

Pertumbuhan Ekonomi Filipina Terendah Sejak 2009 Efek Perang Iran

Jumat, 7 Agustus 2026 12:30 WIB

Neil Jerome Morales dan Ditas B Lopez

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/117613/pertumbuhan-ekonomi-filipina-terendah-sejak-2009-efek-perang-iran/2>

Bloomberg, Pertumbuhan ekonomi Filipina melambat drastis pada kuartal II 2026, meleset dari perkiraan pemulihan seiring konflik Timur Tengah yang berkepanjangan memicu lonjakan inflasi serta menekan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Produk domestik bruto (PDB) Filipina hanya tumbuh 2,3% pada periode April-Juni dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menurut badan statistik negara tersebut pada Jumat (7/8). Angka itu jauh di bawah perkiraan median 2,9% dalam survei Bloomberg News dan pertumbuhan 2,8% pada kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lambat sejak kuartal IV 2009, di luar periode pandemi.

Filipina, yang hampir seluruh kebutuhan minyaknya diimpor dari Timur Tengah, menjadi salah satu negara yang paling terdampak gangguan pasokan akibat perang Iran. Kenaikan biaya energi dan pelemahan mata uang peso mendorong harga pangan dan bahan bakar, sekaligus menggerus pendapatan rumah tangga. Perusahaan juga mengurangi belanja modal karena khawatir terhadap ketidakpastian.

Di saat yang sama, belanja pemerintah cenderung lesu akibat skandal korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur pengendalian banjir senilai miliaran peso. Situasi politik juga didominasi proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang berlangsung panjang. Pada Juni, pemerintah memangkas target pertumbuhan PDB 2026 menjadi 3,5%-4,5% dari sebelumnya 5%-6%.

Kondisi tersebut mendorong Presiden Ferdinand Marcos Jr. berjanji menyalurkan bantuan tunai senilai miliaran peso dan subsidi bahan bakar bagi kelompok rentan, serta memberikan keringanan pajak bagi pekerja dan usaha kecil. Bank Sentral Filipina (Bangko Sentral ng Pilipinas/BSP) juga telah menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 50 basis poin tahun ini dan mengisyaratkan kesiapan untuk kembali menaikannya demi mengarahkan inflasi kembali ke target.

Musalem The Fed Serukan Pengendalian Inflasi yang Signifikan

Jumat, 7 Agustus 2026 08:10 WIB

Jonnelle Marte dan Barbara Nascimento

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/117576/musalem-the-fed-serukan-pengendalian-inflasi-yang-signifikan/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank bagian St. Louis, Alberto Musalem, mengatakan bahwa dengan tingkat inflasi yang berada di atas target 2% bank sentral, para pembuat kebijakan tidak bisa menoleransi inflasi yang lebih tinggi sembari menunggu kemungkinan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat.

"Dalam situasi ini, sangat penting bagi kebijakan moneter untuk memberikan pengendalian yang signifikan terhadap inflasi inti, alih-alih menoleransi inflasi yang agak lebih tinggi saat ini demi

mengejar pertumbuhan produktivitas di masa depan," ujar Musalem dalam pidato yang disiapkan untuk sebuah acara di São Paulo.

"Kontribusi paling berharga dari bank sentral terhadap pertumbuhan jangka panjang adalah menyediakan lingkungan harga yang stabil, yang memungkinkan perusahaan merencanakan investasi dan inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Para pejabat The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dalam pertemuan tanggal 28-29 Juli, namun tiga pembuat kebijakan menyatakan keberatan atas keputusan tersebut dan lebih memilih untuk menaikkan suku bunga.

Selain itu, ada pula pihak lain yang melihat adanya risiko yang meningkat bahwa The Fed perlu segera menaikkan suku bunga guna mencegah inflasi yang tinggi menjadi permanen.

Musalem, yang tidak memiliki hak suara dalam keputusan kebijakan tahun ini, pekan lalu menyatakan bahwa ia lebih memilih kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin pada pertemuan kebijakan The Fed yang terakhir. Ia juga menyebutkan bahwa aksi jual obligasi Treasury setelah pertemuan tersebut menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas The Fed.

Peningkatan Produktivitas

Beberapa ekonom, serta Gubernur The Fed Kevin Warsh, telah mengemukakan kemungkinan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan produktivitas dan meredakan tekanan inflasi dalam jangka panjang. Warsh mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan bulan Juli bahwa waktu terjadinya dampak tersebut masih belum pasti.

Pada hari Kamis, Musalem mengatakan bahwa kebijakan moneter restriktif—yang membatasi aktivitas ekonomi—juga dapat memperlambat inovasi dan menghambat pertumbuhan produktivitas. Namun, ia menegaskan bahwa para pejabat tidak boleh menganggap remeh kepercayaan publik terhadap kemampuan The Fed dalam mengendalikan inflasi.

"Bank sentral yang dianggap menoleransi inflasi di atas target demi janji lonjakan produktivitas di masa depan dapat membahayakan jangkarnya kepercayaan tersebut," ujarnya. "Kredibilitas, jika sudah hilang, membutuhkan biaya besar untuk dibangun kembali." Para pembuat kebijakan akan mendapatkan informasi terkini mengenai pasar tenaga kerja pada hari Jumat dan menerima data inflasi terbaru pekan depan.

Guncangan Pasokan

Dalam sesi tanya jawab setelah pidatonya, Musalem menyatakan bahwa ia melihat adanya guncangan pasokan serta permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai faktor pemicu inflasi. Ia memaparkan dua skenario inflasi yang mungkin terjadi: pertama, inflasi mulai mereda jika dampak tarif memudar dan harga minyak turun. Kedua, tekanan harga yang lebih persisten terjadi sehingga inflasi menetap di kisaran 2,5% hingga 3% atau lebih tinggi.

"Menurut pandangan saya, skenario kedua ini memerlukan tingkat suku bunga yang sedikit lebih tinggi untuk mengatasinya," ujarnya.

Musalem mengatakan ia akan memantau apakah angka inflasi bulanan berada sedikit di bawah 0,2% sebagai bukti bahwa inflasi mungkin bergerak kembali menuju target 2% yang ditetapkan The Fed. Ia menyebutkan bahwa ekspektasi inflasi masih tertahan pada tingkat yang sejalan dengan tujuan tersebut, namun para pejabat tetap waspada terhadap risiko ekspektasi itu bisa terlepas dari jangkarnya stabilitasnya.

Gubernur The Fed wilayah St. Louis itu juga mengatakan sedang mengkaji apakah The Fed dapat mengabaikan serangkaian guncangan pasokan, serta memperingatkan bahwa ekonomi AS bisa kembali mengalami guncangan pasokan akibat dampak El Niño pada musim gugur ini.

Klaim Pengangguran AS Tetap Rendah, Tanda Ketahanan Pasar Kerja

Jumat, 7 Agustus 2026 06:20 WIB

Maya Prakash

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117572/klaim-pengangguran-as-tetap-rendah-tanda-ketahanan-pasar-kerja/2>

Bloomberg, Pengajuan tunjangan pengangguran di Amerika Serikat (AS) tercatat relatif tidak berubah. Angkanya tetap di bawah 200.000 untuk pekan ketiga berturut-turut, menegaskan ketahanan pasar tenaga kerja.

Klaim awal tunjangan pengangguran naik tipis menjadi 199.000 pada pekan yang berakhir 1 Agustus, menurut data Departemen Tenaga Kerja AS yang dirilis Kamis (6/8). Rentetan klaim di bawah 200.000 tersebut merupakan yang terpanjang sejak 1969, ketika tingkat klaim serendah itu masih lebih umum terjadi dan jumlah tenaga kerja AS hanya sekitar separuh dari populasi saat ini.

Sementara itu, rata-rata pergerakan empat pekan, indikator yang membantu meredam volatilitas data, turun ke level terendah sejak September 2022.

Klaim berkelanjutan, yang menjadi gambaran jumlah orang yang menerima tunjangan, meningkat menjadi 1,8 juta pada pekan sebelumnya. Angka tersebut sesuai dengan perkiraan dan masih jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Para ekonom memperkirakan laporan ketenagakerjaan AS untuk Juli yang dijadwalkan dirilis Jumat akan menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang sehat, seiring belanja konsumen yang terus menopang aktivitas ekonomi.

AS Kehilangan 23.000 Pekerjaan pada Juli, Tekanan terhadap The Fed Menguat

Jumat, 7 Agustus 2026 19:54 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/as-kehilangan-23000-pekerjaan-pada-juli-tekanan-terhadap-the-fed-menguat>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Perekonomian Amerika Serikat (AS) secara tak terduga kehilangan lapangan pekerjaan pada Juli 2026. Selain itu, data ketenagakerjaan pada bulan sebelumnya direvisi turun tajam.

Kondisi tersebut berpotensi memunculkan kembali pertanyaan mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dalam beberapa bulan mendatang. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang dirilis Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat (7/8), jumlah tenaga kerja nonpertanian atau nonfarm payrolls turun sebanyak 23.000 pekerjaan pada Juli.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan 20.000 pekerjaan pada Juni setelah direvisi turun. Sebelumnya, pertumbuhan lapangan kerja AS pada Juni dilaporkan mencapai 57.000 pekerjaan.

Hasil tersebut juga jauh di bawah ekspektasi pasar. Berdasarkan jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom, nonfarm payrolls diperkirakan meningkat 80.000 pekerjaan pada Juli. Perkiraan para ekonom berada dalam rentang kenaikan 10.000 hingga 140.000 pekerjaan.

Meski demikian, para ekonom mencatat bahwa data ketenagakerjaan AS cenderung lebih lemah pada Juli. Pasar tenaga kerja AS juga dinilai berada dalam kondisi yang disebut sebagai "perekrutan lambat, pemutusan hubungan kerja juga lambat" atau "slow hire, slow fire".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan AS masih berhati-hati dalam merekrut pekerja baru, tetapi pada saat yang sama belum melakukan pemutusan hubungan kerja secara agresif.

Tingkat Pengangguran AS Turun

Di tengah pelemahan penciptaan lapangan kerja, tingkat pengangguran AS justru turun menjadi 4,1% pada Juli dari 4,2% pada Juni.

Namun, penurunan tersebut terjadi bersamaan dengan kembali melemahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam membaca kesehatan pasar tenaga kerja AS secara keseluruhan.

Sebelum data ketenagakerjaan terbaru dirilis, pasar keuangan telah memperkirakan adanya kenaikan suku bunga The Fed pada September mendatang.

Pekan lalu, bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuan overnight pada kisaran 3,50%-3,75%. Keputusan tersebut juga disertai perbedaan pandangan di antara anggota komite kebijakan moneter The Fed.

Sebanyak tiga anggota komite memilih untuk tidak mendukung keputusan mempertahankan suku bunga. Mereka lebih memilih kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin.

Data Inflasi Jadi Penentu Kebijakan The Fed

Data ketenagakerjaan terbaru berpotensi menambah kompleksitas bagi The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneter berikutnya.

Pelemahan pasar tenaga kerja dapat memberikan alasan bagi bank sentral AS untuk lebih berhati-hati dalam menaikkan suku bunga. Namun, keputusan tersebut tetap akan sangat bergantung pada perkembangan inflasi dan kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Data inflasi AS yang akan dirilis pekan depan diperkirakan dapat memperjelas perdebatan mengenai prospek kebijakan moneter dalam jangka pendek.

Sementara itu, perekonomian AS sejauh ini masih menunjukkan ketahanan. Konflik di Timur Tengah yang telah memasuki bulan keenam dinilai belum mengganggu perekonomian AS secara signifikan.

Permintaan domestik bahkan tumbuh pada laju tercepat dalam lebih dari tiga tahun pada kuartal II 2026.

Dengan demikian, perhatian pasar selanjutnya akan tertuju pada kombinasi antara perkembangan pasar tenaga kerja, inflasi, serta kekuatan permintaan domestik untuk melihat apakah The Fed masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga pada September.

Surplus Dagang China dengan Uni Eropa dan AS Tetap Besar pada Juli, Ini Rinciannya

Jumat, 7 Agustus 2026 10:56 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/surplus-dagang-china-dengan-uni-eropa-dan-as-tetap-besar-pada-juli-ini-rinciannya>

KONTAN.CO.ID - Kinerja perdagangan China dengan sejumlah mitra dagang utama tetap tumbuh pada Juli 2026, seiring ekspor negara tersebut yang melampaui ekspektasi pasar berkat kuatnya permintaan global terhadap produk-produk teknologi tinggi.

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), data Bea Cukai China menunjukkan ekspor China pada Juli 2026 meningkat 23,9% secara tahunan (year on year/YoY) dalam denominasi dolar AS.

Meski melambat dari pertumbuhan 27% pada Juni, realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan proyeksi pasar sebesar 22,2%.

Di sisi lain, impor naik 27,5% YoY, lebih rendah dibandingkan kenaikan 36% pada Juni dan sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 27,9%.

Berikut rincian perdagangan China dengan sejumlah mitra dagang utama pada Juli 2026:

Mitra Dagang	Ekspor (US\$ miliar)	Impor (US\$ miliar)	Neraca Dagang (US\$ miliar)	Pertumbuhan Ekspor (YoY)	Pertumbuhan Impor (YoY)
ASEAN	75,6	42,7	32,9	38,4%	36,0%
Uni Eropa	58,0	24,2	33,8	16,0%	-1,4%
Amerika Serikat	41,9	13,9	28,0	17,0%	15,3%
Korea Selatan	18,1	31,0	-12,9	46,6%	97,8%
Jepang	14,2	19,3	-5,1	14,0%	29,3%
Taiwan	10,3	26,5	-16,2	25,1%	36,6%
Australia	7,3	15,4	-8,1	13,9%	36,8%

ASEAN masih menjadi mitra dagang terbesar China dari sisi ekspor dengan nilai mencapai US\$ 75,6 miliar, disusul Uni Eropa sebesar US\$ 58 miliar dan Amerika Serikat sebesar US\$ 41,9 miliar.

China juga mencatat surplus perdagangan terbesar dengan Uni Eropa sebesar US\$ 33,8 miliar, diikuti ASEAN sebesar US\$ 32,9 miliar, dan Amerika Serikat sebesar US\$ 28 miliar.

Sebaliknya, China masih mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara pemasok utama, seperti Taiwan sebesar US\$ 16,2 miliar, Korea Selatan sebesar US\$ 12,9 miliar, Australia sebesar US\$ 8,1 miliar, serta Jepang sebesar US\$ 5,1 miliar.

Data tersebut mencerminkan kuatnya ekspor produk manufaktur China, sementara impor dari negara-negara tersebut masih didominasi komponen teknologi, semikonduktor, serta komoditas bahan baku.

Ekspor China Tumbuh 23,9% pada Juli 2026, Kinerja Produk AI Jadi Penopang

Jumat, 7 Agustus 2026 10:45 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekspor-china-tumbuh-239-pada-juli-2026-kinerja-produk-ai-jadi-penopang>

KONTAN.CO.ID - Kinerja ekspor China pada Juli 2026 melampaui ekspektasi pasar dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Permintaan global yang kuat terhadap produk-produk berteknologi tinggi, terutama yang terkait dengan pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (AI), menjadi motor penggeraknya.

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), data bea cukai China menunjukkan nilai ekspor negeri itu meningkat 23,9% secara tahunan (year on year/YoY) dalam denominasi dolar AS pada Juli.

Meski lebih rendah dibandingkan lonjakan 27% pada Juni, realisasi tersebut masih lebih baik dari perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memproyeksikan pertumbuhan ekspor sebesar 22,2%.

Sementara itu, impor China naik 27,5% YoY pada Juli. Angka tersebut melambat dibandingkan kenaikan 36% pada Juni dan sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 27,9%.

Surplus neraca perdagangan China menyusut menjadi US\$ 112,5 miliar pada Juli, dari US\$ 125,62 miliar pada bulan sebelumnya.

Ekspor produk AI melonjak

Permintaan terhadap produk-produk teknologi tinggi masih menjadi penopang utama ekspor China.

Nilai ekspor semikonduktor hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan, ekspor produk berteknologi tinggi melonjak 40,7% YoY.

Sebaliknya, ekspor keramik turun 28,3%, mencerminkan ketimpangan pemulihan sektor industri China.

Industri manufaktur berteknologi tinggi menikmati lonjakan permintaan akibat boom AI, sementara industri tradisional masih menghadapi lemahnya permintaan.

Pada akhir bulan lalu, para pemimpin China menyerukan percepatan transformasi dari mesin pertumbuhan lama menuju sektor-sektor baru yang berbasis teknologi tinggi.

Ekonomi China tumbuh 4,7% pada semester I-2026, sehingga masih berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan pemerintah sebesar 4,5%–5% tahun ini.

Namun, laju pertumbuhan melambat menjadi 4,3% pada kuartal II-2026 akibat lemahnya konsumsi domestik dan investasi.

Ketergantungan pada ekspor

China masih mengandalkan permintaan luar negeri untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah konsumsi domestik yang lesu dan perlambatan investasi.

Namun, ketergantungan tersebut juga meningkatkan risiko, terutama di tengah potensi meningkatnya kebijakan proteksionisme dari negara-negara mitra dagang di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik Iran.

Uni Eropa diketahui tengah mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mengurangi defisit perdagangannya dengan China.

Sementara itu, hubungan dagang Beijing dan Washington juga kembali memanas menjelang rencana pertemuan para pemimpin kedua negara pada September mendatang.

Di sisi lain, pemerintah China berulang kali menyatakan komitmennya untuk meningkatkan impor dan mendorong perdagangan yang lebih seimbang.

Meski demikian, surplus perdagangan negara itu diperkirakan kembali menembus US\$ 1 triliun untuk tahun kedua berturut-turut.

Data bea cukai juga menunjukkan impor gas alam China turun 3% pada tujuh bulan pertama 2026, sedangkan impor minyak mentah merosot 13,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Analisis Macquarie menilai dukungan kebijakan Beijing terhadap konsumsi domestik dan sektor properti kemungkinan masih terbatas selama ekspor dan sektor manufaktur mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Filipina Melambat, PDB Kuartal II Hanya Naik 2,3%

Jumat, 7 Agustus 2026 10:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-filipina-melambat-pdb-kuartal-ii-hanya-naik-23>

KONTAN.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi Filipina melambat pada kuartal II-2026 dan berada di bawah ekspektasi pasar, seiring perlambatan belanja pemerintah dan dampak krisis di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), badan statistik Filipina melaporkan produk domestik bruto (PDB) negara itu tumbuh 2,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal II-2026.

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang memperkirakan pertumbuhan 2,8% YoY, atau setara dengan laju pertumbuhan pada kuartal I-2026.

Secara kuartalan yang telah disesuaikan secara musiman (quarter on quarter/qoq), ekonomi Filipina tumbuh 0,6% pada periode April–Juni 2026, melambat dari pertumbuhan 0,9% pada kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, inflasi tahunan Filipina melambat untuk bulan ketiga berturut-turut pada Juli menjadi 6,2%, dari 6,4% pada Juni. Perlambatan inflasi didorong oleh kenaikan biaya transportasi yang lebih moderat.

Pada Juni lalu, pemerintah Filipina memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 3,5%–4,5%.

Revisi tersebut dilakukan akibat dampak krisis di Timur Tengah serta skandal korupsi proyek infrastruktur yang menghambat belanja pemerintah.

Untuk jangka menengah, komite perencanaan anggaran Filipina menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5%–6% per tahun pada periode 2027 hingga 2030.

Won Korea Selatan Pimpin Penguatan Mata Uang Asia, Rupiah Melemah ke Rp 17.930

Jumat, 7 Agustus 2026 10:02 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/won-korea-selatan-pimpin-penguatan-mata-uang-asia-rupiah-melemah-ke-rp-17930>

KONTAN.CO.ID - Mayoritas mata uang Asia bergerak terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Jumat (7/8/2026).

Di antara mata uang kawasan, won Korea Selatan mencatat penguatan harian terbesar, sementara peso Filipina menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam.

Mengutip Reuters, hingga pukul 02.08 GMT, won Korea Selatan menguat 0,37% ke level 1.418,90 per dolar AS, menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan.

Di posisi berikutnya, dolar Taiwan menguat 0,10%, diikuti dolar Singapura yang naik 0,05%, yuan China menguat 0,06%, dan yen Jepang naik tipis 0,04% terhadap dolar AS.

Sebaliknya, peso Filipina melemah 0,35%, menjadi mata uang Asia dengan penurunan terbesar pada perdagangan hari ini.

Rupiah juga terdepresiasi 0,11% ke level Rp 17.930 per dolar AS, sementara ringgit Malaysia melemah 0,07%.

Adapun baht Thailand dan rupee India relatif tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Secara kumulatif sejak awal 2026, yuan China masih menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan setelah menguat 3,56% terhadap dolar AS.

Won Korea Selatan juga masih membukukan apresiasi 1,45%, sedangkan dolar Singapura menguat 0,23%.

Di sisi lain, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia sepanjang tahun ini, dengan depresiasi sekitar 7,03% terhadap dolar AS.

Mata uang lain yang juga masih mencatat pelemahan sejak awal tahun antara lain rupee India (-5,62%), baht Thailand (-4,98%), peso Filipina (-3,58%), dolar Taiwan (-2,46%), yen Jepang (-1,07%), dan ringgit Malaysia (-0,83%).

Jepang Catat Rekor Intervensi Valas, Jual Dolar US\$ 40 Miliar demi Topang Yen

Jumat, 7 Agustus 2026 08:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-catat-rekor-intervensi-valas-jual-dolar-us-40-miliar-demi-topang-yen>

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang mencatat intervensi pembelian yen terbesar dalam satu hari sepanjang sejarah pada April 2026.

Langkah ini dilakukan dengan menjual sekitar US\$ 40 miliar di pasar valuta asing guna menahan pelemahan yen terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), data triwulanan Kementerian Keuangan Jepang (Ministry of Finance/MOF) menunjukkan, otoritas Jepang melakukan intervensi selama tiga hari, yakni pada 30 April hingga 6 Mei 2026, ketika likuiditas pasar menipis akibat libur Golden Week.

Intervensi terbesar dilakukan pada 30 April, dengan nilai mencapai 6,28 triliun yen atau sekitar US\$ 39,64 miliar.

Nilai tersebut melampaui rekor sebelumnya sebesar 5,92 triliun yen yang dilakukan pada 29 April 2024, berdasarkan data MOF sejak 1991.

Data terbaru itu juga merinci intervensi senilai total 11,7 triliun yen yang sebelumnya telah diumumkan untuk periode 28 April hingga 27 Mei 2026.

Langkah tersebut sempat mendorong penguatan yen dari posisi hampir menyentuh level terlemah dalam dua tahun, yakni 160,725 per dolar AS, menjadi sekitar 155 per dolar AS pada 6 Mei.

Namun, intervensi tersebut belum mampu membalikkan tren pelemahan yen secara keseluruhan.

Setelah itu, mata uang Jepang kembali tertekan hingga menyentuh level terendah dalam sekitar 40 tahun, yakni melemah di bawah 163 yen per dolar AS pada Juli 2026.

Pelemahan tersebut mendorong pemerintah Jepang kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing pada pekan lalu.

Kali ini, intervensi dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menstabilkan pergerakan yen.

Suku Bunga The Fed Seharusnya Sudah Naik, Pejabat Bank Sentral AS Ini Beri Alasannya

Jumat, 7 Agustus 2026 07:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/pejabat-the-fed-ini-dorong-kenaikan-suku-bunga-khawatir-inflasi-sulit-turun-ke-2>

KONTAN.CO.ID - Presiden Federal Reserve Bank St. Louis Alberto Musalem menyatakan, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) seharusnya menaikkan suku bunga acuan pada rapat kebijakan pekan lalu.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah inflasi bertahan di atas target 2%.

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), Musalem mengatakan dirinya mendukung kenaikan suku bunga federal funds rate sebesar 25 basis poin dalam pertemuan The Fed pada 29 Juli lalu.

"Saya menyampaikan preferensi pada pertemuan tersebut untuk menaikkan suku bunga federal funds rate sebesar 25 basis poin," ujar Musalem dalam pidatonya di Brasil.

Menurut Musalem, alasan utama di balik usulan kenaikan suku bunga adalah risiko inflasi yang masih berpotensi bertahan di atas target 2% dalam satu tahun ke depan apabila kebijakan moneter tetap berada pada level saat ini.

Ia menilai, kenaikan suku bunga secara bertahap sejak dini akan lebih baik dibandingkan harus melakukan pengetatan yang lebih agresif di kemudian hari.

"Kenaikan suku bunga secara bertahap sejak sekarang lebih baik, tidak terlalu mengganggu, dan lebih rendah biayanya dibandingkan perubahan suku bunga yang lebih tajam di kemudian hari," kata Musalem.

Pada pertemuan 29 Juli lalu, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50%–3,75%, meskipun inflasi masih berada jauh di atas target 2%.

Dalam rapat tersebut, tiga pejabat The Fed memberikan suara mendukung kenaikan suku bunga karena menilai langkah tersebut diperlukan untuk menekan tekanan harga.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pejabat The Fed juga menyatakan bank sentral seharusnya sudah menaikkan suku bunga atau setidaknya siap melakukannya apabila inflasi tidak kunjung mereda.

Di sisi lain, Ketua The Fed Kevin Warsh belum memberikan petunjuk yang jelas mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya.

Ia justru menyatakan bahwa pelaku pasar perlu menilai sendiri prospek kebijakan moneter ke depan.

Musalem mengatakan dirinya memang memperhatikan pergerakan pasar keuangan, tetapi tidak menjadikan ekspektasi pasar sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan.

"Jika Anda yakin sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubah kebijakan ke arah tertentu, maka kebijakan itu seharusnya diubah, terlepas dari apa yang sudah diperhitungkan oleh pasar," ujarnya.

Ia menambahkan, ada kalanya bank sentral perlu memberikan kejutan kepada pasar apabila kondisi ekonomi memang mengharuskannya.

Musalem juga menilai kondisi keuangan saat ini masih sangat mendukung aktivitas ekonomi, sementara harga aset berada pada level yang relatif tinggi.

Meski ekspektasi masyarakat terhadap inflasi masih mengarah pada target 2%, Musalem memperingatkan bahwa ekspektasi tersebut dapat berubah apabila The Fed gagal mengendalikan tekanan harga.

Menurutnya, bank sentral juga tidak seharusnya mempertahankan kebijakan moneter yang terlalu longgar hanya untuk mendukung produktivitas dengan harapan inflasi akan turun di masa depan.

"Sangat penting bagi kebijakan moneter untuk memberikan tekanan yang berarti terhadap inflasi yang mendasari, bukan mentoleransi inflasi yang lebih tinggi saat ini demi mengejar pertumbuhan produktivitas di masa depan," tegasnya.

Ia memperingatkan bahwa pendekatan tersebut dapat menggerus kredibilitas The Fed. "Bank sentral yang dipandang mentoleransi inflasi di atas target dengan janji adanya lonjakan produktivitas di masa depan berisiko kehilangan jangkauan ekspektasi inflasi," ujarnya.

Di sisi lain, Musalem menilai perekonomian Amerika Serikat masih menunjukkan ketahanan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, pasar tenaga kerja telah stabil dengan pertumbuhan lapangan kerja yang solid serta tingkat pengangguran yang mendekati level jangka panjangnya.

Belanja Rumah Tangga Jepang Turun Tak Terduga pada Juni, Jadi Sorotan BOJ

Jumat, 7 Agustus 2026 07:23 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/belanja-rumah-tangga-jepang-turun-tak-terduga-pada-juni-jadi-sorotan-boj>

KONTAN.CO.ID - Belanja rumah tangga di Jepang secara tak terduga kembali mengalami penurunan pada Juni 2026.

Kondisi ini menandai penurunan selama tujuh bulan berturut-turut dan menjadi salah satu indikator yang akan dicermati Bank of Japan (BOJ) dalam menentukan arah kebijakan suku bunga.

Mengutip Reuters, Jumat (7/8/2026), data Kementerian Dalam Negeri Jepang menunjukkan belanja konsumen turun 3,3% secara tahunan (year on year/YoY) pada Juni. Angka tersebut berbanding terbalik dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 1%.

Secara bulanan yang telah disesuaikan dengan faktor musiman (month on month/mtm), belanja rumah tangga juga merosot 6,4%, lebih dalam dibandingkan perkiraan penurunan 3,1%.

Melemahnya konsumsi rumah tangga menjadi perhatian karena mencerminkan masih rapuhnya permintaan domestik Jepang, meskipun sejumlah indikator ekonomi lainnya mulai menunjukkan perbaikan.

Data belanja rumah tangga tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi BOJ dalam menentukan apakah bank sentral akan kembali menaikkan suku bunga paling cepat pada pertemuan kebijakan bulan September.

Sebelumnya, data Kementerian Tenaga Kerja Jepang yang dirilis pekan ini menunjukkan upah riil tumbuh 1,6% pada Juni dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut, mencerminkan adanya peningkatan daya beli pekerja meskipun konsumsi masyarakat belum menunjukkan pemulihan yang konsisten.

BI: Uang Primer Tumbuh 17,1% Menjadi Rp2.254,5 T per Juli 2026

Jumat, 7 Agustus 2026 16:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117656/bi-uang-primer-tumbuh-17-1-menjadi-rp2-254-5-t-per-juli-2026/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi uang primer (M0) adjusted tumbuh 17,1% secara tahunan (year on year/yoy) pada Juli 2026. Dengan demikian, uang primer kini tercatat sebesar Rp2.254,5 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan pertumbuhan 17,1% yoy tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 13,8% yoy.

"Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 17,1% yoy dan uang kartal yang diedarkan sebesar 15,1% yoy," kata Denny dalam siaran pers, Jumat (7/8/2026).

Adapun tren sepanjang tahun ini, jumlah uang primer yang disesuaikan ini cenderung tergerus dari Rp2.367,8 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp2.254,5 triliun pada Juli 2026.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, pertumbuhan M0 Adjusted telah memperhitungkan dampak pemberian insentif likuiditas (pengendalian moneter adjusted).

Sebagai informasi, M0 Adjusted merupakan indikator uang primer yang telah disesuaikan untuk mengisolasi pengaruh penurunan giro bank di BI akibat kebijakan insentif likuiditas. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi likuiditas riil di perekonomian.

Sejak Januari 2025, Bank Indonesia secara resmi menyertakan indikator M0 Adjusted dalam laporan likuiditas moneter. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam memantau perkembangan likuiditas, terutama setelah penerapan kebijakan insentif likuiditas bagi sektor perbankan.

Cadangan Devisa Turun Tipis, Terpakai Bayar Utang

Jumat, 7 Agustus 2026 11:09 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117617/cadangan-devisa-turun-tipis-terpakai-bayar-utang/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Posisi cadangan devisa per akhir Juli, menyusut tipis dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Selasa (7/7/2026), Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia untuk posisi akhir Juli berada di US\$145,3 miliar, berkurang US\$0,3 miliar dari bulan sebelumnya yang berada di US\$145,6 miliar.

"Perkembangan posisi cadangan devisa Juli 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat," sebut laporan BI.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli, lanjut laporan BI, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Capaian tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Meski mencatat penurunan secara bulanan, level cadangan devisa Indonesia masih tergolong kuat dan tetap mampu menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas eksternal.

Posisi tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan impor sekaligus kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah dalam jangka pendek, sehingga memberikan ruang bagi BI untuk meredam gejolak di pasar keuangan ketika tekanan terhadap rupiah meningkat.

Cadangan devisa juga menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor dalam menilai ketahanan ekonomi suatu negara.

Di tengah meningkatnya volatilitas pasar global akibat ketidakpastian arah suku bunga dunia dan risiko geopolitik, ketersediaan cadangan devisa yang memadai memperkuat kepercayaan pasar terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar serta memenuhi kewajiban eksternalnya.

BI dalam rilisnya meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang laporan BI.

Rupiah Ditutup Menguat, Minat Tinggi pada SRBI Topang Sentimen

Jumat, 7 Agustus 2026 15:32 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117655/rupiah-ditutup-menguat-minat-tinggi-pada-srbi-topang-sentimen/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menguat 0,16% dan menutup perdagangan pekan ini di posisi Rp17.890/US\$, bersama sebagian mata uang Asia di zona hijau.

Rupiah berbalik arah setelah dibuka melemah di posisi Rp17.937/US\$, tertopang oleh pergerakan di pasar Surat Utang Negara (SUN) yang mengalami penguatan pada sebagian tenor.

Penurunan yield tenor 10 tahun 0,6 basis poin (bps) ke level 7,27%, tenor 1 tahun yang ikut turun 5,2 bps ke 7,02% memperkuat posisi rupiah hari ini.

Di samping, Bank Indonesia (BI) hari ini melakukan lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan meraup Rp5 triliun. Dalam lelang hari ini, minat investor melonjak signifikan dari Rp17,51 triliun menjadi Rp45,12 triliun.

Dengan minat yang tinggi, investor juga bersedia menerima yield yang lebih rendah dibandingkan lelang sebelumnya.

Kondisi ini mencerminkan persepsi risiko terhadap aset rupiah mulai membaik dan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik masih terjaga.

Yield SRBI tenor 6 bulan tercatat turun 1,4 bps ke 7,18%, tenor 9 bulan turun 1,6 bps ke 7,4%, dan tenor 12 bulan turun 4,45 bps ke 7,59%.

Sebagian mata uang Asia menguat, pada hari Jumat (7/8/2026). (Bloomberg)

Dari kawasan, rupiah menguat di posisi kedua setelah won Korea Selatan, dan disusul dolar Singapura, yuan China, dan ringgit Malaysia juga yen Jepang.

Meski harga minyak mentah masih terbilang tinggi di US\$83/barel, namun kabar bahwa kesepakatan perdamaian Amerika Serikat (AS) dan Iran direspons positif oleh pelaku pasar.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengatakan pada Rabu malam bahwa kesepakatan terkait Selat Hormuz sudah dekat dan pemerintahannya terus berkomunikasi dengan Iran.

"Kami sedang berbicara. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi," ujar Trump dalam sebuah kampanye di Las Vegas, seperti dikutip Bloomberg News.

Kesepakatan antara Iran dan Oman untuk membuka kembali sebagian jalur pelayaran di Selat Hormuz dikabarkan telah memasuki tahap akhir, dengan kesepakatan secara prinsip telah tercapai untuk hampir seluruh isu yang dibahas.

Sejalan dengan kemajuan ini, indeks dolar AS juga relatif terkendali di level 99,96.

Ekonom Soroti Ekonomi Q2-2026 Bergantung pada Stimulus Pemerintah

Jumat, 7 Agustus 2026 11:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117605/ekonom-soroti-ekonomi-q2-2026-bergantung-pada-stimulus-pemerintah/>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 masih sangat bergantung pada stimulus fiskal pemerintah. Tingginya belanja pemerintah menjadi penopang utama konsumsi masyarakat di tengah daya beli yang secara alami belum benar-benar pulih.

"Pertumbuhan konsumsi, baik pemerintah ataupun rumah tangga, memang sepertinya sangat bergantung dari stimulus fiskal pemerintah. Kita bisa katakan doping-nya besar sekali," kata Direktur Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto dalam diskusi, Kamis (6/8/2026).

Eko menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 lebih mengkhawatirkan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal II-2026. Sementara konsumsi pemerintah melonjak 15,97% yoy, berbalik tajam dari kontraksi 0,32% pada periode yang sama tahun lalu.

Meski konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,06%, Eko menilai terjadi perlambatan jika dibandingkan kuartal I-2026 yang mencapai 5,52%. Kondisi tersebut menunjukkan daya beli masyarakat secara alami masih belum cukup kuat dan masih sangat ditopang oleh belanja negara, maupun didorong efek musiman hari besar keagamaan yakni Ramadan maupun Natal dan Tahun Baru.

"Perlambatan ini menunjukkan daya beli natural atau daya beli murni masyarakat memang belum solid kalau tidak ada belanja APBN," ujarnya.

Tanpa MBG, Konsumsi Rumah Tangga di Bawah 5%

Eko menambahkan kenaikan belanja pemerintah melalui berbagai program seperti bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembayaran gaji ke-13 menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Tanpa dorongan tersebut, konsumsi rumah tangga berpotensi tumbuh di bawah level 5%.

Dalam kaitan itu, Eko mengingatkan ketergantungan terhadap stimulus fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian. Apabila belanja pemerintah dikurangi akibat realokasi anggaran atau kebijakan efisiensi, konsumsi rumah tangga dinilai akan langsung merasakan dampaknya.

Bagaimanapun, Eko menegaskan kondisi tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat belum pulih sepenuhnya yang seharusnya ditopang oleh peningkatan pendapatan dan daya beli yang berkelanjutan, melainkan masih bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stimulus fiskal.

Ekonom Soroti Pelemahan Ekspor RI Saat Ekonomi Tumbuh 5,29%

Jumat, 7 Agustus 2026 10:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117609/ekonom-soroti-pelemahan-ekspor-ri-saat-ekonomi-tumbuh-5-29/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 sebesar 5,29% mulai kehilangan salah satu penopang utamanya. Hal ini terlihat dari kinerja ekspor yang melemah, sementara impor masih mencatat pertumbuhan yang tinggi.

Akibatnya, kontribusi ekspor neto—selisih antara ekspor dan impor—berbalik menjadi negatif sehingga tidak lagi mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mulai kehilangan bantalan dari eksternal," kata Direktur Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara daring, Kamis (6/8/2026).

Dia menjelaskan, kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan ekspor yang melambat tajam. Pada kuartal II-2026, ekspor hanya tumbuh sekitar 4,13%, sedangkan impor masih meningkat 8,82%. Akibatnya, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi negatif sebesar 0,78%.

"Pertumbuhan ekspor anjlok cukup tajam, tetapi impornya masih tumbuh tinggi. Akibatnya net export membesar dan menggerus [sumber ekspor] ke pertumbuhan ekonomi menjadi negatif 0,78%," ujarnya.

Dalam kaitan itu, Eko menilai Indonesia mulai kehilangan daya saing di pasar global, terutama dari sisi kemampuan mendorong ekspor.

Sebagai perbandingan, pada kuartal II-2025 ekspor masih mampu tumbuh dua digit sebesar 10,67%, sementara impor meningkat sekitar 11%. Meski impor saat itu sedikit lebih tinggi, kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi hanya negatif 0,02%, sehingga belum menjadi beban yang signifikan.

"Kalau sektor eksternal ini bisa dijaga, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya bisa lebih tinggi," ucap Eko.

Dalam kesempatan tersebut, Eko mengingatkan agar pemerintah tidak lagi terlena dengan capaian surplus neraca perdagangan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.

Menurut dia, kondisi tersebut mulai berubah dalam beberapa waktu terakhir lantaran surplus neraca perdagangan berbalik defisit pada Mei dan Juni 2026 setelah mengalami surplus 72 bulan beruntun sejak Mei 2020.

"Jadi kita enggak bisa lagi membanggakan-banggakan berapa puluh bulan mengalami surplus neraca perdagangan, dua bulan terakhir sudah defisit ya, mudah-mudahan kedepan kita dapat lagi," jelas Eko.

Eko menegaskan, pelemahan kontribusi sektor eksternal menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu memperkuat daya saing ekspor di tengah meningkatnya tantangan perdagangan global.

Tanpa perbaikan pada sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko semakin bergantung pada konsumsi domestik dan belanja pemerintah sebagai motor utama perekonomian.

Bappenas Proyeksikan Ekonomi Hijau Serap 5 Juta Lapangan Kerja Baru hingga 2029

Jumat, 7 Agustus 2026 10:56 WIB

Reporter: Leni Wandira, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/bappenas-proyeksikan-ekonomi-hijau-serap-5-juta-lapangan-kerja-baru-hingga-2029>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menilai transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memperkirakan transformasi tersebut mampu menciptakan lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau hingga 2029.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan ekonomi hijau telah menjadi arah kebijakan strategis nasional yang harus dijalankan secara beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," ujarnya dalam Bangun Bangsa Conference 2026 di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Menurut Rachmat, selain membuka lebih dari 5 juta lapangan kerja hijau baru pada 2029, transisi tersebut juga diproyeksikan mampu mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

Ia menekankan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan inklusi sosial sebagai pusat pembangunan.

Pembahasan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Bangun Bangsa Conference 2026 bertema Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy. Forum ini mempertemukan pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku pemberdayaan masyarakat untuk membahas strategi investasi sosial yang mampu menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur.

President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan investasi sosial perlu bergeser dari pendekatan yang hanya berfokus pada pembangunan fisik menjadi penguatan kapasitas masyarakat.

Ia menegaskan bahwa bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif.

"Kami percaya tantangan sosial ekonomi saat ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya berfokus pada pembangunan fisik. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas—membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri," katanya.

William menjelaskan program Bangun Bangsa berawal dari proyek percontohan di Kota Malang pada 2024 dan kini telah berkembang ke empat kota dan kabupaten dengan lebih dari 200 penerima manfaat.

Menurutnya, dampak investasi sosial akan semakin besar apabila dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Dalam forum tersebut, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSO) Sihol P. Aritonang menilai investasi sosial perlu menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan agar pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan.

"Bisnis hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan ketika masyarakat di sekitarnya juga tumbuh, tangguh, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Karena itu, investasi pada masyarakat harus menjadi bagian dari strategi bisnis dan menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memerlukan pendampingan berkelanjutan, dukungan pembiayaan, serta perluasan akses pasar.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga keuangan menjadi faktor penting agar lebih banyak UMKM mampu naik kelas dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah pembicara dalam konferensi juga menyoroti perlunya transformasi investasi sosial dari aktivitas filantropi menjadi strategi pembangunan yang berbasis data, memiliki indikator dampak yang terukur, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan model pemberdayaan yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Melalui penyelenggaraan Bangun Bangsa Conference 2026, penyelenggara berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat standar baru investasi sosial di Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Cadangan Devisa Juli 2026 Turun, Waspada Tekanan Impor terhadap Rupiah

Jumat, 7 Agustus 2026 21:17 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-juli-2026-turun-waspada-tekanan-impor-terhadap-rupiah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia kembali menyusut pada akhir Juli 2026. Meski turun tipis menjadi US\$ 145,3 miliar dari US\$ 145,6 miliar pada Juni, level tersebut masih dinilai kuat untuk menopang stabilitas eksternal.

Namun, ekonom mengingatkan tantangan yang lebih besar justru datang dari pelebaran defisit transaksi berjalan akibat pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2026 dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah.

Di sisi lain, cadangan devisa juga digunakan untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, posisi cadangan devisa saat ini masih berada pada level yang sangat memadai.

"Cadangan devisa tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Ramdan, Jumat (7/8/2026).

Cadangan devisa sebesar US\$ 145,3 miliar setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional yang sekitar tiga bulan impor.

BI juga meyakini ketahanan sektor eksternal tetap terjaga berkat cadangan devisa yang memadai, didukung prospek aliran modal asing yang tetap positif seiring daya tarik investasi di Indonesia.

Bank sentral juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penurunan cadangan devisa sebesar US\$ 0,3 miliar pada Juli bukan sinyal melemahnya kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan devisa.

Menurutnya, penurunan tersebut lebih mencerminkan penggunaan cadangan devisa sebagai instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah.

Ia memperkirakan posisi cadangan devisa hingga akhir 2026 berada di kisaran US\$ 143 miliar hingga US\$ 147 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2025 yang mencapai US\$ 156,47 miliar.

Dengan posisi saat ini, ruang pergerakan dinilai relatif terbatas, yakni berpotensi naik sekitar US\$ 1 miliar hingga US\$ 2 miliar atau turun sekitar US\$ 2 miliar tergantung perkembangan kondisi global dan domestik.

Menurut Josua, peluang cadangan devisa meningkat ke kisaran US\$ 147 miliar terbuka apabila ketegangan geopolitik mereda, harga minyak turun, rupiah lebih stabil sehingga kebutuhan intervensi BI berkurang, arus modal asing kembali masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham, serta penerimaan devisa dari ekspor maupun penerbitan surat utang global meningkat.

Sebaliknya, cadangan devisa berpotensi turun mendekati atau bahkan menembus US\$ 143 miliar apabila rupiah kembali tertekan, harga minyak melonjak, terjadi arus keluar modal asing, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah meningkat.

Meski demikian, Josua menilai perhatian utama bukan terletak pada penurunan cadangan devisa, melainkan perubahan struktur perdagangan Indonesia.

Pemprov Jateng dan Otorita IKN Jajaki Potensi Kolaborasi dan Investasi

Jumat, 7 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/pemprov-jateng-dan-otorita-ikn-jajaki-potensi-kolaborasi-dan-investasi/>

KALIMANTAN TIMUR — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan kunjungan kerja ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (6/8/2026). Kunjungan yang disambut hangat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono tersebut, untuk menjajaki berbagai potensi kolaborasi dan investasi.

Dalam kunjungan itu, Ahmad Luthfi didampingi jajaran OPD dan BUMD Provinsi Jawa Tengah, serta Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.

Luthfi menilai, IKN punya potensi besar diajak kolaborasi untuk kemajuan bersama, mengingat wilayah tersebut akan menjadi ibukota negara. Dibeberkan, sejumlah potensi yang dikerjasamakan, di antaranya produk furnitur Kabupaten Jepara, yang bisa dijual ke IKN.

“Di Jepara itu adalah daerah yang sudah dikenal dengan produk furnitur. Saya coba melihat potensi, apakah ada peluang kerja sama furnitur di IKN dari Jawa Tengah,” katanya.

Selain potensi tersebut, Luthfi juga menjajaki peluang kolaborasi dari dinas terkait, BUMD seperti perbankan, bahkan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Mengingat perencanaan pembangunan di IKN masih menyisakan ruang kolaborasi.

“Intinya Provinsi Jawa Tengah ingin ikut hadir di IKN juga,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, memaparkan perkembangan pembangunan IKN, termasuk skema pendanaan yang menjadi landasan percepatan pembangunan. Saat ini, pembangunan IKN didukung melalui tiga skema pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah. Hingga saat ini, realisasi investasi swasta yang telah masuk ke IKN mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor, sementara nilai proyek melalui skema KPBU mencapai Rp134,25 triliun.

Basuki menyampaikan, Otorita IKN terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem pembangunan IKN, sebagai ibu kota politik yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN, nantinya akan ada insentif fiskal,” ujar Basuki.

Basuki juga menjelaskan, peluang kerja sama tidak hanya terbatas pada investasi, tetapi juga dapat mencakup berbagai sektor strategis yang mendukung pengembangan kawasan IKN, mulai dari penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, hingga sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. (Humas Jateng)*ul

Fajar 2026, Perkuat Rantai Industri Halal Jateng dan Tingkatkan Omzet UMKM

Jumat, 7 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/fajar-2026-perkuat-rantai-industri-halal-jateng-dan-tingkatkan-omzet-umkm/>

SEMARANG – Festival Jawa Tengah Syariah (Fajar) 2026 kembali menjadi etalase pengembangan ekosistem halal di Jawa Tengah. Tak sekadar menghadirkan produk halal, ajang yang digelar di Queen City Mall Semarang pada 6–9 Agustus 2026 itu, juga membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku UMKM.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, Festival Jateng Syariah merupakan hasil sinergi panjang antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Bank Indonesia, dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Menurutnya, arah pembangunan tersebut akan semakin diperkuat pada 2027, bersamaan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata ramah muslim.

“Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia sudah lama, untuk menumbuhkan ekonomi syariah,” kata Taj Yasin, seusai mewakili Gubernur Ahmad Luthfi membuka Fajar 2026, Kamis (6/8/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, pengembangan ekosistem halal dilakukan dari hulu hingga hilir. Di antaranya melalui pembangunan rumah potong hewan halal di Kabupaten Magelang, rumah potong ayam di Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan pondok pesantren, hingga pengembangan kawasan Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS).

Ditambahkan, keberadaan kawasan kuliner bersertifikat halal, fasilitas ibadah yang memadai, serta layanan yang ramah muslim, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, khususnya dari negara-negara Timur Tengah.

“Kalau kita bicara pariwisata yang ramah muslim, ya salah satunya tadi kawasan food court-nya ini ada sertifikat halalnya, ada keterjaminannya, lalu tempat ibadahnya bagus,” ujar wagub.

Gus Yasin menambahkan, tujuan utama pengembangan ekonomi syariah bukan semata meningkatkan transaksi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha.

“Fajar 2026 juga merangkul UMKM. Saya senang karena tumbuhnya bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, M Noor Nugroho mengatakan, Fajar 2026 mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Sinergi Penguatan Literasi dan Halal Value Chain. Tema tersebut menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat, sekaligus membangun rantai nilai halal dari sisi produksi hingga konsumsi.

Menurut Noor, pengembangan halal value chain dilakukan mulai dari sertifikasi rumah potong hewan dan unggas, penggilingan, hingga sertifikasi halal bagi UMKM.

Harapannya, ketika sisi permintaan dan penawaran sama-sama tumbuh, ekonomi syariah dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Jawa Tengah, sekaligus mendukung program pariwisata ramah muslim, yang tengah disiapkan pemerintah provinsi.

“Kalau sisi suplai dan demand ini bertemu, mudah-mudahan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah,” katanya.

Pada penyelenggaraan tahun kedelapan ini, Fajar menghadirkan sejumlah program baru. Salah satunya adalah Inspirational Talk, yang menghadirkan pelaku usaha dan organisasi perangkat daerah untuk berbagi praktik terbaik dalam pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Tengah.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengunjungi area Halal Experience yang menampilkan 18 tenant kuliner dan sembilan stan edukasi. Di dalamnya terdapat Halal Value Chain Hub, yang menyediakan layanan konsultasi hingga pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Pengunjung juga dapat memanfaatkan Financial Hub yang menyediakan berbagai layanan konsultasi keuangan, mulai dari perlindungan konsumen, layanan jasa keuangan, aplikasi pembukuan SIAPIK, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, hingga edukasi dari Bank Indonesia. Festival turut dilengkapi Sustainable Hub yang mengangkat tema fesyen berkelanjutan.

Festival Jawa Tengah Syariah 2026 berlangsung hingga 9 Agustus 2026, dan menjadi puncak rangkaian Road to Festival Jawa, sebelum berlanjut ke Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada Oktober 2026 mendatang.

Dampak penyelenggaraan Fajar juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM. Roni Abdul Ghoni dari Toros Farm Sulaimaniyah Magelang, mengungkapkan rutin mengikuti festival tersebut selama empat tahun terakhir, karena efektif memperluas pasar.

Dia mengatakan, pada hari biasa penjualan produknya berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta per hari. Namun, dengan melihat ramainya pengunjung, omzet hariannya bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta.

“Festival seperti ini sangat membantu UMKM, karena produk kami semakin dikenal masyarakat,” ujarnya.

Pengalaman serupa disampaikan Aris Agung Nugroho, pelaku usaha Dawet Ayu Durian Pak Sarjohadi asal Banjarnegara. Dia mengaku telah empat kali mengikuti gelaran tersebut, untuk memperkenalkan minuman khas daerahnya kepada masyarakat yang lebih luas.

“Kami berharap, event seperti ini terus berlanjut,” katanya. (Humas Jateng)*ul

Klaten Jobfair 2026 Buka Lebih dari 6.000 Lowongan Kerja

Jumat, 7 Agustus 2026

Penulis: ang/Kominfo-klt, Editor: WH/DiskomdigiJtg

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/klaten-jobfair-2026-buka-lebih-dari-6-000-lowongan-kerja/>

KLATEN – Lebih dari 6.000 lowongan kerja dibuka dalam Klaten Jobfair 2026, memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mempermudah perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Bursa kerja yang diikuti 31 perusahaan itu digelar di kompleks Gedung Sunan Pandanaran pada Rabu (5/8/2026) hingga Kamis (6/8/2026).

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Klaten, Luciana Rina Damayanti, mengatakan Klaten Jobfair 2026 yang digelar dalam rangka Hari Jadi Klaten ke-222 menghadirkan lebih dari 6.000 lowongan kerja dari berbagai sektor.

“Perusahaan yang ikut dalam kegiatan tersebut sudah dilakukan verifikasi sehingga cukup aman bagi masyarakat,” ungkapnya usai pembukaan Klaten Jobfair 2026.

Selain melibatkan perusahaan, Disperinaker juga menghadirkan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk mengikuti program magang ke luar negeri.

Luciana berharap penyelenggaraan Klaten Jobfair 2026 mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan.

“Kami berharap melalui Klaten Jobfair 2026 ribuan pencari kerja terserap oleh perusahaan,” ujarnya.

Klaten Jobfair juga menjadi sarana yang mempertemukan kebutuhan pencari kerja dan dunia usaha. Hal itu diakui HR PT Intan Sejati Klaten, Arina. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu perusahaan menjaring kandidat potensial untuk mengisi sejumlah posisi yang sebelumnya sulit dipenuhi.

“Sebelumnya kami kesulitan mengisi pekerja pada posisi tertentu. Tapi lewat Klaten Jobfair ini, ada sejumlah kandidat potensial yang bisa kami temui,” katanya.

Bagi para pencari kerja, kehadiran job fair memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai peluang karier. Vico Riva, warga Klaten Utara, mengaku kegiatan tersebut membantunya mengenal beragam pilihan pekerjaan sekaligus membuka kesempatan untuk berkarier.

“Ini jadi pengalaman yang bagus buat saya pribadi. Banyak peluang kerja yang dibuka, sekaligus memberikan gambaran karier buat saya,” ujarnya.

Dorong UMKM dan Koperasi Naik Kelas, Demak Expo 2026 Resmi Dibuka

Jumat, 7 Agustus 2026

Penulis: red-kmf/ist, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dorong-umkm-dan-koperasi-naik-kelas-demak-expo-2026-resmi-dibuka/>

DEMAK – Sebanyak 110 stan produk unggulan ikut berpartisipasi dalam Demak Expo 2026, di halaman Stadion Sport Center, mulai Kamis (6/8/2026) sampai Minggu (9/8/2026). Pameran yang mengusung misi mendorong UMKM naik kelas ini menampilkan beragam produk kreatif, mulai dari kerajinan, batik, fesyen, makanan dan minuman, hingga layanan jasa keuangan.

Kepala Dindagkop UKM Kabupaten Demak, Iskandar Zulkarnain, mengatakan, Demak Expo menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana publikasi hasil pembangunan dan pembinaan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, dan BUMD agar lebih dikenal masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Demak menargetkan nilai transaksi selama pelaksanaan kegiatan mencapai Rp500 juta,” ujarnya, saat pembukaan Demak Expo, Kamis (6/8/2026).

Tak hanya pameran produk, lanjutnya, pengunjung juga disuguhi berbagai kegiatan menarik, seperti pertunjukan seni budaya setiap hari, pelayanan publik, sarasehan Forum UMKM, jalan sehat, beauty class, senam dan yoga ibu hamil, pound fit, serta berbagai perlombaan, di antaranya lomba mewarnai dan puzzle untuk anak tingkat TK, serta fashion show bagi pelajar SD.

Sementara itu, Bupati Demak Eisti'anah menyampaikan, Demak Expo merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Demak yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun. Menurutnya, jika pada awalnya kegiatan ini hanya berfokus pada pameran UMKM, kini Demak Expo telah dikolaborasikan dengan berbagai program dan kegiatan, sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui Demak Expo, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat produk-produk unggulan, serta berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Demak. Kami berharap, kegiatan ini semakin mendorong UMKM agar terus berkembang, semakin dikenal masyarakat, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas,” ujar Eisti'anah.

Dia berharap, dengan adanya pameran tersebut, upaya memperkenalkan UMKM Kabupaten Demak semakin optimal.

“Sehingga, produk-produk lokal semakin berjaya dan mampu bersaing di berbagai pasar,” pungkasnya.

Festival Jateng Syariah 2026 Jadi Ladang Rezeki UMKM, Omzet Naik Berlipat

Jumat, 7 Agustus 2026 09:16 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/festival-jateng-syariah-2026-jadi-ladang-rezeki-umkm-omzet-naik-berlipat>

Festival Jawa Tengah Syariah (Fajar) 2026 membawa dampak langsung bagi pelaku UMKM. Omzet sejumlah peserta bahkan melonjak hingga lima kali lipat selama festival berlangsung.

Fajar 2026 digelar di Queen City Mall Semarang pada 6–9 Agustus 2026. Ajang ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan produk halal dan produk khas Jawa Tengah kepada masyarakat.

Salah satu pelaku UMKM yang merasakan peningkatan omzet adalah Roni Abdul Ghoni dari Toros Farm Sulaimaniyah, Magelang. Ia mengaku penjualan produknya meningkat signifikan ketika mengikuti festival tersebut.

Pada hari biasa, omzet Roni berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta per hari. Namun selama Fajar 2026, omzetnya bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp10 juta sehari.

“Festival seperti ini sangat membantu UMKM karena produk kami semakin dikenal masyarakat,” ujar Roni.

Menurut Roni, keikutsertaannya dalam Fajar bukan hanya untuk mengejar transaksi selama festival. Ajang tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan produknya kepada konsumen yang lebih luas.

Hal serupa dilakukan Aris Agung Nugroho, pelaku usaha Dawet Ayu Durian Pak Sarjohadi asal Banjarnegara. Ia telah empat kali mengikuti FAJAR untuk memperkenalkan minuman khas daerahnya kepada masyarakat.

Aris berharap kegiatan seperti Fajar terus digelar sehingga UMKM memiliki ruang untuk memperluas pasar dan mengenalkan produk lokal kepada konsumen di luar daerah asalnya.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan transaksi. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari pengembangan ekosistem tersebut.

Fajar 2026 juga memperkuat akses UMKM terhadap ekosistem halal melalui Halal Experience. Area tersebut menghadirkan 18 tenant kuliner dan sembilan stan edukasi, termasuk Halal Value Chain Hub yang menyediakan konsultasi serta pendampingan pengurusan sertifikasi halal.

Selain itu, tersedia Financial Hub yang memberikan layanan konsultasi terkait perlindungan konsumen, jasa keuangan, aplikasi pembukuan SIAPIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, hingga edukasi Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan penguatan halal value chain dilakukan dari sisi produksi hingga konsumsi. Penguatan rantai nilai tersebut diharapkan dapat mempertemukan sisi pasokan dan permintaan sehingga ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan baru Jawa Tengah.

Fajar 2026 berlangsung hingga 9 Agustus 2026 di Queen City Mall Semarang. Gelaran tahun kedelapan ini menjadi puncak rangkaian Road to Festival Jawa sebelum berlanjut menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada Oktober 2026.

Satu per Satu Pabrik Garmen Tutup, Kenapa Industri Padat Karya Berguguran?

Jumat, 7 Agustus 2026 13:54 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/satu-per-satu-pabrik-garmen-tutup-kenapa-industri-padat-karya-berguguran>

Gelombang penutupan pabrik garmen kembali terjadi di Indonesia. Setelah Jawa Tengah, kini dua pabrik garmen di Cimahi ikut menghentikan produksi dan memicu PHK massal ratusan pekerja.

Fenomena tutupnya pabrik garmen terjadi beruntun dalam beberapa pekan terakhir. Di Jawa Tengah, dua perusahaan besar lebih dulu menghentikan operasional, disusul dua pabrik garmen di Kota Cimahi, Jawa Barat, yang mengalami nasib serupa akibat tekanan bisnis.

Di Jawa Tengah, PT Samwon Busana Indonesia di Jepara resmi menghentikan seluruh aktivitas produksi per 1 Agustus 2026. Penutupan tersebut berdampak pada 685 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, PT Victory Apparel di Semarang juga menghentikan produksi dan bersiap menutup operasional saat kontrak sewanya berakhir pada Oktober 2026. Sekitar 800 pekerja terdampak proses PHK yang hingga kini masih disertai negosiasi mengenai besaran pesangon.

Memasuki awal Agustus, gelombang serupa terjadi di Kota Cimahi. PT Namnam Fashion Industries melakukan efisiensi total dengan menghentikan produksi garmen. Sebanyak 178 pekerja di-PHK, sementara perusahaan masih mempertahankan sekitar 101 karyawan dan berencana mengalihkan bisnis ke sektor lain.

Berbeda dengan PT Namnam, PT 6 Fashion yang telah beroperasi sekitar 30 tahun memilih menutup pabrik secara permanen sejak 31 Juli 2026. Penutupan itu menyebabkan sedikitnya 200 pekerja kehilangan pekerjaan setelah perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir.

Mengapa Pabrik Garmen Banyak Tutup?

Penyebab utama yang muncul di berbagai daerah relatif sama, yakni turunnya permintaan dari pasar ekspor. Melemahnya ekonomi global membuat pesanan pakaian dari pembeli luar negeri terus menyusut sehingga utilisasi pabrik ikut turun.

Kondisi tersebut diperparah oleh persaingan harga yang semakin ketat. Negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah menjadi tujuan baru para pembeli global sehingga pabrik di Indonesia kesulitan mempertahankan daya saing.

Selain itu, sejumlah perusahaan masih menanggung dampak berkepanjangan sejak pandemi Covid-19. Kerugian operasional yang terjadi selama beberapa tahun membuat kondisi keuangan perusahaan semakin tertekan hingga akhirnya memilih melakukan efisiensi bahkan menghentikan usaha.

Di Jawa Tengah, beberapa perusahaan juga menghadapi persoalan operasional lain, seperti biaya produksi yang meningkat dan gangguan lingkungan usaha. Sementara di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyebut industri padat karya mulai bergeser dari kawasan Bandung Raya menuju daerah dengan biaya tenaga kerja yang dinilai lebih efisien, seperti Majalengka, Garut, dan Indramayu.

Penyelesaian PHK Berjalan Berbeda

Meski sama-sama melakukan PHK, penyelesaian hak pekerja di setiap perusahaan tidak seragam.

Di PT Samwon Jepara, pembayaran pesangon kepada 685 pekerja telah diselesaikan menggunakan skema 0,5 kali ketentuan sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021 karena perusahaan dinyatakan merugi. Sebanyak 350 mantan pekerja juga telah terserap di perusahaan garmen lain di Jepara.

Sebaliknya, proses penyelesaian di PT Victory Apparel Semarang masih berlangsung. Sebagian pekerja menerima tawaran pesangon 0,5 kali ketentuan, sedangkan ratusan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja tetap menolak dan meminta pembayaran sesuai ketentuan penuh karena rata-rata memiliki masa kerja belasan hingga puluhan tahun.

Di Cimahi, pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja mengawal pembayaran hak normatif pekerja, termasuk pesangon dan pencairan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi para buruh yang terdampak PHK.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai gelombang penutupan pabrik dan PHK massal di sektor padat karya tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan masing-masing perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan tekanan yang sedang dihadapi industri tekstil dan garmen nasional.

"Pemerintah harus memiliki strategi untuk menjaga industri padat karya tetap bertahan, mulai dari perlindungan pasar domestik, penguatan ekspor, hingga menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya buruh yang terdampak, tetapi juga daya saing industri nasional," ujar Said Iqbal.

Ia juga meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang terkena PHK dipenuhi sesuai ketentuan, sekaligus mempercepat penyaluran program perlindungan sosial, termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta pelatihan kerja bagi buruh yang kehilangan mata pencaharian.

Gelombang penutupan pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi sinyal bahwa industri garmen nasional masih menghadapi tekanan berat. Selama permintaan ekspor belum pulih dan persaingan global semakin ketat, sektor padat karya diperkirakan masih menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan produksi maupun tenaga kerjanya.

Sensus ekonomi 2026 jadi kompas arah kebijakan, Wali Kota Tegal hadir rakorda di Semarang

Jumat, 7 Agustus 2026 16:17 WIB

Pewarta: Oky, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641064/sensus-ekonomi-2026-jadi-kompas-arah-kebijakan-wali-kota-tegal-hadiri-rakorda-di-semarang>

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (6/8).

Kegiatan tersebut dihadiri kepala daerah se-Jawa Tengah, jajaran BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menyelesaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengapresiasi BPS Jawa Tengah yang telah menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai langkah mempercepat penyelesaian pendataan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 80,10 persen, sebuah capaian yang dinilai sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional.

"Capaian ini luar biasa. Terima kasih kepada seluruh petugas sensus yang telah bekerja di lapangan dan kepada pemerintah daerah yang terus mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi. Kita berharap target pendataan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPS," ujar Taj Yasin.

Ia menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.

"Keberhasilan Sensus Ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, termasuk seluruh kepala daerah," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Sonny Harry B. Harmadi, menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan menjadi sumber data strategis bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Menurut Sonny, perubahan pola ekonomi pascapandemi membuat aktivitas usaha semakin dinamis. Kini, kegiatan ekonomi tidak lagi hanya dilakukan di kawasan perdagangan atau industri, tetapi juga tumbuh dari rumah-rumah masyarakat melalui berbagai model usaha berbasis digital maupun rumahan.

"Sejak tahun 2020 struktur perekonomian mengalami perubahan yang sangat cepat. Hari ini usaha bisa tumbuh dari rumah, sehingga pemerintah membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi di lapangan," ujarnya.

Ia mengibaratkan Sensus Ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Hasil sensus nantinya akan menjadi "kompas" dalam menentukan arah pembangunan ekonomi, penyusunan program pemberdayaan usaha, hingga penyusunan kebijakan investasi di daerah.

Sonny juga memaparkan bahwa berdasarkan PDRB tahun 2025, Jawa Tengah menempati peringkat keempat sebagai provinsi dengan perekonomian terbesar di Indonesia, setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan hasil sementara Prelist Sensus Ekonomi 2026, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,55 juta unit usaha, menjadikannya provinsi dengan jumlah usaha terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Untuk kategori Usaha Besar, Jawa Tengah berada di peringkat ketiga nasional, sedangkan jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga menempati posisi kedua secara nasional.

"Capaian ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Karena itu, data hasil Sensus Ekonomi harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran," tegas Sonny.

Melalui keikutsertaan dalam Rakorda tersebut, Pemerintah Kota Tegal menegaskan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas, akurat, dan mampu menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. (*)

Partisipasi Kerja Berkurang, Tingkat Pengangguran AS Juli Turun

Sabtu, 8 Agustus 2026 06:30 WIB

Augusta Saraiva

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117684/partisipasi-kerja-berkurang-tingkat-pengangguran-as-juli-turun/2>

Bloomberg, Pemberi kerja di AS secara tak terduga melakukan pemutusan hubungan kerja pada Juli. Data bulan-bulan sebelumnya direvisi turun, yang mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja sedang menghadapi tantangan setelah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan pada awal tahun ini.

Jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian (nonfarm payrolls/NFP) turun 23.000 pada bulan lalu menyusul revisi ke bawah yang signifikan terhadap data dua bulan sebelumnya, menurut data Biro Statistik Tenaga Kerja yang dirilis pada Jumat waktu setempat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,1% seiring dengan terus menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mungkin mulai melemah di tengah kenaikan harga dan ketidakpastian akibat perang Iran, meski permintaan konsumen yang tangguh sejauh ini telah mendorong sebagian pemberi kerja untuk melanjutkan rencana perekrutan mereka.

Data ini juga berpotensi mendorong Federal Reserve (The Fed) untuk menunda kenaikan suku bunga, sementara para pejabat menimbang antara inflasi dan risiko terhadap lapangan kerja.

Saham berjangka AS naik dan imbal hasil obligasi Treasury turun karena investor mengurangi spekulasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed pada September.

Penurunan jumlah pekerja ini didorong oleh pemangkasan tenaga kerja di sektor pemerintah, rekreasi dan perhotelan, serta perdagangan ritel. Jumlah pekerja sektor swasta meningkat sebanyak 30.000 untuk bulan kedua berturut-turut, dipimpin oleh sektor layanan kesehatan dan bantuan sosial.

Pemberi kerja di pemerintah daerah memangkas hampir 60.000 pekerja, hampir seluruhnya di sektor pendidikan. Angka di sektor ini bisa fluktuatif selama musim panas karena banyak guru tidak tercatat dalam daftar gaji sebelum kembali bekerja saat tahun ajaran baru dimulai. Jumlah tenaga kerja pemerintah federal juga turun.

Lapangan kerja di sektor rekreasi dan perhotelan turun ke level terendah dalam hampir setahun, seiring restoran dan bar mengurangi staf. Hal ini menunjukkan bahwa Piala Dunia FIFA yang berakhir pada 19 Juli tidak memberikan dorongan terhadap jumlah pekerja seperti perkiraan banyak pihak.

Jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur dan konstruksi terus meningkat. Banyak ekonom menyoroti pembangunan pusat data sebagai faktor pendorong permintaan tenaga kerja konstruksi pada tahun 2026, meski pembangunan perumahan terus terhambat oleh suku bunga yang tinggi.

Jumlah pekerja di sektor aktivitas keuangan—sektor utama bagi pekerja kerah putih yang dianggap paling rentan terhadap adopsi kecerdasan buatan (AI)—turun ke level terendah dalam empat tahun terakhir.

Bank Sentral China Tambah 20 Ton Cadangan Emas pada Juli

Sabtu, 8 Agustus 2026 07:00 WIB

<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/117678/bank-sentral-china-tambah-20-ton-cadangan-emas-pada-juli/2>

Bloomberg, Bank sentral China meningkatkan penambahan cadangan emasnya bulan lalu, memperpanjang tren pembelian yang telah berlangsung hampir dua tahun seiring harga emas yang bertahan di atas level US\$4.000 per troy ons.

Cadangan emasnya meningkat sebesar 640.000 ons, atau sekitar 20 ton, pada Juli; menandai bulan ke-21 berturut-turut penambahan cadangan, menurut data dari People's Bank of China (PBOC) yang dirilis pada Jumat.

Angka ini merupakan kenaikan terbesar dalam cadangan sejak Oktober 2023 dan terjadi setelah penambahan sekitar 15 ton cadangan emas pada Juni.

Harga emas terus naik sepanjang bulan ini. Kenaikan harga didukung oleh tanda-tanda adanya kemungkinan kesepakatan antara AS dan Iran terkait Selat Hormuz, yang berpotensi meredakan inflasi akibat harga energi dan mengurangi kemungkinan pengetatan kebijakan moneter.

Selain itu, investor institusional di China juga terus menambah posisi mereka dalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) lokal yang didukung oleh emas fisik.

Harga emas spot naik hingga 1,8% ke level tertinggi US\$4.316 per troy ons setelah rilis data PBOC, mencapai harga tertinggi sejak pertengahan Juni.

Bank sentral China juga telah meningkatkan cadangan emasnya di Hong Kong selama beberapa bulan terakhir, menurut sumber yang mengetahui hal ini—sehingga mendukung upaya kota tersebut untuk menjadi pusat perdagangan emas batangan.

Penambahan terbaru ini mempercepat tren jangka panjang, di mana PBOC telah memindahkan sebagian cadangan emasnya kembali ke China dari London, tambah sumber tersebut.

Secara keseluruhan, bank-bank sentral di seluruh dunia membeli 289 metrik ton emas pada kuartal kedua, menurut perkiraan World Gold Council yang didanai oleh para produsen emas.

Meski pembelian oleh sektor resmi mengalami pemulihan dibandingkan kuartal pertama, pembelian secara keseluruhan diperkirakan masih akan menurun sepanjang tahun ini.

Dolar AS Tertekan, Data Jobs Lemah Pangkas Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Sabtu, 8 Agustus 2026 06:05 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-tertekan-data-jobs-lemah-pangkas-ekspektasi-kenaikan-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sejumlah mata uang utama, termasuk yen Jepang dan euro, pada Jumat (7/8/2026).

Pelemahan terjadi setelah data ketenagakerjaan AS menunjukkan penurunan jumlah lapangan kerja pada Juli, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kekuatan ekonomi AS dan mengurangi alasan bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga.

Mengutip Reuters, ekonomi AS kehilangan 23.000 pekerjaan pada Juli. Angka tersebut berbanding terbalik dengan ekspektasi ekonom yang disurvei Reuters, yang memperkirakan penambahan 80.000 pekerjaan.

Tingkat pengangguran AS turun menjadi 4,1%. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja juga turun ke 61,4%, level terendah dalam hampir lima setengah tahun.

Data tersebut langsung menekan dolar AS. Terhadap yen, dolar AS kehilangan penguatan yang sebelumnya diraih dalam beberapa hari terakhir setelah intervensi bersejarah antara otoritas Jepang dan AS pada pekan sebelumnya.

Pada perdagangan terakhir, dolar AS turun 0,57% menjadi 157,56 yen. Meski demikian, dolar masih berada di jalur mencatat kenaikan mingguan sekitar 0,10%.

Sementara itu, euro menguat 0,39% terhadap dolar AS menjadi US\$ 1,1568. Euro juga berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan sekitar 0,41% terhadap dolar AS.

Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Bergeser

Pelemahan dolar mencerminkan menurunnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed.

Berdasarkan CME FedWatch, pasar kini memperkirakan probabilitas The Fed mempertahankan suku bunga pada pertemuan September mencapai 56%, naik dari 45% sehari sebelumnya.

Thierry Wizman, Global FX and Rates Strategist di Macquarie Group, mengatakan pasar tidak memperkirakan data nonfarm payrolls akan menunjukkan kontraksi maupun revisi besar terhadap data Juni.

"Saya pikir tidak ada yang benar-benar memperkirakan nonfarm payrolls akan negatif atau akan terjadi revisi besar terhadap angka Juni," ujar Wizman.

Menurut Wizman, pasar kini kemungkinan menggeser ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dari September ke Oktober atau Desember.

"Saya cenderung berpikir pasar telah menggeser ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ke Oktober atau Desember, bukan September," katanya.

Ia menambahkan, setiap data yang menunjukkan ekonomi AS melemah atau pasar tenaga kerja tidak sekuat perkiraan akan membuat pasar kembali menunda ekspektasi kenaikan suku bunga.

"Setiap kali ada data yang menunjukkan ekonomi AS melemah atau pasar tenaga kerja tidak sekuat yang diperkirakan, pasar pada dasarnya akan menunda prospek kenaikan suku bunga The Fed," ujar Wizman.

Imbal Hasil Obligasi AS Turun

Imbal hasil (yield) US Treasury turun tajam setelah rilis data ketenagakerjaan.

Yield obligasi AS tenor dua tahun, yang biasanya bergerak mengikuti ekspektasi kebijakan The Fed, turun 4,2 basis poin menjadi 4,245%.

Sementara itu, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun 2 basis poin menjadi 4,649%.

Indeks dolar AS (US Dollar Index/DXY), yang mengukur kinerja greenback terhadap sejumlah mata uang utama termasuk yen dan euro, turun 0,44% menjadi 99,50.

Dolar AS juga berada di jalur mencatat penurunan mingguan sebesar 0,31%. Jika terealisasi, ini menjadi pelemahan mingguan untuk dua pekan berturut-turut.

Pelemahan dolar turut memberikan dorongan bagi harga emas. Harga emas spot naik 2,55% menjadi US\$ 4.347,29 per ons troy.

Devisa Aman, Tapi Neraca BI Belum Sepenuhnya Nyaman

Sabtu, 8 Agustus 2026 10:18 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117696/devisa-aman-tapi-neraca-bi-belum-sepenuhnya-nyaman/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Cadangan devisa Indonesia tercatat turun pada akhir Juli 2026. Penurunan yang relatif terbatas ini disebabkan oleh adanya pembayaran utang, dan intervensi Bank Indonesia (BI) dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping masuknya hasil dari penerimaan pajak dan jasa, dan penerbitan global bond.

Pada Jumat (7/8/2026), Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa Indonesia untuk posisi akhir Juli berada di US\$145,3 miliar, berkurang US\$0,3 miliar dari bulan sebelumnya yang berada di US\$145,6 miliar. Penurunan ini mematahkan perbaikan pada posisi devisa Juni yang sempat bertambah sebesar US\$700 juta, dari US\$144,9 miliar pada Mei, menjadi US\$145,6 miliar di Juni.

"Perkembangan posisi cadangan devisa Juli 2026 tersebut dipengaruhi terutama oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat," sebut laporan BI.

Posisi cadangan devisa yang kembali terkuras setelah sempat membaik bulan lalu, memberi sinyal bahwa pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi BI masih terus dilakukan untuk menjaga rupiah. Meski begitu, devisa tak terlalu terkuras seperti bulan-bulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pergerakan rupiah yang relatif stabil.

Sepanjang Juli, rupiah tergerus 0,29%. Meski menjadi yang terlemah kedua di Asia sepanjang bulan itu, namun pelemahan rupiah pada Juli relatif terbatas jika dibandingkan dengan kondisi pada kuartal pertama yang melemah 1,79%, dan kuartal kedua yang anjlok hingga 4,96%.

Rupiah sepanjang Juli melemah lebih terbatas, kala mata uang Asia lainnya berpesta. (Bloomberg)

Penurunannya memang relatif terbatas, yakni US\$300 juta, juga lebih kecil dari penambahan devisa yang terjadi pada Juni yang sebesar US\$700 juta. Namun, jika angka devisa dibaca bersama neraca moneter BI, bahwa tekanan eksternal juga terlihat masih kuat.

Hal tersebut tercermin dari posisi Net Foreign Assets (NFA) BI yang pada Juli masih berada di Rp1.873,1 triliun, jauh di bawah posisi Januari yang sebesar Rp2.172,8 triliun. Artinya, meski cadangan devisa hanya turun tipis pada Juli, tapi posisi aset luar negeri bersih masih berada sekitar Rp299,7 triliun, atau hampir 14% di bawah level awal tahun.

Memang, devisa lebih menggambarkan aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan eksternal, termasuk pembayaran utang luar negeri, atau intervensi stabilisasi rupiah. Sedangkan NFA punya posisi lebih luas karena mencakup tagihan BI kepada non-residen, dan dikurangi kewajiban BI kepada non-residen.

Melansir data BI, klaim atau tagihan kepada non-residen tercatat naik jadi Rp3.012,2 triliun, dari Januari yang berada di Rp2.825,3 triliun. Akan tetapi, di saat yang sama, kewajiban terhadap non-residen justru melonjak jauh lebih besar, menjadi Rp1.139,1 triliun.

Hal ini mengindikasikan bahwa kewajiban luar negeri tumbuh jauh lebih cepat daripada tagihan luar negeri. Tagihan kepada non-residen bertambah sekitar Rp186,9 triliun atau 6,6% dari Januari hingga Juli. Sebaliknya, kewajiban kepada non-residen meningkat sekitar Rp486,5 triliun atau hampir 75%.

Sehingga, kabar bahwa cadangan devisa hanya menyusut US\$300 juta pada Juli, tidak serta merta menghilangkan tekanan eksternal. Sebab, pada saat yang sama neraca eksternal BI masih menggambarkan adanya perubahan besar pada struktur aset dan kewajibannya.

Kepemilikan SRBI

Membesarnya kewajiban BI terhadap non-residen tergambar juga pada bertambahnya kepemilikan asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), meski instrumen moneter ini bukan menjadi satu-satunya penyebab kenaikan kewajiban BI terhadap non-residen.

Mengutip data BI, kepemilikan non-residen pada SRBI tercatat naik dari Rp121,9 triliun pada Januari, menjadi Rp287,06 triliun pada Juli, bertambah sekitar Rp165,16 triliun. Begitu juga dengan pangsa non-residen terhadap total SRBI yang ikut naik dari 16,2% menjadi 27,1%.

Di sisi lain, kepemilikan bank relatif stagnan, hanya naik Rp6,78 triliun atau 1,1%. Artinya ekspansi kepemilikan SRBI tidak berasal dari bank, melainkan semakin banyak ditopang oleh sektor non-bank, terutama investor non-residen.

Sejalan dengan itu, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Destry Damayanti sempat menegaskan bahwa sebenarnya penerbitan instrumen SRBI bertujuan untuk mendukung perbankan dalam mengelola likuiditas, bukan untuk membantu mereka memupuk investasi setinggi-tingginya.

"Kami kan inginnya SRBI itu sebenarnya adalah untuk liquidity management. Jadi bukan untuk memupuk investasi, dan untuk SBN lebih terkendali," ujar Destry dalam konferensi pers hasil rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Selasa (4/8/2026).

Bukan tanpa sebab SRBI digemari oleh investor. Yield yang tercatat lebih tinggi daripada Surat Utang Negara (SUN) pada tenor sama, menjadikan SRBI instrumen yang menarik.

Dalam lelang terbaru SRBI pada Jumat (7/8/2026), SRBI diserbu investor dengan lonjakan permintaan mencapai Rp45,12 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding lelang sebelumnya, di Rp17,51 triliun. Yield tenor 6 bulan turun menjadi 7,18% dari 7,2%, lalu tenor 9 bulan turun menjadi 7,40% dari 7,42%, dan tenor 12 bulan turun paling tajam jadi 7,59% dari 7,63%.

Meski turun, sejatinya yield SRBI masih tetap lebih mahal daripada yield yang ditawarkan oleh Surat Utang Negara (SUN) pada tenor yang sama, 1 tahun, berada di 7,02%. Itu sebabnya, instrumen ini masih lebih menarik bagi investor.

Cadangan Devisa Turun Tipis, Tekanan Rupiah dan Impor Mengintai Semester II

Sabtu, 8 Agustus 2026 14:56 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-turun-tipis-tekanan-rupiah-dan-impor-mengintai-semester-ii>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cadangan devisa Indonesia turun tipis pada akhir Juli 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa sebesar US\$ 145,3 miliar, susut dari US\$ 145,6 miliar pada akhir Juni 2026.

Penurunan tersebut menunjukkan cadangan devisa masih digunakan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Meski demikian, BI menilai posisi cadangan devisa saat ini masih kuat untuk menopang ketahanan eksternal Indonesia.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadangan devisa pada Juli dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah.

Di sisi lain, pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah turut menekan posisi cadangan devisa. "Posisi cadangan devisa masih berada di atas standar kecukupan internasional," kata Denny dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Pada akhir Juli, cadangan devisa setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut juga masih jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Dengan posisi tersebut, BI menilai cadangan devisa masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Namun, tekanan terhadap cadangan devisa berpotensi berlanjut pada semester II 2026. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai penurunan tipis pada Juli belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

"Penurunan tipis Juli lebih tepat dibaca sebagai penggunaan bantalan devisa sesuai fungsinya untuk meredam gejolak rupiah," ujar Josua.

Menurut Josua, cadangan devisa kemungkinan bergerak di kisaran US\$ 140 miliar pada semester II. Ia memperkirakan posisi cadangan devisa pada akhir 2026 berada di rentang US\$ 143 miliar-US\$ 147 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi akhir 2025 yang mencapai US\$ 156,47 miliar.

Dalam skenario dasar, cadangan devisa tidak akan terus mengalami penurunan, tetapi cenderung bertahan di kisaran pertengahan US\$ 140 miliar. Meski begitu, sejumlah risiko dapat kembali meningkatkan tekanan terhadap bantalan devisa Indonesia.

Risiko tersebut antara lain pelemahan rupiah yang memaksa BI meningkatkan intervensi, lonjakan harga minyak, arus modal asing keluar, serta meningkatnya kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Sebaliknya, cadangan devisa masih berpeluang kembali naik hingga sekitar US\$ 147 miliar apabila ketegangan geopolitik mereda, harga minyak turun, rupiah stabil, dan kebutuhan intervensi BI berkurang.

Arus modal asing yang kembali masuk, penerbitan surat utang global pemerintah, serta penerimaan devisa ekspor yang kuat juga dapat menopang cadangan devisa.

Josua juga menyoroti lonjakan impor yang berpotensi menambah kebutuhan dolar AS dalam beberapa bulan ke depan. Impor bahan baku tercatat tumbuh 18,38%, sedangkan impor barang modal meningkat 20,50% sepanjang semester I 2026.

Dari sisi ekonomi, peningkatan impor tersebut menjadi sinyal positif karena menunjukkan aktivitas produksi dan investasi yang menguat. Namun, kenaikan impor juga berarti kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek semakin besar.

"Jika peningkatan impor tersebut tidak menghasilkan tambahan produksi dan ekspor, tekanan terhadap transaksi berjalan dan cadangan devisa akan meningkat," tandas Josua.

Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2026 berpotensi melebar menjadi sekitar 1%-2% dari produk domestik bruto (PDB).

Tekanan tersebut dapat semakin besar apabila kebutuhan dolar meningkat sementara arus devisa masuk tidak tumbuh seimbang.

Selain itu, selama rupiah masih rentan bergerak menuju level Rp 18.000 per dolar AS, BI diperkirakan tetap menggunakan sebagian cadangan devisa untuk meredam volatilitas nilai tukar.

Josua memperkirakan rupiah pada akhir tahun berada di kisaran Rp 17.800-Rp 18.000 per dolar AS.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual juga melihat sejumlah risiko yang dapat menekan cadangan devisa hingga akhir tahun.

Risiko tersebut mencakup arah kebijakan moneter The Fed yang cenderung hawkish, pertumbuhan kredit yang menguat, tren defisit perdagangan, serta prospek peringkat utang Indonesia dari lembaga pemeringkat internasional.

David memperkirakan cadangan devisa Indonesia pada akhir 2026 berada di kisaran US\$ 142 miliar-US\$ 146 miliar.

Dengan demikian, meski posisi cadangan devisa saat ini masih tergolong aman, ruang penurunannya tetap perlu dicermati. Tekanan rupiah, kebutuhan impor, kondisi perdagangan, dan arus modal akan menjadi faktor penting yang menentukan seberapa besar bantalan devisa Indonesia tergerus hingga akhir tahun.

Mendag Budi Dorong RI-India Perluas Akses Pasar dan Investasi

Sabtu, 8 Agustus 2026 14:19 WIB

Penulis: Antara

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3017456/mendag-budi-dorong-ri-india-perluas-akses-pasar-dan-investasi>

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendorong penguatan hubungan ekonomi Indonesia dan India melalui perluasan akses pasar, percepatan kerja sama perdagangan, dan peningkatan investasi.

Menurut Budi, India merupakan salah satu mitra dagang strategis Indonesia di kawasan Asia Selatan yang masih memiliki ruang besar untuk pengembangan kerja sama. Penguatan hubungan perdagangan kedua negara dinilai dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat rantai pasok regional.

"Indonesia mendukung terciptanya perdagangan yang semakin terbuka, fasilitatif, dan saling menguntungkan, sehingga mampu mendorong peningkatan perdagangan dan investasi kedua negara," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Pembahasan tersebut dilakukan Budi bersama Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal di sela-sela pertemuan BRICS Tingkat Menteri Perdagangan di Jaipur, India, Jumat (7/8/2026).

Kedua menteri membahas perkembangan Working Group on Trade and Investment (WGTI) Indonesia-India. Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap India yang menjadi tuan rumah pelaksanaan WGTI kedua pada 2026.

Pelaksanaan WGTI tersebut merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Bersama para pemimpin Indonesia dan India setelah kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta pada 7 Juli 2026.

Selain kerja sama bilateral, kedua negara membahas perkembangan revidir ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA). Indonesia kembali mendukung penyelesaian perundingan AITIGA pada 2026 dengan mendorong hasil yang lebih sederhana, ramah bagi dunia usaha, dan efektif dalam memfasilitasi perdagangan.

Budi mengatakan Indonesia berkomitmen memenuhi target liberalisasi akses pasar sebesar 80% yang telah disepakati dalam proses revidir AITIGA. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat liberalisasi Indonesia saat ini yang mencapai 41,9%.

Hingga Juli 2026, Indonesia secara bertahap telah menyampaikan penawaran akses pasar yang mencakup sekitar 57% dari target liberalisasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Budi juga menyambut respons positif pemerintah India terhadap usulan pembentukan Indonesia-India Preferential Trade Agreement (ID-IN PTA).

Menurut Budi, perjanjian perdagangan bilateral tersebut dapat melengkapi AITIGA dengan memperluas akses pasar bagi kedua negara. Perjanjian itu juga diharapkan dapat mengurangi hambatan nontarif serta memperbaiki fasilitasi perdagangan.

Budi berharap pembahasan teknis ID-IN PTA dapat segera dimulai setelah revidir AITIGA mencapai kesimpulan substansial yang ditargetkan pada Oktober 2026.

Perdagangan RI-India Surplus US\$ 6,68 Miliar

Hubungan perdagangan Indonesia dan India menunjukkan kinerja positif bagi Indonesia. Pada Januari-Juni 2026, nilai perdagangan kedua negara mencapai US\$ 11,89 miliar.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia ke India mencapai US\$ 9,28 miliar, sedangkan impor dari India sebesar US\$ 2,60 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US\$ 6,68 miliar pada periode tersebut.

Jika menggunakan asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS, total perdagangan tersebut setara sekitar Rp 211,64 triliun. Nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar Rp 165,18 triliun, sedangkan impor sekitar Rp 46,28 triliun. Surplus perdagangan Indonesia setara sekitar Rp 118,90 triliun.

Sepanjang 2025, nilai perdagangan Indonesia-India mencapai US\$ 23,13 miliar. Ekspor Indonesia tercatat sebesar US\$ 18,30 miliar, sedangkan impor mencapai US\$ 4,84 miliar.

Indonesia pada tahun tersebut membukukan surplus perdagangan dengan India sebesar US\$ 13,46 miliar, atau sekitar Rp 239,59 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS.

Komoditas utama yang diekspor Indonesia ke India antara lain batu bara, minyak sawit, baja nirkarat, asam lemak monokarboksilat industri, dan korundum buatan.

Sementara itu, sejumlah produk yang banyak diimpor Indonesia dari India meliputi daging kerbau, kacang tanah, kendaraan pengangkut barang, suku cadang dan aksesoris traktor, serta tembakau mentah.

Penguatan kerja sama perdagangan dan investasi diharapkan dapat memperluas peluang bagi pelaku usaha kedua negara sekaligus meningkatkan nilai perdagangan bilateral di tengah upaya Indonesia memperkuat diversifikasi pasar ekspor.

Penguatan Sektor Produktif Jadi Kunci Perluas Lapangan Kerja

Sabtu, 8 Agustus 2026 12:09 WIB

Penulis: Alfi Dinilhaq

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3017428/penguatan-sektor-produktif-jadi-kunci-perluas-lapangan-kerja>

Jakarta, Beritasatu.com - Penguatan sektor produktif dinilai menjadi salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya meningkatkan angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, sektor tradable yang selama ini berperan dalam pembentukan PDB sekaligus menyerap tenaga kerja justru tumbuh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

"Oleh sebab itu, agenda industrialisasi harus kembali ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi," kata Esther dikutip dari Antara pada Sabtu (8/8/2026).

Menurut Esther, struktur sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sangat menentukan seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan dan memberikan efek berganda terhadap kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif banyak ditopang sektor non-tradable, antara lain informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta pengadaan listrik dan gas.

Di sisi lain, sektor tradable yang memiliki peran besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja masih tumbuh di bawah rata-rata ekonomi nasional.

"Akibatnya, pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda (spillover effect) yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Esther mendorong penguatan industri manufaktur melalui perbaikan iklim investasi produktif, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan aktivitas ekonomi tidak berhenti pada peningkatan investasi atau output, tetapi juga menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi penting, tetapi lebih penting lagi distribusi pendapatan dan memperbaiki ketimpangan ekonomi," ujar Esther.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang semester I 2026 mencapai 5,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang. Angka tersebut meningkat 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 berada di level 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja investasi juga menunjukkan pertumbuhan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan.

Realisasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia dan setara dengan 49,5% dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun.

Khusus pada triwulan II 2026, realisasi investasi mencapai Rp 511,8 triliun atau meningkat 7,1% secara tahunan. Investasi pada periode tersebut menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia.

Meski demikian, Esther menilai peningkatan investasi perlu dilihat dari sisi kualitas. Menurut dia, tren investasi saat ini masih cenderung mengarah pada investasi padat modal sehingga dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja perlu menjadi perhatian.

"Jadi yang terpenting adalah tidak hanya besarnya investasi yang masuk, tetapi seberapa kualitas investasi yang masuk berdampak pada penciptaan tenaga kerja, poverty alleviation, dan lain-lain," katanya pula.

Karena itu, penguatan industrialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai perlu berjalan beriringan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat pertumbuhan ekonomi lebih inklusif sekaligus memperbesar kesempatan kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sendiri telah mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya melalui program Kredit Industri Padat Karya (KIPK). Skema pembiayaan tersebut ditujukan untuk membantu industri melakukan revitalisasi mesin dan peralatan produksi.

Program KIPK menyasar enam sektor industri padat karya, yakni makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, alas kaki, serta mainan anak.

Hingga Mei 2026, KIPK telah disalurkan melalui 13 mitra perbankan dengan total plafon pembiayaan Rp 549 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi pembiayaan mencapai Rp 91 miliar atau 16,72% kepada 26 debitur dari target keseluruhan 293 debitur.

Selain pembiayaan, Kemenperin memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi industri melalui program Master Trainer. Program ini diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satu implementasinya adalah pelatihan Master Trainer/In-Company Trainer (ICT) yang berlangsung pada 18-25 Mei 2026 di Jakarta.

Kemenperin mencatat industri manufaktur telah menyerap 20,26 juta tenaga kerja hingga Agustus 2025. Data tersebut menunjukkan sektor industri tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja sehingga penguatan sektor produktif menjadi penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEK Batang Didorong Jadi Model Eco Industrial Park untuk Perkuat Dekarbonisasi

Sabtu, 8 Agustus 2026 21:13 WIB

Ihfa Firdausya

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/919764/kek-batang-didorong-jadi-model-eco-industrial-park-untuk-perkuat-dekarbonisasi>

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang didorong untuk mengadopsi konsep Eco Industrial Park (EIP) secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan emisi karbon. Dorongan tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam rangkaian Diskusi Terpumpun, Stakeholder Engagement, dan Field Visit bertajuk Diplomasi Dekarbonisasi yang Berdaya Ungkit: Merumuskan Strategi Kemitraan Transformatif di KEK Industropolis Batang yang berlangsung pada 6-7 Agustus 2026.

Forum tersebut membahas peluang dan tantangan transformasi KEK Industropolis Batang menuju kawasan industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Para pemangku kepentingan menilai penerapan konsep EIP perlu menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan agar pertumbuhan investasi dapat berjalan beriringan dengan agenda dekarbonisasi.

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan dalam diskusi tersebut. Provinsi ini merupakan salah satu kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan laju pertumbuhan yang sempat mencapai 7,79% sebelum melandai menjadi 7,74%. Angka tersebut masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

KEK Industropolis Batang turut dipandang sebagai salah satu magnet investasi yang mendukung aktivitas ekonomi Jawa Tengah. Namun, di sisi lain, provinsi tersebut juga tercatat sebagai penyumbang emisi karbon terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Barat.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada investasi industri tanpa intervensi dekarbonisasi yang memadai dapat meningkatkan beban emisi di kawasan industri. Karena itu, transformasi KEK Industropolis Batang menuju model Eco Industrial Park dinilai semakin relevan.

Konsep EIP sendiri merupakan bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan global yang berkembang sejak Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro pada 1992. Dalam pengembangannya, model kawasan industri hijau di Shenzhen, Tiongkok, kini menjadi salah satu rujukan yang relevan, terutama seiring kerja sama Two Countries Twin Park (TCTP) antara Indonesia dan Tiongkok. Nota kesepahaman kerja sama tersebut telah ditandatangani di Batang pada 20 Maret 2025.

Staf Ahli Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Zelda Wulan Kartika, mengatakan pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kemitraan internasional untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

"Kementerian Luar Negeri berperan sebagai fasilitator, katalisator, sekaligus problem solver dalam membangun kemitraan internasional. Ini semua untuk memperkuat ketahanan nasional yang adaptif, atau yang kami sebut dynamic resilience," kata Zelda.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri, Muhammad Takdir, menilai Indonesia perlu bergerak cepat dalam mengadopsi prinsip ESG dan mengembangkan kawasan industri hijau agar tetap kompetitif dalam memperebutkan investasi global.

"Indonesia punya dua pilihan: menawarkan diri sebagai destinasi investasi dengan menjadi bagian ESG atau kehilangan kesempatan terbaik karena tidak berada dalam ekosistem tersebut. Untuk masuk ke rantai pasok global, jendela kesempatannya singkat dan persaingannya semakin ketat. Transisi ke industri energi terbarukan dan pengembangan Eco Industrial Park adalah kunci untuk merebut peluang itu," ujar Muhammad Takdir.

Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha yang telah lebih dahulu mengembangkan praktik bisnis dan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Dari kalangan akademisi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (UNNES) sekaligus perwakilan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Semarang, Prof. Dr. Sucihatiningsih DW Prajanti, mengatakan perguruan tinggi dapat mengambil peran dalam membangun ekosistem EIP melalui kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah.

"Sebagai perwakilan di daerah KEK Industropolis Batang, ISEI juga berpotensi berkontribusi atas ekosistem yang dapat mendukung dengan pelibatan Akademisi, Bisnis, dan Government (ABG). Penerapan Eco Industrial Park ini akan terus menjadi perhatian khusus ISEI Semarang. Kami akan mengawal agenda ini agar benar-benar terwujud di Batang," ujarnya.

Dukungan juga disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho. Menurutnya, transformasi KEK Industropolis Batang sejalan dengan agenda ekonomi hijau yang menjadi salah satu perhatian di tingkat daerah.

"Hal ini sejalan dengan agenda ekonomi hijau yang menjadi perhatian khusus kami di daerah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, selaku inisiator kegiatan, mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan hubungan yang lebih produktif antara kawasan industri dan masyarakat di sekitarnya.

"Forum ini menjadi bahan refleksi penting bagi kita semua untuk menyusun simbiosis antara industri dan masyarakat sekitar KEK Industropolis Batang, agar hubungan keduanya menjadi lebih produktif dan berkelanjutan," jelas Dinna.

Setelah rangkaian diskusi, para delegasi melakukan kunjungan langsung ke KEK Industropolis Batang. Dalam kunjungan tersebut, mereka meninjau sejumlah fasilitas strategis kawasan, antara lain gedung pengelola, instalasi pengolahan air limbah (PAL), reservoir, serta jetty.

Delegasi juga berdialog dengan 14 perwakilan tenant kawasan, di antaranya PT Yih Quan, PT Rumah Keramik Indonesia, PT KCC Glass, PT Wavin, dan PT Indoprowel. Dialog tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelaku industri dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau di kawasan.

Hasil diskusi dan kunjungan lapangan selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Luar Negeri RI dalam menyusun strategi diplomasi dekarbonisasi dan kemitraan transformatif. Sejumlah aspek yang akan menjadi perhatian mencakup regulasi, pembiayaan, infrastruktur, kelembagaan, hingga pelibatan masyarakat dan institusi pendidikan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem Eco Industrial Park di KEK Industropolis Batang sekaligus mendukung pengembangan kawasan sebagai model twin park dengan Shenzhen, Tiongkok, yang dikenal sebagai salah satu kawasan yang berhasil menarik investasi global berbasis industri hijau.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Synergy Policies bersama Kementerian Luar Negeri RI melalui Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN), dengan dukungan ViriyaENB serta menggandeng ISEI Pusat dan ISEI Semarang.

Sejumlah pihak turut terlibat, antara lain Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Bank Indonesia Institute, UNNES, Universitas Diponegoro (UNDIP), pengelola KEK Industropolis Batang, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan unsur masyarakat. (E-3)

UMKM Korea Selatan Gencar Ekspansi, Indonesia Jadi Pasar Prioritas

Sabtu, 8 Agustus 2026 00:43 WIB

Mirza Andreas

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/919581/umkm-korea-selatan-gencar-ekspansi-indonesia-jadi-pasar-prioritas>

HUBUNGAN perdagangan Indonesia dan Korea Selatan terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut turut mendorong semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekspansi, terutama untuk produk-produk konsumsi yang dinilai memiliki peluang besar di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk asal Negeri Ginseng.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui Unboxing Day edisi kedua yang digelar di Jakarta, Kamis (6/8). Program promosi tahunan ini menjadi wadah bagi perusahaan UMKM Korea Selatan untuk memperkenalkan produk mereka kepada influencer, praktisi industri, dan konsumen Indonesia sebelum resmi memasuki pasar nasional.

Melalui konsep tersebut, para produsen tidak hanya memperkenalkan produknya, tetapi juga memperoleh umpan balik langsung dari calon konsumen sebagai bagian dari uji pasar (market validation). Respons tersebut diharapkan menjadi bekal bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran sebelum melakukan ekspansi secara lebih luas di Indonesia.

Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar paling strategis bagi Korea Selatan. Selain merupakan salah satu dari 10 mitra dagang utama Korea Selatan, Indonesia memiliki jumlah konsumen yang besar dengan ketertarikan tinggi terhadap berbagai produk Korea, mulai dari produk kecantikan, kesehatan, hingga perlengkapan rumah tangga.

"Bagi Korea Selatan, Indonesia merupakan salah satu dari 10 mitra dagang utama dan negara yang sangat bernilai. Oleh karena itu, banyak perusahaan Korea yang sangat berkeinginan dan bersemangat untuk membuka peluang bisnis di sini," ujar Team Leader Gimhae Bio-Industry Agency, Hwang Ok Sung.

Menurut Hwang, perusahaan yang mengikuti Unboxing Day tidak dipilih secara sembarangan. Penyelenggara memprioritaskan produsen barang jadi (consumer goods) yang mudah diterima masyarakat, memiliki keunggulan produk yang jelas, serta menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan ekspansi dan ekspor ke pasar internasional, termasuk Indonesia.

"Kami mengutamakan perusahaan yang memproduksi barang jadi yang secara keseluruhan dapat disukai oleh konsumen. Di antara perusahaan tersebut, kami memberikan prioritas utama kepada mereka yang memiliki keinginan kuat serta kapasitas untuk melakukan ekspor ke luar negeri. Selain itu, kami memilih produk-produk yang memiliki keunggulan dan keunikan yang kuat, sehingga diyakini memiliki potensi keberhasilan dan disukai saat masuk ke pasar Indonesia," jelasnya.

Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat lima perusahaan UMKM Korea Selatan yang lolos seleksi dan berasal dari beragam kategori produk konsumsi.

Di sektor personal care, Insan Jugyeom menghadirkan pasta gigi dan sabun berbahan garam bambu tradisional (jugyeom). Sementara Jaayeon memperkenalkan perangkat kecantikan (beauty device) serta cooling cream untuk perawatan tubuh.

Pada kategori kesehatan, Wellness Innercell menawarkan suplemen untuk membantu menjaga kesehatan sendi dan pembuluh darah. Adapun Phytoeco membawa produk herbal pencernaan Gentle Relief yang memanfaatkan tanaman khas Korea, Wasong (*Orostachys japonica*).

Sementara itu, Smart Berry memperkenalkan peralatan dapur berupa multi-cooker yang dirancang untuk memudahkan proses memasak dan mendukung aktivitas rumah tangga yang lebih praktis.

Penyelenggara optimistis minat perusahaan Korea Selatan untuk memasuki pasar Indonesia akan terus meningkat. Karena itu, Unboxing Day diharapkan dapat menjadi agenda tahunan dengan skala yang semakin besar, baik dari sisi jumlah peserta maupun ragam produk yang diperkenalkan.

Hasil evaluasi penyelenggaraan tahun ini akan menjadi dasar untuk menghadirkan lebih banyak perusahaan UMKM serta variasi produk pada penyelenggaraan berikutnya. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya membuka peluang ekspor bagi UMKM Korea Selatan, tetapi juga memperluas pilihan produk inovatif bagi konsumen Indonesia sekaligus memperkuat hubungan perdagangan kedua negara. (E-1)

Banyumas Mantu dan Wedding Expo 2026 perkuat ekonomi kreatif

Sabtu, 8 Agustus 2026 18:27 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641151/banyumas-mantu-dan-wedding-expo-2026-perkuat-ekonomi-kreatif>

Purwokerto (ANTARA) - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan Banyumas Mantu dan Banyumas Wedding Expo 2026 menjadi momentum memperkuat ekosistem industri pernikahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berkolaborasi, maka akan melahirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya dalam Technical Meeting Banyumas Wedding Expo 2026 dan Banyumas Mantu 2026 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas, Sabtu.

Ia mengatakan industri pernikahan di Banyumas terus berkembang dengan melibatkan berbagai bidang usaha, seperti wedding organizer, fotografer, videografer, dekorator, desainer, busana, catering, serta pelaku usaha kreatif lainnya.

"Sebagian besar pelaku industri wedding di Banyumas adalah generasi muda yang berani memilih jalan berwirausaha, mengandalkan kreativitas, dan menciptakan lapangan kerja," katanya.

Menurut dia, Banyumas Wedding Expo menjadi ruang promosi dan perluasan jejaring bagi pelaku usaha sehingga produk dan jasa lokal semakin dikenal masyarakat. Sementara Banyumas Mantu diharapkan memberikan manfaat langsung kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Saat ditemui se usai acara, Sadewo mengatakan sebanyak 30 pasangan calon peserta Banyumas Mantu 2026 telah dipilih melalui seleksi dari ratusan pendaftar.

"Dari sekian ratus pendaftar diseleksi menjadi 30 pasangan. Tadi dari panitia mengharapkan kegiatan ini setiap tahun akan kita adakan, syukur-syukur jumlahnya bertambah," katanya.

Menurut dia, kedua kegiatan tersebut akan terus dikembangkan agar semakin meriah dan menjadi agenda tahunan.

Terkait usia, Sadewo mengatakan peserta Banyumas Mantu memiliki rentang usia beragam, dengan peserta tertua 64 tahun serta pasangan termuda berusia 17 tahun dan 18 tahun.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Rumaisha mengatakan Banyumas Wedding Expo 2026 berlangsung 4-6 September di Rita Supermall Purwokerto dengan tema "Heritage Love Story". Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi industri pernikahan sekaligus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM daerah.

Dia mengatakan ekspo melibatkan sekitar 55-60 vendor dengan rangkaian kegiatan berupa peragaan fesyen, gelar wicara pernikahan, hiburan musik, dan kegiatan lainnya, sedangkan rangkaian kegiatan diawali dengan Banyumas Mantu pada Jumat (4/9).

"Seluruh pasangan peserta akan mengikuti persiapan dan tata rias di Pendopo Si Panji, kemudian dikirab menuju Rita Supermall sebelum mengikuti prosesi pernikahan sesuai hasil verifikasi administrasi," katanya.

Rumaisha mengatakan vendor Wedding Expo turut mendukung Banyumas Mantu dengan menyediakan layanan tata rias dan foto dokumentasi secara gratis bagi peserta.

Salah seorang calon peserta Banyumas Mantu, Sumardi (64), warga Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, mengaku senang mengikuti program tersebut karena membantu dari sisi biaya dan administrasi.

"Ya cukup lumayan untuk membantu. Alasannya biaya, tidak ada biaya. Sangat membantu," katanya.

Sumardi mengatakan telah tiga kali menikah. Dua pernikahan sebelumnya berakhir dengan perceraian karena faktor ekonomi, sedangkan pernikahan ketiganya berakhir setelah istrinya meninggal dunia.

Ia kemudian memutuskan mengikuti Banyumas Mantu untuk menikahi Kartini (49), warga Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng.

Kartini mengatakan mengetahui program tersebut dari status WhatsApp temannya dan kemudian mendaftar atas dukungan anaknya.

"Awalnya didaftarkan oleh anak saya, kemudian saya tanya apakah boleh ikut, ternyata boleh dan langsung diterima, alhamdulillah," katanya.

Ekonomi Jawa Tengah Semester I 2026 Tumbuh 5,80 Persen, Didorong Perdagangan dan Konsumsi Rumah Tangga

Sabtu, 8 Agustus 2026 09:00 WIB

Nurul Hidayat

<https://foto.bisnis.com/view/20260808/1994621/ekonomi-jawa-tengah-semester-i-2026-tumbuh-580-persen-didorong-perdagangan-dan-konsumsi-rumah-tangga>

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat perekonomian Jawa Tengah pada semester I 2026 secara kumulatif atau cumulative to cumulative (c-to-c) tumbuh

sebesar 5,80 persen. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sebesar 5,13 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut salah satunya didorong oleh kinerja sektor perdagangan besar dan eceran. Aktivitas perdagangan yang tetap tumbuh menunjukkan pergerakan ekonomi daerah yang terus berlangsung di tengah perkembangan berbagai sektor usaha.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turut ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi masyarakat yang tetap terjaga mencerminkan daya beli yang relatif kuat selama semester I 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Konsumsi rumah tangga yang tetap stabil turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas produksi dan perdagangan di berbagai sektor.

Dengan pertumbuhan sebesar 5,80 persen pada semester I 2026, kinerja ekonomi Jawa Tengah menunjukkan penguatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut sekaligus mencerminkan terjaganya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat di wilayah Jawa Tengah.

Kolaborasi Pemprov, Kadin, dan USM Percepat Transformasi Industri Hijau di Jawa Tengah

Sabtu, 8 Agustus 2026 00:59 WIB

Didik Saptiyono

<https://wawasan.suaramerdeka.com/semarang/0817480056/kolaborasi-pemprov-kadin-dan-usm-percepat-transformasi-industri-hijau-di-jawa-tengah>

SEMARANG, suaramerdeka-wawasan.com – Penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan industri hijau di Jawa Tengah mulai dimatangkan melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah, serta Universitas Semarang (USM).

Upaya tersebut akan dibahas dalam forum Meaningful Participation: Central Java Green Industry Initiative – Developing the Roadmap for Sustainable Industrial Growth yang berlangsung di Ruang Teleconference Lantai 8 USM pada 12 Agustus 2026 mendatang.

Ketua Panitia, Ferry Firmawan PhD, mengatakan, forum itu dirancang sebagai wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Tujuannya, kata Ferry, membangun kesamaan pandangan sekaligus menyusun arah kebijakan pengembangan industri hijau di Jawa Tengah.

Menurut Ferry, forum tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon.

"Central Java Green Industry Initiative lahir dari kebutuhan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri di Jawa Tengah tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi transformasi sektor industri agar menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Di sisi lain, Kadin Jawa Tengah berperan menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kebijakan pembangunan daerah, sedangkan Universitas Semarang memberikan dukungan melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi strategis berbasis data sebagai landasan penyusunan roadmap industri hijau.

Forum tersebut secara khusus akan membahas penyusunan roadmap pengembangan industri hijau sebagai langkah strategis mendukung rencana pengembangan 12 kawasan industri prioritas di Jawa Tengah yang diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap, melalui pendekatan partisipatif, para peserta memberikan masukan terkait tata kelola kawasan industri, investasi berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, serta implementasi teknologi hijau," kata Ferry.

Ia berharap sinergi antara Pemprov Jawa Tengah, Kadin Jawa Tengah, dan Universitas Semarang mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang memperkuat daya saing kawasan industri sekaligus menjadi acuan pengembangan industri hijau yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat nasional.

"Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi, Jawa Tengah berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang," tandasnya.

Defisit Perdagangan Jerman dengan China Melebar pada Semester I-2026

Minggu, 9 Agustus 2026 14:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-perdagangan-jerman-dengan-china-melebar-pada-semester-i-2026>

KONTAN.CO.ID - BERLIN. Defisit perdagangan Jerman dengan China melebar pada semester pertama tahun 2026, meskipun China tetap menjadi mitra dagang utamanya; demikian ditunjukkan oleh data awal dari badan pemerintah Germany Trade & Invest (GTAI) pada hari Minggu.

Mengutip Reuters, Minggu (9/8/2026), data tersebut menunjukkan bahwa ekspor Jerman ke China turun lebih dari 12% secara tahunan menjadi sedikit di bawah €37 miliar antara bulan Januari dan Juni, seiring langkah perusahaan-perusahaan China mengurangi ketergantungan pada impor Eropa, yang menjadikan China hanya sebagai pasar terbesar kesembilan bagi produk-produk Jerman.

Padahal, baru pada tahun 2021, China merupakan pasar ekspor terbesar kedua. Pada tahun itu, Jerman menjual barang senilai €104 miliar ke China, meskipun ada dampak pandemi. Kini, sektor manufaktur Jerman sedang kesulitan menghadapi tarif AS maupun persaingan dari Tiongkok, yang memicu pemangkasan besar-besaran lapangan kerja di perusahaan-perusahaan industri utama seperti produsen mobil Volkswagen.

Di sisi lain, China justru semakin banyak menjual produknya ke Jerman.

Pada semester pertama tahun lalu, Jerman mencatat defisit perdagangan sebesar €40 miliar dengan China. Angka tersebut membengkak menjadi sekitar €55 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Impor Jerman dari China naik 8,9% menjadi €91,8 miliar selama periode tersebut. Total nilai perdagangan mencapai lebih dari €128 miliar, atau €3 miliar lebih tinggi dibandingkan nilai perdagangan dengan Amerika Serikat.

"Penyebab penurunan ekspor ke China adalah lemahnya ekonomi domestik dan meningkatnya fokus (China) pada rantai nilai dalam negeri," kata Corinne Abele, pakar Asia Timur di GTAI.

Perusahaan-perusahaan Jerman kini lebih banyak melakukan produksi di dalam wilayah China sendiri, sementara krisis properti dan masalah keuangan pemerintah daerah di China menghambat investasi, tambah Abele.

Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan ekonomi jauh lebih kecil, seperti Austria dan Swiss, membeli lebih banyak barang Jerman dibandingkan Tiongkok pada tahun 2026.

Berkurangnya ketergantungan China terhadap Jerman menunjukkan bahwa negara tersebut semakin mandiri dari kekuatan Barat dan terus mengejar ketertinggalan di bidang teknologi, kata ekonom Commerzbank, Vincent Stamer.

China melampaui AS sebagai mitra dagang utama Jerman pada tahun 2025 setelah Presiden AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih dan menerapkan kebijakan tarif proteksionis yang menggerus ekspor Jerman ke Amerika Serikat.

AS tetap menjadi pasar luar negeri terbesar bagi Jerman, namun ekspor ke negara tersebut turun sekitar 6% hingga bulan Juni menjadi sedikit di atas €74 miliar, ujar Abele. Sebaliknya, impor Jerman dari AS tumbuh 7,1% menjadi hampir €51 miliar.

Prancis dan Belanda menempati posisi berikutnya sebagai pasar ekspor terbesar. Secara keseluruhan, ekspor Jerman naik 3,7% menjadi €817 miliar hingga bulan Juni seiring dengan pertumbuhan ekonomi global yang terus menjaga arus pesanan.

"Namun, merek 'Made in Germany' tetap harus melakukan pembaruan diri," kata Stamer dari Commerzbank.

Inflasi Produsen China Turun pada Juli 2026, Seiring Penurunan Harga Energi Global

Minggu, 9 Agustus 2026 12:07 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-produsen-china-turun-pada-juli-2026-seiring-penurunan-harga-energi-global>

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Inflasi harga produsen di China turun lebih dari yang diperkirakan pada Juli, melambat ke level terlemah dalam tiga bulan, sementara inflasi konsumen juga melandai.

Data resmi yang dikutip Reuters, Minggu (9/8/2026) menunjukkan, penurunan ini terjadi seiring penurunan harga energi global meskipun terjadi perang AS-Iran.

Para pemimpin China, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan dengan mempercepat pengeluaran fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur yang telah dianggarkan hingga akhir tahun.

Inflasi konsumen dan produsen "melemah pada bulan Juli. Hal ini konsisten dengan data aktivitas lainnya seperti indeks PMI, yang juga turun lebih dari yang diperkirakan," kata Zhiwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management.

"Momentum ekonomi melambat pada kuartal kedua. Politbiro pada bulan Juli mengisyaratkan pengeluaran fiskal yang lebih kuat sebagai respons kebijakan. Transmisi pengeluaran fiskal akan membutuhkan waktu."

Indeks harga produsen naik 3,5% dari tahun sebelumnya pada bulan Juli, menurut data Biro Statistik Nasional, melambat dari 4,1% pada bulan Juni ke level terendah dalam tiga bulan.

Angka ini di bawah ekspektasi ekonom yang memperkirakan kenaikan 3,8% dalam jajak pendapat Reuters.

Meskipun beberapa sektor hulu dan teknologi tinggi China mempertahankan pertumbuhan laba yang kuat, produsen yang lebih berorientasi pasar domestik berjuang melawan permintaan yang lesu karena pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan kehilangan momentum.

Meningkatnya biaya input berisiko semakin menekan margin keuntungan mereka dan meredam kepercayaan.

PAD Belum Memadai Jadi Kendala Pemda Selama 20 Tahun Belum Eksekusi Obligasi Daerah

Minggu, 9 Agustus 2026 16:30 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/pad-belum-memadai-jadi-kendala-pemda-selama-20-tahun-belum-eksekusi-obligasi-daerah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah (Pemda) masih menghadapi sejumlah kendala untuk mengeksekusi penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan APBD, meski landasan hukumnya telah tersedia sejak 2004.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, salah satu kendala utama berasal dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum memadai dan belum berkelanjutan di sebagian besar daerah.

"Selain kendala birokrasi, sebagian besar Pemda masih banyak yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya belum memadai dan belum berkelanjutan atau berfluktuasi," ujar David kepada Kontan, Minggu (9/8/2026).

Menurutnya, kondisi PAD menjadi penting karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi dalam jangka panjang. Stabilitas pendapatan daerah juga menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum menempatkan dana pada obligasi daerah.

Meski demikian, David menilai prospek obligasi daerah ke depan cukup baik, terutama bagi daerah yang memiliki PAD memadai. Kondisi tersebut dapat membuat penerbitan obligasi daerah lebih menarik bagi investor.

"Prospeknya cukup baik karena PAD memadai dan akan menarik buat investor," katanya.

Menurut David, investor akan semakin tertarik apabila dana hasil penerbitan obligasi diarahkan untuk membiayai proyek infrastruktur maupun revitalisasi yang memiliki sumber pendapatan atau stream of income yang berkelanjutan.

"Investor akan tertarik jika dana hasil obligasi diarahkan untuk proyek-proyek infrastruktur dan revitalisasi yang bisa dikaitkan dengan stream of income yang berkelanjutan, misalnya proyek-proyek pariwisata," ujar David.

Ia menambahkan, penggunaan dana obligasi untuk proyek yang memiliki efek pengganda atau multiplier effect tinggi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Namun, David mengingatkan pemerintah daerah tetap perlu menjaga rasio pembayaran pokok dan bunga utang dalam jangka panjang pada level yang aman.

"Rasio pembayaran pokok dan bunga dalam jangka panjang harus dijaga dalam level yang aman," tegasnya.

DKI Jakarta dan Bali Mulai Menjajaki

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah pemerintah daerah mulai menjajaki penerbitan obligasi daerah. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang tengah mempersiapkan instrumen pembiayaan tersebut.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah sekitar Rp 5,3 triliun yang dijadwalkan a 2027. Dana tersebut direncanakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, antara lain LRT, rumah sakit umum daerah (RSUD), sekolah, pengendalian banjir, dan perumahan.

Rencana tersebut menjadi penting karena DKI Jakarta memiliki kapasitas fiskal dan PAD yang relatif kuat dibandingkan banyak daerah lain. Jika berhasil direalisasikan, penerbitan obligasi DKI dapat menjadi salah satu contoh awal bagi daerah lain untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Selain DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali juga mulai menjajaki skema penerbitan obligasi daerah. Penjajakan tersebut dilakukan untuk mencari alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar sumber pembiayaan konvensional APBD.

Bali memiliki karakteristik yang menarik bagi skema tersebut karena sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama ekonominya. Hal ini sejalan dengan pandangan David bahwa proyek yang memiliki stream of income berkelanjutan akan lebih menarik bagi investor.

Dengan demikian, keberhasilan DKI Jakarta maupun Bali dalam mempersiapkan penerbitan obligasi daerah dapat menjadi momentum untuk melihat sejauh mana instrumen tersebut dapat diterapkan di daerah lain.

Namun, David menilai penerbitan obligasi tetap harus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kemampuan pembayaran kewajiban utang dalam jangka panjang.

Jika dana obligasi diarahkan ke proyek produktif dengan multiplier effect tinggi dan didukung sumber pendapatan yang berkelanjutan, instrumen tersebut tidak hanya dapat membantu pembiayaan APBD, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Jika digunakan ke proyek-proyek yang efek multiplier-nya tinggi diharapkan bisa efektif dorong ekonomi,"katanya.

BI: Penerbitan Obligasi Daerah Bisa Menopang APBD Saat Fiskal Terbatas

Minggu, 9 Agustus 2026 15:29 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/bi-penerbitan-obligasi-daerah-bisa-menopang-apbd-saat-fiskal-terbatas>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto mengatakan, rencana penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah adanya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

"Memang kan kita lihat bahwa kebutuhannya untuk pembangunan infrastruktur ini biar tetap berjalan, ya ini mau nggak mau dengan adanya penyesuaian TKD dari pemerintah pusat, saya kira ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menopang dari sisi pembiayaan infrastruktur baik di Jakarta dan Indonesia tentunya," ujar Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat lalu.

Menurut dia, penerbitan obligasi daerah tetap harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko pembiayaan. Terutama, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai melalui obligasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan yang dapat menopang kewajiban pembayaran.

"Tapi yang penting adalah bagaimana Pemprov DKI itu siap mengelola risiko-risiko terkait dengan pembiayaan ini bisa ter-cover dari sisi pendapatan dari ekonomi-ekonomi yang dihubungkan, misalnya untuk LRT, untuk MRT, untuk pembangunan transportasi tentunya itu nanti akan ada pemasukan-pemasukan," ujarnya.

Bambang menilai, apabila potensi ekonomi dari proyek yang dibiayai melalui obligasi cukup kuat, pendapatan yang dihasilkan dapat membantu menutup biaya penerbitan obligasi tersebut.

"Kalau memang potensinya bagus tentunya akan biaya dari pengeluaran dari obligasinya tentu akan tertutupi dengan baik," ujarnya.

Penerbitan obligasi daerah sendiri telah memiliki landasan hukum sejak 2004 melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut kemudian diperkuat dengan sejumlah aturan teknis, antara lain PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah. Ketentuan mengenai pinjaman daerah juga diperbarui melalui PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pinjaman Daerah.

Landasan penerbitan obligasi daerah semakin diperkuat melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Terbaru, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 87 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penerbitan dan pembelian kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur penerbitan dan pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah melalui POJK Nomor 10 Tahun 2024.

Meski memiliki landasan hukum yang relatif panjang, penerbitan obligasi daerah di Indonesia hingga kini belum banyak dilakukan. Sejumlah daerah baru mulai menjajaki instrumen tersebut sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.

DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang tengah memproses rencana penerbitan obligasi daerah. Nilai penerbitan yang semula direncanakan sekitar Rp 3,5 triliun kemudian dinaikkan menjadi sekitar Rp 5,2 triliun.

"Jadi ada overlapping-nya, pokoknya angkanya kurang lebih Rp5,2 triliun nantinya," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers, Rabu (5/8).

Dana tersebut rencananya digunakan untuk sektor transportasi dan kesehatan. Salah satu proyek yang akan dibiayai adalah kelanjutan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 2,7 triliun.

"Digunakan untuk terutama dua hal, menyelesaikan LRT dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas," ujar Pramono.

Selain DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Bali juga tengah mempelajari skema penerbitan obligasi daerah. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya menemui Pramono Anung di kantor Gubernur DKI Jakarta untuk mempelajari skema pembiayaan tersebut.

"Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Koster.

Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya membahas kemungkinan penerbitan obligasi daerah, tetapi juga berbagai inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar APBD.

Pramono mengatakan, keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menjaga pembangunan tetap berjalan.

"Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Pramono.

Namun, penerbitan obligasi daerah tetap memiliki sejumlah persyaratan dan koridor fiskal yang ketat. Pemerintah daerah antara lain harus memenuhi rasio kemampuan membayar utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5 kali dan batas kumulatif utang maksimal 75% dari pendapatan daerah tahun sebelumnya.

Selain itu, pemerintah daerah wajib memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penerbitan juga membutuhkan persetujuan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, menurut BI, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk menjaga pembangunan infrastruktur tetap berjalan ketika kapasitas fiskal daerah terbatas. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memastikan proyek yang dibiayai menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

Cadangan Devisa Diproyeksi di Kisaran US\$ 142 Miliar-US\$ 146 Miliar di Akhir 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 11:22 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Avanty Nurdiana

<https://nasional.kontan.co.id/news/cadangan-devisa-diproyeksi-di-kisaran-us-142-miliar-us-146-miliar-di-akhir-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih akan berada dalam kondisi relatif stabil hingga akhir 2026, meski terdapat sejumlah risiko yang dapat memberikan tekanan terhadap posisi cadangan devisa.

Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan cadangan devisa Indonesia pada akhir tahun ini akan berada di kisaran US\$ 142 miliar-US\$ 146 miliar. Proyeksi tersebut lebih rendah dari cadangan devisa pada akhir 2025 sebesar US\$ 156,5 miliar.

"Masih stabil US\$142 miliar-US\$146 miliar (akhir 2026)," ujar David kepada Kontan, Jumat (7/8/2026).

Sebagai informasi, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 tercatat sebesar US\$ 145,3 miliar, turun tipis dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang mencapai US\$ 145,6 miliar.

David mengatakan, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan terhadap posisi cadangan devisa Indonesia ke depan.

Salah satunya adalah kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) yang cenderung hawkish.

Selain itu, pertumbuhan kredit domestik yang relatif menguat juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Risiko lainnya berasal dari perkembangan neraca perdagangan Indonesia. Tren defisit perdagangan. Sebagaimana diketahui, neraca perdagangan Indonesia berbalik menjadi defisit pada Mei dan Juni 2026, setelah mengalami surplus selama 72 bulan beruntun.

Di sisi lain, prospek rating outlook Indonesia juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas eksternal.

Dana Desa Telah Tersalurkan Rp 16,05 Triliun Hingga Juni 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 11:12 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/dana-desa-telah-tersalurkan-rp-1605-triliun-hingga-juni-2026>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menyalurkan anggaran Dana Desa Rp 16,05 triliun hingga Juni 2026.

Realisasi tersebut sudah mencapai 64,26% dari total anggaran Dana Desa tahun 2026 sebesar Rp 25 triliun. Tahun 2026, pemerintah siapkan Rp 25 triliun untuk Dana Desa Reguler dan hingga Juni 2026 sudah disalurkan ke 75.260 desa di seluruh Indonesia melalui dua tahap penyaluran.

“Dana Desa regular telah disalurkan melalui dua tahap, dengan rincian tahap 1 75.140 desa Rp 11,36 triliun, dan tahap 2 Rp 4,69 triliun kepada 45.229 desa,” mengutip postingan akun Instagram resmi @dirjenperbendaharaan, Minggu (9/8/2026).

Pemerintah menyalurkan Dana Desa untuk membantu desa di Indonesia agar semakin maju dan berdaya saing. Dana Desa ini mengalir dari kas negara sampai ke rekening desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh penduduk desa.

Dana ini dipakai untuk hal-hal yang langsung terasa manfaatnya di desa, mulai dari bantuan tunai buat warga kurang mampu, layanan kesehatan dasar (termasuk cegah stunting), sampai bangun infrastruktur desa lewat program padat karya tunai.

“Ini semua dari #UangKita untuk Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur!,” mengutip postingan tersebut.

KDMP vs Tengkulak, Petani Didorong Pegang Kendali Pasar

Minggu, 9 Agustus 2026 09:31 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/kdmp-vs-tengkulak-petani-didorong-pegang-kendali-pasar>

Petani ingin lepas dari jerat tengkulak. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi senjata baru untuk memperkuat posisi tawar petani.

Gagasan tersebut mencuat dalam Workshop Pertanian Nasional yang digelar Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) bersama Jaga Tunas Bumi (Jatubu) di Restoran Krishna Garden, Wonosobo, Sabtu (8/8/2026).

Forum tersebut membahas implementasi KDMP sebagai program prioritas pemerintah, terutama dalam memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota mengatakan KDMP tidak semestinya hanya dipandang sebagai koperasi yang menjalankan aktivitas perdagangan.

Menurutnya, KDMP harus menjadi instrumen ekonomi yang membantu masyarakat desa mengelola potensi lokal, termasuk pertanian, peternakan, perikanan dan UMKM.

"Koperasi ini merupakan wujud kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam menggerakkan segala sektor ekonomi desa," kata Joao.

Petani Jangan Terjebak Tengkulak

Persoalan tengkulak menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan. Ketika petani tidak memiliki akses pasar dan modal yang cukup, posisi tawar mereka cenderung lemah saat menjual hasil panen.

KDMP diharapkan dapat memotong mata rantai tersebut dengan mempertemukan petani dan pasar secara lebih langsung.

Dengan begitu, petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki instrumen ekonomi untuk menentukan arah distribusi dan pemasaran hasil pertanian.

Akses permodalan juga menjadi bagian penting. Joao menyebut pemerintah menyediakan KUR mikro dan super mikro melalui bank-bank Himbara dengan bunga 3 persen per tahun.

Skema tersebut diharapkan memberikan alternatif pembiayaan yang lebih murah sehingga petani tidak harus bergantung pada pinjaman informal.

Perwakilan petani Wonosobo meminta manfaat tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Mereka berharap Agrinas dan KDMP mampu menyerap hasil hortikultura serta peternakan lokal.

"Kami dari petani Wonosobo sangat berharap Agrinas dan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi nyata untuk menyerap langsung hasil komoditas hortikultura dan peternakan lokal," ujar perwakilan petani.

Jangan Berhenti di Pembentukan Koperasi

Rektor UPN Veteran Jakarta Prof Anter Venus mengingatkan bahwa tantangan KDMP bukan hanya soal membangun kelembagaan, tetapi juga meyakinkan masyarakat mengenai manfaat program.

Menurutnya, persepsi publik terhadap KDMP masih menghadapi persoalan. Karena itu, keberhasilan program harus ditunjukkan melalui hasil konkret di lapangan.

"Niat baik saja tidak cukup di era digital saat opini bisa dibengkokkan melalui gawai," ujar Anter.

Ia menilai testimoni masyarakat dan capaian nyata di desa akan menjadi cara paling efektif untuk membangun kepercayaan terhadap program tersebut.

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (UNAS) Prof Yudi Chrisnandi menambahkan, KDMP harus dijalankan dengan pendekatan dari bawah atau bottom-up.

Menurut Yudi, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan agar program tersebut tidak berhenti pada pembentukan koperasi maupun pembangunan fasilitas.

"Program ini harus berjalan bersih, produktif, dan terbebas dari praktik korupsi satu rupiah pun," tegas Yudi.

Workshop diikuti sekitar 50 perwakilan kelompok tani dari Kabupaten Wonosobo serta perwakilan kelompok tani dari wilayah Karesidenan Banyumas.

Melalui forum tersebut, GMPP dan Jatube mendorong KDMP menjadi instrumen yang benar-benar memperkuat petani. Bukan sekadar tempat transaksi, tetapi sarana untuk memperbesar akses modal, memastikan pasar dan meningkatkan posisi tawar petani dalam rantai pangan.

Menkop Ferry: Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penyelamat UMKM Lokal

Minggu, 9 Agustus 2026 09:08 WIB

Hendro Dahlan Situmorang

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/3017633/menkop-ferry-koperasi-desah-merah-putih-jadi-penyelamat-umkm-lokal>

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menggenjot perekonomian akar rumput melalui kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan ekonomi, KDKMP juga dipastikan menjadi penampung utama atau off-taker bagi produk-produk UMKM lokal di berbagai daerah.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan, langkah tersebut dirancang agar produk buatan masyarakat desa mendapatkan akses pasar yang lebih kuat sekaligus membantu mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

“KDKMP akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi sekaligus menjadi off taker atau penyerap utama hasil produksi UMKM dan pelaku usaha lokal. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap perekonomian desa semakin kuat serta mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan,” tegas Ferry, Minggu (9/8/2026).

Ferry menekankan, KDKMP memiliki fondasi yang berbeda jika dibandingkan dengan jaringan ritel komersial swasta. Meski sama-sama bergerak di sektor perdagangan, keuntungan finansial yang dihasilkan koperasi akan kembali kepada masyarakat sebagai anggota koperasi.

“Kalau koperasi desa melakukan kegiatan ritel, keuntungan yang diperoleh akan kembali kepada masyarakat desa sebagai anggota koperasi. Itulah semangat ekonomi gotong royong yang ingin dibangun,” ujarnya.

Lebih dari sekadar toko kelontong atau pusat distribusi barang, KDKMP dirancang menjadi ekosistem ekonomi produktif. Koperasi nantinya memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian, perikanan, peternakan, hingga produk kreatif UMKM lokal.

Melalui program tersebut, pemerintah berupaya mengubah paradigma pembangunan desa agar tidak terus bergantung pada kucuran bantuan sosial (bansos). KDKMP dirancang untuk mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan mampu mengoptimalkan potensi lokal.

“Selama ini desa terlalu bergantung pada bantuan. Padahal masyarakat desa harus menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, memiliki badan usaha sendiri, dan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal,” kata Ferry.

Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan dapat menjawab tantangan urbanisasi. Dengan terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha yang layak, generasi muda di desa diharapkan memiliki alasan untuk tetap tinggal sekaligus membangun daerahnya sendiri.

“Kalau desa tidak segera diperkuat, anak-anak muda akan terus pindah ke kota. Kita tidak ingin desa menjadi kosong karena tidak ada aktivitas ekonomi yang mampu memberikan kehidupan yang layak,” pungkasnya.

Indonesia Dorong Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral dan Kemitraan Ekonomi Inklusif

Minggu, 9 Agustus 2026 22.48 WIB

Ridho Dwi Putranto

<https://nasional.tvrinews.com/berita/t1ua1n1-indonesia-dorong-penguatan-sistem-perdagangan-multilateral-dan-kemitraan-ekonomi-inklusif>

Hadiri BRICS TMM 2026 di India, Mendag Budi Santoso tekankan pentingnya perdagangan multilateral yang adil dan inklusif.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso, kembali menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong sistem perdagangan multilateral yang adil, inklusif, terbuka, transparan, dan berbasis aturan (rules-based).

Di tengah eskalasi tantangan perdagangan global, negara-negara anggota BRICS dinilai perlu mempererat kerja sama ekonomi konkret guna menjaga stabilitas pasar internasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang akrab disapa Mendag Busan, usai menghadiri Sesi Penutupan Rangkaian Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting / TMM) di Jaipur, India. Rangkaian pertemuan strategis ini diselenggarakan di bawah Presidensi India pada 6–7 Agustus 2026.

"Indonesia menegaskan pentingnya menjaga sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan melalui WTO yang kuat, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan global. Pada saat yang sama, BRICS perlu terus menghadirkan kerja sama nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang," tegas Mendag Busan dalam keterangannya, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.

Meskipun pernyataan bersama (joint statement) belum tercapai secara penuh, Mendag Busan menyebutkan bahwa para menteri perdagangan negara anggota BRICS telah menyetujui sebagian besar substansi penting yang dibahas dalam forum tersebut.

Empat Poin Utama Bahasan BRICS TMM 2026

Pertemuan tingkat menteri perdagangan tahun ini memfokuskan pembahasan pada empat pilar strategis:

- **Penguatan Sistem Perdagangan Multilateral:** Menempatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai inti, memprioritaskan pembangunan, serta memastikan perlakuan khusus bagi negara berkembang.
- **Internasionalisasi UMKM:** Memperluas akses pembiayaan perdagangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk adopsi prinsip penilaian kredit serta Jaipur Consensus.
- **Ketahanan Rantai Nilai Global (Global Value Chains):** Mengesahkan Workplan on BRICS Shared Understanding on Global Value Chains untuk memperkuat rantai pasok yang tangguh, efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
- **Transformasi Layanan Digital Lintas Batas:** Mendorong adopsi BRICS Principles to Facilitate Digitally Delivered Services Across Borders guna memperluas perdagangan jasa digital.

Penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030

Salah satu tonggak penting dalam pertemuan ini adalah tercapainya kesepakatan penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030. Dokumen strategis ini akan berfungsi sebagai acuan utama dalam mengarahkan pengembangan berbagai strategi sektoral, program kerja, serta peta jalan kerja sama ekonomi antarnegara anggota hingga tahun 2030.

"Indonesia menyambut baik penyelesaian Strategy for BRICS Economic Partnership 2030. Strategi ini diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat kemitraan ekonomi BRICS yang semakin erat sekaligus membuka lebih banyak peluang perdagangan, investasi, dan pembangunan yang inklusif bagi seluruh negara anggota," pungkas Mendag Busan.

Indonesia-Brasil Jajaki PTA Perkuat Akses Pasar Amerika Latin

Minggu, 9 Agustus 2026 10:04 WIB

Andhika Prasetyo

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/919818/indonesia-brasil-jajaki-pta-perkuat-akses-pasar-amerika-latin>

Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia dan Brasil tengah mempertimbangkan pembentukan Indonesia-Mercosur Preferential Trade Agreement (PTA). Langkah ini dinilai sebagai strategi awal yang pragmatis untuk memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dengan blok ekonomi Mercosur.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa Republik Federasi Brasil, Márcio Fernando Elias Rosa, di Jaipur, India, pada Jumat (7/8). Budi berharap kerja sama ini nantinya dapat bertransformasi menjadi kemitraan ekonomi yang lebih komprehensif.

"Kami juga berharap Brasil dapat membantu membangun kesepakatan di antara negara-negara anggota Mercosur dan mendorong kemajuan proses negosiasi Indonesia-Mercosur PTA," ujar Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (9/8).

Alternatif Terhadap Hambatan CEPA

Opsi pembentukan PTA diajukan Indonesia sebagai solusi alternatif karena negosiasi Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) belum berjalan efektif. Blok Mercosur sendiri beranggotakan Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Bolivia.

Budi mengakui adanya dinamika internal di antara negara anggota Mercosur, termasuk perbedaan pandangan mengenai format kerja sama perdagangan dengan Indonesia. Hal inilah yang turut memengaruhi lambatnya progres negosiasi CEPA selama ini.

Pintu Masuk Pasar Regional

Penguatan hubungan dagang dengan Brasil dipandang strategis bagi kedua negara untuk membuka akses pasar di kawasan masing-masing. Brasil diproyeksikan menjadi pintu masuk produk-produk unggulan Indonesia ke pasar Amerika Latin, sementara Indonesia dapat berperan sebagai gerbang bagi produk Brasil untuk merambah pasar Asia.

"Kerja sama perdagangan Indonesia dan Brasil tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga dapat membuka akses yang lebih luas ke kawasan masing-masing," terang Budi.

Menteri Márcio Fernando Elias Rosa menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan keterbukaan Brasil untuk melanjutkan pembahasan. Pihak Brasil berkomitmen untuk mempelajari lebih lanjut draf usulan yang diajukan Indonesia.

Data Perdagangan Indonesia-Brasil

Berdasarkan data kementerian, kinerja perdagangan kedua negara menunjukkan angka yang signifikan:

- Januari-Juni 2026: Total perdagangan mencapai US\$3,53 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia sebesar US\$1,17 miliar.
- Tahun 2025: Total perdagangan tercatat sebesar US\$7,00 miliar dengan nilai ekspor Indonesia ke Brasil mencapai US\$2,21 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Brasil meliputi lemak dan minyak hewani/nabati, kendaraan beserta bagiannya, mesin dan peralatan listrik, karet, serta bahan bakar mineral. Sebaliknya, Indonesia mengimpor ampas dan sisa industri makanan, gula, kapas, tembakau, serta bijih logam dari Brasil. (Ant/E-3)

Dari Satu Pasar, E-Retribusi Grobogan Kini Tembus Tujuh Pasar

Minggu, 9 Agustus 2026 09:38 WIB

Damarjati

<https://www.rmoljawatengah.id/dari-satu-pasar-e-retribusi-grobogan-kini-tembus-tujuh-pasar>

Digitalisasi retribusi pasar di Grobogan terus meluas. Berawal dari satu pasar pada 2023, sistem e-retribusi kini diterapkan di tujuh pasar daerah.

Pemkab Grobogan bersama Bank Jateng resmi meluncurkan Sistem E-Retribusi Pengelolaan Pasar di Alun-Alun Purwodadi, Minggu (19/7/2026) malam.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan retribusi pasar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Grobogan Pradana Setyawan mengatakan penerapan e-retribusi dilakukan melalui kolaborasi Pemkab Grobogan dan Bank Jateng.

Setelah diluncurkan, sistem pembayaran non-tunai tersebut langsung diterapkan di tujuh pasar daerah. Ketujuh pasar itu yakni Pasar Pagi, Pasar Induk Purwodadi, Pasar Agro Hortikultura, Pasar Glendoh, Pasar Danyang, Pasar Tuko, dan Pasar Tegowanu.

Dengan sistem elektronik, pembayaran retribusi pedagang tercatat secara digital. Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan transaksi secara lebih mudah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penerimaan daerah.

Berawal dari Pasar Nglejok

Pimpinan Bank Jateng Cabang Purwodadi Cahya Imanuddin Firmansyah mengatakan digitalisasi retribusi pasar di Grobogan sebenarnya telah dimulai sejak 2023.

Saat itu, Pasar Nglejok dipilih sebagai proyek percontohan atau pilot project penerapan e-retribusi.

Menurut Firman, perkembangan dari satu pasar menjadi tujuh pasar menunjukkan konsistensi kolaborasi antara Bank Jateng dan Pemkab Grobogan dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Ia menilai digitalisasi retribusi tidak hanya memberikan kemudahan bagi pedagang, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pengawasan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Alhamdulillah pada 2026 ini implementasi e-retribusi telah merambah ke tujuh pasar. Perjalanan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan pengelolaan retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan modern," kata Firman.

Bank Jateng juga berharap digitalisasi tersebut dapat terus diperluas sehingga semakin banyak pelayanan publik di Grobogan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Retribusi Pasar Wajib Non-Tunai

Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan pembayaran retribusi pasar ke depan dilakukan secara non-tunai dan seluruh transaksinya tercatat secara elektronik.

Menurutnya, sistem tersebut dapat meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.

Setyo Hadi meminta petugas pasar menjadi agen perubahan dengan memberikan pendampingan kepada pedagang selama penerapan sistem baru.

Para pedagang juga didorong mendukung e-retribusi karena sistem pembayaran dinilai lebih praktis, aman, transparan, dan memberikan bukti transaksi yang jelas.

"Keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari banyaknya pengguna, tetapi juga meningkatnya kualitas pelayanan, kepatuhan membayar retribusi, PAD, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty turut mengapresiasi langkah Pemkab Grobogan dan Bank Jateng tersebut.

Ia menilai digitalisasi pasar rakyat bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai. Lebih dari itu, sistem elektronik dapat menjadi instrumen untuk membangun pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Menurut Evita, pasar rakyat memiliki posisi penting sebagai penggerak UMKM, penyedia lapangan kerja, sekaligus penopang ekonomi daerah.

Karena itu, digitalisasi retribusi dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

Garam Jateng Diprediksi Melimpah 2026, Petambak Justru Dibayangi Harga Anjlok

Minggu, 9 Agustus 2026 19:14 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/garam-jateng-diprediksi-melimpah-2026-petambak-justru-dibayangi-harga-anjlok>

Produksi garam rakyat Jawa Tengah diproyeksikan melonjak pada 2026. Namun, panen melimpah justru membayangi petambak dengan ancaman harga anjlok.

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah memprediksi kondisi cuaca tahun ini lebih mendukung produksi garam dibandingkan 2025. Suhu udara yang lebih tinggi dan kemarau panjang membuat masa produksi diperkirakan berlangsung lebih lama, bahkan hingga November.

Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jateng Lilik Harnadi mengatakan, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, produksi garam Jateng tertekan akibat fenomena kemarau basah dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun.

"Produksi garam kita turun menjadi sekitar 283.000 ton, dari tahun sebelumnya yang mencapai 536.000 ton di bulan Desember," kata Lilik saat ditemui di Kantor DKP Jateng..

Menurut Lilik, pada 2026 produksi garam diperkirakan meningkat tajam seiring kondisi yang lebih kering. Suhu diproyeksikan naik sekitar 2 derajat dan masa panen berpotensi membentang panjang sampai November.

Jawa Tengah saat ini menjadi daerah penghasil garam terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Jateng menyumbang sekitar 33 persen dari total produksi garam nasional dengan luas lahan hampir 10.000 hektare dan jumlah petambak mendekati 10.000 orang.

Sentra produksi garam Jateng tersebar di sejumlah wilayah. Di Pantura terdapat Pati, Rembang, Demak, Jepara dan Brebes, sedangkan wilayah pesisir selatan meliputi Purworejo, Kebumen dan Cilacap, serta Kabupaten Grobogan yang memiliki produksi garam di wilayah daratan.

Meski proyeksi produksi meningkat, DKP Jateng mengingatkan persoalan klasik yang kerap muncul ketika panen raya. Melimpahnya pasokan garam dapat membuat harga di tingkat petambak turun karena stok yang tersedia lebih banyak.

Petambak penggarap menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan harga tersebut. Kebutuhan hidup sehari-hari membuat mereka sering terpaksa menjual hasil panen lebih cepat meski harga sedang rendah.

Berbeda dengan petambak penggarap, pemilik modal atau juragan umumnya memiliki gudang untuk menyimpan garam. Mereka dapat menahan stok sampai harga kembali membaik, sehingga memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi harga.

“Kalau produksi melimpah biasanya harga di tingkat petambak akan turun. Ini jadi dilema. Petambak penggarap yang butuh memenuhi kebutuhan harian kerap terpaksa menjual murah hasil panen di awal,” ujar Lilik.

Karena itu, lonjakan produksi garam pada 2026 dinilai perlu diimbangi dengan upaya menjaga stabilitas harga. Bagi petambak, musim kemarau panjang akan benar-benar menjadi berkah jika peningkatan produksi tidak justru diikuti anjloknya harga saat panen raya.

Harga kedelai impor di Kudus alami penurunan meski nilai tukar rupiah tinggi

Minggu, 9 Agustus 2026 20:34 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/641211/harga-kedelai-impor-di-kudus-alami-penurunan-meski-nilai-tukar-rupiah-tinggi>

Kudus (ANTARA) - Harga jual kedelai impor di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada pekan ini mengalami penurunan dari sebelumnya dijual Rp10.800 per kilogram menjadi Rp10.400/kg, meskipun nilai tukar rupiah cukup tinggi.

"Biasanya terjadi sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akan tetapi, sejak Juli 2026 harga jual kedelai impor mencapai Rp10.800/kg, saat ini justru turun terus hingga menjadi Rp10.400/kg," kata Manajer Primer Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Primkopti) Kabupaten Kudus Amar Ma'ruf di Kudus, Jateng, Minggu.

Padahal, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap dolar sempat mencapai Rp18.000, meskipun saat ini turun menjadi Rp17.801.

Untuk stok kedelai impor di gudang, kata dia, melimpah karena mencapai 70-an ton, masih bisa diperbanyak sesuai permintaan pengusaha tahu dan tempe di Kudus.

Meskipun sering berfluktuasi mengikuti perubahan kurs rupiah terhadap mata uang dolar AS, kata dia, pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Kudus juga masih bertahan dengan harga jual sebelumnya.

Para pelaku usaha, kata dia, tidak berani menaikkan harga jual tahu maupun tempe hasil produksinya, karena pelaku usaha lain juga bertahan dengan harga lama.

Bagi pengusaha tahu dan tempe yang membutuhkan kedelai lokal sebagai alternatif, kata dia, saat ini memang sudah ada panen di daerah Kayen, Kabupaten Pati.

"Hanya saja, saya belum memutuskan untuk menambah stok karena kedelai impor masih tersedia melimpah. Kecuali ada permintaan dan kualitas barangnya juga sesuai," ujarnya.

Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sonhaji mengakui harga jual kedelai impor selama ini sering berfluktuasi.

Untuk stok kedelai, menurut dia, selama ini tersedia cukup, sedangkan fluktuasi harganya masih terus dipantau bersama komoditas pokok lainnya guna memastikan daya beli masyarakat masih terjangkau.

OJK Setujui Merger Sejumlah BPR di Jateng, Perkuat Industri dan Pembiayaan UMKM

Minggu, 9 Agustus 2026 08:55 WIB

Penulis : Marnisa Nurdian Saritri, Editor : Gautama

<https://rri.co.id/semarang/ekonomi/keuangan/2637793/ojk-setujui-merger-sejumlah-bpr-di-jateng-perkuat-industri-dan-pembiayaan-umkm>

RRI.CO.ID, Semarang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Jawa Tengah sebagai bagian dari kebijakan konsolidasi industri perbankan. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha BPR sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif, khususnya UMKM.

Penggabungan dilakukan terhadap PT BPR Anugerah Harta Kaliwungu ke dalam PT BPR Klepu Mitra Kencana. Sementara itu, lima BPR Nusamba, yakni BPR Nusamba Adiwerna, Pecangaan, Ampel, Banguntapan, dan Temon, bergabung ke dalam PT BPR Nusamba Cepiring.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat permodalan, tata kelola, dan kapasitas usaha BPR. "Melalui penguatan kelembagaan ini, kami berharap BPR dapat semakin berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan," kata Hidayat melalui siaran pers, Jumat, 7 Agustus 2026.

Menurutnya, persetujuan penggabungan diberikan setelah dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aspek permodalan, tata kelola, manajemen risiko, kinerja keuangan, kesiapan operasional, dan perlindungan konsumen. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses konsolidasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan penggabungan tersebut, seluruh hak dan kewajiban BPR yang menggabungkan diri akan beralih kepada entitas penerima penggabungan. OJK memastikan seluruh nasabah tetap dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan perbankan secara normal tanpa perubahan atas hak maupun kewajibannya.

OJK menilai penguatan kelembagaan melalui konsolidasi akan membuat industri BPR semakin sehat, tangguh, efisien, dan berdaya saing. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan BPR dalam memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, OJK akan terus mendorong kebijakan konsolidasi dan transformasi industri BPR di Jawa Tengah. Upaya tersebut diarahkan agar BPR mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional, terutama melalui perluasan akses pembiayaan bagi UMKM.

Inflasi China Melandai Seiring Redanya Guncangan Harga Minyak

Senin, 10 Agustus 2026 05:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117747/inflasi-china-melandai-seiring-redanya-guncangan-harga-minyak/2>

Bloomberg, China — Inflasi di tingkat produsen China melandai untuk pertama kalinya sejak perang Iran pecah pada akhir Februari, sementara harga konsumen juga mengalami perlambatan. Hal ini menjadi tanda lain bahwa tekanan biaya akibat guncangan harga minyak mulai mereda.

Indeks harga produsen (PPI) naik 3,5% pada Juli dibandingkan setahun sebelumnya, lebih lambat dari perkiraan dan turun dari kenaikan 4,1% pada bulan sebelumnya, berdasarkan data yang diterbitkan Biro Statistik Nasional China pada Minggu. Ini merupakan perlambatan pertama sejak PPI China kembali tumbuh positif pada Maret akibat kenaikan harga minyak, setelah mengalami penurunan selama lebih dari tiga tahun.

Inflasi konsumen melambat menjadi 0,5% dari 1% pada Juni. Indeks harga konsumen inti, yang tidak memasukkan komponen pangan dan energi yang volatil, turun menjadi 0,9% dari 1%.

Indeks Harga Produsen China Melandai untuk Pertama Kalinya sejak Perang Iran Dimulai

China telah keluar dari periode deflasi yang berlangsung cukup lama, tetapi momentum kenaikan harga masih lemah. Lesunya belanja konsumen domestik sejauh ini membatasi kemampuan pabrik untuk meneruskan peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak, cip, dan logam global kepada konsumen.

Akibatnya, terjadi kesenjangan laba antara sektor hulu dan hilir. Industri seperti manufaktur pakaian mengalami penurunan laba yang tajam, sementara sektor lain seperti produsen energi mencatat lonjakan keuntungan.

Dampak ekonomi dari kenaikan harga komoditas global mulai mereda di China. Meskipun harga minyak mentah berfluktuasi tajam pada Juni dan Juli, biaya rata-rata tetap menurun dari puncaknya pada awal tahun ini.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pekan ini bahwa negosiasi antara Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz “terus berjalan.” Teheran mengatakan pihaknya “sangat dekat” dengan kesepakatan bersama Oman mengenai rute transit maritim baru di selat tersebut, meskipun Republik Islam itu kembali mengajukan sejumlah tuntutan yang harus disepakati AS sebelum jalur perairan tersebut dibuka.

Banyak ekonom dalam beberapa tahun terakhir memperingatkan bahwa tekanan deflasi yang terus berlangsung di China dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kondisi tersebut dapat mendorong rumah tangga mengurangi belanja, menekan laba perusahaan, serta menghambat investasi dan perekrutan tenaga kerja.

Perlambatan indikator harga utama dapat kembali memicu kekhawatiran tersebut dengan memberikan bukti tambahan bahwa kembalinya inflasi yang sehat setelah guncangan harga minyak masih membutuhkan waktu cukup lama.

Harga daging babi, yang merupakan bahan pangan pokok China, mengalami penyusutan penurunan secara tahunan. Hal ini menjadi tanda bahwa kelebihan pasokan mulai mereda di industri peternakan babi setelah mengalami kontraksi selama setahun.

Harga jasa pariwisata mengalami penurunan. Belanja domestik di sektor tersebut selama periode liburan musim panas lebih rendah dari perkiraan, menurut laporan media lokal yang mengutip penurunan tarif hotel dan harga tiket pesawat dibandingkan tahun sebelumnya.

BoJ Isyaratkan Potensi Kenaikan Suku Bunga Imbas Risiko Inflasi

Senin, 10 Agustus 2026 08:10 WIB

Yoshiaki Nohara

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117758/boj-isyaratkan-potensi-kenaikan-suku-bunga-imbasi-risiko-inflasi/2>

Bloomberg, Bank of Japan (BOJ) mengisyaratkan meningkatnya risiko inflasi yang lebih tinggi, dengan salah satu anggotanya menyebut kemungkinan percepatan laju kenaikan suku bunga dalam ringkasan pandangan anggota dewan dari pertemuan Juli.

“Dengan inflasi CPI yang mendasari mendekati 2% dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada risiko kenaikan harga dibandingkan sebelumnya, dapat dipertimbangkan bahwa laju kenaikan suku bunga kebijakan akan lebih cepat dari ekspektasi pasar,” kata salah satu dari sembilan anggota dewan, menurut ringkasan pertemuan 30-31 Juli yang dirilis pada Senin.

Dalam pertemuan tersebut, BOJ mempertahankan suku bunga kebijakan di level 1% dan mengisyaratkan kemungkinan menaikannya pada September. BOJ mengatakan akan mencermati dampak pelemahan yen terhadap harga dan pertumbuhan ekonomi. Keputusan tersebut diambil tak lama setelah otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang yen dengan bantuan mitra AS.

Mata uang Jepang melemah ke level terendah dalam 40 tahun terhadap dolar pada bulan lalu, memicu kekhawatiran mengenai inflasi yang didorong kenaikan harga impor di Jepang serta risiko terhadap stabilitas pasar keuangan global.

Hanya satu dari sembilan anggota dewan, Hajime Takata, yang menyerukan kenaikan suku bunga secara berturut-turut pada bulan lalu. Namun, Gubernur Kazuo Ueda secara umum menunjukkan sikap hawkish dalam konferensi pers setelah keputusan tersebut, dengan menekankan bahwa ia melihat risiko kenaikan yang lebih besar terhadap prospek harga.

Ringkasan tersebut tidak mengungkap siapa yang menyampaikan masing-masing pandangan dalam pertemuan tersebut.

Saat BOJ mempertimbangkan waktu dan laju kenaikan suku bunga selanjutnya, bank sentral perlu mencermati dampak sejumlah faktor seperti situasi di Timur Tengah, permintaan terkait AI, dan perkembangan nilai tukar, kata salah satu anggota dalam ringkasan tersebut.

“Dalam melakukan hal tersebut, kondisi saat ini memerlukan perhatian yang semestinya terhadap risiko kenaikan dalam tren harga yang mendasari,” kata anggota tersebut.

BOJ perlu menunjukkan tekad untuk mencegah penyimpangan inflasi ke arah atas ketika lingkungan global memasuki fase kenaikan suku bunga, menurut salah satu anggota dewan BOJ.

BOJ “perlu menerapkan pendekatan yang gesit dalam merespons faktor-faktor seperti perubahan kondisi keuangan luar negeri dan membahas besaran kenaikan suku bunga, alih-alih terpaku pada laju kenaikan suku bunga tertentu,” kata anggota tersebut.

Salah satu anggota dewan BOJ mengatakan bahwa meskipun tingkat suku bunga netral yang tepat tidak dapat ditentukan, BOJ perlu menaikkan suku bunga kebijakan yang saat ini berada di bawah batas bawah kisaran estimasi secara luas, “untuk membangun landasan bagi normalisasi kebijakan moneter dan memastikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan kebijakan.”

BOJ memperkirakan tingkat suku bunga netral berada di kisaran 1,1% hingga 2,5%.

Redam Kenaikan Harga Gula, India Pertimbangkan Pembatasan Tebu untuk Etanol

Senin, 10 Agustus 2026 17:57 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/redam-kenaikan-harga-gula-india-pertimbangkan-pembatasan-tebu-untuk-etanol>

KONTAN.CO.ID - MUMBAI. India sedang mempertimbangkan untuk membatasi jumlah tebu yang digunakan untuk etanol pada musim yang dimulai bulan Oktober mendatang.

Mengutip Reuters, Senin (10/8/2026), menurut dua sumber pemerintah dan sumber industri, langkah ini bertujuan meningkatkan produksi gula dan meredam harga yang telah mencapai rekor tertinggi.

Curah hujan yang rendah di Maharashtra dan Karnataka—negara bagian penghasil tebu terbesar di India—telah menimbulkan kekhawatiran mengenai produksi gula tahun depan, ujar sumber-sumber tersebut. Mereka meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembahasan ini belum dipublikasikan.

Mereka mengatakan bahwa memprioritaskan pasokan gula dibandingkan etanol dapat membantu India menghindari impor gula dengan cara meningkatkan pasokan domestik di tengah penurunan produksi; keputusan mengenai masalah ini diperkirakan akan diambil pada akhir bulan depan.

Juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Sekitar 3 Juta Ton Gula Jadi Taruhan

Pabrik-pabrik gula mengalihkan sekitar 3 juta metrik ton gula—atau sekitar 10% dari total produksi—untuk pembuatan etanol selama tahun berjalan hingga akhir September.

Membatasi pengalihan tersebut pada musim mendatang dapat menambah volume pasokan gula domestik dalam jumlah serupa, sehingga mengimbangi perkiraan penurunan produksi akibat curah hujan yang minim di negara-negara bagian penghasil tebu terbesar, kata sumber-sumber tersebut.

Harga gula di India telah naik sekitar 10% dalam sebulan terakhir hingga mencapai rekor tertinggi. Harga diperkirakan akan tetap tinggi setidaknya selama tiga bulan ke depan seiring dengan menipisnya pasokan dan meningkatnya permintaan selama musim festival di India—periode saat mobilitas masyarakat meningkat—demikian dilaporkan Reuters pekan lalu.

Agar program pencampuran 20% etanol ke dalam bensin tetap berjalan sesuai rencana, pemerintah perlu meningkatkan penggunaan jagung dan beras untuk produksi etanol guna mengimbangi penurunan pasokan dari tebu. Stok jagung dan beras saat ini melimpah.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini secara langsung mengatakan bahwa pabrik-pabrik akan diminta untuk menghentikan produksi etanol dari nira tebu dan molase *B-heavy*—produk sampingan dengan kandungan gula yang relatif tinggi.

Sebagai gantinya, pabrik-pabrik tersebut akan diizinkan memproduksi etanol terutama dari molase C-heavy, yaitu produk sampingan yang tersisa setelah sebagian besar gula diekstraksi.

Alokasi etanol bagi industri gula untuk tahun pemasaran yang dimulai pada bulan November diperkirakan akan ditetapkan sebelum musim dimulai; setelah itu, perusahaan pengecer bahan bakar milik negara akan membuka tender untuk pembelian etanol, menurut sumber-sumber tersebut.

Pemerintah India telah melarang ekspor gula dan bulan lalu memberlakukan pembatasan terhadap jumlah stok yang boleh disimpan oleh para pedagang.

Pembatasan baru yang sedang dipertimbangkan ini diperkirakan tidak akan berdampak buruk secara signifikan terhadap industri gula, karena pabrik-pabrik diprediksi akan memperoleh keuntungan lebih besar dari produksi dan penjualan gula dibandingkan dengan mengalihkan tebu untuk pembuatan etanol, demikian ungkap para pejabat industri.

Yuan Stabil, Namun Diproyeksi Akan Menguat Berkat Kenaikan Ekspor

Senin, 10 Agustus 2026 11:03 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-stabil-namun-diproyeksi-akan-menguat-berkat-kenaikan-ekspor>

KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Yuan Cina bergerak stabil pada Senin (10/8/2026), bertahan di dekat level terkuatnya dalam 3,5 tahun terakhir terhadap dolar yang sedang melemah, sementara para pelaku pasar menantikan petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve dan kondisi ekonomi China.

Para analis menyatakan bahwa penguatan bertahap lebih lanjut pada nilai tukar yuan diperlukan untuk membantu Beijing menghindari kembali munculnya ketegangan perdagangan, mengingat ekspor yang kuat terus memperlebar surplus perdagangan China.

"Tanpa langkah tersebut, surplus besar Tiongkok dapat memicu respons yang lebih proteksionis dari mitra dagang, yang pada akhirnya mengancam akses Tiongkok ke pasar luar negeri serta kinerja

ekspornya yang kuat," demikian disampaikan Goldman Sachs dalam sebuah catatan analisis seperti dilansir Reuters, Senin (10/8/2026).

Pada hari Senin, yuan di pasar domestik (onshore) diperdagangkan di kisaran 6,74 per dolar pada sesi pagi, tidak banyak berubah dibandingkan penutupan sesi sebelumnya.

Nilai tukar sempat menyentuh level 6,74400 per dolar, yang merupakan level terkuat sejak Februari 2023.

Di pasar valuta asing secara umum, dolar bergerak di dekat level terendah dalam dua bulan terhadap mata uang utama lainnya, seiring investor menantikan data inflasi minggu ini untuk mendapatkan petunjuk mengenai arah kebijakan The Fed.

"Spekulasi mengenai kenaikan suku bunga telah berkurang, namun belum sepenuhnya hilang," ungkap Huatai Futures dalam sebuah laporan.

Ia seraya menambahkan bahwa data inflasi AS pekan ini akan menjadi kunci dalam membentuk ekspektasi pasar.

Terkait mata uang yuan, "kekuatannya mencerminkan pelemahan dolar AS belakangan ini sekaligus kinerja ekspor yang kuat."

Ekspor China melonjak 24% pada bulan Juli, melampaui perkiraan, seiring dengan lonjakan permintaan barang-barang berteknologi tinggi yang didorong oleh pesatnya pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) global.

Para pelaku pasar juga mencermati serangkaian indikator ekonomi China bulan Juli untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kekuatan ekonominya.

"Data ekonomi bulan Juli sangatlah krusial," ujar Nanhua Futures.

"Jika indikator-indikator tersebut menunjukkan penurunan secara luas, kebijakan stimulus baru diperkirakan akan muncul menjelang akhir September."

Dalam perspektif yang lebih luas, Goldman menyatakan bahwa kinerja ekspor yang kuat dan nilai yuan yang saat ini berada di bawah nilai wajarnya (undervalued) mengindikasikan potensi penguatan mata uang China tersebut secara bertahap di masa mendatang.

Sebelum pembukaan pasar, bank sentral China menetapkan kurs acuan yuan di angka 6,7884 per dolar AS, yang merupakan level terkuat dalam kurun waktu tiga setengah tahun terakhir.

Jepang Catat Defisit Transaksi Berjalan Pertama dalam 17 Bulan

Senin, 10 Agustus 2026 08:59 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/jepang-catat-defisit-transaksi-berjalan-pertama-dalam-17-bulan>

KONTAN.CO.ID - Jepang mencatat defisit transaksi berjalan pada Juni 2026, menjadi yang pertama dalam 17 bulan.

Kondisi tersebut terjadi setelah investasi asing yang kuat di pasar domestik meningkatkan pembayaran dividen kepada investor luar negeri.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang yang dirilis Senin (10/8/2026), defisit transaksi berjalan Jepang mencapai 92,3 miliar yen atau sekitar US\$ 584,51 juta pada Juni.

Angka tersebut berbanding terbalik dengan surplus 1,28 triliun yen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian Juni juga jauh di bawah proyeksi ekonom yang memperkirakan Jepang masih mencatat surplus sebesar 1,51 triliun yen.

Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh menyusutnya surplus pendapatan primer, yang berasal dari investasi surat berharga dan investasi langsung di luar negeri.

Komponen ini biasanya menjadi penopang utama surplus transaksi berjalan Jepang.

Pada Juni, surplus pendapatan primer menyusut 74% menjadi 380 miliar yen. Penurunan tersebut terjadi karena meningkatnya pembayaran dividen dari perusahaan-perusahaan Jepang kepada investor asing.

Selain itu, kenaikan biaya impor minyak turut mendorong Jepang mencatat defisit perdagangan pada Juni. Kondisi tersebut kemudian ikut menyeret transaksi berjalan Jepang ke zona defisit.

Meski demikian, kinerja transaksi berjalan Jepang sepanjang paruh pertama 2026 masih menunjukkan penguatan.

Pada periode Januari-Juni 2026, surplus transaksi berjalan Jepang meningkat 22,5% menjadi rekor 17,4 triliun yen.

Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh surplus perdagangan yang didorong kuatnya ekspor semikonduktor untuk pusat data kecerdasan buatan (AI).

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Jepang menghadapi tekanan dari meningkatnya pembayaran kepada investor asing dan biaya impor energi, kinerja ekspor, terutama produk yang berkaitan dengan industri AI, masih menjadi penopang utama posisi eksternal ekonomi Jepang.

Dolar AS Tertekan Dekati Level Terendah Dua Bulan Senin (10/8), Jelang Data Inflasi

Senin, 10 Agustus 2026 08:52 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-as-tertekan-dekati-level-terendah-dua-bulan-senin-108-jelang-data-inflasi>

KONTAN.CO.ID - Dolar Amerika Serikat (AS) bergerak di dekat level terendah dalam dua bulan terhadap sejumlah mata uang utama pada Senin (10/8/2026).

Pelaku pasar menanti data inflasi AS yang akan menjadi petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Euro menguat tipis ke US\$ 1,1558 dan berada di dekat level terkuat sejak pertengahan Juni. Sementara itu, poundsterling cenderung stabil di US\$ 1,3490, tidak jauh dari level tertinggi dalam lima pekan.

Di sisi lain, yen bertahan di sekitar 157,90 per dolar AS. Mata uang Jepang tersebut telah mengurangi sebagian penguatan yang sebelumnya didorong intervensi, tetapi masih jauh lebih kuat dibandingkan level sekitar 164 yen per dolar AS yang dicapai pada akhir Juli dan menjadi level terendah dalam beberapa dekade.

Indeks dolar AS, yang mengukur kinerja greenback terhadap enam mata uang utama, relatif tidak berubah di level 99,6. Posisi tersebut berada di dekat level terendah sejak 2 Juni.

Tekanan terhadap dolar AS meningkat setelah data ketenagakerjaan AS yang dirilis Jumat (7/8) menunjukkan ekonomi AS secara tak terduga kehilangan lapangan pekerjaan pada Juli.

Selain itu, pertumbuhan lapangan kerja pada dua bulan sebelumnya direvisi turun secara signifikan.

Data tersebut mendorong pasar mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS juga turun setelah laporan tenaga kerja tersebut meredam spekulasi kenaikan suku bunga. Imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun terakhir berada di sekitar 4,637%.

Di pasar berjangka, probabilitas kenaikan suku bunga The Fed pada September kini turun menjadi sekitar 44%, dari 67% sepekan sebelumnya.

"Indikasi pelemahan pasar tenaga kerja AS telah menurunkan ekspektasi suku bunga riil dan memperpanjang penurunan dolar, tetapi belum menunjukkan gambaran pelonggaran yang sepenuhnya jelas," ujar Geoff Yu, Senior EMEA Market Strategist BNY.

Menurut Yu, persepsi pasar terhadap data inflasi AS akan menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan mata uang sepanjang pekan ini.

Pelaku pasar memperkirakan inflasi inti atau core Consumer Price Index (CPI) AS meningkat 0,2% secara bulanan pada Juli.

Secara tahunan, inflasi inti diperkirakan naik menjadi 2,5%, melanjutkan tren perlambatan secara bertahap dari 2,6% pada Juni.

Selain CPI, pasar juga akan mencermati data Producer Price Index (PPI) yang dijadwalkan dirilis Kamis (13/8), serta data penjualan ritel pada Jumat (14/8).

Rodrigo Catril, Senior FX Strategist NAB mengatakan, The Fed kemungkinan masih akan mengambil sikap menunggu untuk melihat perkembangan inflasi dan kondisi ekonomi AS.

"Meskipun terdapat banyak dinamika inflasi, The Fed untuk saat ini akan tetap berada di posisi menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya," kata Catril.

Sementara itu, harga minyak mentah bergerak menguat pada Senin di tengah ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz. Harga Brent naik sekitar 1,4% menjadi US\$ 85 per barel.

Iran sebelumnya mengatakan kesepakatan dengan Oman untuk menentukan jalur pelayaran baru melalui Selat Hormuz telah memasuki tahap akhir.

Namun, Iran menegaskan Amerika Serikat masih harus memenuhi sejumlah tuntutan sebelum jalur strategis tersebut kembali dibuka.

Di kawasan Asia, dolar Selandia Baru dan dolar Australia masing-masing melemah 0,1% menjadi US\$ 0,7062 dan US\$ 0,5889.

Pelaku pasar juga menantikan keputusan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) pada Selasa (11/8). Bank sentral Australia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,35% hingga akhir tahun.

Bos Jepang Minta Stabilitas Yen, Pelemahan Mata Uang Picu Tekanan Biaya Impor

Senin, 10 Agustus 2026 08:29 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bos-jepang-minta-stabilitas-yen-pelemahan-mata-uang-picu-tekanan-biaya-impor>

KONTAN.CO.ID - Para eksekutif perusahaan Jepang semakin memperingatkan risiko volatilitas nilai tukar dan pelemahan yen yang berkepanjangan terhadap perekonomian.

Kondisi tersebut menambah kekhawatiran terkait tekanan biaya impor yang menjadi salah satu alasan Jepang dan Amerika Serikat (AS) melakukan intervensi valuta asing bersama pekan lalu.

Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif yen yang lemah semakin dirasakan oleh dunia usaha Jepang, termasuk perusahaan eksportir yang selama ini mendapatkan keuntungan dari pelemahan mata uang domestik di pasar global.

Pada Juli 2026, yen sempat melemah hingga hampir 164 yen per dolar AS, level terendah dalam 40 tahun. Kondisi tersebut mendorong Jepang dan AS melakukan intervensi bersama untuk menopang yen. Setelah intervensi, yen menguat sekitar 5%.

"Masalah yang memengaruhi perekonomian Jepang secara keseluruhan juga memengaruhi kami," kata Chief Financial Officer Mitsubishi Electric Kenichiro Fujimoto kepada Reuters dalam wawancara pekan lalu.

"Yen yang lemah tidak selalu berarti semuanya berjalan baik," ujarnya.

Pelemahan yen meningkatkan biaya energi, bahan baku dan pangan yang diimpor Jepang. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi domestik dan mengganggu upaya Jepang untuk keluar secara bertahap dari periode deflasi selama beberapa dekade.

Eksportir Tak Selalu Diuntungkan

Ketua Japan External Trade Organization (JETRO) Norihiko Ishiguro mengatakan pelemahan yen memang memberikan keuntungan bagi ekspor, tetapi dampaknya tidak selalu positif bagi perusahaan Jepang.

"Yen yang lebih lemah memang memiliki keuntungan nyata bagi ekspor, tetapi perusahaan Jepang mengimpor hampir seluruh bahan bakunya," kata Ishiguro dalam konferensi pers pada Juli.

Menurut dia, pada tingkat nilai tukar tertentu, biaya impor justru meningkat sehingga eksportir tidak selalu menjadi pihak yang diuntungkan dari pelemahan yen.

Pergerakan nilai tukar yang tajam juga menyulitkan perusahaan dalam menyusun proyeksi laba dan mengambil keputusan investasi, terutama bagi perusahaan yang memiliki operasi global.

Makoto Tanaka, CFO Mitsui & Co mengatakan, perusahaan menginginkan stabilitas nilai tukar dan penurunan volatilitas.

"Lebih dari segalanya, saya ingin pasar stabil dan volatilitas menurun," kata Tanaka.

Mitsui & Co sendiri mencatat laba kuartal pertama yang mencapai rekor pada pekan ini, salah satunya terbantu pelemahan yen yang meningkatkan pendapatan perusahaan dari luar negeri.

Sementara itu, CFO Mitsubishi Corp Yoshihiro Shimazu mengatakan volatilitas nilai tukar yang tinggi telah memberikan dampak signifikan terhadap bisnis perusahaan.

"Kami benar-benar merasakan dampak volatilitas yang sangat tinggi dan akan merevisi asumsi nilai tukar kami saat ini sebesar 150 yen per dolar sesuai kebutuhan," ujarnya.

Level Yen 120-124 per Dolar Dianggap Ideal

Survei JETRO yang diterbitkan pada Maret menunjukkan bahwa nilai tukar 120-124 yen per dolar AS menjadi level yang paling diinginkan perusahaan Jepang. Kisaran tersebut dipilih oleh hampir seperlima perusahaan yang disurvei.

Sementara itu, hanya sekitar 11% perusahaan yang menginginkan nilai tukar di atas 150 yen per dolar AS.

Namun, harapan yen kembali menguat ke level tersebut mulai memudar seiring kondisi fundamental Jepang yang masih menghadapi sejumlah tantangan.

"Mempertimbangkan fundamental Jepang dan kondisi neraca perdagangan yang belum pulih, mungkin kita tidak akan melihat kembali nilai tukar 120 hingga 130 yen per dolar," kata Fujimoto.

Rupiah dan Dolar Taiwan Jadi Mata Uang Asia dengan Penguatan Terbesar Senin (10/8)

Senin, 10 Agustus 2026 09:39 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto K

<https://internasional.kontan.co.id/news/rupiah-dan-dolar-taiwan-jadi-mata-uang-asia-dengan-penguatan-terbesar>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar rupiah dan dolar Taiwan menjadi dua mata uang Asia yang mencatat penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (10/8), di tengah pergerakan mayoritas mata uang regional yang cenderung terbatas.

Mengutip Reuters, pada pukul 02.13 GMT, rupiah berada di level Rp17.820 per dolar AS, menguat 0,36% dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di Rp17.885 per dolar AS.

Dolar Taiwan juga menguat 0,18% menjadi 32,230 per dolar AS dari sebelumnya 32,288.

Baht Thailand naik 0,09% menjadi 33,00 per dolar AS. Peso Filipina menguat 0,07% menjadi 60,780, sementara ringgit Malaysia naik tipis 0,05% ke level 4,086 per dolar AS.

Di sisi lain, yen Jepang melemah 0,32% menjadi 158,280 per dolar AS. Won Korea Selatan turun 0,47% ke level 1.416,20 per dolar AS.

Dolar Singapura melemah 0,10% menjadi 1,279 per dolar AS, sedangkan yuan China turun tipis 0,01% ke level 6,746.

Rupiah India menjadi satu-satunya mata uang yang relatif stabil dengan posisi 95,208 per dolar AS.

Baca Juga: Bursa Korea Selatan Naik Senin (10/8), Saham Chip Samsung dan SK Hynix Jadi Penopang

Rupiah Masih Tertekan Sepanjang 2026

Meski mencatat penguatan pada perdagangan Senin, rupiah masih menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terbesar sepanjang tahun berjalan.

Sejak akhir 2025, rupiah telah melemah 6,45% terhadap dolar AS.

Posisi tersebut lebih buruk dibandingkan yen Jepang yang turun 1,03%, ringgit Malaysia yang melemah 0,73%, serta won Korea Selatan yang justru menguat 1,65%.

Rupee India menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terbesar dalam periode tersebut, yakni 5,61%, disusul baht Thailand yang turun 4,70% dan peso Filipina yang melemah 3,26%.

Sementara itu, yuan China menjadi salah satu mata uang yang mencatat penguatan terhadap dolar AS sejak awal 2026 dengan kenaikan 3,58%. Dolar Singapura juga menguat 0,48%.

Dolar Taiwan mencatat pelemahan 2,46% sepanjang tahun berjalan, sedangkan rupiah masih menjadi salah satu mata uang regional yang berada di bawah tekanan cukup besar.

Pergerakan mata uang Asia pada awal pekan berlangsung di tengah perhatian investor terhadap arah kebijakan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini.

Kemenkeu: Pembiayaan Swasta Perlu Demi Penuhi 91% Investasi 2027

Senin, 10 Agustus 2026 21:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117866/kemenkeu-pembiayaan-swasta-perlu-demi-penuhi-91-investasi-2027/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Junda Agung memproyeksikan kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 mencapai Rp8.705 triliun. Jumlah ini jauh di atas gabungan pembiayaan APBN yang hanya sekitar Rp459 triliun, maupun entitas BUMN-Danantara yang diperkirakan berkontribusi sekitar Rp330 triliun.

Dengan kondisi tersebut, APBN tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan investasi Indonesia. Alhasil dibutuhkan berbagai sumber pembiayaan lainnya. Makanya pemerintah berharap, porsi pembiayaan investasi tahun depan mencapai Rp7.973 triliun atau mencakup 91% dapat dipenuhi oleh pihak swasta.

"APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp459 triliun, sebagian lagi oleh BUMN termasuk Danantara sebesar Rp330 triliun. Sisanya, sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta, yaitu 7.973 triliun atau sekitar 91% berasal apakah itu dari bank, pembiayaan lain, dan termasuk di sini adalah pasar modal," kata Junda dalam acara Peluncuran ETF Emas, Senin (10/8/2026).

Junda mengungkapkan pasar modal memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi nasional. Pasar modal diyakini dapat menjadi penghubung antara kebutuhan pendanaan perusahaan dengan dana yang dimiliki masyarakat dan investor.

Selain itu, Junda menilai penguatan pasar modal Indonesia perlu terus dilakukan agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Junda menekankan pentingnya membangun pasar modal yang memiliki kedalaman dan likuiditas yang memadai, serta memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi.

"Pasar modal hadir sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan tentu saja yang trustable dan kredibel

sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi," tuturnya.

APBN 2026 On Track, Penerimaan Tumbuh 24%

Dari sisi fiskal, Junda menyampaikan hingga kini kondisi APBN masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target, meskipun perekonomian global menghadapi ketidakpastian.

Dia menambahkan, penerimaan negara tumbuh sekitar 24%, sementara belanja pemerintah turut menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dalam sepanjang semester pertama 2026. Junda juga memastikan, defisit fiskal masih berada dalam batas yang terkendali.

"Kami di Kementerian Keuangan bekerja keras untuk menjaga kesehatan APBN sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kehati-hatian dalam mengelola posisi fiskal di bawah defisit di bawah 3%," katanya.

Meski demikian, Junda kembali mengingatkan, APBN tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pembiayaan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan nasional.

Junda menegaskan bahwa kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur, energi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga hilirisasi, membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal pemerintah.

Rupiah Menguat Ungguli Mata Uang Asia

Senin, 10 Agustus 2026 09:24 WIB

<https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/117770/rupiah-menguat-ungguli-mata-uang-asia/2>

Karyawan merapihkan mata uang dolar AS dan rupiah di tempat penukaran mata uang di Jakarta, Senin (27/7/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Karyawan merapihkan mata uang dolar AS dan rupiah di tempat penukaran mata uang di Jakarta, Senin (27/7/2026). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah membuka perdagangan pekan ini dengan penguatan 0,26% ke Rp17.844/US\$, meski harga minyak mentah dunia kembali naik ke level US\$84/barel.

Tekanan harga minyak membawa pengaruh berbeda pada sebagian mata uang Asia pagi ini. Rupiah menguat bersama dolar Taiwan, peso Filipina, baht Thailand, dan ringgit Malaysia. Sebaliknya, won Korea Selatan melemah bersama yen Jepang, dolar Singapura, dan yuan offshore.

Penguatan sebagian mata uang kawasan tertopang oleh strategi bank sentral negara yang semakin mencoba memperkuat posisi mata uangnya tanpa membuat cadangan devisa tergerus.

India, misalnya, disebut menarik hampir US\$40 miliar dari diaspora lewat deposito dolar berbunga tinggi, dan strategi ini terbukti membantu pemulihan rupee dari posisi terendahnya pada Mei.

Sementara Korea Selatan beberapa waktu lalu dikabarkan mendorong percepatan repatriasi dolar korporasi, dan membuat won mencatat penguatan bulanan terbesar sejak 2022.

Begitu juga dengan Indonesia yang telah menarik senilai US\$1,6 miliar ke pasar obligasi dalam dua bulan terakhir, dengan memberikan insentif kepada investor.

Namun begitu, secara fundamental, posisi rupiah masih terbebani oleh sentimen dari data-data ekonomi domestiknya, dengan defisit neraca dagang yang masih tercatat US\$450 juta, lebih baik dari posisi

Mei yang mencatat defisit US\$1,61 miliar. Hari ini pasar akan mencermati perkembangan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).

IKK sempat mengalami tren pelemahan, meski masih tertahan di atas level 100, yang masih berada dalam zona optimis. IKK Indonesia sempat berada di level 120,9 pada Mei, lalu turun 117,8 pada Juni.

Investasi Pariwisata Tembus Rp39,68 T, Tumbuh 16,64% dari 2025

Senin, 10 Agustus 2026 14:10 WIB

Dinda Decembria

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117808/investasi-pariwisata-tembus-rp39-68-t-tumbuh-16-64-dari-2025/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Investasi di sektor pariwisata mencapai Rp39,68 triliun pada periode berjalan hingga 2026, tumbuh 16,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi tersebut terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp12,19 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp27,48 triliun.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan realisasi PMA tumbuh 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, investasi dalam negeri tumbuh 9,39%.

Menurut dia, peningkatan investasi tersebut tidak hanya mendorong pembangunan fasilitas pariwisata, tetapi juga memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian daerah dan nasional.

"Investasi pariwisata tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai destinasi," kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, Senin (10/8).

Peningkatan investasi tersebut berjalan seiring dengan aktivitas pariwisata yang semakin meningkat. Hal ini antara lain tercermin dari tingkat okupansi hotel yang mencapai 48,20%, naik 2,48 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menpar Widiyanti mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional. Pada kuartal II-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29%.

Sejumlah lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata juga mencatatkan pertumbuhan. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 10,60%, transportasi dan pergudangan tumbuh 5,65%, jasa perusahaan tumbuh 5,08%, serta jasa lainnya tumbuh 6,36%.

Secara keseluruhan, sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 0,86 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Angka-angka tersebut menunjukkan bagaimana perjalanan wisata mampu menggerakkan banyak sektor sekaligus," ujarnya.

BPS: Harga Daging Ayam Naik di 188 Wilayah

Senin, 10 Agustus 2026 19:30 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117861/bps-harga-daging-ayam-naik-di-188-wilayah/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga daging ayam ras mulai terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data terakhir, kenaikan harga sudah terjadi di 188 dari total 514 kabupaten dan kota.

"Kalau kita lihat jumlah kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan IPH [Indeks Perkembangan Harga] daging ayam ras sudah ada 188 kota yang mengalami kenaikan," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rakor Inflasi Nasional, Senin (10/8/2026).

Kendati demikian, dia menyatakan secara rata-rata nasional, harga daging ayam ras masih berada di kisaran Rp39.712 per kilogram (kg) atau berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) konsumen yakni Rp40.000 per kg.

Namun, ia tetap meminta pemerintah untuk mewaspadai tren kenaikan harga ayam ras karena kenaikan yang terus berlanjut berpotensi mendorong harga nasional maupun daerah melewati HAP.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan daerah Bangka Selatan. Perubahan IPH daging ayam ras di wilayah tersebut tercatat mencapai 34,58%. Namun, level harganya masih berada sekitar 3% di bawah HAP.

Sementara itu, Kota Binjai mencatat kenaikan IPH sebesar 29,78%. Di wilayah tersebut, harga daging ayam ras bahkan sudah sekitar 5% di atas HAP.

"Begitu juga untuk kabupaten Kepahiang di mana perubahan IPHnya sudah 21,34% dan harganya sudah 20% di atas HAP artinya ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena dia sudah di atas HAP dan tingkat kenaikan harga IPHnya ini sudah di atas 15%," ujar dia.

Sebagai catatan, BPS juga mencatat pada minggu pertama Agustus 2026 sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan IPHG dibandingkan bulan sebelumnya, sementara 21 provinsi dinyatakan mengalami penurunan.

Sedangkan komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 17 provinsi adalah daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai rawit merah.

Harga Pangan Awal Pekan: Beras hingga Cabai Kompak Naik

Senin, 10 Agustus 2026 09:20 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117767/harga-pangan-awal-pekan-beras-hingga-cabai-kompak-naik/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Hampir seluruh komoditas bahan pangan mengalami kenaikan pada awal pekan ini, Senin (10/8/2026). Beras hingga cabai juga masih menjadi salah satu komoditas yang terpantau naik sebagaimana terjadi pada perdagangan hari sebelumnya.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia (BI) pukul 08.22 WIB seluruh komoditas beras mengalami kenaikan harga. Untuk beras kualitas bawah

I dan beras kualitas bawah II masing-masing mengalami kenaikan harga yang sama yakni 0,34% menjadi Rp14.800 per Kilogram (kg) dan Rp14.600 per Kg.

Begitupun pada kualitas beras medium I dan II yang mengalami kenaikan rata-rata secara nasional menjadi Rp16.450 per kg atau naik 0,3% serta Rp16.250 per kg atau naik 0,31%.

Sementara beras kualitas super I juga naik hingga 0,28% menjadi Rp17.750 per kg dan beras kualitas super II kini menjadi Rp17.200 per kg atau naik 0,29%.

Adapun kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang naik hingga Rp1.550 per kg atau 2,67% menjadi Rp59.650 per kg, disusul cabai merah besar yang juga naik hingga 1,73% menjadi Rp49.900 per kg. Cabai merah keriting dan cabai rawit hijau kini secara rata-rata nasional berada pada harga Rp50.400 per kg dan Rp52.600 per kg atau masing-masing naik 1% juga 0,57%.

Di sisi lain, terdapat sejumlah bahan pangan yang mengalami penurunan harga dan beberapa komoditas lainnya masih bertahan pada level harga sebelumnya.

Pertama, bawang merah ukuran sedang kini turun harga 1,49% menjadi Rp39.550 per kg. Bawang putih ukuran sedang juga turun harga menjadi Rp41.050 per kg atau turun 1,32%. Daging ayam ras segar juga telur ayam ras segar juga secara rata-rata nasional turun 0,25% dan 0,17% menjadi Rp40.0450 per kg serta Rp29.450 per kg.

Harga pangan lainnya yang naik harga yakni daging sapi kualitas 1 yang naik 0,4% menjadi Rp151.750 per kg dan daging sapi kualitas 2 juga naik 0,63% menjadi Rp143.050 per kg. Gula pasir lokal juga kini menjadi Rp19.150 per kg atau naik 0,26%. Minyak goreng kemasan bermerk 1 dan bermerk 2 juga masing-masing naik harga masing-masing sebesar Rp24.450 per kg dan Rp23.500 per kg.

Sedangkan gula pasir kualitas premium dan minyak goreng curah justru tetap berada pada rata-rata harga nasional yakni Rp20.300 per kg serta Rp20.450 per kg.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi inflasi pangan nasional saat ini masih terkendali dengan baik, seiring langkah-langkah konkret yang terus diperkuat pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga, khususnya komoditas bawang putih yang belakangan menjadi sorotan.

Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Inflasi pangan saat ini masih dalam kondisi yang baik dan tertangani dengan baik. Namun pengendaliannya tidak cukup hanya dengan menahan kenaikan harga di tingkat konsumen, tetapi juga harus mampu melindungi harga di tingkat produsen agar petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang wajar," ujar Hermawan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/8/2026)

Secara umum, terkendalinya inflasi pangan juga ditopang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang deflasi. Komoditas yang menjadi penyumbang utama deflasi tersebut di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat.

Penempatan SAL di Himbara Diharapkan Bisa Dorong Kredit UMKM dan Konsumsi

Senin, 10 Agustus 2026 22:04 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://nasional.kontan.co.id/news/penempatan-sal-di-himbara-diharapkan-bisa-dorong-kredit-umkm-dan-konsumsi>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penempatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan tidak hanya mempertebal likuiditas perbankan, tetapi juga mendorong penyaluran kredit ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kredit konsumsi.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, tambahan likuiditas dari penempatan SAL seharusnya dapat memperkuat fungsi intermediasi perbankan sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

"Harapannya tentunya penempatan SAL ini bisa mendorong ataupun mendukung ya bukan hanya sekadar menjaga likuiditas perbankan, khususnya perbankan Himbara, tapi juga bisa berdampak positif bagi perekonomian," ujar Josua dalam agenda PIER Economic Review Kuartal II-2026, Senin (10/8/2026).

Untuk diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana SAL sebesar Rp 381 triliun di Himbara untuk mempertebal likuiditas perbankan. Pemerintah juga menyiapkan tambahan sekitar Rp 70 triliun apabila masih dibutuhkan.

Menurut Josua, dana tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat intermediasi perbankan kepada sektor-sektor yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian. Selain UMKM, ia menilai kredit bagi ekonomi kerakyatan dan masyarakat kelas menengah juga perlu menjadi sasaran penyaluran.

Josua menyoroti kondisi penyaluran kredit perbankan yang saat ini masih didominasi oleh kredit korporasi. Sementara itu, penyaluran kepada UMKM dan kredit konsumsi dinilai masih perlu diperkuat.

"Karena yang kita lihat saat ini adalah penempatan SAL di bank Himbara, pada kenyataannya penyaluran kredit perbankan masih didominasi oleh kredit korporasi, bukan kredit UMKM ataupun kredit konsumsi," katanya.

Karena itu, Josua menilai perlu ada pemantauan terhadap penyaluran dana SAL agar tambahan likuiditas tersebut benar-benar masuk ke sektor yang dituju. Menurutnya, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Kementerian Keuangan perlu melakukan pengawasan terhadap efektivitas penempatan dana tersebut.

"Ini yang harusnya dimonitor secara closely oleh BI dan OJK ataupun oleh Kementerian Keuangan sendiri agar tadi penempatan dana SAL ini bisa lebih tepat sasaran," jelas Josua.

Lebih lanjut Josua menyebut, keberhasilan kebijakan penempatan SAL tidak cukup hanya dilihat dari meningkatnya likuiditas perbankan. Dampak terhadap perekonomian juga bergantung pada kemampuan bank menyalurkan likuiditas tersebut kepada sektor produktif dan masyarakat.

Dengan demikian, penempatan SAL diharapkan dapat memberikan efek lanjutan terhadap aktivitas ekonomi, termasuk melalui peningkatan pembiayaan UMKM dan kredit konsumsi.

"Ujung-ujungnya kita berharap bahwa apapun kebijakan dari pemerintah ini agar bisa tepat sasaran," pungkas Josua.

Keyakinan Konsumen Turun, Lampu Kuning bagi Pelemahan Daya Beli

Senin, 10 Agustus 2026 17:15 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/keyakinan-konsumen-turun-lampu-kuning-bagi-pelemahan-daya-beli>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional pada Juli 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, tingkat keyakinan masyarakat masih bertahan di level optimistis.

Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juli 2026 yang berada pada level optimistis (indeks >100) sebesar 116,8, lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 117,8.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menilai, penurunan keyakinan konsumen pada Juli 2026 menurut saya belum menunjukkan pelemahan konsumsi yang akut, tetapi merupakan sinyal peringatan bahwa ketahanan keuangan rumah tangga mulai menipis.

Adapun IKK pada Juli 2026 turun dari 117,8 menjadi 116,8. Penurunan juga terjadi pada persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini yang turun dari 109,2 menjadi 107,9 serta ekspektasi enam bulan ke depan yang turun dari 126,4 menjadi 125,7.

Meski demikian, seluruh indeks tersebut masih berada di atas level 100 yang menunjukkan konsumen masih berada dalam zona optimistis. Namun, menurut Josua arah penurunan perlu diperhatikan karena terjadi baik pada persepsi kondisi saat ini maupun ekspektasi ke depan.

Baca Juga: Survei BI: Konsumen Menengah Atas Hati-Hati, Mulai Perbanyak Cicilan Utang “Tetapi arah penurunannya perlu diperhatikan karena terjadi pada kondisi saat ini sekaligus harapan ke depan. Bahkan persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan pekerjaan, dan kemampuan membeli barang tahan lama semuanya menurun pada Juli,” tutur Josua kepada Kontan, Senin (10/8/2026).

Menurut Josua, terdapat koreksi pada data penggunaan pendapatan masyarakat. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi justru turun dari 73% pada Juni menjadi 72,7% pada Juli 2026.

Di sisi lain, porsi pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan meningkat dari 10% menjadi 10,5%. Sementara itu, porsi pendapatan yang ditabung turun dari 17% menjadi 16,8%.

Artinya, peningkatan beban cicilan sebesar 0,5 poin persentase tersebut mengambil ruang dari konsumsi sekaligus tabungan rumah tangga.

"Yang lebih penting lagi, kenaikan porsi cicilan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Jadi persoalannya bukan sekadar masyarakat menjadi lebih hemat, melainkan semakin besarnya bagian pendapatan yang sudah terikat untuk membayar kewajiban masa lalu," jelasnya.

Menurut Josua, kondisi tersebut membuat ruang rumah tangga untuk melakukan belanja baru sekaligus membentuk tabungan menjadi semakin terbatas. Ia melihat terdapat sejumlah faktor yang kemungkinan menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, terjadi normalisasi setelah tingginya belanja pada awal tahun.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat melambat dari 5,52% secara tahunan pada kuartal I 2026 menjadi 5,06% pada kuartal II 2026. Perlambatan terutama terjadi pada konsumsi pakaian, transportasi, komunikasi, restoran, dan hotel.

Kedua, tekanan terhadap rumah tangga dinilai bukan terutama berasal dari inflasi umum. Pasalnya, inflasi Juli 2026 tercatat 2,88% secara tahunan dan terjadi penurunan harga secara bulanan. J

osua menilai tekanan justru lebih terlihat pada struktur keuangan rumah tangga, yakni meningkatnya cicilan ketika tabungan mengalami penurunan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kuatnya penyaluran kredit konsumsi pada kuartal II 2026, termasuk kredit pemilikan rumah, kendaraan, multiguna, dan kredit tanpa agunan.

Ketiga, ketidakpastian ekonomi global, tekanan nilai tukar, serta kekhawatiran terhadap prospek ekonomi membuat rumah tangga semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan belanja dalam jumlah besar.

Penurunan ekspektasi juga terlihat lebih jelas pada kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta hingga Rp 4 juta, terutama terkait ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha. Karena itu, kelompok menengah bawah dinilai perlu menjadi perhatian utama.

Josua mengatakan, dampak penurunan keyakinan konsumen terhadap perekonomian perlu dicermati karena konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sekitar 2,67 poin persentase dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,29%.

Jika penurunan keyakinan konsumen berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, rumah tangga biasanya akan terlebih dahulu menunda belanja yang mudah ditangguhkan, seperti kendaraan, elektronik, pakaian, rekreasi, dan perbaikan rumah.

Dampaknya kemudian dapat menjalar ke sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi, restoran, hingga penciptaan lapangan kerja.

Menurut Josua, tanda-tanda kehati-hatian masyarakat sebenarnya sudah terlihat dari kinerja penjualan eceran. Pada Mei 2026, penjualan eceran masih mengalami kontraksi 3,9% secara tahunan dan diperkirakan kembali turun 4,4% pada Juni 2026.

Ia menilai risiko yang lebih mendasar adalah kualitas pertumbuhan konsumsi. Jika konsumsi dipertahankan dengan semakin banyak cicilan sementara tabungan terus berkurang, konsumsi memang masih dapat terlihat kuat dalam jangka pendek, tetapi menjadi semakin rentan terhadap guncangan.

"Jika konsumsi dipertahankan dengan semakin banyak cicilan sementara tabungan terus berkurang, konsumsi mungkin masih terlihat kuat untuk beberapa waktu, tetapi menjadi semakin rapuh terhadap kehilangan pekerjaan, kenaikan bunga, atau lonjakan harga," kata Josua.

Dalam kondisi tersebut, guncangan kecil dapat mendorong rumah tangga memangkas belanja secara lebih tajam.

Meski begitu, Josua belum melihat kondisi Juli sebagai tanda menuju kontraksi ekonomi. Pasalnya, tingkat keyakinan dan ekspektasi konsumen masih berada di wilayah optimistis. Selain itu, aktivitas manufaktur pada Juli kembali membaik, sementara belanja pemerintah dan investasi masih menjadi penyangga pertumbuhan.

Dengan demikian, penurunan IKK saat ini lebih tepat dibaca sebagai lampu kuning bagi daya beli daripada lampu merah bagi perekonomian.

Josua menilai kebijakan pemerintah ke depan sebaiknya tidak semata-mata mendorong masyarakat untuk meningkatkan utang guna menjaga konsumsi.

Menurutnya, prioritas kebijakan perlu diarahkan pada penguatan pendapatan rumah tangga, terutama kelompok menengah bawah, melalui penciptaan lapangan kerja formal, dukungan bagi usaha kecil yang mampu menghasilkan pekerjaan, serta bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran bagi kelompok yang benar-benar mengalami tekanan.

Dari sisi perbankan, pertumbuhan kredit konsumsi juga perlu dijaga tetap sehat dengan memperhatikan kemampuan membayar debitur, bukan sekadar mengejar volume penyaluran kredit.

Josua mengingatkan, apabila dalam beberapa bulan ke depan porsi cicilan terus meningkat sementara tabungan dan keyakinan konsumen terus menurun, kondisi tersebut akan menjadi sinyal yang lebih serius.

Hal itu menunjukkan pelemahan daya beli mulai bergeser dari sekadar persoalan persepsi menjadi persoalan kemampuan belanja rumah tangga. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2026.

Konsumsi Melambat Bisa Tekan Penerimaan Pajak Daerah pada 2026

Senin, 10 Agustus 2026 15:40 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/konsumsi-melambat-bisa-tekan-penerimaan-pajak-daerah-pada-2026>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Risiko penerimaan pajak daerah tidak mencapai target hingga akhir 2026 mulai meningkat seiring masih lebarnya gap realisasi penerimaan pada awal Agustus.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp 155,106 triliun atau sekitar 50,63% dari target APBD 2026 hingga 9 Agustus 2026.

Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang telah mencapai sekitar 60,43% dari target APBD 2025 sebesar Rp 292,53 triliun.

Sejalan dengan itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 9 Agustus 2026 tercatat Rp 213,54 triliun atau baru mencapai 49,72% dari target PAD 2026 sebesar Rp 429,50 triliun. Capaian tersebut juga lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 61,82% dari target PAD sebesar Rp 405,20 triliun.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, capaian realisasi penerimaan pajak daerah yang baru sekitar separuh target pada awal Agustus belum otomatis menunjukkan akan terjadi shortfall hingga akhir tahun. Pasalnya, pola penerimaan pajak tidak berjalan linear sepanjang tahun dan biasanya mengalami akselerasi pada semester II.

"Menurut saya, angka realisasi 50,63%% di awal Agustus belum otomatis berarti akan terjadi shortfall sebesar selisih terhadap target. Pola penerimaan pajak juga tidak linear sepanjang tahun dan biasanya ada akselerasi pada semester kedua," ujar Irman kepada Kontan, Senin (10/8).

Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah perlu mencermati perkembangan penerimaan hingga akhir kuartal III. Apabila gap terhadap pola historis masih bertahan hingga periode tersebut, risiko target penerimaan tidak tercapai hingga akhir tahun akan semakin besar.

"Yang perlu dicermati adalah apabila gap terhadap pola historis terus bertahan hingga akhir kuartal III, karena itu akan meningkatkan risiko target penerimaan tidak tercapai," katanya.

Menurut Irman, risiko tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Penerimaan pajak daerah juga sangat bergantung pada aktivitas ekonomi lokal, terutama transaksi properti, kendaraan bermotor, hotel, restoran, hiburan, serta berbagai aktivitas jasa lainnya.

"Selain konsumsi, menurut saya ada beberapa faktor struktural yang perlu diperhatikan. Pajak daerah sangat sensitif terhadap aktivitas ekonomi lokal, terutama transaksi properti, kendaraan bermotor, hotel, restoran, hiburan dan aktivitas jasa lainnya," jelasnya.

Ia mengatakan, perlambatan transaksi barang durable seperti kendaraan dan properti dapat memberikan dampak relatif besar terhadap penerimaan pajak daerah.

Sementara itu, moderasi belanja discretionary masyarakat akan tercermin pada penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Selain faktor ekonomi, penerimaan daerah juga dipengaruhi faktor administratif, seperti waktu pembayaran pajak, pemberian insentif atau relaksasi pajak, serta efektivitas intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak.

"Jadi tidak seluruh perlambatan realisasi dapat dijelaskan oleh daya beli masyarakat," kata Irman.

Ia mecontohkan perlambatan konsumsi rumah tangga di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tumbuh 5,18% yoy pada kuartal II-2026, melambat dari kuartal I-2026 sebesar 5,72% yoy, dimana risiko tersebut perlu diperhatikan karena ruang fiskal daerah tahun ini juga menghadapi penurunan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat ketergantungan terhadap PAD menjadi semakin besar.

"Artinya, ketika transfer turun, ketergantungan terhadap PAD menjadi semakin besar. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, pemerintah daerah menghadapi pilihan antara menggunakan buffer fiskal, meningkatkan optimalisasi penerimaan, atau melakukan penyesuaian belanja," ujarnya.

Irman memperingatkan, penyesuaian belanja perlu dilakukan secara hati-hati, terutama agar tidak menekan belanja produktif. Sebab, penahanan belanja daerah berpotensi menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi dan pada akhirnya kembali menekan basis pajak.

"Risiko terbesarnya justru jika respons yang dipilih adalah menahan belanja produktif. Ini dapat menciptakan efek berantai dimana penerimaan melemah membuat belanja daerah melambat kemudian aktivitas ekonomi lokal ikut tertahan. Jika ini terjadi basis pajak kembali melemah," jelasnya.

Karena itu, Irman menilai pemerintah daerah sebaiknya tidak mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk mengejar target penerimaan dalam jangka pendek.

Di tengah daya beli yang belum sepenuhnya kuat, kenaikan beban pajak yang terlalu agresif justru berpotensi kontraproduktif terhadap konsumsi.

"Yang lebih optimal adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan dan digitalisasi administrasi, serta menjaga belanja daerah yang memiliki multiplier tinggi," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah dapat menjaga penerimaan hingga akhir tahun tanpa semakin menekan aktivitas ekonomi yang justru menjadi sumber utama PAD.

Kebutuhan Investasi 2027 Capai Rp 8.705 Triliun, Mayoritas Ditopang Swasta

Senin, 10 Agustus 2026 12:18 WIB

Reporter: Vatrisha Putri Nur, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/kebutuhan-investasi-2027-capai-rp-8705-triliun-mayotitas-ditopang-swasta>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyebut kebutuhan investasi Indonesia pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.705 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, menjabarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan tersebut.

Menurut Juda, kapasitas APBN hanya mampu membiayai sekitar Rp 459 triliun dari kebutuhan investasi tersebut.

Kemudian, sebagian pembiayaan investasi akan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Danantara, dengan nilai sekitar Rp 330 triliun.

Sementara itu, sebagian besar kebutuhan investasi nasional harus dipenuhi dari sumber pembiayaan swasta. Juda bilang, pemerintah memperkirakan pembiayaan swasta mencapai Rp 7.973 triliun atau sekitar 91% dari total kebutuhan investasi Indonesia pada 2027.

"Satu hal yang harus kita sadari bersama bahwa APBN saja itu tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan kita. Kebutuhan infrastruktur, kebutuhan energi, pendidikan yang sekarang ini sedang digalangkan, kualitas SDM hingga hilirisasi membutuhkan skala pembiayaan yang jauh melampaui kemampuan dari fiskal kita," ungkap Juda di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (10/8/2026).

Menurut Juda, sumber pembiayaan swasta tersebut dapat berasal dari perbankan, lembaga pembiayaan lainnya, hingga pasar modal.

Karena itu, ia menilai pasar modal memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta dengan menjembatani kebutuhan pembiayaan korporasi dan dana masyarakat.

"Di sinilah pasar modal memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat," katanya.

Juda menambahkan, tercatat sepanjang semester I-2026, lebih dari Rp 125 triliun dana telah berhasil dihimpun melalui pasar modal. Sementara itu, jumlah investor pasar modal telah mencapai 28 juta investor.

"Namun kita juga tidak boleh berpuas diri. Kita perlu terus memperluas basis investor, menambah keragaman instrumennya, meningkatkan likuiditas serta memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia," pungkasnya.

Lewat Program Revola, Pemprov Jateng Mampu Sulap Lahan Tidur Belasan Tahun Jadi Produktif

Senin, 10 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/lewat-program-revola-pemprov-jateng-mampu-sulap-lahan-tidur-belasan-tahun-jadi-produktif/>

BANJARNEGARA — Melalui program Revolusi Lahan atau Revola Jateng Optimis, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif.

Hal itu seperti yang dilakukan di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Lahan tersebut ditinjau dan diresmikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Senin (10/8/2026). Program tersebut tak sekadar menghidupkan kembali lahan tidur belasan tahun, tetapi juga menghidupkan harapan baru ekonomi masyarakat dan masa depan pertanian.

Dalam kesempatan itu, Luthfi berharap, program Revola Jateng Optimis dapat direplikasi di 35 kabupaten/kota. Sebab, dia yakin masih banyak lahan tidur di daerah-daerah yang bisa dioptimalkan, guna mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan di Jawa Tengah.

“Saya pengen seluruh kabupaten/ kota harus punya Revola, karena saya yakin di seluruh kabupaten/ kota masih banyak lahan kita yang tidur nyenyak. Lahan tidur yang tidak pernah digarap,” katanya.

Luthfi menjelaskan, program tersebut intinya untuk membangunkan lahan tidur, untuk kemudian digarap secara terus-menerus oleh masyarakat, bekerja sama dengan banyak stakeholder terkait.

Revola Jateng juga menggunakan konsep integrated smart farming, di mana di areal seluas 10 hektare tersebut ditanami komoditas tanaman kopi dan buah alpukat, untuk menahan erosi. Kemudian ada tanaman hortikultura, padi, perikanan, peternakan ayam dan kambing, serta memanfaatkan teknologi untuk smart farming, yang dikendalikan oleh petani milenial.

“Semua tersambung, campur baur, sehingga ujungnya masyarakat sejahtera, masyarakat tidak menganggur, serta lahannya terpakai,” bebernya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, lanjut Luthfi, perekonomian masyarakat perlahan akan hidup dan terangkat. Hal itu juga menjadi salah satu role model, yang akan digunakan untuk pengentasan kemiskinan.

Kepala Desa Susukan, Hasyim Abdullah mengatakan, masyarakat sangat antusias dengan program Revola Jateng Optimis, yang dilakukan Pemprov Jateng. Sebab, program itu membuka lahan tidur menjadi lahan produktif.

Melalui program itu, masyarakat dapat memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan untuk kebutuhan sendiri dan kemudian bisa dijual. Sementara, untuk tanaman kopi dan alpukat bisa juga untuk konservasi lahan.

“Revola ini juga memberdayakan masyarakat miskin yang ada di desa kami. Program ini kan baru berjalan sebulan, jadi untuk sementara hasil telur ayam akan dimanfaatkan sendiri, untuk peningkatan gizi. Ke depannya akan meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin,” ujarnya.

Perwakilan petani, Nur Fauzi menambahkan, program Revola Jateng Optimis sangat membantu petani di Desa Susukan. Lahan tidur yang 12 tahun tidak digarap optimal, sekarang bisa diolah kembali menjadi lahan pertanian. Dulu lahan eks tanaman teh, sekarang dialihkan ke tanaman kopi, alpukat, dan hortikultura.

“Saya ikut ternak kambing, ayam, perikanan, dan lainnya. Saya juga menanam kopi, alpukat, dan hortikultura seperti cabai terong hingga padi,” ujarnya.

Fauzi juga berterima kasih karena program itu melibatkan petani-petani muda, mengingat menggunakan teknologi smart farming. Tak ayal, petani muda ke depan akan mengendalikan teknologi, seperti drone, mesin penyiram, serta mengukur unsur tanah. (Humas Jateng)*ul

Belanja APBD Temanggung 2027 diperkirakan Rp2,047 triliun

Senin, 10 Agustus 2026 22:05 WIB

Pewarta: Heru Suyitno, Editor: Immanuel Citra Senjaya

<https://jateng.antaranews.com/berita/641328/belanja-apbd-temanggung-2027-diperkirakan-rp2047-triliun>

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memproyeksikan belanja daerah dalam APBD 2027 mencapai Rp2,047 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan Rp1,917 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp129,301 miliar.

Bupati Temanggung Agus Setyawan di Temanggung, Senin, mengatakan kebijakan belanja daerah 2027 diarahkan untuk mendukung visi, misi, tujuan, isu strategis, dan target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029. Tema pembangunan pada 2027 difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia mengatakan belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pertama diberikan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, terutama dalam menjamin keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.

Ia menyebutkan, belanja wajib tersebut mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo, serta kebutuhan rutin pemerintahan seperti gaji pegawai, listrik, air, telepon, dan internet.

Pemkab Temanggung juga memenuhi ketentuan belanja mandatori, antara lain alokasi pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, serta belanja pegawai maksimal 30 persen di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Dari total belanja Rp2,047 triliun, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp1,464 triliun. Selanjutnya, belanja modal direncanakan Rp212,546 miliar, belanja tidak terduga Rp1,598 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp368,694 miliar.

Anggaran belanja juga diarahkan untuk pembangunan dan pemberdayaan jalan, peningkatan sarana transportasi umum, penyediaan penerangan jalan umum, pelayanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum terkait pajak rokok, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, serta penguatan fungsi pengawasan. Pemkab juga akan memperbaiki tata kelola belanja melalui penyusunan anggaran berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja serta mengoptimalkan penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

Pada sisi pendapatan, Pemkab Temanggung memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,917 triliun, terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp435,777 miliar dan pendapatan transfer Rp1,482 triliun. Struktur tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih cukup bergantung pada

transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga penguatan PAD terus dilakukan melalui pendataan objek pajak baru dan pemutakhiran basis data pendapatan daerah.

Ia mengatakan peningkatan PAD juga dilakukan melalui optimalisasi kinerja BUMD serta penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pemkab berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah melalui Tim Sinergitas Pendapatan Opsen Kabupaten Temanggung yang melibatkan kepolisian, BPKPAD, dan UPPD, serta menjalankan program Sengkuyung Pendataan Pajak dan gerakan disiplin pajak.

Untuk menutup defisit Rp129,301 miliar, kayanya, Pemkab Temanggung menyiapkan pembiayaan daerah yang antara lain bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya yang diproyeksikan Rp155,801 miliar. Angka tersebut masih bersifat prediksi dan akan disesuaikan dengan hasil perhitungan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya. Jika SiLPA tidak sesuai hasil pemeriksaan, pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi terhadap pendapatan dan belanja yang telah diprogramkan.

Butuh Kolaborasi Multisektoral Demi Wujudkan Ekonomi Jateng Tangguh Hadapi Perubahan Iklim

Senin, 10 Agustus 2026 14:34 WIB

Agus Hermanto

<https://www.rmoljawatengah.id/butuh-kolaborasi-multisektoral-demi-wujudkan-ekonomi-jateng-tangguh-hadapi-perubahan-iklim>

Mercy Corps Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 7 (tujuh) Pemerintah Kota dan Kabupaten resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut MoU dalam memperkuat kebijakan dan implementasi ketahanan iklim serta penanganan banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Babon dan DAS Tuntang.

Kerja bareng antara Mercy Corps Indonesia bersama sejumlah pemerintah daerah itu merupakan upaya kolaborasi bersama dalam menghadapi dampak nyata perubahan iklim yang kian mengancam.

Mercy Corps Indonesia adalah organisasi kemanusiaan dan pembangunan yang bekerja bersama masyarakat rentan di Indonesia untuk membangun ketahanan terhadap krisis ekonomi.

Organisasi nirlaba yang berpusat di Jakarta itu berdiri sebagai afiliasi dari organisasi kemanusiaan internasional Mercy Corps. Di Indonesia, Mercy Corps aktif sejak tahun 1999 untuk membantu masyarakat bangkit dari krisis, mengatasi kemiskinan, serta menghadapi bencana alam.

Hadir pada kegiatan penandatanganan yang berlangsung Rabu 5 Agustus 2026 itu Sekretaris Daerah Sumarno, S.E., M.M. mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Executive Director Mercy Corps Indonesia Ade Soekadi serta perwakilan dari Pemerintah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak.

Executive Director Mercy Corps Indonesia Ade Soekadi menyatakan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peranan ekonomi yang sangat penting di Indonesia, namun juga menghadapi tantangan yang luar biasa dari sisi lingkungan dan perubahan iklim, yang hari ini sudah dirasakan dampaknya.

Pemerintah dan masyarakat, tambahnya, perlu berkolaborasi menggunakan pendekatan multisektoral sehingga tantangan ini bisa dihadapi demi mewujudkan Jawa Tengah yang lebih tangguh.

"Kami berharap program ini memberi dampak positif bagi komunitas, baik di hulu maupun hilir, melalui pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ekonomi alternatif yang berketahanan iklim," ujar Ade Soekadi.

Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan saat ini masyarakat sudah merasakan dampak dari perubahan iklim. Panas di musim kemarau semakin ekstrem, pola hujan sudah tidak seperti dulu lagi, bahkan hitungan waktu tanam petani pun sudah berubah.

"Mengatasi permasalahan di daerah aliran sungai (DAS) memerlukan kolaborasi banyak pihak. Pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja, karena aliran sungai melintasi wilayah hulu, tengah dan hilir. Tantangannya juga beragam, mulai dari kerusakan daerah tangkapan air, degradasi aliran sungai, hingga persoalan sampah. Karenanya, upaya menjaga DAS harus dilakukan secara bersama-sama, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri," papar Sumarno.

Di sisi lain, Sumarno turut mengangkat sudut pandang yang jarang terdengar dalam forum kebijakan iklim, yaitu soal nilai keagamaan.

Menurutnya, membuang sampah atau menebang pohon sembarangan yang berujung merugikan orang lain dan menyebabkan banjir pada dasarnya adalah tindakan menzalimi sesama, dan tentu semua agama sepakat hal itu berdosa.

Sebaliknya, menanam pohon adalah bentuk sedekah yang terus mengalirkan pahala selama pohon itu bermanfaat bagi makhluk hidup.

"Kepedulian menjaga lingkungan itu perlu ditumbuhkan lewat kesadaran akan dampaknya bagi orang lain, termasuk lewat pendekatan agama," ujarnya.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Yusmanto menjelaskan bagaimana arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Tantangan yang dihadapi saat ini salah satunya adalah krisis air/kekeringan.

"Rata-rata 23 kecamatan di Jawa Tengah rentan mengalami kekeringan akibat perubahan iklim, dengan kerentanan sangat tinggi di wilayah Demak, Semarang, Tegal, hingga Pemalang. Kawasan pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah merupakan "pabrik air" yang memasok kebutuhan air bagi wilayah lain. Sedangkan daerah yang rentan mengalami kekeringan berada di pesisir utara," papar Yusmanto.

Untuk menjawab tantangan ini, tambah Yusmanto, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai 4 program prioritas daerah terkait ketahanan iklim dalam RPJMD Jawa Tengah 2025-2029, yaitu Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai dengan pendekatan soft structure seperti rehabilitasi mangrove, desalinasi air laut untuk akses air bersih, pembangunan rumah apung, serta pengembangan giant sea wall (hard structure).

"Sedangkan program taktisnya berupa pendidikan perubahan iklim di sekolah dan pesantren, drainase pengendalian banjir, pengelolaan DAS Babon, yang bermuara di pantai utara," ujar Yusmanto.

Adapun Pemerintah Kabupaten yang diwakili Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Demak Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si. turut menyampaikan pandangan terkait tantangan di wilayahnya.

"Demak ini merupakan tempat bermuaranya air sungai. Ancaman perubahan iklim sudah terjadi hari ini, bahkan terdapat 2 Dukuh yang sudah harus direlokasi. Abrasi sudah sering terjadi, garis pantai yang dulu panjangnya 36 km, kini sudah 47 km," ujar Arief.

Arief menambahkan, RPJMD 2025-2029 Kab. Demak sudah sesuai dengan upaya adaptasi perubahan iklim, dan berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam implementasi program ZCRA, khususnya dalam koordinasi lintas perangkat daerah dan penguatan kelembagaan.

Salah satu usulan konkret yang mengemuka dalam sesi diskusi adalah perlunya skema imbal jasa lingkungan sebagai insentif bagi daerah hulu yang menjaga kawasan tangkapan air.

Adapun Pemerintah Kabupaten Semarang yang diwakili Yusa Eko Sapindra dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi turut mendukung skema tersebut.

“Kalau daerah hulu diminta menanam lebih banyak pohon untuk menjaga tangkapan air, semestinya ada imbal jasa lingkungan yang memadai, supaya penanaman itu bisa lebih luas dan benar-benar berfungsi baik bagi wilayah di bawahnya,” ujarnya.

Usulan tersebut disambut oleh Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto, yang menyatakan dukungannya terhadap skema imbal jasa lingkungan tersebut, dengan catatan perlu ada payung hukum yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri agar insentif itu bisa berjalan tanpa menimbulkan temuan administratif di kemudian hari.

Panen Raya Garam 2026 Diprediksi Tembus 600 Ribu Ton, Petani Jateng Dilema Harga Anjlok

Senin, 10 Agustus 2026 17:58 WIB

Penulis: iwan Arifianto, Editor: raka f pujangga

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262687/panen-raya-garam-2026-diprediksi-tembus-600-ribu-ton-petani-jateng-dilema-harga-anjlok>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Tengah mengungkap, bakal terjadi panen raya garam yang diprediksi mencapai 600 ribu ton di tahun 2026.

Panen raya garam ini terjadi karena merujuk informasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ada peningkatan suhu panas sebesar dua derajat di kawasan Jateng.

Peningkatan suhu dampak super El Nino ini akan memperpanjang masa panen garam mulai Juni hingga Desember 2026.

Baca juga: Bank Indonesia Dukung Petani Garam Jateng, Targetkan Kualitas Garam Lokal Lebih Berdaya Saing

Di balik kabar gembira itu, DKP juga mengantisipasi anjloknya harga garam yang awal Agustus 2026 ini sudah menyentuh Rp600 perkilogram.

Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKP Jateng Lilik Harnadi, mengaku, optimis produksi garam Jateng memenuhi target produksi sebesar 541.000 ton tahun 2026.

Ia bahkan memprediksi, produksi garam Jateng bisa melampaui target tersebut yakni produksi bisa di atas angka 600.000 ton.

"Saya optimis produksi garam Jateng mencapai 600 ribu ton karena super El Nino yang akan memperpanjang masa panen garam," jelas Lilik kepada Tribun, Senin (10/8/2026).

Produksi garam yang diprediksi mencapai 600 ribu ton pertahun itu bakal mengembalikan masa jaya produksi garam Jateng yang sempat terpuruk pada tahun 2025.

Pada tahun itu, produksi garam hanya di angka 283 ribu ton karena fenomena kemarau basah.

Angka itu jelas jauh dari pencapaian produksi tahun 2024 yang mencapai 536 ribu ton dan 2023 sebanyak 652 ribu ton.

Capaian produksi garam tersebut selalu ditopang oleh Kabupaten Pati sebesar 272 ribu ton (2023), 270 ribu ton (2024) dan 211 ribu ton (2025).

Adapula Rembang 196 ribu ton (2023), 160 ribu ton (2024) dan 42 ribu ton (2025).

Berikutnya, Jepara 55 ribu ton (2023), 34 ribu ton (2024) dan 14 ribu ton (2025). Sisanya ditopang wilayah lainnya seperti Demak, Brebes, Kebumen, Cilacap, Purworejo, Grobogan.

Menurut Lilik, Jateng sebagai daerah penghasil garam nomor dua di Indonesia, telah memasok sepertiga kebutuhan garam nasional.

Ia yakin posisi itu bisa direngkuh Jateng yang tahun 2025 menghasilkan 283 ribu ton atau 33 persen dari kebutuhan garam nasional.

Sementara, data hingga Juni 2026, produksi garam sudah mencapai 240 ribu ton.

"Iya tahun 2025, sepertiga kebutuhan garam nasional disuplai Jateng, hanya kalah sama Jawa Timur (409 ribu ton, 49 persen kebutuhan nasional)," bebernya.

Mewaspada Anjloknya Harga Garam

Akan tetapi, Lilik juga mewaspada panen raya akan diiringi oleh anjloknya harga garam.

Indikasi itu sudah mulai muncul awal Agustus ini. Ia telah mendapatkan laporan dari petambak harga garam sudah menyentuh Rp600 hingga Rp750 perkilogram.

Padahal, masa panen sebelumnya pada akhir 2025, harga garam masih menyentuh harga Rp1.500 hingga Rp2.000 perkilogram.

"Tahun kemarin kemarau basah, produksi turun sehingga harga menyentuh hampir Rp2 ribu perkilogram, kini harga Anjlok sampai Rp600-Rp750 perkilogram," terangnya.

Informasi harga itu, lanjut Lilik, terjadi di daerah Demak sebagai salah satu penghasil garam di Jawa Tengah.

Kondisi serupa juga terjadi di beberapa daerah sentra penghasil garam seperti Brebes, Demak, Jepara, Rembang, dan Pati. Sementara, di pesisir selatan di Purworejo, Kebumen, dan Cilacap.

Kondisi itu, menjadi perhatian pihaknya, terutama di Kabupaten Pati dan Rembang sebagai penghasil garam terbesar di Jateng.

"Selama ini, kami akui, soal harga kami serahkan ke pasar, artinya tergantung supply and demand (penawaran dan permintaan)," jelasnya.

Namun, pihaknya akan melakukan berbagai langkah antisipasi merespon anjloknya harga garam ini.

Lilik menjelaskan, langkah pertama adalah menyalurkan garam ke PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) milik Pemprov Jateng. Perusahaan ini menampung setidaknya 25.200 ton garam pertahun.

Langkah lainnya, menyalurkan ke koperasi Sari Makmur di Rembang yang juga memiliki washing plant, mampu menyerap garam petambak sebesar 7.500 ton pertahun.

"Kami akui serapan itu memang tidak terlalu signifikan," bebernya.

Untuk itu, Lilik berharap, implementasi Peraturan Gubernur Jateng Nomor 20 tahun 2024 tentang rencana Induk Pergaraman Daerah bisa diterapkan.

Dalam regulasi itu, sebanyak 119 Industri Kecil dan Menengah (IKM) seluruh Jateng diharapkan bisa menyerap produksi garam dari 9.998 orang petambak dari luasan tambak garam sekitar 10.000 hektare.

"Dari mekanisme ini, harapannya produk garam bisa diolah, tidak hanya dijual dalam bentuk krosok (kasar) tapi jadi garam halus siap dijual ke industri," bebernya.

Juragan Garam Lebih Eksis

Lilik mengaku, dalam pengendalian harga juga tidak bisa terlalu cawe-cawe.

Diakuinya, para juragan garam bisa lebih eksis dibandingkan para petambak.

Hal itu terjadi karena juragan ini memiliki gudang garam yang mampu menyimpan hasil panen garam yang tidak memiliki masa kedaluwarsa.

"Para juragan bisa menahan garan saat harga murah ditahan, sebaliknya saat harga mahal dilepas, berbeda dengan para petambak yang terpaksa menjual garam meskipun harganya murah," tuturnya.

Meski demikian, Lilik mengungkapkan, para petambak juga memiliki strategi dalam penjualan. Dari pantauannya, biasanya petambak garam akan menjual hasil panennya sebelum terjadi masa panen raya.

"Penjualan garam dengan harga lumayan itu nanti ditabung, jadi mereka sudah paham soal ini. Mereka juga sudah memiliki jaringan tengkulak dan juragan garam," bebernya.

Di tengah harga garam yang diprediksi akan semakin anjlok, Lilik menyebut, tidak mengetahui pasti apakah ada kebijakan impor garam. Namun, bila merujuk Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2025, tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, seharusnya kran impor garam telah dihentikan.

Terlebih ada target swasembada garam nasional pada tahun 2027.

"Ya harapnya jangan sampai ada (impor) karena di Jateng sendiri hampir 10 ribu petambak garam menggantungkan hidup dari asinnya garam," terangnya.

Dari kondisi ini, ia berharap, ada penguatan koperasi yang mampu menyerap garap dari petambak.

Sebab, membentuk Bulog (Badan Urusan Logistik) garam seperti Bulog beras masih terlalu jauh merealisasikannya.

"Kami ingin ada penguatan koperasi petani garam ini," terangnya.

Selain harga anjlok, petani garam di Pati dan Rembang mengeluhkan sedimentasi saluran irigasi sebagai jalur air laut masuk ke tambak garam. Lilik sedang berkoodinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk mengatasi persoalan ini. (Iwn)

Peternak Kabupaten Pekalongan Menjerit, Harga Telur Ambruk di Tengah Pakan Mahal

Senin, 10 Agustus 2026 16:13 WIB

Penulis: Indra Dwi Purnomo, Editor: rival al manaf

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262664/peternak-kabupaten-pekalongan-menjerit-harga-telur-ambruk-di-tengah-pakan-mahal>

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Peternak ayam petelur di Kabupaten Pekalongan semakin terjepit. Harga telur di tingkat kandang ambruk hingga sekitar Rp 21.000 per kilogram, sementara harga pakan masih bertahan tinggi.

Kondisi tersebut, membuat peternak harus menanggung kerugian hingga sekitar Rp4.000 untuk setiap kilogram telur yang dijual.

Kondisi itu mendorong Aliansi Peternak Ayam Petelur Kabupaten Pekalongan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Kantor Bupati Pekalongan, Senin (10/8/2026) siang.

Mereka meminta pemerintah, segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus menekan harga pakan.

Perwakilan Aliansi Peternak Ayam Petelur Kabupaten Pekalongan, Kus Budianto, mengatakan harga telur yang rendah dan mahalnya harga pakan telah membuat kondisi peternak semakin memprihatinkan. Tidak sedikit peternak yang kini harus menanggung beban utang.

"Peternak di Kabupaten Pekalongan telurnya murah, harga pakan mahal. Kondisi peternak seperti itu."

"Utang menumpuk dan bergelimang air mata," kata Budi kepada Tribunjateng.com.

Menurut dia, harga telur sekitar Rp 21.000 per kilogram di tingkat kandang masih jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) yang diperkirakan mencapai Rp 25.000 per kilogram.

Artinya, peternak harus menanggung kerugian sekitar Rp 4.000 per kilogram.

"Fakta yang kami rasakan di lapangan, harga telur Rp 21.000 per kilogram dari peternakan, ambil di kandang. Minus Rp4.000."

"Ini bukan angka yang kecil. Dikalikan hari, bulan, angka itu lenyap jutaan rupiah bagi peternak," ujarnya.

Bahkan, kata Budi, harga telur di sejumlah peternakan masih berada di bawah Rp 21.000 per kilogram. Ada peternak yang hanya mendapatkan harga sekitar Rp 20.900 per kilogram.

Para peternak pun mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pakan, terutama jagung dan konsentrat. Pasalnya, jagung menyumbang sekitar 50 persen komposisi pakan ayam, sedangkan konsentrat sekitar 30 persen.

Selain itu, peternak meminta agar HPP telur yang telah ditetapkan pemerintah benar-benar dapat direalisasikan di lapangan.

Budi menyebut, pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan HPP telur sebesar Rp 26.500 per kilogram, sementara HPP di Kabupaten Pekalongan berada di kisaran Rp 25.000 per kilogram.

"Menetapkan HPP harga telur di angka Rp25.000 itu sudah ditetapkan, cuma realisasi di lapangan tidak bisa seperti itu. Harga masih tetap rendah," katanya.

Ia juga menambahkan, di Kecamatan Doro dan Talun ada sekitar 230 peternak ayam petelur.

Peternak lainnya, Wasolih, mengatakan tingginya harga pakan telah dirasakan selama sekitar tiga bulan terakhir.

Saat ini, harga pakan pabrikan mencapai sekitar Rp8.500 per kilogram, sedangkan harga jagung giling sekitar Rp7.500 per kilogram.

Menurut dia, biasanya harga telur mengalami penurunan saat masa libur sekolah karena permintaan berkurang. Namun, harga biasanya kembali naik setelah kegiatan belajar mengajar kembali berjalan.

"Biasanya selama sekolah libur dua pekan harga telur menurun. Kalau sekolah sudah aktif biasanya harga naik lagi. Tapi ini masih tetap, menurun terus," kata Wasolih.

Ia menyebut, harga telur yang ideal di tingkat peternakan berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, dengan catatan harga pakan tidak kembali mengalami kenaikan.

"Harga normal dari peternakan Rp25.000 per kilogram, dengan catatan harga pakan tidak naik lagi. Harga pakan mahal, harga telur malah rendah," ujarnya. (Dro)

BPS Blora Sebut Data Sensus Ekonomi 2026 Akan Jadi Dasar Pemerintah Susun Kebijakan Ekonomi

Senin, 10 Agustus 2026 10:36 WIB

Penulis: M Iqbal Shukri, Editor: muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262619/bps-blora-sebut-data-sensus-ekonomi-2026-akan-jadi-dasar-pemerintah-susun-kebijakan-ekonomi>

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora menyebut data hasil dari sensus ekonomi 2026 akan digunakan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

Oleh karena itu, petugas sensus yang sudah diterjunkan menggali informasi terkait aktivitas perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

Kepala BPS Kabupaten Blora, Rukhedi, menyampaikan, dalam Sensus Ekonomi 2026, petugas tidak hanya mendata keberadaan usaha masyarakat, tetapi juga menggali informasi mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu tahun.

Beberapa hal yang ditanyakan antara lain omzet usaha, biaya yang dikeluarkan, sumber modal, hingga pendapatan dari kegiatan usaha.

Menurutnya data tersebut nantinya digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian masyarakat sekaligus menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan.

"Karena sensus ekonomi, maka bicaranya adalah sejauh mana usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sumber pendapatannya, omzetnya berapa banyak, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan apa saja, kebutuhan modal berasal dari mana dan sebagainya," katanya, Senin (10/8/2026).

Rukhedi menjelaskan pendataan juga mencakup masyarakat yang memiliki lebih dari satu sumber usaha.

Misalnya, dalam satu rumah tangga terdapat usaha perdagangan sekaligus kegiatan pertanian, kedua aktivitas ekonomi tersebut tetap dicatat oleh petugas.

"Kalau misalnya satu rumah ada dua usaha, dagang sama pertanian misalnya, itu juga kita catat dua. Jadi kegiatan selama satu tahun, berapa omzetnya, berapa margin keuntungannya, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan," ujarnya.

Khusus bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap, seperti petani, penghitungan dilakukan berdasarkan akumulasi pendapatan dari seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun.

"Yang kita hitung itu adalah penghasilan selama setahun. Misalnya petani tiga bulan pertama menanam padi, tiga bulan berikutnya menanam jagung, kemudian bulan lain mungkin menanam yang lain. Nanti yang kita akumulasi adalah totalnya selama setahun itu," jelasnya. (Iqs)

Bank Sentral Australia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Level 4,35%

Selasa, 11 Agustus 2026 12:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-australia-pertahankan-suku-bunga-acuan-di-level-435>

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Reserve Bank of Australia (RBA) atau bank sentral Australia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 4,35%. Hal tersebut seperti yang diperkirakan, dengan mengatakan bahwa ekonomi melambat di tengah kondisi keuangan yang lebih ketat.

Selasa (11/8/2026), dalam keputusannya, RBA juga sambil memperingatkan bahwa bank sentral Australia mungkin harus menaikkan suku bunga lagi jika diperlukan.

Sebagai penutup rapat kebijakan Agustus 2026, dewan Reserve Bank of Australia mengatakan akan melakukan apa yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran target 2% hingga 3%, termasuk menaikkan target suku bunga acuan lebih lanjut jika risiko kenaikan terwujud.

RBA telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin sejak Februari karena berjuang untuk menahan tekanan inflasi yang membandel di tengah melonjaknya biaya energi.

Sebelumnya, pasar telah bertaruh pada hasil yang stabil mengingat data inflasi berada di bawah perkiraan pada kuartal kedua, sementara pasar perumahan melemah lebih dari yang diperkirakan oleh para pembuat kebijakan.

Australia dan Vietnam Perkuat Kerja Sama Rantai Pasok

Selasa, 11 Agustus 2026 11:25 WIB

Reporter: Nina Dwiantika, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/australia-dan-vietnam-perkuat-kerja-sama-rantai-pasok>

KONTAN.CO.ID – SYDNEY. Australia dan Vietnam sepakat memperdalam kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada penguatan ketahanan rantai pasok di tengah meningkatnya gangguan perdagangan global.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam kunjungan resmi Presiden Vietnam To Lam ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, kedua negara memiliki perhatian yang sama terhadap praktik perdagangan restriktif yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

“Kedua negara sepakat bekerja sama untuk mendukung rantai pasok,” kata Albanese dalam pernyataan bersama dengan To Lam, Selasa (11/8) dalam laporan Reuters.

Kerja sama tersebut akan diarahkan ke sejumlah sektor strategis, termasuk mineral kritis, semikonduktor, dan energi bersih. Ketiga sektor tersebut semakin penting di tengah upaya berbagai negara mengurangi ketergantungan pada rantai pasok tertentu dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Australia memiliki kepentingan besar dalam pengembangan mineral kritis, sementara Vietnam berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok kawasan. Kerja sama kedua negara juga mencakup sektor energi, sumber daya, teknologi, dan penguatan rantai pasok.

Penguatan kerja sama ini menjadi semakin relevan ketika perdagangan global menghadapi tekanan dari kebijakan perdagangan yang lebih restriktif. Bagi Australia dan Vietnam, diversifikasi rantai pasok dapat membuka peluang investasi sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan untuk sektor-sektor strategis.

Australia dan Vietnam meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2024. Sejak saat itu, kedua negara mendorong kerja sama yang lebih luas, termasuk di bidang energi, mineral kritis, ekonomi digital, dan teknologi.

Peso Filipina Jadi Mata Uang Asia dengan Pelemahan Terbesar pada Selasa (11/8)

Selasa, 11 Agustus 2026 09:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/peso-filipina-jadi-mata-uang-asia-dengan-pelemahan-terbesar-pada-selasa-118>

KONTAN.CO.ID - Peso Filipina menjadi mata uang Asia dengan pelemahan terbesar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa (11/8/2026).

Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.05 GMT, peso melemah 0,38% menjadi 60,955 per dolar AS dari 60,721 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya.

Pelemahan peso terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang relatif beragam. Yen Jepang menguat 0,08% menjadi 159,18 per dolar AS, dolar Singapura menguat 0,02% ke 1,280 per dolar AS, sementara dolar Taiwan menguat 0,09% ke 32,202 per dolar AS.

Won Korea Selatan juga menguat 0,18% menjadi 1.415,7 per dolar AS. Baht Thailand naik 0,04% ke 32,975 per dolar AS, sedangkan yuan China menguat tipis 0,02% menjadi 6,745 per dolar AS.

Sebaliknya, rupiah Indonesia melemah 0,22% menjadi 17.790 per dolar AS. Ringgit Malaysia juga turun 0,10% menjadi 4,092 per dolar AS.

Rupiah Melemah 6,3% Sepanjang 2026

Secara kumulatif sepanjang 2026, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia dengan kinerja terburuk. Rupiah telah melemah 6,30% dibandingkan posisi akhir 2025 di level 16.670 per dolar AS.

Rupee India juga telah terdepresiasi 5,70%, sedangkan baht Thailand melemah 4,62% dan peso Filipina turun 3,54%.

Sebaliknya, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang Asia yang menguat sepanjang tahun ini, dengan apresiasi 1,68% terhadap dolar AS. Yuan China juga menguat 3,60%, sementara dolar Singapura naik 0,43%.

Pergerakan mata uang Asia saat ini turut dipengaruhi perkembangan harga minyak, prospek kebijakan moneter AS, serta ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Investor juga masih mencermati data inflasi AS yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah suku bunga Federal Reserve.

Singapura Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2026 Jadi 4,5%-5,5%

Selasa, 11 Agustus 2026 09:19 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://internasional.kontan.co.id/news/singapura-kerek-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-2026-jadi-45-55>

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026, dengan mengatakan bahwa lonjakan investasi kecerdasan buatan global yang lebih kuat dari perkiraan dan dampak yang lebih ringan dari perang di Timur Tengah mendukung aktivitas di paruh kedua tahun ini.

Selasa (11/8/2026), Kementerian Perdagangan Singapura memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,5%-5,5% untuk tahun 2026. Proyeksi tersebut naik dari perkiraan sebelumnya di kisaran 2,0%-4,0%.

Proyeksi tersebut terjadi setelah PDB Singapura di kuartal kedua tumbuh 5,9% dari tahun sebelumnya, di atas perkiraan awal sebesar 5,7%.

Kementerian Perdagangan menambahkan, dampak dari perang Iran kurang merusak daripada yang dikhawatirkan, sementara lonjakan investasi AI global telah melampaui ekspektasi.

"Dengan latar belakang ini, prospek tahun 2026 untuk sektor-sektor ekonomi Singapura yang terkait dengan siklus teknologi berbasis AI telah membaik, meskipun prospek untuk sektor-sektor yang secara langsung terdampak oleh gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah tetap lemah," kata kementerian tersebut.

Pemerintah juga tidak mengantisipasi dampak dari tarif AS sebesar 12,5% terhadap ekspor Singapura, kata Beh Swan Gin, Sekretaris Tetap Kementerian Perdagangan Singapura.

"Dengan meredanya bayang-bayang perang dan harga minyak jauh di bawah titik tertingginya, ekonomi tampaknya akan terus melaju di paruh kedua tahun ini," kata ekonom Maybank, Chua Hak Bin.

Chua bilang, "ledakan AI, masuknya modal ke aset aman, dan peningkatan konstruksi dapat membawa momentum kuat di paruh pertama tahun ini ke sisa tahun ini," menambahkan bahwa pertumbuhan dapat kembali melebihi perkiraan pemerintah yang telah ditingkatkan.

Untuk paruh pertama tahun ini, pertumbuhan PDB Singapura mencapai 6,1%, kata kementerian perdagangan.

Secara kuartalan, dengan penyesuaian musiman, produk domestik bruto (PDB) Singapura juga tumbuh sebesar 1,4% pada periode April-Juni, dibandingkan dengan perkiraan awal pertumbuhan sebesar 1,1%.

Dalam pernyataan terpisah, Enterprise Singapore meningkatkan perkiraan pertumbuhan ekspor domestik non-minyak tahun ini menjadi 14% hingga 16%, dari sebelumnya 3% hingga 5%.

"Ekonomi global tetap lebih tangguh dari yang diperkirakan, didukung oleh permintaan terkait AI yang berkelanjutan dan pengeluaran modal," kata Enterprise Singapore.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan, pihaknya memperkirakan pertumbuhan akan tetap kuat hingga akhir tahun 2026, meskipun telah menandai keberlanjutan booming investasi AI sebagai risiko utama.

Bank sentral secara tak terduga memperketat kebijakan moneter pada akhir Juli, dengan alasan risiko inflasi yang terus berlanjut karena konflik di Timur Tengah terus menekan biaya energi.

Bulan lalu, Singapura juga mengumumkan paket bantuan sebesar S\$900 juta untuk membantu rumah tangga dan bisnis mengatasi harga energi yang tinggi, di samping hampir S\$1 miliar yang diumumkan pada bulan April.

Pada bulan April, bank sentral menaikkan perkiraan inflasi inti dan inflasi utama untuk tahun 2026 menjadi kisaran 1,5% hingga 2,5%, dari sebelumnya 1,0% hingga 2,0%.

Inflasi tahunan Singapura sebesar 1,6% pada bulan Juni, dan bank sentral memperkirakan inflasi akan meningkat dan tetap tinggi pada paruh pertama tahun depan. Data inflasi Juli akan dirilis akhir bulan ini.

Bank Sentral China Hentikan Suntikan Likuiditas Harian, Pertama Kali Sejak Juni

Selasa, 11 Agustus 2026 09:16 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-china-hentikan-suntikan-likuiditas-harian-pertama-kali-sejak-juni>

KONTAN.CO.ID – BEIJING. Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), untuk pertama kalinya sejak Juni tidak menyuntikkan likuiditas melalui instrumen reverse repo tenor tujuh hari pada Selasa (11/8/2026).

Dalam pernyataan daring, PBOC menyebut volume reverse repo tujuh hari dalam operasi pasar terbuka ditetapkan nol, sebagai respons terhadap kebutuhan para primary dealers.

Keputusan tersebut menjadi pertama kalinya sejak Juni PBOC tidak melakukan injeksi melalui reverse repo tujuh hari.

PBOC secara fleksibel menggunakan instrumen likuiditas jangka pendek tersebut untuk menyesuaikan kondisi kas dalam sistem perbankan China.

Langkah tersebut menunjukkan PBOC memilih untuk tidak menambah likuiditas jangka pendek melalui instrumen tersebut pada perdagangan Selasa, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan likuiditas perbankan.

Yen Stabil Selasa (11/8), Pasar Tunggu Keputusan RBA dan Data Inflasi AS

Selasa, 11 Agustus 2026 08:44 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yen-stabil-selasa-118-pasar-tunggu-keputusan-rba-dan-data-inflasi-as>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yen Jepang stabil pada perdagangan Selasa (11/8/2026) setelah merosot tajam pada sesi sebelumnya. Intervensi bersama Amerika Serikat (AS) dan Jepang dinilai belum mampu memberikan dorongan yang bertahan lama terhadap yen.

Di sisi lain, dolar Australia menguat ke level tertinggi dalam delapan pekan menjelang keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA).

Mengutip Reuters, yen menguat tipis ke level 158,93 per dolar AS pada perdagangan di Asia. Namun, posisi tersebut masih jauh dari level 155,20 per dolar AS yang dicapai pekan lalu setelah intervensi pembelian yen oleh AS dan Jepang pada akhir Juli.

Intervensi tersebut dilakukan setelah yen sebelumnya anjlok ke level terendah dalam 40 tahun, yakni 163,99 per dolar AS. Sejak itu, yen telah menghapus hampir separuh penguatan yang diperolehnya pascaintervensi.

Kondisi tersebut memicu spekulasi di pasar bahwa hanya masalah waktu sebelum otoritas Jepang dan AS kembali melakukan intervensi di pasar valuta asing.

"Pasar sedang menguji keteguhan pejabat Jepang dan AS," ujar Marc Chandler, Chief Market Strategist Bannockburn Capital Markets.

Aktivitas perdagangan yen relatif tipis karena pasar Jepang tutup untuk libur nasional.

Posisi Short Yen Menyusut Tajam Data regulator AS menunjukkan spekulasi memangkas posisi short terhadap yen dalam jumlah terbesar dalam lebih dari 12 tahun.

Posisi net short yen turun US\$8,865 miliar menjadi US\$3,604 miliar dalam sepekan hingga 4 Agustus.

Namun, analis memperkirakan spekulasi berpotensi kembali membangun posisi short setelah efek intervensi mereda.

"Perjalanan ke depan mungkin tetap bergejolak," kata analis ING.

Menurut ING, yen masih berisiko kembali menyentuh level 160 per dolar AS pada suatu waktu bulan ini, bahkan jika Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga pada September dan Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga.

Data LSEG menunjukkan pasar saat ini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga BOJ hanya sedikit di atas 50%.

Langkah pengetatan BOJ juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya tekanan politik untuk mendukung pasar obligasi Jepang.

RBA Jadi Perhatian Pasar

Perhatian investor selanjutnya beralih ke keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia (RBA). Bank sentral Australia diperkirakan mempertahankan suku bunga acuannya, dengan fokus pasar tertuju pada komentar para pejabat terkait arah kebijakan selanjutnya.

Dolar Australia berada di level US\$0,7057, mendekati level tertinggi dalam delapan pekan.

Carol Kong, Currency Strategist Commonwealth Bank of Australia mengatakan, RBA kemungkinan menekankan bahwa inflasi masih tinggi dan bank sentral siap kembali menaikkan suku bunga jika diperlukan.

"Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dapat mendorong kenaikan harga ke konsumen pada kuartal III 2026," ujarnya.

Namun, inflasi yang lebih rendah serta melemahnya pasar perumahan memberikan ruang bagi RBA untuk menilai dampak pengetatan kebijakan sebelumnya.

Sementara itu, dolar AS relatif stabil terhadap sebagian besar mata uang utama. Harga minyak yang bertahan di sekitar level tertinggi sepekan turut menjadi perhatian karena harapan tercapainya kesepakatan AS-Iran untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah semakin meredup.

Euro berada di US\$1,1544, sedangkan poundsterling berada di US\$1,3509.

Investor juga menantikan data Consumer Price Index (CPI) AS yang akan dirilis Rabu (12/8). Data tersebut diperkirakan memberikan gambaran mengenai dampak konflik Timur Tengah terhadap tekanan harga.

Data Producer Price Index (PPI) akan menyusul pada Kamis (13/8), sementara laporan penjualan ritel AS pada Jumat (14/8) akan menjadi tambahan petunjuk mengenai arah inflasi dan kebijakan Federal Reserve.

Hammack The Fed Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Masih Diperlukan

Selasa, 11 Agustus 2026 07:20 WIB

Jonnelle Marte

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117873/hammack-the-fed-beri-sinyal-kenaikan-suku-bunga-masih-diperlukan/2>

Bloomberg, Gubernur Federal Reserve (The Fed) Bank of Cleveland Beth Hammack menyatakan bahwa sejumlah kenaikan suku bunga acuan mungkin masih diperlukan untuk menekan angka inflasi kembali ke target 2% yang ditetapkan bank sentral. Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin terburu-buru berspekulasi mengenai titik akhir dari pengetatan kebijakan tersebut.

"Secara umum, saya akan mengatakan bahwa kenaikan 25 basis poin mungkin tidak banyak berdampak terhadap perekonomian," kata Hammack dalam wawancara dengan Yahoo Finance pada Senin (10/8). "Jadi, mungkin diperlukan sejumlah kenaikan," tetapi "saya tidak ingin mendahului keputusan mengenai berapa banyak kenaikan yang akan diperlukan."

Hammack merupakan satu dari tiga pejabat The Fed yang menyatakan perbedaan pendapat (dissent) terhadap keputusan bulan lalu untuk mempertahankan suku bunga, dan memilih kenaikan suku bunga. Dalam pernyataannya setelah rapat, Gubernur The Fed Cleveland tersebut mengatakan semakin lama inflasi tinggi bertahan, semakin sulit untuk menurunkannya kembali.

Dalam wawancara hari Senin tersebut, Hammack menambahkan bahwa tingkat suku bunga saat ini belum "secara signifikan membatasi" laju perekonomian. Ia juga menilai bahwa inflasi tidak akan bisa melandai kembali ke target dengan sendirinya.

BI Catat Perlambatan Penjualan Ritel di Juni

Selasa, 11 Agustus 2026 13:20 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117923/bi-catat-perlambatan-penjualan-ritel-di-juni/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Indonesia mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2026 tercatat sebesar 225,0 atau turun sebesar 3,0% secara year-on year/yoy.

Sejumlah kelompok masih mencatatkan pertumbuhan dan menjadi penopang kinerja penjualan pada periode laporan, antara lain kelompok suku cadang dan aksesori yang tumbuh 18,8%, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya yang tumbuh 2,8% yoy serta kelompok barang lainnya yang tumbuh 1,1% yoy.

Sementara itu, kelompok lainnya masih mencatatkan kontraksi, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang berkontraksi 3,6% yoy serta subkelompok sandang yang berkontraksi 3,1% yoy.

Meski begitu, secara bulanan, penjualan eceran pada Juni 2026 tercatat tumbuh sebesar 0,7% secara month to month/ mtm, lebih baik dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya yang tercatat turun sebesar -1,5% (mtm).

“Perkembangan tersebut sejalan dengan terjaganya permintaan selama periode HBKN [Hari Besar Keagamaan Nasional] dan libur sekolah,” kata Ramdan Denny Prakoso Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Selasa (11/8/2026).

Sementara itu menurut Denny, penjualan eceran pada Juli 2026 secara tahunan diperkirakan meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 0,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sehingga mencapai level 224,4.

“Peningkatan penjualan tersebut didorong oleh kenaikan penjualan pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, disertai pertumbuhan positif pada Kelompok Suku Cadang dan Aksesori serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya,” katanya.

Sementara, penjualan eceran secara bulanan pada Juli 2026 diperkirakan menurun sebesar -0,3% (mtm), dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pasca periode HBKN dan libur sekolah.

Meski demikian, Ia memproyeksikan kinerja penjualan pada Juli 2026 tersebut lebih baik dibandingkan Juli 2025 yang turun -4,1% (mtm).

Dari sisi harga, tekanan inflasi pada September 2026 diperkirakan menurun, sementara pada Desember 2026, diperkirakan meningkat.

Hal ini menurutnya tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) September 2026 sebesar 155,2, lebih rendah dibandingkan dengan IEH pada Agustus 2026 sebesar 178,0. Sementara itu, IEH Desember 2026 diperkirakan sebesar 168,1, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH November 2026 sebesar 167,5.

Purbaya Beber Penerimaan Pajak Naik 23% per Juli 2026: Masih Aman

Selasa, 11 Agustus 2026 19:00 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117978/purbaya-beber-penerimaan-pajak-naik-23-per-juli-2026-masih-aman/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 masih mencatat pertumbuhan lebih dari 23%. dibanding periode yang sama tahun lalu

Purbaya menyebut kondisi tersebut menandakan kinerja penerimaan pajak masih relatif aman.

"Pak Bimo [Dirjen Pajak] lapor kemarin, dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman 23% lebih masih pertumbuhannya," kata Purbaya ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Sebagai catatan saja, Kemenkeu pada awal Juli lalu melaporkan penerimaan pajak hingga Semester I-2026 mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi tersebut telah mencapai 43,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan menjadi pembalikan dari tren kontraksi yang sempat terjadi pada periode sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Purbaya.

Dari sisi jenis pajak, hampir seluruh kelompok penerimaan mencatatkan pertumbuhan positif. PPh Badan beserta setoran deposit mencapai Rp196,1 triliun atau meningkat 28,6% dibandingkan tahun sebelumnya seiring membaiknya profitabilitas dunia usaha.

Sementara itu, penerimaan PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan deposit terealisasi sebesar Rp146 triliun atau tumbuh 13,6% secara tahunan. PPh Final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26 mencapai Rp159,9 triliun atau meningkat 1,4%.

Di sisi lain, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM mencatat pertumbuhan paling tinggi. Hingga akhir Juni 2026, penerimaannya mencapai Rp380 triliun atau melonjak 42,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara secara sektoral, pertumbuhan penerimaan pajak ditopang oleh hampir seluruh sektor utama ekonomi. Kontributor terbesar berasal dari sektor perdagangan dengan porsi 25,6%, diikuti industri pengolahan sebesar 22,8%.

Dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 45,9%, disusul sektor pertambangan sebesar 22,8% dan industri pengolahan yang tumbuh 19,9%.

Purbaya Pastikan Rp20,5 T Sudah Tersalur ke Daerah, Ini Detailnya

Selasa, 11 Agustus 2026 18:00 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117975/purbaya-pastikan-rp20-5-t-sudah-tersalur-ke-daerah-ini-detailnya/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tambahan anggaran pemerintah sebesar Rp20,5 triliun untuk pemerintah daerah telah disalurkan di seluruh wilayah pada Jumat (7/8/2026) pekan lalu.

Penyaluran anggaran tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan kas dalam memenuhi kebutuhan belanja, termasuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"[Tambahan anggaran] sudah disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita pelajari APBN-nya seperti apa, kita distribusikan sesuai dengan kondisi masing-masing, cukup untuk membayar gaji PPPK dan lain-lain," kata Purbaya ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Purbaya juga menegaskan total dana sebesar Rp20,5 triliun tersebut disalurkan secara serentak, bukan berdasarkan permohonan daerah secara bertahap.

Meski Purbaya belum memerinci secara penuh daerah yang mendapatkan alokasi terbesar dari tambahan dana tersebut tetapi ia mencontohkan penyaluran kepada wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya ingat kemarin waktu ke Kupang Kabupaten Kupang dapatnya Rp193 miliar, terus Kota Madyanya dapat Rp17 [miliar], tapi [saya pastikan] seluruh provinsi [dapat] cukup besar," tegasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai alokasi untuk DKI Jakarta, Purbaya mengatakan nilainya cukup besar. Namun, Jakarta dinilai memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat sehingga tingkat urgensi untuk memperoleh tambahan dana tidak sebesar daerah lainnya.

Sebelumnya, Purbaya juga mengatakan pemerintah turut melakukan monitoring terhadap daerah-daerah yang sedang mengalami kekurangan anggaran. Dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan akan memberikan sokongan terhadap keberlangsungan fiskal daerah.

"Kita hitung berdasarkan anggarannya dia dan kekurangan dia seperti apa. Kan bisa dideteksi itu anggarannya seperti apa, kemudian kita hitung kekurangan seperti apa sehingga mencukupi. Jadi [dana di] daerah harusnya bisa cukup. Enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi," jelas Purbaya.

Dalam kaitan ini, Purbaya menyebut pemerintah akan menggunakan anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk kucuran dana ke pemda tersebut. Dia memastikan penyaluran dana ke pemda tidak akan mengganggu penyaluran dana ke kementerian/lembaga (K/L).

"Tentunya ada yang dikurangi sedikit. Tapi dampak ke program kementerian/lembaga pasti hampir insignificant karena ini bukan diambil dari pos kementerian/lembaga," tuturnya.

Untuk diketahui, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp357,4 triliun pada semester I-2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi kontraksi sebesar 11,2%. Saat itu realisasi TKD mencapai Rp402,5 triliun, imbasnya banyak daerah mengalami kekurangan anggaran. Terutama daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

OJK Beberkan Strategi Dongkrak Kredit UMKM

Selasa, 11 Agustus 2026 15:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117956/ojk-beberkan-strategi-dongkrak-kredit-umkm/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai cara untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit UMKM dibutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan tidak cukup hanya mengejar jumlah kredit. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan dan perkembangan UMKM penerima kredit juga perlu jadi perhatian.

"Nah persoalannya sekarang adalah yang paling penting seperti apa yang tadi hasil diskusi di dalam, masalah kolaborasi itu satu hal yang sangat penting. Kedua, pendekatan itu adalah pendekatan kualitas, di samping juga kuantitas tentunya," kata Dian di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (12/8/2026)

Di sisi lain, untuk mempercepat pertumbuhan pembiayaan UMKM, OJK kata dia juga akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Bank Indonesia.

Dian menyebut pendekatan yang diperlukan bukan hanya peningkatan kuantitas kredit, tetapi juga perbaikan kualitas pembiayaan dan ekosistem UMKM.

"Jadi hari ini adalah salah satu target kita itu adalah mencapai kesepakatan dan pembentukan yang kita sebut sebagai working group sebetulnya untuk bagaimana memonitor dari waktu ke waktu peningkatan kualitas pembiayaan dan kualitas UMKM itu sendiri sebetulnya, dan pengembangan ekosistem UMKM yang lebih lebih baik lagi," jelasnya.

Sebagai catatan saja, pada Juni 2026 OJK mencatat kredit UMKM sebesar Rp1.519,1 triliun atau hanya tumbuh tipis 1,05% (yoy), membaik dibanding pertumbuhan kredit UMKM Mei 2026 sebesar 0,6%.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dirilis OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia meningkat dari 92,74% pada 2025 menjadi 93,61% pada 2026. Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional tercatat stagnan 69,57%.

Pada kesempatan yang sama, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan target penyaluran kredit UMKM meningkat menjadi Rp2.000 triliun, dari posisi saat ini yang sudah mencapai sekitar Rp1.500 triliun.

"Nah, inilah PR tambahan untuk Pak Maman [Menteri UMKM]. Karena kalau ini [kredit UMKM] bisa naik menjadi Rp2.000 triliun," ungkapnya.

Harga Minyak Makin Ganas, Rupiah Menutup Hari di Rp17.840/US\$

Selasa, 11 Agustus 2026 15:47 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117963/harga-minyak-makin-ganas-rupiah-menutup-hari-di-rp17-840-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah menutup perdagangan dengan pelemahan 0,44% ke posisi Rp17.840/US\$, memangkas penguatan yang terjadi kemarin.

Pelemahan rupiah dipicu oleh kenaikan harga minyak mentah dunia yang kembali terkerek di kisaran US\$90/barel. Ketidakpastian geopolitik kembali menjadi titik lemah mata uang Garuda hari ini, meski sejumlah sentimen domestik sempat menopang pergerakannya kemarin.

Kenaikan harga minyak terjadi setelah Presiden Donald Trump menyampaikan tuntutan baru yang luas terhadap Iran, dalam bentuk kompensasi atas orang-orang yang tewas dalam konflik. Hal ini makin mengaburkan prospek tercapainya kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz.

Hampir semua mata uang Asia melemah pada sore ini. Peso Filipina menjadi mata uang paling lemah di kawasan dengan depresiasi sebesar 0,86%, disusul baht Thailand, rupiah, dolar Taiwan, rupee India, dolar Singapura, ringgit Malaysia, dan yuan offshore. Hanya won Korea Selatan yang menguat sangat terbatas 0,03% saja.

Setali tiga uang, dari pasar obligasi pergerakan yield cukup beragam, namun pada tenor pendek terjadi aksi jual yang cukup masif. Yield tenor 5 tahun tercatat naik 4,9 basis poin (bps) ke 7,21%, disusul yield 4 tahun naik 3,1 bps ke 7,11%. Begitu juga tenor 1 dan 2 tahun mencatat kenaikan yield masing-masing 2,4 bps dan 2,8 bps ke 6,95% dan 6,98%.

Kenaikan harga minyak sepertinya mulai diterjemahkan pelaku pasar sebagai risiko yang lebih luas dengan menaikkan premi untuk memegang aset domestik.

Di sisi lain, Citi memperkirakan adanya perubahan ekspektasi terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI). Citi melihat ruang bagi BI untuk bersikap semakin dovish setelah berganti nakhoda, termasuk adanya penurunan suku bunga SRBI setidaknya 25 bps dalam jangka pendek.

Menurut Citi, sinyal itu terlihat pada lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada Jumat (7/8/2026) yang menurunkan yield SRBI sebesar 5 bps. Citi memproyeksikan ruang pelonggaran mulai terbuka terutama jika yield US Treasury juga tetap rendah dan arus dana asing ke pasar obligasi menguat.

Namun, kenaikan harga minyak yang hari ini kembali melonjak hingga US\$90/barel malah menghadirkan komplikasi. Tak terelakkan, tekanan terhadap rupiah kembali terjadi, bahkan secara luas berdampak pada mata uang kawasan.

Meski rupiah sempat tertopang oleh sentimen kepastian pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI, tapi ketika risiko global kembali meningkat, sentimen ini tak serta-merta mampu menahan tekanan eksternal.

Bagi rupiah, sentimen eksternal terkait harga minyak dapat memicu volatilitas lantaran tingginya ketergantungan domestik pada impor minyak.

Ketika harga bensin dan diesel di pasar internasional tetap tinggi, nilai impor migas otomatis meningkat, sekalipun volume impornya tidak berubah secara signifikan.

Hal ini mulai tercermin dalam data perdagangan semester pertama 2026 (Januari-Juni).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa defisit neraca migas melebar hingga mencapai US\$15,77 miliar, menggerus hampir seluruh surplus non-migas sebesar US\$19,35 miliar. Akhirnya membuat surplus perdagangan nasional menyusut menjadi hanya US\$3,58 miliar.

Pada saat yang sama, kebutuhan dolar justru meningkat karena nilai impor, terutama minyak dan gas, semakin besar. Kombinasi kedua faktor tersebut menyebabkan rupiah menjadi lebih rapuh.

Akibatnya, rupiah berpotensi semakin sensitif terhadap setiap perubahan sentimen global, baik berupa penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi AS, maupun keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik.

Arah rupiah diperkirakan masih akan sangat bergantung pada seberapa kuat sentimen domestik setelah kepastian kepemimpinan BI, dan seberapa lama risiko geopolitik mampu membuat harga minyak bertahan tinggi.

Cabai Rawit Tembus Rp60 Ribu, Daging Sapi Rp150 Ribuan

Selasa, 11 Agustus 2026 15:10 WIB

Sabrina Mulia Rhamadanty

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/117954/cabai-rawit-tembus-rp60-ribu-daging-sapi-rp150-ribuan/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Sejumlah harga pangan tercatat mengalami kenaikan pada hari ini, Selasa (11/8/2026) pukul 14.00 WIB. Kenaikan utamanya terjadi pada beras, bawang, cabai.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga beras naik di kelompok beras kualitas bawah II naik 0,68% menjadi Rp14.700 per kilogram, sedangkan beras kualitas bawah I harga tetap pada Rp14.800 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I dan medium II tetap, senilai Rp16.450 per kilogram dan Rp16.250 per kilogram. Hal yang sama juga terjadi pada beras kualitas super I dan beras kualitas super II yaitu senilai Rp17.700 dan Rp17.200 per kilogram.

Penurunan terjadi pada kelompok bawang. Bawang merah ukuran sedang turun 1,26% menjadi Rp39.200 per kilogram, sementara bawang putih ukuran sedang naik 2,4% menjadi Rp50.650 per kilogram.

Pada kelompok cabai, kenaikan harga terjadi di seluruh jenis, kecuali cabai merah besar yang turun 0,29% menjadi Rp48.700 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting naik 0,7% menjadi Rp50.250 per kilogram.

Cabai rawit hijau juga naik 2,5% menjadi Rp53.250 per kilogram. Adapun pada cabai rawit merah yang melonjak 2,8% menjadi Rp60.550 per kilogram. Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras segar naik 1% menjadi Rp40.400 per kilogram.

Sebaliknya, harga daging sapi kualitas I turun 1% menjadi Rp150.400 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 0,94% menjadi Rp141.800 per kilogram.

Sementara itu, harga telur ayam ras segar turun 0,34% menjadi Rp29.4500 per kilogram. Untuk komoditas gula, gula pasir lokal turun 0,26% menjadi Rp19.100 per kilogram.

Adapun gula pasir premium 0,28% menjadi Rp20.300 per kilogram. Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 2% menjadi Rp20.250 per kilogram. Sementara itu, minyak goreng

kemasan bermerek I turun menjadi Rp24.250 per kilogram dan minyak goreng kemasan bermerek II juga turun menjadi Rp23.550 per kilogram.

Di sisi lain, harga daging sapi kualitas I dan II serta minyak goreng bermerek masih mencatatkan penurunan, dengan harga Rp150.400 per kg, Rp141.600 per kg dan Rp24.500 per kg.

Penjualan Eceran Melambat, BI Perkirakan Tekanan Inflasi Akan Mereda

Selasa, 11 Agustus 2026 13:53 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/penjualan-eceran-melambat-bi-perkiraan-tekanan-inflasi-akan-mereda>

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia (BI) memprakirakan tekanan inflasi pada September 2026 akan menurun, sementara pada Desember 2026, diperkirakan meningkat.

Kelapa Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso memperkirakan, Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) September 2026 sebesar 155,2, lebih rendah dibandingkan dengan IEH pada Agustus 2026 sebesar 178,0.

“Sementara itu, IEH Desember 2026 diperkirakan sebesar 168,1, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH November 2026 sebesar 167,5,” tutur Denny dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Adapun inflasi diperkirakan mereda sejalan dengan penjualan eceran yang diperkirakan melambat pada September 2026. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) September yang mengalami penurunan menjadi 148,3, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 159,8.

Di sisi lain, inflasi pada Desember diperkirakan meningkat sejalan dengan IEP Desember 2026 tercatat meningkat sebesar 171,6, lebih tinggi dibandingkan periode November 2026 yang sebesar 153,8.

Responden menginformasikan bahwa penurunan pada IEP September 2026 dipengaruhi oleh normalisasi pasca kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI), sementara peningkatan pada IEP Desember 2026 dipengaruhi oleh HBKN Natal.

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29%, Kelas Menengah Justru Makin Terhimpit

Selasa, 11 Agustus 2026 12:22 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Anna Suci Perwitasari

<https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-tumbuh-529-kelas-menengah-justru-makin-terhimpit>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelas menengah Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Pendapatan rumah tangga harus terserap untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti biaya tempat tinggal, pendidikan anak, cicilan kendaraan, hingga utang konsumtif.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat kelas menengah kehilangan ruang untuk menabung maupun membangun ketahanan finansial.

"Gaji kelas menengah hari ini sering kali sudah habis bahkan sebelum masuk ke rekening," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, sebagian pendapatan masyarakat telah dialokasikan untuk cicilan rumah atau biaya sewa, uang sekolah anak, angsuran kendaraan, kartu kredit, paylater, hingga kewajiban keluarga.

Kondisi ini terjadi meski perekonomian Indonesia masih tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II-2026.

Namun, Achmad mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara agregat tidak otomatis membuat rumah tangga memiliki ruang finansial yang lebih besar.

"Pertumbuhan ekonomi menghitung peningkatan produksi, bukan menghitung berapa banyak sisa gaji keluarga setelah membayar rumah, pendidikan, dan utang," katanya.

Tekanan terhadap kelas menengah juga tercermin dari perubahan komposisi penduduk dalam beberapa tahun terakhir.

Data BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% dari populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Pada saat yang sama, kelompok menuju kelas menengah meningkat menjadi 137,5 juta orang atau 49,22% dari populasi.

Pembaruan klasifikasi BPS untuk September 2024 juga menunjukkan jumlah kelas menengah sekitar 48,41 juta orang, sedangkan kelompok menuju kelas menengah mencapai 138,31 juta orang.

Tren tersebut diperkirakan berlanjut. Perhitungan Mandiri Institute berdasarkan data Susenas memperkirakan jumlah kelas menengah pada 2025 turun menjadi 46,7 juta orang atau sekitar 16,6% penduduk.

Menurut dia, tekanan tersebut tercermin dari perubahan keputusan rumah tangga, mulai dari menunda pembelian rumah, memilih sekolah yang lebih murah, mengurangi layanan kesehatan hingga menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan rutin.

Tekanan daya beli juga terlihat dari kemampuan pendapatan rumah tangga. BPS mencatat rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp 3,39 juta per bulan.

Sementara itu, inflasi tahunan pada Juli 2026 mencapai 2,88%. Achmad menilai angka inflasi nasional tidak sepenuhnya menggambarkan tekanan yang dirasakan masing-masing keluarga karena komposisi pengeluaran setiap rumah tangga berbeda.

Keluarga dengan anak sekolah, misalnya, menghadapi tekanan biaya pendidikan. Pada Juli 2026, kelompok pendidikan mengalami inflasi bulanan sebesar 0,55% seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.

Data Bank Indonesia juga menunjukkan adanya perubahan pola keuangan rumah tangga. Dalam Survei Konsumen Juli 2026, rata-rata 72,7% pendapatan responden digunakan untuk konsumsi.

Sementara porsi pendapatan untuk pembayaran cicilan meningkat dari 10% menjadi 10,5%. Sebaliknya, porsi pendapatan yang disimpan turun dari 17% menjadi 16,8%.

Indeks Keyakinan Konsumen juga turun dari 117,8 menjadi 116,8.

Achmad mengatakan, ketika pendapatan tertekan, keluarga biasanya tidak langsung menghentikan pembayaran kebutuhan utama seperti sekolah atau cicilan. Pos yang lebih dulu dikorbankan justru tabungan, rekreasi, pembelian pakaian hingga investasi.

"Setelah tabungan habis, guncangan kecil seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kenaikan uang sekolah dapat memaksa keluarga menambah utang," jelas Achmad.

Tekanan kelas menengah juga terlihat dari sektor perumahan.

Hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia menunjukkan harga rumah primer pada kuartal II-2026 hanya tumbuh 0,69% secara tahunan. Namun, penjualan properti masih mengalami kontraksi 2,36%.

Sebanyak 70,05% pembelian rumah primer dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Menurut Achmad, persoalan utama bukan hanya kenaikan harga rumah, tetapi keterjangkauannya terhadap pendapatan masyarakat.

Uang muka, tingkat bunga, kepastian pekerjaan, serta kemampuan membayar cicilan selama bertahun-tahun menjadi pertimbangan penting bagi keluarga.

Akibatnya, masyarakat kelas menengah bisa memilih menyewa rumah lebih lama, membeli rumah yang lokasinya semakin jauh dari tempat kerja, atau menunda kepemilikan rumah.

Achmad bilang, menunda pembelian rumah dalam kondisi tersebut bukan berarti kegagalan finansial.

"Lebih rasional menyewa rumah yang terjangkau dan dekat dengan pekerjaan daripada memaksakan KPR yang menyerap terlalu banyak pendapatan," katanya.

Selain perumahan dan pendidikan, utang konsumtif menjadi persoalan lain yang membayangi kelas menengah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, baki debit Buy Now Pay Later (BNPL) perbankan pada Juni 2026 mencapai Rp30,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 33,54% secara tahunan dengan jumlah rekening mencapai 32,77 juta.

Pertumbuhan BNPL jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit konsumsi secara umum yang sebesar 5,75%.

Achmad menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat menggunakan utang digital untuk menopang konsumsi.

"Paylater mudah terlihat ringan karena cicilan bulannya kecil. Namun, beberapa cicilan kecil dari berbagai aplikasi dapat berubah menjadi defisit permanen," terang Achmad.

Oleh karena itu, ia menyarankan keluarga mulai menghentikan penggunaan utang untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kemampuan pendapatan.

Jika total cicilan telah mendekati atau melewati 30% dari pendapatan bersih, keluarga dinilai perlu menahan utang baru dan mulai menata kembali kewajibannya.

Achmad menyebut, tekanan yang dialami kelas menengah tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai persoalan keputusan finansial masing-masing keluarga.

Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok yang berada di antara kelompok penerima bantuan sosial dan masyarakat yang mampu membeli layanan secara privat.

"Pemerintah harus membangun perlindungan sosial bagi kelas menengah yang selama ini berada dalam posisi serba salah: terlalu dianggap mampu untuk menerima bantuan, tetapi tidak cukup kuat membeli semua layanan secara privat," katanya.

Sejumlah kebijakan yang dinilai diperlukan antara lain penyediaan hunian sewa terjangkau di dekat pusat pekerjaan, KPR rumah pertama dengan bunga tetap yang transparan, pemerataan sekolah negeri berkualitas, keringanan pajak pendidikan keluarga, serta pengawasan terhadap kemampuan bayar pengguna BNPL.

Achmad juga menyinggung kemungkinan semakin banyak keluarga muda menunda memiliki anak akibat tekanan biaya hidup. Namun, dia menegaskan belum terdapat cukup data resmi untuk menyimpulkan biaya hidup sebagai satu-satunya penyebab.

Menurutnya, jika semakin banyak keluarga muda merasa tidak mampu membeli rumah atau membesarkan anak, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai isu ketahanan ekonomi rumah tangga.

"Kelas menengah tidak benar-benar jatuh pada hari statistik mengubah kategorinya. Mereka mulai jatuh ketika tidak lagi mampu menabung, ketika pendidikan harus dibiayai dengan utang, dan ketika membeli rumah atau memiliki anak berubah dari rencana hidup menjadi kemewahan," pungkash Achmad.

Ekonomi Jateng Tetap Tumbuh, Industri dan Perdagangan Jadi Penopang

Selasa, 11 Agustus 2026 16:57 WIB

Arif

<https://jatengpos.co.id/ekonomi/2026/08/11/ekonomi-jateng-tetap-tumbuh-industri-dan-perdagangan-jadi-penopang/>

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG- Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi dari sisi pengeluaran, sementara dari sisi lapangan usaha didorong Industri Pengolahan dan Perdagangan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho mengatakan, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jateng dengan pangsa mencapai 59,73 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 tumbuh 4,31 persen secara tahunan (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan I yang mencapai 5,08 persen.

"Konsumsi rumah tangga tetap tumbuh kuat, didukung peningkatan mobilitas masyarakat Jawa Tengah terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026 dan libur panjang," katanya.

Menurutnya, kondisi konsumsi masyarakat juga tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan II 2026 yang masih berada pada level optimis. Hal tersebut menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi perekonomian masih terjaga.

Di sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 8,84 persen (yoy) pada triwulan II 2026. Meski melambat dari triwulan I yang tumbuh 9,61 persen, kinerja investasi tetap terjaga dengan realisasi investasi meningkat dari Rp23,73 triliun menjadi Rp25,53 triliun.

"Investasi Jawa Tengah masih menunjukkan kinerja yang kuat. Pembangunan kawasan industri dan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan investasi," ujarnya.

Noor Nugroho menambahkan, konsumsi pemerintah juga masih tumbuh kuat sebesar 15,69 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didukung akselerasi pembangunan program prioritas nasional, meski lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 19,39 persen.

Dari sisi lapangan usaha, Industri Pengolahan masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah dengan pangsa mencapai 33,18 persen. Sektor tersebut tumbuh 5,03 persen (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,04 persen.

“Peningkatan kinerja Industri Pengolahan terutama dipengaruhi oleh peningkatan ekspor barang industri yang tumbuh 41,26 persen secara tahunan,” jelasnya.

Peningkatan ekspor tersebut terutama berasal dari sejumlah komoditas unggulan Jawa Tengah, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), kayu dan furnitur, alas kaki, serta bahan makanan. Perbaikan kinerja industri juga tercermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan II 2026.

Sektor Perdagangan menjadi sumber pertumbuhan berikutnya dengan pertumbuhan 7,52 persen (yoy). Angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 5,22 persen.

“Pertumbuhan perdagangan didorong konsumsi masyarakat yang masih terjaga, terutama pada momentum Idul Adha dan libur panjang. Mobilitas masyarakat juga meningkat 5,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” terangnya.

Selain momentum hari besar dan libur panjang, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 pada triwulan II turut memberikan dorongan terhadap aktivitas perdagangan. Penjualan jersey, aksesoris, serta berbagai produk terkait sepak bola ikut mengalami peningkatan.

Sementara itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (Akmamin) menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi terbesar sekaligus mencatat pertumbuhan tertinggi. Sektor ini tumbuh 12,80 persen (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 14,14 persen.

“Kinerja akomodasi dan makan-minum masih terjaga seiring peningkatan mobilitas masyarakat saat HBKN Idul Adha dan libur panjang, serta berlanjutnya berbagai program prioritas nasional,” pungkasnya.

Dengan konsumsi masyarakat, investasi, industri pengolahan, perdagangan, serta sektor akomodasi dan makan-minum yang tetap tumbuh positif, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2026 dinilai masih memiliki fondasi pertumbuhan yang kuat.(aln)

Pemkot Semarang dorong UCC Terboyo menjadi ekosistem baru ekonomi

Selasa, 11 Agustus 2026 08:25 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641376/pemkot-semarang-dorong-ucc-terboyo-menjadi-ekosistem-baru-ekonomi>

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang mendorong Urban Consolidation Center (UCC) Terboyo menjadi simpul baru ekosistem ekonomi Kota Semarang, Jawa Tengah, apalagi lokasinya yang strategis dekat dengan berbagai simpul transportasi.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Senin, memaparkan proposal Semarang Logistic Hub UCC Terboyo dalam "Investment Challenge 2026" di Semarang, Senin.

Forum tersebut dihadiri jajaran panelis dari Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Pemprov Jateng, Bappeda Jateng, Universitas Diponegoro, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta jajaran konsultan ahli.

Menurut dia, keberadaan kawasan itu berfokus pada konsolidasi dan distribusi barang, sekaligus menghubungkan aktivitas logistik dengan UMKM, koperasi, jaringan transportasi, tenaga kerja, serta berbagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Proyek ini lebih dari sekadar bisnis sewa lahan fisik. Banyak peluang yang bisa kita eksplorasi untuk menjadi pendapatan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia menyebutkan salah satu keunggulan UCC Terboyo terletak pada lokasinya yang strategis, yakni berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Emas, akses tol, bandara, stasiun kereta, serta kawasan industri di sekitar Kota Semarang.

Posisi tersebut menjadi nilai tawar untuk memperkuat daya saing investasi sekaligus mendukung efisiensi distribusi barang.

Selain menjadi simpul logistik, UCC Terboyo juga diproyeksikan sebagai bagian dari solusi transportasi perkotaan.

Konsolidasi dan distribusi barang dalam satu kawasan terpadu diharapkan mampu mengurangi aktivitas bongkar muat kendaraan besar di berbagai titik kota.

"Secara ekonomi, kemacetan sangat berkorelasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang," katanya.

Pengembangan UCC, lanjut dia, akan ditopang oleh ekosistem bisnis yang terukur, sebab setiap tenant yang masuk nantinya diharapkan memiliki fungsi dan keterkaitan yang saling mendukung.

Karena itu, Pemkot Semarang membuka ruang kolaborasi fleksibel bersama investor dan pengelola untuk menyesuaikan skala bisnis dengan kebutuhan pasar.

Skema tersebut nantinya diintegrasikan dengan rencana pengembangan 16 gudang di tiap kecamatan yang dapat berfungsi sebagai titik pengumpulan dan distribusi barang dari dan menuju UCC Terboyo.

"Langkah integrasi ini berpotensi memperkuat daya saing sekitar 33.000 UMKM di 177 kelurahan melalui sistem klusterisasi produk dan distribusi yang lebih terarah," katanya.

Semarang Logistic Hub UCC Terboyo dirancang sebagai pusat konsolidasi dan distribusi barang yang menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, pusat perdagangan, dan pasar perkotaan.

Proyek itu memanfaatkan aset Pemkot Semarang sekitar 5,1 hektare dengan area penawaran 4,4 hektare dan kebutuhan investasi awal sekitar Rp71,17 miliar.

Jatubu Fest 2026 Dorong Ekonomi Wonosobo, Puluhan Ribu Warga Ikut Meramaikan

Selasa, 11 Agustus 2026 13:41 WIB

H. Nugraha

<https://www.rmoljawatengah.id/jatubu-fest-2026-dorong-ekonomi-wonosobo-puluhan-ribu-warga-ikut-meramaikan>

Jatubu Fest 2026 di Wonosobo tak sekadar hiburan. Festival ini membawa agenda ekonomi, pertanian, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Jatubu Fest 2026 tak sekadar menghadirkan keramaian di Wonosobo. Festival tiga hari ini membawa agenda untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal.

Puluhan ribu warga meramaikan rangkaian Tunas Bumi Fest 2026 di Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah, pada 8-10 Agustus 2026. Selain hiburan, festival tersebut menggabungkan agenda ekonomi, pertanian, budaya, hingga pemberdayaan masyarakat.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menilai kegiatan yang digelar Yayasan Jagat Tunas Bumi (Jatubu) bersama Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) itu memberikan manfaat bagi masyarakat dan berpotensi ikut menggerakkan perekonomian daerah.

"Jatubu Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Yayasan Jagat Tunas Bumi bersama GMPP dalam rangka hari ulang tahun yang ketiga, GMPP telah banyak menghadirkan kegiatan yang tentunya sangat bermakna, sangat bermanfaat karena ini akan tumbuh perekonomian di Kabupaten Wonosobo," kata Afif.

Peluang pergerakan ekonomi tersebut tidak hanya bertumpu pada jumlah warga yang datang. Sejumlah agenda dalam festival dirancang dengan membawa tema penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi lokal.

Salah satunya melalui Workshop Kemandirian Ekonomi yang digelar pada hari pertama. Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi masyarakat desa serta upaya mendorong kemandirian melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.

Agenda ekonomi itu kemudian diperkuat dengan pemberdayaan sektor pertanian. Yayasan Jatubu membawa program hibah 192.000 bibit kopi untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

Program tersebut menyasar sektor hulu dan diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi petani. Pengembangan kopi juga memiliki irisan dengan agenda lingkungan karena sejumlah program Jatubu sebelumnya menggabungkan penanaman kopi dengan upaya pemulihan kawasan hutan.

Ketua Yayasan Jatubu sekaligus Kepala Koordinator Nasional GMPP, Mantep Abdul Ghoni, mendorong masyarakat dan petani agar optimistis mengembangkan potensi lokal. Sektor pertanian dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat jika dikembangkan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, festival budaya menjadi magnet lain dalam rangkaian kegiatan. Festival Balon Udara Tradisional yang digelar pada Minggu (9/8/2026) turut menarik perhatian masyarakat Wonosobo.

Kegiatan tersebut mempertemukan agenda budaya dengan keramaian publik. Potensi seperti ini dapat membuka ruang aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kegiatan, meski besaran transaksi atau omzet yang dihasilkan selama festival belum disebutkan.

Jatubu Fest 2026 juga menghadirkan diskusi kebangsaan, pertunjukan seni dan budaya, serta berbagai agenda masyarakat. Rangkaian tersebut membuat festival tidak hanya bertumpu pada satu jenis kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melihat kegiatan semacam ini sebagai bagian dari ruang yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi daerah. Terlebih, kegiatan berlangsung bertepatan dengan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke-201 dan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rangkaian festival kemudian ditutup pada Senin (10/8/2026) malam di Alun-Alun Wonosobo. Penutupan ditandai dengan Malam Puncak serta pertunjukan budaya dari Saleho Karya Budaya.

Bagi Wonosobo, Jatubu Fest 2026 meninggalkan agenda yang lebih panjang dari sekadar keramaian selama tiga hari. Pengembangan ekonomi masyarakat, pertanian, budaya, dan potensi lokal menjadi pekerjaan lanjutan agar manfaat kegiatan dapat terus dirasakan setelah festival berakhir.

Pemkab Pati Wajibkan SPPG Serap Telur Peternak Lokal Rp26 Ribu Per Kg

Selasa, 11 Agustus 2026 17:32 WIB

Rubadi

<https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-pati-wajibkan-sppg-serap-telur-peternak-lokal-rp26-ribu-per-kg>

Pemerintah Kabupaten Pati merespons aksi unjuk rasa Asosiasi Peternak Unggas Rakyat terkait anjloknya harga telur dan lonjakan harga pakan. Pemkab menjanjikan harga telur ayam Rp 26 ribu per kilogram.

Melalui audiensi di Pendopo Kabupaten Pati, Selasa 11 Agustus 2026, Pemkab Pati menyepakati komitmen penyerapan hasil ternak lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan kesiapan daerah menjalankan Nota Dinas Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang.

Aturan tersebut mewajibkan seluruh instansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap produksi peternak setempat.

"Setiap kabupaten/kota wajib menyerap telur dari peternak lokal dengan harga Rp26.000 per kilogram. Skema pengiriman berjalan mulai pekan depan dengan frekuensi pasokan satu kali seminggu ke tiap SPPG," terang Chandra, Selasa 11 Agustus 2026.

Wakil Ketua Asosiasi Peternak Unggas Rakyat Pati, Moh. Ali Ghufon, menyambut positif kesepakatan harga tersebut. Patokan Rp26.000 per kg untuk telur dan Rp35.000 per kg untuk daging ayam dinilai sudah ideal karena mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) Bapanas.

Meski begitu, peternak mengingatkan bahwa intervensi ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah hilir.

Mengingat populasi 1,05 juta ayam petelur di Pati setidaknya menghasilkan 40-50 ton telur per hari (860 ribu butir per hari), kondisi tersebut memicu surplus. Sementara penyerapan lewat 170 unit SPPG di Pati diperkirakan baru mencakup sekitar 2% dari total produksi harian peternak lokal.

Selain itu, serbuan pasokan dari luar daerah dan peternakan skala besar masih membanjiri ritel modern serta swalayan lokal.

Ghufron mendesak Pemkab Pati tidak berhenti pada program MBG, melainkan menerbitkan regulasi perlindungan pasar yang lebih luas.

"Peternak rakyat ini mandiri tanpa subsidi negara. Pemkab harus berani membuat aturan agar produk lokal diberi porsi khusus untuk masuk ke jejaring toko modern," tegas Ghufron.

Yuan Stabil di Dekat Level Tertinggi 3,5 Tahun, Pasar Tunggu Data Inflasi AS

Rabu, 12 Agustus 2026 11:33 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/yuan-stabil-di-dekat-level-tertinggi-35-tahun-pasar-tunggu-data-inflasi-as>

KONTAN.CO.ID - Nilai tukar yuan China bertahan stabil di dekat level tertinggi dalam 3,5 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (12/8/2026).

Penguatan yuan ditopang arahan kebijakan yang lebih kuat dari bank sentral China, sementara pasar menanti data inflasi AS.

Melansir Reuters, Yuan di pasar spot terakhir berada di level 6,7465 per dolar AS, relatif tidak berubah dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang China tersebut sebelumnya menyentuh level terkuat sejak Februari 2023 pada Senin (10/8).

Sementara itu, yuan offshore melemah sekitar 0,02% menjadi 6,7479 per dolar AS dalam perdagangan Asia.

Pergerakan yuan terjadi menjelang rilis data Consumer Price Index (CPI) AS yang menjadi perhatian utama pasar global.

Data tersebut dinilai dapat memberikan petunjuk mengenai langkah kebijakan Federal Reserve (The Fed) berikutnya.

Data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan pekan lalu telah mendorong investor mengurangi ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut.

Indeks dolar AS yang mengukur kinerja greenback terhadap enam mata uang utama juga bergerak terbatas di level 99,86.

Yuan Diperkirakan Menguat Bertahap

Analisis China Construction Bank memperkirakan, yuan masih akan bergerak fluktuatif mengikuti pergerakan dolar AS sepanjang bulan ini.

"Dengan indeks dolar AS diperkirakan tetap volatil, yuan kemungkinan bergerak dua arah mengikuti dolar AS bulan ini," tulis analisis China Construction Bank dalam sebuah catatan.

Mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa yuan akan menguat secara bertahap sepanjang tahun.

Namun, potensi penguatannya dinilai terbatas sehingga peluang terjadinya kenaikan nilai yuan secara cepat kembali relatif kecil.

Sepanjang Agustus, yuan telah menguat sekitar 0,6% terhadap dolar AS. Sementara sejak awal tahun, yuan telah menguat sekitar 3,7%.

Bank Sentral China Perkuat Panduan Yuan

Sebelum perdagangan dibuka, People's Bank of China (PBOC) menetapkan kurs tengah yuan di level 6,7882 per dolar AS.

Level tersebut merupakan kurs tengah terkuat sejak 8 Februari 2023. Namun, posisi tersebut masih 452 pip lebih lemah dibandingkan perkiraan Reuters.

Yuan spot diperbolehkan bergerak dalam kisaran 2% di atas atau di bawah kurs tengah yang ditetapkan PBOC setiap hari.

Bank sentral China secara bertahap memperkuat panduan harian yuan. Namun, level yang ditetapkan masih lebih lemah dibandingkan ekspektasi pasar.

Menurut para trader dan analis, kondisi tersebut menunjukkan PBOC masih berupaya mengendalikan laju apresiasi yuan agar penguatannya tidak berlangsung terlalu cepat.

Inflasi AS Juli Diprediksi Melandai, Bagaimana Nasib Suku Bunga The Fed?

Rabu, 12 Agustus 2026 11:26 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-as-juli-diprediksi-melandai-bagaimana-nasib-suku-bunga-the-fed>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) diperkirakan meningkat secara moderat pada Juli 2026, seiring penurunan harga bensin.

Kondisi tersebut berpotensi semakin mengurangi ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tahun ini.

Melansir Reuters, Departemen Tenaga Kerja AS dijadwalkan merilis laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) pada Rabu (12/8/2026) waktu setempat.

Rilis tersebut muncul setelah data ketenagakerjaan pekan lalu menunjukkan penurunan jumlah pekerjaan yang tidak terduga.

Ekonom menilai posisi AS sebagai eksportir bersih minyak serta berkurangnya persediaan minyak mentah telah membantu meredam dampak terhadap perekonomian dari lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Meski demikian, risiko inflasi masih dinilai cenderung meningkat selama belum ada penyelesaian terhadap perang antara AS-Israel dan Iran.

"Saya tidak memperkirakan adanya kejutan signifikan ketika angka tersebut dirilis," kata Sung Won Sohn, profesor ekonomi dan keuangan di Loyola Marymount University.

Menurut dia, The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan maupun menurunkan suku bunga, kecuali kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi memburuk secara signifikan.

Harga Bensin Menurun

Survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan CPI AS naik 0,1% pada Juli, setelah turun 0,4% pada Juni. Penurunan pada Juni merupakan yang pertama dalam enam tahun.

Secara tahunan, CPI diperkirakan meningkat 3,4% pada Juli, melambat dari kenaikan 3,5% pada Juni.

Kenaikan bulanan yang moderat tersebut diperkirakan mencerminkan penurunan lebih lanjut harga bensin.

Data Energy Information Administration (EIA) menunjukkan harga rata-rata bensin berada di US\$4,064 per galon pada Juli, turun dari US\$4,184 per galon pada Juni. Harga bensin juga telah turun dari rata-rata US\$4,609 per galon pada Mei.

Sementara itu, harga makanan diperkirakan hanya naik tipis, sejalan dengan tren beberapa bulan terakhir.

Harga barang, termasuk furnitur rumah tangga dan pakaian, diperkirakan turut menyumbang kenaikan CPI yang moderat seiring meredanya dampak tarif terhadap harga konsumen.

Inflasi Masih di Atas Target

Di luar komponen makanan dan energi yang cenderung bergejolak, CPI inti diperkirakan naik 0,2% pada Juli setelah tidak berubah pada Juni.

Kenaikan tersebut akan membuat inflasi CPI inti secara tahunan berada di sekitar 2,5%.

The Fed menggunakan indeks harga Personal Consumption Expenditures (PCE) sebagai indikator utama untuk mencapai target inflasi 2%.

Meski inflasi yang lebih rendah dapat mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga, kondisi tersebut belum tentu memberikan banyak kelegaan bagi konsumen karena pertumbuhan upah belum mampu mengimbangi kenaikan harga.

"Ini merupakan perbaikan, tetapi kedua angka tersebut masih sangat tinggi dan tidak menyenangkan bagi konsumen," kata Tani Fukui, ekonom di MetLife Investment Management.

Tingginya biaya hidup juga telah memengaruhi pandangan masyarakat AS terhadap Presiden Donald Trump dan berpotensi menjadi faktor dalam pemilihan umum sela pada November mendatang yang akan menentukan kendali Kongres AS selama dua tahun berikutnya.

Trump memenangkan pemilu presiden 2024 antara lain dengan janji untuk menurunkan inflasi.

The Fed Masih Bisa Naikkan Suku Bunga

Inflasi inti diperkirakan terdorong oleh kenaikan kembali harga mobil dan truk bekas, barang terkait pendidikan dan komunikasi, serta tarif penerbangan.

Harga sewa juga diperkirakan meningkat moderat. Namun, para ekonom masih berbeda pendapat mengenai apakah harga kamar hotel dan motel akan melanjutkan tren penurunannya.

Meski CPI inti diperkirakan tetap terkendali, kondisi tersebut belum tentu tercermin sepenuhnya dalam indeks harga PCE inti.

Karena itu, sebagian ekonom masih memperkirakan The Fed akan memperketat kebijakan moneter pada September.

Sebelum data CPI dirilis, para ekonom memperkirakan PCE inti naik 0,2% secara bulanan setelah meningkat 0,1% pada Juni. Secara tahunan, inflasi PCE inti diperkirakan mencapai 3,3%, sama dengan kenaikan pada Juni.

"Jika laporan sesuai dengan ekspektasi kami, hal itu akan memperkuat alasan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga pada September," kata Stephen Juneau, ekonom AS di Bank of America Securities.

Dolar Taiwan Menguat Rabu (12/8), Rupiah Jadi Mata Uang Asia yang Melemah

Rabu, 12 Agustus 2026 09:25 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-taiwan-menguat-rabu-128-rupiah-jadi-mata-uang-asia-yang-melemah>

KONTAN.CO.ID - Dolar Taiwan menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (12/8/2026), di tengah pergerakan mayoritas mata uang Asia yang cenderung melemah.

Berdasarkan data Reuters pada pukul 02.08 GMT, dolar Taiwan berada di level 32,215 per dolar AS, menguat 0,20% dibandingkan posisi sebelumnya di 32,278.

Penguatan dolar Taiwan menjadi salah satu kinerja terbaik di kawasan Asia pada perdagangan tersebut.

Sebaliknya, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia yang mengalami pelemahan paling dalam. Rupiah berada di level Rp17.870 per dolar AS, melemah 0,22% dari posisi sebelumnya Rp17.830.

Won Korea Selatan juga turun 0,13% menjadi 1.414,80 per dolar AS. Baht Thailand melemah 0,12% ke level 33,153, sedangkan peso Filipina turun 0,15% menjadi 61,325 per dolar AS.

Dolar Singapura terkoreksi 0,11% menjadi 1,281 per dolar AS, sementara yen Jepang melemah 0,04% menjadi 159,34 per dolar AS.

Di sisi lain, rupee India bergerak stabil di level 95,435 per dolar AS. Ringgit Malaysia juga tidak berubah di 4,090 per dolar AS.

Yuan China nyaris stagnan di level 6,746 per dolar AS, dibandingkan posisi sebelumnya 6,7466.

Rupiah Melemah 6,72% Sepanjang 2026

Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025, rupiah mencatat pelemahan paling dalam di antara sejumlah mata uang Asia yang tercatat dalam data tersebut.

Rupiah berada di level Rp17.870 per dolar AS pada perdagangan Rabu, dibandingkan Rp16.670 pada akhir 2025. Dengan demikian, rupiah telah melemah sekitar 6,72% sepanjang 2026.

Rupee India menyusul dengan pelemahan 5,83%, kemudian baht Thailand yang turun 5,14% dan peso Filipina yang melemah 4,12%.

Yen Jepang melemah 1,69% sepanjang tahun berjalan, sedangkan ringgit Malaysia turun 0,83%.

Sementara itu, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang menguat terhadap dolar AS sepanjang 2026, dengan kenaikan sekitar 1,75%.

Yuan China juga menguat 3,59%, sedangkan dolar Singapura naik 0,37%.

Dolar Taiwan sendiri masih melemah 2,41% dibandingkan posisi akhir 2025, meski pada perdagangan Rabu menguat 0,20% terhadap dolar AS.

Inflasi India Naik Jadi 4,45% pada Juli, Tembus Target Bank Sentral

Rabu, 12 Agustus 2026 18:06 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Handoyo

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-india-naik-jadi-445-pada-juli-tembus-target-bank-sentral>

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Inflasi ritel India kembali meningkat pada Juli 2026 seiring kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut membuat inflasi tahunan India naik menjadi 4,45%, dari 4,38% pada Juni 2026.

Data inflasi Juli tersebut hampir sesuai dengan hasil jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom yang memperkirakan inflasi berada di level 4,50%. Kenaikan ini juga menandai bulan kedua berturut-turut inflasi India berada di atas target jangka menengah Reserve Bank of India (RBI) sebesar 4%.

Meski inflasi kembali meningkat, laju kenaikan harga tersebut dinilai belum cukup untuk mendorong bank sentral India mengubah arah kebijakan suku bunganya.

RBI pada pekan lalu mempertahankan suku bunga repo acuan di level 5,25%. Para pembuat kebijakan masih menunggu bukti yang lebih jelas mengenai apakah tekanan inflasi telah meluas di negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia tersebut.

Inflasi Pangan India Meningkat

Salah satu faktor utama yang mendorong inflasi India pada Juli adalah kenaikan harga pangan. Inflasi pangan meningkat menjadi 5,52% pada Juli dari 5,32% pada Juni.

Kenaikan tersebut terjadi di tengah curah hujan monsun yang relatif lemah. Namun, inflasi pangan diperkirakan dapat mereda apabila curah hujan sedikit membaik pada Agustus.

Perbaikan hujan berpotensi membantu menekan tekanan harga lebih lanjut yang berkaitan dengan dampak El Nino.

Gubernur RBI Sanjay Malhotra mengatakan inflasi utama telah bergerak di atas target terutama akibat kenaikan harga bahan bakar. Sementara itu, tekanan harga yang lebih luas masih berada dalam kendali pada pengumuman kebijakan moneter terakhir bank sentral pada awal Agustus.

Pada pertemuan tersebut, RBI juga memangkas proyeksi inflasi untuk tahun fiskal 2026/2027 sebesar 10 basis poin menjadi 5%.

Harga BBM Jadi Perhatian

Perkembangan harga bahan bakar juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam prospek inflasi India.

Perusahaan ritel bahan bakar milik negara India menaikkan harga bensin dan diesel sebanyak empat kali pada Mei sebagai respons terhadap kenaikan biaya akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Meskipun jeda singkat dalam konflik tersebut sempat mendorong harga minyak mentah global turun, harga minyak masih berada sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang.

Para ekonom menilai volatilitas harga minyak mentah selama Juli belum secara signifikan diteruskan kepada konsumen India. Hal tersebut karena tidak adanya perubahan berarti pada harga eceran bahan bakar domestik.

Namun, tekanan biaya transportasi mulai meningkat. Inflasi sektor transportasi tercatat naik menjadi 4,43% pada Juli dari 4,31% pada Juni.

Kenaikan inflasi ritel India pada Juli menunjukkan bahwa tekanan harga masih menjadi perhatian bagi RBI. Meski demikian, inflasi yang meningkat secara moderat dan masih didorong terutama oleh pangan serta bahan bakar diperkirakan belum cukup untuk mengubah sikap bank sentral terhadap kebijakan suku bunga.

Korea Selatan Umumkan Tujuh Proyek Teknologi Pendorong Ekonomi Masa Depan

Rabu, 12 Agustus 2026 15:10 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/korea-selatan-umumkan-tujuh-proyek-teknologi-pendorong-ekonomi-masa-depan>

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Selatan (Korsel) meluncurkan berbagai proyek teknologi ambisius, Rabu (12/8/2026). Reuters melaporkan, strategi teknologi ini berpusat pada tujuh proyek.

Tujuh proyek tersebut mulai dari energi nuklir dan komputasi kuantum hingga proyek antariksa dan bioteknologi. Seperti diumumkan sebelumnya, Korsel berupaya mengamankan mesin pertumbuhan baru di luar sektor semikonduktor dan akal imitasi (AI).

Inisiatif tersebut dinamakan Seven Major SEED. Presiden Korsel Lee Jae Myung mengumumkan inisiatif tersebut dalam pertemuan di Blue House.

Lee menyatakan, Korea Selatan harus memanfaatkan peluang dari lonjakan industri semikonduktor dan pesatnya perkembangan AI untuk mempersiapkan penggerak pertumbuhan masa depan negara tersebut, sebelum teknologi-teknologi itu benar-benar muncul.

"Ketujuh proyek SEED yang kita bahas hari ini akan menjadi mesin pertumbuhan generasi mendatang dan aset strategis nasional yang utama," ujar Lee, seperti dikutip Reuters, Rabu (12/8/2026).

Menurut Menteri Sains Korsel Bae Kyung-hoon, inisiatif ini mencakup SMR, energi fusi, energi terbarukan generasi mendatang, teknologi kuantum, sektor antariksa dan penerbangan, bioteknologi tingkat lanjut, serta rantai pasok mineral dan material kritis.

Rencana ini muncul di tengah tantangan menyusutnya populasi usia kerja dan melambatnya potensi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Di saat yang sama, negara ini bersaing untuk meraih keunggulan dalam teknologi baru yang semakin dipandang krusial bagi daya saing ekonomi dan keamanan nasional.

"Kami akan membantu benih-benih ini tumbuh dan membangun Korea Selatan yang tak tertandingi dalam 10 atau 20 tahun ke depan," kata Bae.

Menurut siaran pers pemerintah Korsel, proyek pertama yang disiapkan melalui strategi ini adalah proyek SMR. Korea Selatan menargetkan komersialisasi SMR buatan dalam negeri pada tahun 2035 dan memulai pembangunan SMR non-light-water pada dekade 2030-an.

Kedua, pemerintah Korsel mengembangkan energi fusi. Pemerintah Korsel sekaligus mengupayakan pembangkitan listrik berbasis fusi pada akhir dekade 2030-an.

Ketiga, mengembangkan energi terbarukan. Komponen energi terbarukan dalam rencana ini mencakup pengembangan sel surya ultra-efisien, teknologi angin lepas pantai tingkat lanjut, sistem produksi hidrogen, dan teknologi jaringan listrik berbasis AI.

Keempat, di bidang teknologi kuantum, pemerintah negeri ginseng ini menargetkan pengembangan prosesor kuantum 100-qubit dengan kemampuan koreksi kesalahan buatan dalam negeri pada tahun 2029, serta berupaya menjadi negara produsen cip kuantum terkemuka di dunia pada tahun 2035.

Kelima, Korsel juga menyiapkan program antariksa. Negara asal K-pop ini menargetkan bisa melakukan misi pendaratan di bulan secara mandiri pada 2030. Lalu, misi pendaratan di bulan kedua ditargetkan pada 2032, dan pembangunan jaringan komunikasi satelit orbit rendah bumimandiri pada 2035.

Pemerintah juga berencana mengembangkan teknologi terkait pusat data antariksa serta mendukung partisipasi Korea Selatan dalam program pesawat komersial generasi mendatang.

Keenam, di sektor bioteknologi, Korea Selatan menargetkan pembangunan infrastruktur bio AI pada tahun 2030 dan komersialisasi produk antarmuka otak-komputer pada tahun 2035, sembari mendukung penemuan obat berbasis AI, laboratorium otonom, serta terapi gen dan sel tingkat lanjut.

Ketujuh, Korsel berupaya mengamankan komponen rantai pasok. Ini mencakup langkah-langkah untuk memperluas pengolahan dan daur ulang mineral kritis di dalam negeri, meningkatkan cadangan strategis, mendiversifikasi sumber pasokan, serta menginvestasikan 10 triliun won dalam teknologi material, komponen, dan peralatan hingga 2030.

Para pejabat Korsel juga menyatakan, sebuah gugus tugas gabungan pemerintah dan swasta akan dibentuk untuk membantu mempercepat komersialisasi melalui reformasi regulasi. "Apakah kita akan menjadi pemimpin yang menikmati peluang tak terbatas atau sekadar pengikut yang berisiko tertinggal, semua itu bergantung pada pilihan kita," ujar Lee.

Peluang Kenaikan Suku Bunga The Fed Menyusut, Inflasi AS Naik Tipis Sesuai Ekspektasi

Rabu, 12 Agustus 2026 19:51 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/peluang-kenaikan-suku-bunga-the-fed-menyusut-inflasi-as-naik-tipis-sesuai-ekspektasi>

KONTAN.CO.ID - Inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) meningkat tipis pada Juli 2026 sesuai ekspektasi pasar.

Kondisi ini berpotensi melemahkan alasan bagi Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga pada pertemuan September mendatang.

Melansir Reuters pada Rabu (12/8/2026), Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, Consumer Price Index (CPI) naik 0,1% pada Juli dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Juni, CPI justru turun 0,4% yang menjadi penurunan pertama dalam enam tahun.

Secara tahunan, CPI naik 3,4% hingga Juli, melambat dari kenaikan 3,5% pada Juni.

Sementara itu, inflasi inti yang tidak memperhitungkan harga pangan dan energi meningkat 0,2% secara bulanan pada Juli, setelah tidak berubah pada Juni.

Dalam basis tahunan, inflasi inti mencapai 2,5%, turun dari 2,6% pada bulan sebelumnya.

Angka tersebut sejalan dengan ekspektasi ekonom yang disurvei Reuters. Sebelumnya, ekonom memperkirakan CPI naik 0,1% dan inflasi inti meningkat 0,2% pada Juli.

Peluang Kenaikan Suku Bunga Fed

Data inflasi terbaru menjadi perhatian pasar setelah laporan ketenagakerjaan AS pekan lalu menunjukkan penurunan lapangan kerja yang mengejutkan.

Sebelum data CPI dirilis, pasar keuangan memperkirakan peluang sekitar 46% bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan 15-16 September, berdasarkan CME FedWatch.

The Fed masih akan mendapatkan data CPI dan ketenagakerjaan untuk Agustus sebelum pertemuan tersebut.

Ekonom memperkirakan tekanan inflasi kembali meningkat pada Agustus seiring kenaikan harga minyak baru-baru ini. Pertumbuhan lapangan kerja juga diperkirakan kembali menguat setelah distorsi musiman mereda.

The Fed pada bulan lalu mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50%-3,75%.

Harga Minyak Jadi Risiko Inflasi

Posisi AS sebagai eksportir minyak bersih dan pengurangan persediaan minyak bumi sejauh ini membantu meredam dampak kenaikan harga minyak terhadap perekonomian akibat konflik di Timur Tengah.

Namun, sejumlah ekonom menilai kondisi tersebut tidak dapat berlangsung selamanya.

AS dan negara-negara lain pada akhirnya perlu kembali mengisi persediaan minyak bumi, yang berpotensi menjaga harga minyak tetap tinggi.

Kenaikan harga minyak menjadi salah satu risiko terhadap prospek inflasi AS, terutama jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut Iran sebagai "negosiator yang licik" dan mengatakan dirinya dapat membiarkan perekonomian Teheran melemah atau mengambil tindakan yang jauh lebih keras.

Meski inflasi Juli yang lebih rendah dapat semakin mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga, tekanan biaya hidup masih menjadi persoalan bagi masyarakat AS karena pertumbuhan upah belum mampu mengimbangi kenaikan harga.

Tingginya biaya hidup juga berpotensi memengaruhi dukungan politik terhadap Trump menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections) November mendatang yang akan menentukan kendali Kongres AS untuk dua tahun berikutnya.

Inflasi Amerika Serikat di Juli Melandai, Mencapai 3,4% Secara Tahunan

Rabu, 12 Agustus 2026 19:46 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-amerika-serikat-di-juli-melandai-mencapai-34-secara-tahunan>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Laju inflasi tahunan Amerika Serikat (AS) mengalami perlambatan pada Juli 2026. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen atau consumer price index (CPI) Juli cuma naik sebesar 3,4% secara tahunan.

Realisasi tersebut melambat dari inflasi sebesar 3,5% yang dicatatkan pada Juni. Kendati begitu, realisasi tersebut sejalan dengan konsensus proyeksi analis, yang memprediksi inflasi berada di 3,4%.

Secara bulanan, inflasi AS naik 0,1% pada Juli setelah pada Juni justru mencatat penurunan 0,4%. Kenaikan bulanan tersebut juga sejalan dengan konsensus proyeksi analis.

Tekanan inflasi inti juga menunjukkan perkembangan positif. Inflasi inti, yang tidak memperhitungkan komponen makanan dan energi yang cenderung volatil, naik 0,2% secara bulanan pada Juli.

Secara tahunan, inflasi inti mencapai 2,5%, turun dari 2,6% pada Juni. Angka tersebut juga sesuai dengan konsensus proyeksi ekonom.

Pergerakan harga energi menjadi salah satu faktor yang menahan laju inflasi AS pada Juli. Indeks energi turun 1,5% secara bulanan setelah merosot 5,7% pada Juni.

Harga bensin juga turun 2,9% pada Juli. Namun, secara tahunan harga energi masih tercatat naik 14,7%, sementara harga bensin melonjak 24,6%.

Di sisi lain, biaya tempat tinggal masih menjadi sumber tekanan utama bagi inflasi. Indeks perumahan naik 0,1% pada Juli dan menyumbang sekitar dua pertiga dari kenaikan inflasi bulanan.

Harga sewa tempat tinggal utama maupun indeks owners' equivalent rent masing-masing naik 0,3%. Secara tahunan, indeks perumahan meningkat 3,2%.

Tekanan juga terlihat pada sejumlah komponen jasa. Tarif penerbangan melonjak 2,2% secara bulanan, sementara indeks layanan kesehatan naik 0,4%.

Harga jasa komunikasi naik 0,6% dan pendidikan meningkat 0,5%. Harga mobil bekas juga kembali naik 0,4% setelah sebelumnya turun 0,2% pada Juni.

Sementara itu, harga makanan hanya naik 0,1% pada Juli. Harga makanan yang dikonsumsi di rumah bahkan turun 0,1%, sedangkan harga makanan di luar rumah meningkat 0,3%. Secara tahunan, harga makanan naik 3,0%, dengan harga makanan di luar rumah meningkat 3,4%.

Data inflasi Juli menjadi penting bagi arah kebijakan Federal Reserve (The Fed), terutama setelah bank sentral AS mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,50%-3,75% dalam rapat 28-29 Juli.

Dengan inflasi utama dan inflasi inti yang sama-sama melandai, akan ada sedikit ruang bagi The Fed untuk tidak terburu-buru menaikkan suku bunga. Ini sesuai dengan pernyataan Chairman The Fed Kevin Warsh usai FOMC Juli lalu.

Kendati begitu, inflasi inti sebesar 2,5% masih berada di atas target 2%, sementara tekanan harga pada sejumlah jasa dan biaya tempat tinggal belum sepenuhnya hilang. Pasar pun masih mencermati kemungkinan perubahan kebijakan pada pertemuan The Fed berikutnya pada 15-16 September.

Investasi Asing Ogah Masuk Ke Negara Tetangga RI Ini, Tanam Modal Anjlok Ke Terendah

Rabu, 12 Agustus 2026 07:28 WIB

Reporter: Adi Wikanto, Editor: Adi Wikanto

<https://internasional.kontan.co.id/news/investasi-asing-ogah-masuk-ke-negara-tetangga-ri-ini-tanam-modal-anjlok-ke-terendah>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Arus investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI) ke Filipina merosot tajam pada Mei 2026. Penurunan ini terjadi di tengah meningkatnya kehati-hatian investor terhadap kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik.

Mengutip Philstar.com, Selasa (11/8/2026), berdasarkan data awal Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), FDI netto Filipina pada Mei 2026 tercatat sebesar US\$ 210 juta atau sekitar Rp 3,75 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.834 per dolar AS.

Nilai tersebut anjlok 64,7% dibandingkan FDI pada Mei 2025 yang mencapai US\$ 595 juta atau sekitar Rp 10,61 triliun.

FDI Filipina pada Mei 2026 juga turun 16% dibandingkan April 2026 yang mencapai US\$ 250 juta atau sekitar Rp 4,46 triliun.

Dengan capaian tersebut, arus FDI Filipina pada Mei 2026 menjadi yang terendah sejak Maret 2015. Kala itu, FDI netto Filipina hanya mencapai US\$ 200 juta.

Investasi utang anjlok

Penurunan FDI Filipina pada Mei 2026 terutama dipicu oleh merosotnya investasi netto dalam instrumen utang. Komponen ini mencerminkan antara lain pinjaman antara investor asing dengan anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya di Filipina.

Menurut data BSP yang dikutip BusinessWorld, investasi netto dalam instrumen utang anjlok 92,1% secara tahunan menjadi hanya US\$ 35 juta pada Mei 2026. Setahun sebelumnya, nilainya masih mencapai US\$ 440 juta.

Penurunan tersebut cukup dalam untuk mengimbangi kenaikan pada dua komponen FDI lainnya, yakni investasi modal ekuitas dan reinvestasi laba.

Investasi modal ekuitas netto justru tumbuh 24,5% menjadi US\$ 77 juta pada Mei 2026, dari US\$ 62 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, reinvestasi laba meningkat 5,7% menjadi US\$ 98 juta dari sebelumnya US\$ 93 juta.

Meski investasi ekuitas netto meningkat, kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh peningkatan penempatan modal baru. Penempatan ekuitas bruto justru turun sekitar 19% menjadi US\$ 87 juta dari US\$ 108 juta.

Namun, penarikan modal juga mengalami penurunan signifikan menjadi US\$ 10 juta dari US\$ 46 juta. Kondisi tersebut membuat investasi ekuitas netto tetap tumbuh meskipun penempatan modal bruto mengalami penurunan.

FDI Januari-Mei 2026 turun 33,4%

Penurunan pada Mei turut menekan kinerja investasi asing Filipina sepanjang lima bulan pertama 2026.

Berdasarkan data BSP, FDI netto Filipina sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai US\$ 2,18 miliar atau sekitar Rp 38,88 triliun.

Angka tersebut turun 33,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai US\$ 3,27 miliar atau sekitar Rp 58,32 triliun.

BSP menyebut penurunan FDI sepanjang Januari-Mei 2026 terutama disebabkan oleh merosotnya investasi netto dalam instrumen utang dan reinvestasi laba. Penurunan kedua komponen tersebut lebih besar dibandingkan kenaikan investasi modal ekuitas.

Dalam lima bulan pertama 2026, investasi netto dalam instrumen utang turun 49,5% menjadi US\$ 1,25 miliar dari US\$ 2,48 miliar.

Reinvestasi laba juga turun 9,7% menjadi US\$ 383 juta dari US\$ 424 juta.

Sebaliknya, investasi modal ekuitas netto melonjak 48,7% menjadi US\$ 541 juta dari US\$ 364 juta.

BSP menyebut penempatan modal ekuitas selama Januari-Mei 2026 terutama berasal dari Jepang, Amerika Serikat (AS), dan Singapura.

Investasi tersebut terutama mengalir ke sektor manufaktur, kegiatan keuangan dan asuransi, serta real estat.

Investor masih wait and see

Kepala Ekonom Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC) Michael Ricafort menilai pelemahan FDI Filipina mencerminkan kombinasi ketidakpastian geopolitik dan domestik yang menekan minat investor.

Menurut dia, pelemahan investasi asing tersebut juga sejalan dengan perlambatan investasi secara keseluruhan serta pertumbuhan ekonomi Filipina pada kuartal II 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan investor cenderung mengambil sikap lebih hati-hati sebelum meningkatkan penempatan modal di Filipina.

Selain faktor domestik, ketidakpastian geopolitik juga menjadi salah satu faktor yang membebani arus investasi asing.

FDI berbeda dengan persetujuan investasi

BSP menegaskan bahwa data FDI yang mereka catat menggambarkan arus investasi lintas batas yang benar-benar terealisasi.

Data tersebut berbeda dengan angka persetujuan investasi yang dilaporkan oleh lembaga promosi investasi.

Persetujuan investasi pada dasarnya merupakan komitmen penanaman modal yang belum tentu langsung terealisasi pada periode yang sama.

Dengan demikian, data FDI BSP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan arus modal asing yang benar-benar masuk ke Filipina.

Penurunan FDI pada Mei 2026 menunjukkan tekanan terhadap arus modal asing Filipina masih cukup kuat. Jika tren tersebut berlanjut, pelemahan investasi asing dapat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Filipina pada paruh kedua tahun ini.

Konsumsi Mulai Melemah, Penjualan Eceran Juli 2026 Turun 0,7%

Rabu, 12 Agustus 2026 07:05 WIB

Reporter: Siti Masitoh, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/konsumsi-mulai-melemah-penjualan-eceran-juli-2026-turun-07>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga kembali terlihat. Penjualan eceran pada Juli 2026 tercatat turun secara bulanan, seiring berakhirnya momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan libur sekolah.

Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) Juli 2026 diperkirakan berada di level 224,4. Angka tersebut turun 0,7% secara bulanan (mom). Sementara secara tahunan, IPR masih tumbuh 0,9%.

Secara bulanan, penurunan IPR terutama dipicu oleh melemahnya penjualan kelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,8%, serta makanan, minuman dan tembakau yang turun 0,9%.

Penurunan lebih dalam tertahan oleh kenaikan penjualan kelompok perlengkapan rumah tangga dan lainnya yang tumbuh 9,5% dibandingkan bulan sebelumnya.

Jika dilihat secara tahunan, pertumbuhan IPR Juli 2026 yang hanya 0,9% terutama tertahan oleh penjualan peralatan informasi dan komunikasi yang merosot 20,8%. Penjualan kelompok rekreasi dan barang budaya juga turun 10,4%.

Sebaliknya, penjualan suku cadang dan aksesoris masih mencatat pertumbuhan 10,8% secara tahunan.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, kinerja penjualan eceran pada Juli 2026 masih lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kinerja penjualan pada Juli 2026 tersebut lebih baik dibandingkan Juli 2025 yang turun 4,1% dibanding bulan sebelumnya," kata Ramdan, Selasa (11/8/2026).

Daya beli mulai tertekan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurrahman menilai pelemahan penjualan eceran sejalan dengan berakhirnya momentum HBKN dan libur sekolah.

Di saat yang sama, penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menunjukkan rumah tangga mulai lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya.

"Kombinasi ini menunjukkan rumah tangga mulai lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya," kata Rizal.

Menurut dia, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026. Namun, laju pertumbuhannya berpotensi terbatas apabila daya beli masyarakat tidak segera menguat.

Tekanan terhadap konsumsi juga berpotensi datang dari sisi harga. Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rahman memperkirakan tekanan inflasi dapat meningkat akibat kenaikan harga energi nonsubsidi dan dampak El Nino terhadap harga pangan.

Kenaikan harga tersebut berisiko mengurangi ruang belanja masyarakat karena sebagian pendapatan rumah tangga harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan energi.

"Untuk itu memang dibutuhkan stimulus dari pemerintah untuk tetap menjaga momentum dan daya beli masyarakat tersebut," kata Faisal.

Dengan demikian, pelemahan penjualan eceran pada Juli menjadi sinyal yang perlu dicermati. Meski konsumsi masih tumbuh secara tahunan, pertumbuhan yang tipis menunjukkan pemulihan daya beli belum sepenuhnya solid.

Kondisi ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga konsumsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026.

Utang Pemerintah Era Prabowo Bertambah Rp1.819 Triliun, Ekonom Soroti Risikonya

Rabu, 12 Agustus 2026 20:01 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-pemerintah-era-prabowo-bertambah-rp1819-triliun-ekonom-soroti-risikonya>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Utang pemerintah Indonesia bertambah nyaris Rp 2.000 triliun sejak Presiden Prabowo Subianto mulai menjabat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemampuan perekonomian domestik dalam menanggung beban utang yang terus meningkat.

Hingga akhir Juni 2026, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 10.293,69 triliun atau setara 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut meningkat sekitar Rp 1.819,79 triliun dibandingkan posisi utang sebelum Prabowo menjabat pada akhir September 2024 yang sebesar Rp 8.473,90 triliun.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, kenaikan utang perlu dilihat secara relatif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ia menilai, yang perlu menjadi perhatian bukan hanya besarnya nominal utang, tetapi juga kemampuan ekonomi untuk mengimbangi pertumbuhan utang tersebut.

David mencatat, posisi utang pemerintah pada kuartal II-2026 telah tumbuh 67,5% dibandingkan level pada 2020. Sementara itu, PDB nominal dalam periode yang sama hanya tumbuh 64,9%.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan utang yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Apabila tren akselerasi tersebut berlanjut, kemampuan perekonomian domestik dalam menanggung utang berpotensi melemah.

"Jika tren akselerasi ini berlanjut, kemampuan perekonomian domestik dalam menanggung utang berpotensi melemah, meski dalam posisi saat ini Indonesia belum masuk dalam kategori debtor state," ujar David kepada Kontan, Rabu (12/8).

Namun, menurut David perkembangan tersebut tetap perlu menjadi perhatian, terutama untuk memastikan utang yang ditarik pemerintah dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

"Kenaikan rasio hutang terhadap PDB menunjukkan bahwa hutang yang saat ini ditarik belum terlampau optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi," ujar David.

Ia menambahkan, kapasitas fiskal dalam menanggung utang juga dapat dilihat dari rasio penerimaan fiskal terhadap pembayaran bunga. Rasio tersebut saat ini telah mencapai sekitar 19%, meningkat dibandingkan 14,6% pada 2022.

Di sisi lain, David menilai kenaikan nominal utang pemerintah merupakan hal yang wajar, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk yang terus berkembang.

Namun, persoalan utamanya adalah kemampuan produktivitas perekonomian untuk meningkat sehingga dapat mengimbangi kenaikan utang.

"Tren kenaikan nominal utang pemerintah merupakan suatu hal yang wajar, terutama pada negara dengan demografi yang terus berkembang. Yang perlu diperhatikan adalah apakah produktivitas perekonomian tersebut dapat terakselerasi demi mengkompensasi kenaikan utang tersebut," kata David.

Utang Pemerintah di Era Prabowo Nyaris Rp 2.000 Triliun

Posisi utang pemerintah mulai meningkat sejak awal pemerintahan Prabowo. Sebelum Prabowo menjabat pada 20 Oktober 2024, utang pemerintah per akhir September 2024 tercatat sebesar Rp 8.473,90 triliun atau 38,55% terhadap PDB.

Kemudian, per akhir Desember 2024, utang pemerintah meningkat menjadi Rp 9.105 triliun atau 39,81% terhadap PDB.

Kenaikan berlanjut hingga akhir 2025. Posisi utang pemerintah per akhir Desember 2025 mencapai Rp 9.637,90 triliun atau 40,46% terhadap PDB.

Memasuki 2026, tren kenaikan masih berlanjut. Hingga akhir Juni 2026, utang pemerintah telah mencapai Rp 10.293,69 triliun atau 41,26% terhadap PDB.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.819,79 triliun atau melonjak 21,5%.

Kenaikan utang tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan pemerintah menjaga kesehatan fiskal dan memastikan keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hampir 50% Penerimaan Negara Habis Bayar Utang, Ekonom Soroti Fiskal yang Menyempit

Rabu, 12 Agustus 2026 19:59 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

<https://nasional.kontan.co.id/news/hampir-50-penerimaan-negara-habis-bayar-utang-ekonom-soroti-fiskal-yang-menyempit>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, persoalan utang pemerintah perlu dilihat bukan hanya dari sisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari kemampuan penerimaan negara dalam menanggung beban pembayaran utang.

Pasalnya, Hampir separuh penerimaan negara terserap untuk membayar pokok dan bunga utang pemerintah. Kondisi ini dinilai semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi.

Berdasarkan laporan APBN yang telah diaudit per Desember 2025, Juniman menyebut pembayaran bunga utang mencapai sekitar Rp 800 triliun, sementara pembayaran pokok utang sekitar Rp 515 triliun. Dengan demikian, total pembayaran pokok dan bunga mencapai sekitar Rp 1.315 triliun.

Sementara itu, total penerimaan negara dalam laporan APBN tersebut sekitar Rp 2.700 triliun. Artinya, hampir 49% penerimaan negara terserap untuk membayar pokok dan bunga utang.

"Jadi dari penerimaan negara itu hampir sekitar 49% itu hanya untuk bayar utang dan pokoknya, pembayaran utang dan pokoknya. Kebayang aja, sisanya itu baru bisa habis pakai untuk subsidi, gaji dan lain sebagainya," ujar Juniman kepada Kontan, Rabu (12/8/2026).

Menurut Juniman, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Pasalnya, setelah memenuhi kewajiban pembayaran utang, pemerintah masih harus menyediakan anggaran untuk subsidi, pendidikan, belanja pegawai, serta berbagai program pemerintah lainnya.

Tekanan tersebut terjadi ketika posisi utang pemerintah juga terus meningkat. Hingga 30 Juni 2026, utang pemerintah telah mencapai Rp 10.293,69 triliun, setara dengan 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dari Rp 9.637,90 triliun pada akhir 2025.

Jika dibandingkan dengan posisi sebelum Presiden Prabowo Subianto menjabat, yakni Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024, utang pemerintah telah bertambah sekitar Rp 1.819,79 triliun atau 21,5%.

Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Prabowo, tambahan utang pemerintah sudah mendekati Rp 2.000 triliun.

Juniman menilai, peningkatan utang tersebut perlu diwaspadai karena semakin besar utang, semakin besar pula kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang harus disediakan pemerintah.

Bunga Utang Makin Membebani

Selain pembayaran pokok, Juniman menyoroti meningkatnya beban bunga utang terhadap penerimaan pemerintah. Ia menyebut rasio pembayaran bunga utang telah meningkat dari sekitar 14% pada 2022 menjadi hampir 19%.

Menurutnya, angka tersebut baru mencerminkan pembayaran bunga dan belum memperhitungkan pembayaran pokok utang.

"Ya sudah pasti itu, sudah pasti akan menekan fiskal. Kan untuk bunganya saja sudah hampir 19% dari APBN, belum lagi pokoknya," kata Juniman.

Ia memperkirakan pembayaran pokok utang pada tahun ini dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika penerimaan negara tidak tumbuh sebanding dengan kenaikan kewajiban pembayaran utang, rasio pembayaran pokok dan bunga terhadap penerimaan negara akan semakin besar.

Kondisi tersebut, lanjut Juniman, akan semakin membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memberikan stimulus ekonomi.

"Dan membuat termasuk fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan makin terbatas. Itu baru persoalan bayar utang, belum persoalan untuk belanja yang lain," jelasnya.

Menurut Juniman, persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di kisaran 6%-8%, pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang cukup untuk memberikan stimulus dan membiayai pembangunan.

Namun, ruang tersebut semakin terbatas karena pemerintah dibatasi oleh ketentuan defisit fiskal sekitar 3% terhadap PDB.

"Kalau growth-nya ingin growth di atas 6% sampai 8%, tentu pemerintah harus mencari dana untuk membiayai growth itu. Nggak bisa untuk menyandarkan dari pemerintah, sebesar apapun pemerintah untuk melakukan stimulus. Kalau ceritanya defisitnya dipatok di 3%, ruang fiskalnya nggak ada," ujar Juniman.

Karena itu, Juniman mengingatkan pemerintah agar tambahan utang dapat diarahkan untuk kegiatan produktif yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai utang baru lebih banyak digunakan untuk membayar kewajiban utang sebelumnya atau membiayai belanja yang tidak meningkatkan kapasitas ekonomi.

"Jangan sampai utang dipakai hanya untuk membayar utang atau membayar subsidi dan lain sebagainya, tapi bukan untuk pembangunan," tegas Juniman.

Menurutnya, rasio utang terhadap PDB yang masih berada di sekitar 41% dan di bawah batas 60% tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran kesehatan fiskal. Pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara dalam membayar pokok dan bunga utang.

"Jangan sampai ke sana, soalnya nanti tekanan daripada fiskal kita makin berat. Di 40% saja sekarang, pembayaran utang, pokok dan bunga terhadap penerimaan sekarang sudah 49%," pungkas Juniman.

Penerimaan Pajak Baru Separuh Target, Pemerintah Dikejar Setoran Rp 1.148 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 05:27 WIB

Reporter: Dendi Siswanto, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-baru-separuh-target-pemerintah-dikejar-setoran-rp-1148-triliun?page=1>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih menghadapi pekerjaan berat untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2026.

Hingga akhir Juli, penerimaan pajak baru mencapai sekitar separuh dari target tahunan, sementara basis penerimaan dari sektor manufaktur terus menunjukkan tren penurunan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 1.209,6 triliun.

Angka tersebut setara 51,31% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Meski baru memenuhi separuh target, penerimaan pajak hingga Juli sebenarnya tumbuh cukup tinggi. Realisasi tersebut meningkat 22,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 990,01 triliun.

Namun, pertumbuhan tersebut belum membuat target tahunan aman. Pemerintah masih harus mengumpulkan Rp 1.148,1 triliun dalam lima bulan terakhir tahun ini.

Dengan demikian, rata-rata penerimaan pajak yang harus dihimpun pada Agustus-Desember 2026 mencapai sekitar Rp 229,6 triliun per bulan agar target Rp 2.357,7 triliun dapat tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menegaskan bahwa target yang telah ditetapkan pemerintah tetap menjadi acuan utama Ditjen Pajak.

"Kalau kami dari Direktorat Jenderal Pajak ya harus bisa mencapai 23%," kata Bimo.

Meski demikian, Kemenkeu sendiri memperkirakan target tersebut tidak sepenuhnya tercapai. Dalam outlook yang disampaikan kepada Komisi XI DPR, penerimaan pajak 2026 diproyeksikan mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98% dari target APBN.

Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall Rp 46,9 triliun. Meski demikian, selisih tersebut jauh lebih kecil dibandingkan shortfall penerimaan pajak pada 2025 yang mencapai Rp 271,7 triliun.

Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai target penerimaan pajak tahun ini masih sulit dicapai.

Bahkan, ia memperkirakan shortfall penerimaan pajak bisa lebih besar dari proyeksi pemerintah, yakni mencapai Rp 140 triliun-Rp 188 triliun.

Menurut Fajry, tantangan penerimaan pajak tidak hanya berasal dari sisi kepatuhan wajib pajak, tetapi juga dari kondisi ekonomi dan perubahan struktur sumber penerimaan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor manufaktur atau industri pengolahan. Sektor yang selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan pajak tersebut menunjukkan penurunan kontribusi dalam jangka panjang.

Fajry mencatat kontribusi sektor pengolahan terhadap penerimaan pajak mencapai 30,66% pada 2013. Namun, kontribusinya turun menjadi 24,6% pada 2025.

Tren tersebut berlanjut pada semester I-2026. Kontribusi sektor pengolahan terhadap penerimaan pajak tercatat hanya 22,8%.

Artinya, dalam kurun waktu sekitar 13 tahun, kontribusi manufaktur terhadap penerimaan pajak telah merosot hampir 8 poin persentase.

"Jika sektor pengolahan terus menurun, pemerintah akan semakin sulit untuk menggali penerimaan pajak dari perekonomian, sehingga rasio pajak kita pun akan semakin turun," tegas Fajry.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah di tengah kebutuhan untuk menggenjot penerimaan negara. Pasalnya, meski penerimaan pajak hingga Juli tumbuh 22,17%, pemerintah tetap membutuhkan lonjakan setoran pada lima bulan terakhir untuk mendekati target APBN.

Di sisi lain, menyusutnya kontribusi manufaktur menunjukkan bahwa tantangan penerimaan pajak bukan semata-mata soal mengejar kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memperkuat basis ekonomi yang mampu menghasilkan penerimaan secara berkelanjutan.

Utang RI Tembus Rp10.293 Triliun Purbaya Akui Akan Batasi Defisit

Rabu, 12 Agustus 2026 18:30 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118127/utang-ri-tembus-rp10-293-triliun-purbaya-akui-akan-batasi-defisit/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Utang pemerintah tembus mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026 atau 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah itu naik Rp373,27 triliun atau 3,76% dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.

Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rasio utang terhadap PDB masih jauh berada di batas aman 60%. Meski utang terus naik, pemerintah masih akan memonitor besaran utang hingga akhir tahun.

"Belum berakhir tahunnya, nanti kami lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa, harusnya kan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh," kata Purbaya ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Strategi Hadapi Utang

Meski demikian, Purbaya menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar utang tidak terus menerus meningkat. Hal ini diantaranya dengan membatasi kenaikan defisit dan mengoptimalkan pengumpulan pajak.

"Strateginya kita akan batasi defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita, bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak," tuturnya.

Sekadar catatan, defisit APBN 2026 diproyeksikan pemerintah bakal melebar menjadi Rp734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target defisit dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun sampai 30 Juni 2026. Angka ini naik 3,76% dari level utang pada Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), posisi utang pemerintah sampai akhir kuartal II-2026 itu setara dengan 41,26% terhadap PDB.

Dari total utang tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11% dari total utang pemerintah. Sementara sisanya, komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun atau 12,89%.

Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan melalui penerbitan obligasi negara.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari laman resmi DJPPR Kemenkeu, Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan data yang tercantum dalam website resmi DJPPR, rasio utang terhadap PDB berada di level 41,26%. Angka tersebut sejatinya masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB.

Rupiah Finis di Rp17.875/US\$

Rabu, 12 Agustus 2026 16:31 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118086/rupiah-finis-di-rp17-875-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah melemah 0,2% dan menutup perdagangan Rabu (12/8/2026) di posisi Rp17.875/US\$. Pelemahan rupiah sejalan dengan mata uang Asia lainnya yang terpengkas oleh kenaikan harga minyak mentah ke US\$89/barel.

Tingginya harga minyak memicu kekhawatiran inflasi bagi negara-negara pengimpor minyak di Benua Kuning. Mata uang negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia, India, Filipina, dan Thailand masih rentan terhadap kenaikan minyak.

Tekanan ini membuat ruang penguatan rupiah jadi lebih terbatas, meskipun sentimen domestik sebenarnya mulai membaik. Pasar obligasi menunjukkan investor belum melakukan aksi jual secara masif. Bahkan yield sejumlah tenor panjang di pasar obligasi masih tercatat turun, dan aliran dana asing disebut berpotensi kembali masuk ke pasar domestik.

Setidaknya, sentimen positif pekan ini terkait pencalonan Destry Damayanti sebagai gubernur baru Bank Indonesia (BI) juga memberi kepastian terhadap arah kebijakan moneter, dan mulai meredakan kekhawatiran investor terhadap stabilitas rupiah.

Di sisi eksternal, pasar kini juga mencermati data inflasi AS yang jadi penentu bagi arah dolar AS dan ekspektasi suku bunga The Fed. Inflasi AS diperkirakan melandai jadi 3,4% secara tahunan, sementara inflasi inti diproyeksikan turun jadi 2,5%.

Jika data sesuai ekspektasi pasar atau bahkan lebih rendah, dapat memberi ruang penguatan bagi mata uang Asia, termasuk rupiah.

Purbaya: Sebagian Laba BUMN untuk Cadangan APBN Dimulai Tahun Ini

Rabu, 12 Agustus 2026 20:10 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118132/purbaya-sebagian-laba-bumn-untuk-cadangan-apbn-dimulai-tahun-ini/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana sebagian dari dividen BUMN kembali ke kas APBN akan dimulai pada 2026. Penerimaan dari perusahaan pelat merah tersebut diharapkan menjadi cadangan fiskal untuk pemerintah.

Diketahui, seluruh perusahaan BUMN kini telah dialihkan ke Danantara sebagaimana konsekuensi dari amandemen Undang-Undang BUMN. Dividen BUMN yang dulu disetor ke APBN melalui pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) lalu dialihkan ke Danantara.

“Tahun ini mulai, bukan bulan ini. Nanti kita lihat ya,” kata Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menuturkan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tambahan dividen BUMN itu bisa meningkatkan kesinambungan fiskal pemerintah di tengah peningkatan utang.

“Ada ide presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya tidak memerinci lebih lanjut apabila sebagian dividen BUMN ini akan kembali masuk ke PNBPN KND. Namun, dia memastikan pengalihan sebagian dividen BUMN ini akan mulai dieksekusi pada tahun ini.

"Sebagian tahun ini juga sudah ada. Tetapi nanti kami lihat petunjuk Bapak Presiden," tuturnya.

Melalui setoran tersebut, Purbaya berharap pemerintah dapat menurunkan penarikan utang baru di tengah tingginya ongkos pembiayaan saat ini.

“Jadi kita meningkatkan efisiensi pendapatan kita. Dan ingin membuat anggaran kita ke depan semakin berkesinambungan. Segala cara kita manfaatkan, termasuk pendapatan dari Danantara,” imbuh Purbaya.

Sekadar catatan, utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun per Juni 2026 atau setara dengan 41,26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut naik Rp373,27 triliun atau 3,76%, dibandingkan posisi Maret 2026 yang sebesar Rp9.920,42 triliun.

Pendapatan Danantara Diklaim Naik 400%

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan dirinya mendapatkan laporan mengenai kenaikan pendapatan Danantara sekitar 400% dalam satu tahun selama beroperasi.

"Saya dapat laporan bahwa revenue, penghasilan dari Danantara sudah naik 400% kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek," kata Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran 10 buku karya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jumat (7/8/2026).

Prabowo juga menyebut, apabila hasil audit nantinya menunjukkan kenaikan yang lebih rendah, misalnya 200%-300%, angka tersebut tetap menunjukkan peningkatan signifikan dalam satu tahun operasi.

Namun, hingga kini laporan keuangan konsolidasian Danantara Tahun Buku 2025 belum dipublikasikan kepada publik. Kondisi tersebut membuat sumber dan komposisi kenaikan pendapatan yang disampaikan pemerintah belum dapat dilihat secara utuh dari laporan keuangan konsolidasian.

Mayoritas Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai Rawit Hijau Turun

Rabu, 12 Agustus 2026 10:50 WIB

Pramesti Regita Cindy

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118038/mayoritas-harga-pangan-hari-ini-naik-cabai-rawit-hijau-turun/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Hampir seluruh harga pangan tercatat mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (12/8/2026) pukul 09.10 WIB. Hanya beras kualitas medium II, cabai rawit hijau dan daging sapi kualitas 1 yang justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga beras kualitas medium II mengalami penurunan harga menjadi Rp16.200 per Kilogram (kg) atau turun Rp50 dibandingkan hari sebelumnya.

Penurunan harga juga disusul oleh komoditas cabai rawit hijau dan daging sapi kualitas 1 dengan masing-masing turun 23,3% dan 0,93% menjadi Rp40.150 per kg dan Rp149.750 per kg.

Sementara itu hampir seluruh harga bahan pangan mengalami kenaikan harga. Seperti bawang merah ukuran sedang yang naik harga hingga Rp2.150 menjadi Rp42.050 per kg. Bawang putih ukuran sedang juga naik harga hingga Rp150 menjadi Rp41.300 per kg.

Komoditas hortikultura lainnya yang mengalami kenaikan selain bawang merah dan putih adalah cabai merah besar yang naik hingga Rp400 menjadi Rp50.050 per kg. Cabai merah keriting juga naik harga menjadi Rp53.050 per kg. Cabai rawit merah juga naik hingga Rp4.400 menjadi Rp63.950 per kg.

Di sisi lain, komoditas beras juga mengalami kenaikan harga. Beras kualitas bawah I dan II kini berada dirata-rata harga nasional Rp15.600 per kg dan Rp15.350 per kg. Begitupun beras kualitas medium yang naik Rp500 menjadi Rp16.950 per kg.

Beras kualitas super I dan beras kualitas super II juga naik harga hingga Rp250 dan Rp300 menjadi Rp17.950 per kg serta Rp17.500 per kg.

Pada bagian protein hewani, daging ayam ras segar naik harga menjadi Rp41.050 per kg atau naik Rp1.000. Daging sapi kualitas 2 juga naik harga hingga Rp1.600 menjadi Rp143.750 per kg, dan telur ayam ras segar juga naik secara rata-rata nasional menjadi Rp29.650 per kg.

Untuk komoditas seperti gula pasir dan minyak juga turut mengalami kenaikan harga. Gula pasir kualitas premoum dan gula pasir lokal naik harga hingga Rp21.550 per kg dan Rp19.200 per kg atau naik masing-masing Rp1.200 dan Rp100.

Adapun minyak goreng kemasan bermerk 1 dan bermerk 2 juga naik harga secara rata-rata nasional menjadi Rp26.300 per kg dan Rp25.200. Tak luput juga minyak goreng curah yang naik harga hingga Rp750 menjadi Rp21.200 per kg.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kelik Budiana mengatakan berbagai langkah antisipasi terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sepanjang 2026.

“Sebagai antisipasi, aksi Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan di tahun 2026 terus dilakukan. Per 8 Agustus 2026, realisasi SPHP beras telah mencapai 73,71 persen atau 610,3 ribu ton,” ujar Kelik dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Penguatan stabilitas pangan juga diwujudkan melalui bantuan pangan bagi masyarakat. Pada Februari dan Maret 2026, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng per bulan. Program tersebut menjangkau 33,2 juta KPM, dengan realisasi hingga 30 Juni 2026 mencapai 664,8 juta kilogram beras dan 132,7 juta liter minyak goreng atau 99,70 persen.

“Bantuan pangan ini dilanjutkan selama tiga bulan untuk periode Juli sampai september 2026 berdasarkan Rakortas Kemenko Pangan tanggal 9 Juni 2026, kepada penerima desil 1 sampai 4,” kata Kelik.

Sementara, untuk menjaga harga jagung dan telur di tingkat peternak, SPHP jagung telah disalurkan kepada peternak telur ayam ras. Hingga 8 Agustus 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai 110.573 ton atau 45,93 persen dari target 213.200 ton.

“Dalam rangka stabilisasi harga jagung dan telur di tingkat peternak, Badan Pangan Nasional telah menyalurkan SPHP jagung pada peternak telur ayam ras. Penyaluran SPHP jagung ini dalam rangka stabilisasi harga telur dan daging ayam ras,” ujar Kelik.

Perkuat Ketahanan Energi dan Ekonomi di Jateng, Taj Yasin Dorong Pemerataan EBT

Rabu, 12 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/perkuat-ketahanan-energi-dan-ekonomi-di-jateng-taj-yasin-dorong-pemerataan-ebt/>

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mendorong pemerataan dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di wilayahnya. Pengembangan itu tidak sekadar memperkuat ketahanan energi, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengembangan energi terbarukan perlu berjalan, seiring dengan pertumbuhan investasi dan industri di Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kami butuh energi terbarukan itu benar-benar bisa merata di Jawa Tengah. Kita butuh ekosistem di Jawa Tengah tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan,” kata Taj Yasin, saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema Penguatan Ketahanan Energi Nasional: Menjawab Tantangan Saat Ini dan Masa Depan, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (12/8/2026).

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menekankan, pembahasan energi terbarukan tidak cukup hanya melihat ketersediaan sumber energi. Pengembangannya juga harus mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan masyarakat, di sekitar kawasan industri maupun sumber energi.

Menurut Gus Yasin, Jawa Tengah saat ini menjadi salah satu daerah yang menarik bagi investor. Sejumlah perusahaan datang untuk mengembangkan usaha dan industri. Karena itu, pertumbuhan investasi dan industri perlu diarahkan, agar tetap menciptakan aktivitas ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan.

Sejalan dengan itu, imbuhnya, bauran energi terbarukan Jawa Tengah pada 2025 tercatat mencapai 22,33 persen. Capaian tersebut telah melampaui target dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Tengah sebesar 21,32 persen.

Capaian tersebut, menurut wagub, menjadi modal bagi Pemprov Jateng untuk memperluas pemanfaatan EBT. Jawa Tengah memiliki sejumlah potensi energi terbarukan, antara lain energi surya, panas bumi, hidro, biomassa, dan biogas.

Pengembangannya juga diarahkan untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat. Pemprov Jateng antara lain memfasilitasi pengembangan PLTS, PLTS terapung, panas bumi, PLTM/PLTMH, serta energi berbasis limbah dan biomassa di sektor industri maupun pedesaan.

Pemanfaatan energi lokal, ujar Gus Yasin, juga dikembangkan melalui Desa Mandiri Energi, pompa air tenaga surya untuk irigasi, biogas dari limbah peternakan dan industri kecil, serta Eco Pesantren berbasis PLTS dan biogas.

Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya menambah pasokan energi, tetapi juga membuka ruang investasi, memperkuat daya saing industri, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut penting di tengah tantangan ketahanan energi nasional, yang masih menghadapi ketergantungan terhadap energi impor.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyoroti tantangan ketahanan energi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber energi fosil maupun energi terbarukan yang melimpah, tetapi masih menghadapi ketergantungan terhadap impor energi.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia di dalam negeri, mulai dari energi surya, angin, air, hingga panas bumi.

“Kita tingkatkan sumber energi terbarukan supaya kita punya pembangunan berkelanjutan, tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan Pak Wagub,” ujarnya.

Eddy menilai, pengembangan EBT dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau kita kembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang ada di seluruh Indonesia, rasanya kita enggak perlu impor lagi. Rasanya ketahanan energi kita bisa kita kuatkan,” pungkasnya. (Humas Jateng)*ul

Harga Garam Turun, Pemprov Jateng Dorong Peran Koperasi

Rabu, 12 Agustus 2026

<https://jatengprov.go.id/publik/harga-garam-turun-pemprov-jateng-dorong-peran-koperasi/>

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak tinggal diam menyikapi merosotnya harga garam rakyat saat panen. Selain berbagai bantuan yang telah diberikan pemerintah, petambak garam juga diimbau menunda penjualan, dan bekerja sama dengan koperasi.

Kabid Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, Lilik Harnadi menyampaikan, cuaca kemarau saat ini sangat mendukung produksi di sentra-sentra garam Jawa Tengah. Dia mengungkapkan, terdapat sembilan daerah penghasil garam, dengan total produksi pada 2025 mencapai 283.202,19 ton.

Peringkat pertama diduduki Pati dengan produksi 211.544,23 ton, disusul Rembang 42.112,30 ton, Jepara 14.174,36 ton, Demak 13.868,66 ton, Brebes 1.294,35 ton, Purworejo 136,91 ton, Kebumen 38,68 ton, Grobogan 30,95 ton, dan Cilacap 1,75 ton. Dengan produksi tersebut, Jawa Tengah menjadi produsen garam terbesar kedua di Indonesia.

“Tahun kemarin sempat turun karena kemarau basah. Pada 2024 produksi kita menyentuh 536.612,56 ton. Tahun ini diprediksi suhu meningkat sekitar 2 derajat Celsius, sehingga kondisi cuaca lebih kering. Sampai November mungkin masih bisa panen,” paparnya, kemarin.

Namun demikian, dengan produksi yang meningkat, harga garam rakyat diprediksi cenderung turun akibat pasokan yang melimpah. Contohnya, garam produksi petambak di Demak kini dihargai Rp60 ribu per kuintal atau Rp600 per kilogram.

Karena itu, pihaknya meminta petambak garam memaksimalkan peran koperasi. Lilik menyampaikan, salah satu best practice kerja sama dilakukan oleh petambak garam di Kaliori, Kabupaten Rembang.

Melalui Koperasi Sari Tani Makmur yang didukung bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan DKP Jawa Tengah, petambak berhasil memproduksi garam konsumsi secara mandiri. Bahkan, koperasi tersebut juga bekerja sama dengan pihak lain, untuk memproduksi garam dengan merek sendiri.

Di samping itu, Pemprov Jateng juga memiliki pabrik garam yang berada di bawah manajemen BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 25 ribu ton per tahun.

“Mudah-mudahan petani garam kita masih bisa menahan (penjualan) dulu. Biasanya petambak garam pada saat awal-awal harga masih bagus mereka lepas. Begitu harga mulai turun, nanti akan ditahan di gudang,” ungkapnya.

Terkait bantuan, Lilik mengatakan DKP Jawa Tengah rutin memberikan geomembran untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas panen garam. Tahun ini, pihaknya menganggarkan pemberian 161 rol geomembran kepada kelompok petambak garam.

Selain itu, ada pula pelatihan produksi garam berstandar nasional, yang diselenggarakan Bank Indonesia. Tahun ini, rencananya juga akan diberikan bantuan kepada petambak garam miskin melalui Baznas.

“Jadi kita mencoba tidak hanya dari APBD provinsi, tetapi juga lewat bantuan BI dan Baznas. Kalau KKP langsung masuk ke kabupaten,” pungkas Lilik. (Pd/UL, Diskomdigi Jateng)

Pati Prioritaskan Telur Peternak Lokal untuk Penuhi Kebutuhan SPPG

Rabu, 12 Agustus 2026

Penulis: Kontributor Kab Pati, Editor: Di/UL, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pati-prioritaskan-telur-peternak-lokal-untuk-penuhi-kebutuhan-sppg/>

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati memastikan, telur peternak lokal diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pati, dengan harga yang disepakati sebesar Rp26.000 per kilogram.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, pada pertemuan tindak lanjut aksi damai Asosiasi Peternak Unggas, di Pendapa Kabupaten Pati, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut pembahasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait. Setiap kabupaten dan kota diarahkan memprioritaskan penyerapan telur, dari peternak lokal di wilayah masing-masing.

“Mulai minggu depan, apabila masih terdapat SPPG yang tidak mengambil telur dari peternak lokal, maka dapat dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti,” tegas Chandra.

Disampaikan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut. Koordinator SPPG wilayah Pati juga akan berkomunikasi dengan Asosiasi Peternak Unggas, untuk memastikan distribusi dan kerja sama berjalan sesuai kesepakatan.

“Hasil pertemuan ini menjadi langkah penting, untuk menyamakan persepsi seluruh pihak,” ujarnya.

Chandra menambahkan, seluruh kepala SPPG di setiap kecamatan akan diarahkan memiliki satu kesepakatan, dalam pengadaan telur dan ayam dari Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati. Dan

skema tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas aspirasi peternak, yang disampaikan sehari sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Pati, Ali Gufron mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pati, yang mempertemukan peternak dengan pihak SPPG. Menurutnya, fasilitasi tersebut membuka ruang komunikasi, untuk memastikan hasil produksi peternak lokal terserap lebih baik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pati, dalam menjembatani komunikasi antara peternak dan SPPG,” kata Ali.

Disampaikan, pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari aksi para peternak unggas di depan Kantor Bupati Pati pada Senin (10/8/2026), yang menyuarakan persoalan anjloknya harga telur, sementara biaya pakan mengalami kenaikan.

Pemkab Kudus ajak Bank Jateng perkuat UMKM

Rabu, 12 Agustus 2026 21:20 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641595/pemkab-kudus-ajak-bank-jateng-perkuat-umkm>

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengajak Bank Jateng memperkuat kolaborasi dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar terus berkembang dan mampu naik kelas.

"Perbankan sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat membuka Gebyar Fest 81 Bank Jateng di Kantor Bank Jateng Cabang Kudus, Rabu.

Selain itu, kata dia, kemudahan perizinan juga menjadi bagian penting agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing.

Menurut dia kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang semakin kuat. Bank Jateng merupakan mitra strategis Pemkab Kudus dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Sam'ani mengapresiasi pendampingan yang telah diberikan Bank Jateng kepada pelaku UMKM. Pemkab Kudus juga akan mengawal aspek perizinan sehingga pelaku UMKM mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan usahanya.

Selain penguatan UMKM, Bupati Kudus juga mendorong peningkatan literasi transaksi digital melalui pemanfaatan QRIS Bank Jateng. Edukasi kepada masyarakat dinilai perlu terus dilakukan agar transaksi non tunai dapat dimanfaatkan secara aman, mudah, dan tepat.

Di sisi lain, masyarakat diingatkan untuk menjaga kepercayaan terhadap layanan perbankan dengan menggunakan layanan keuangan secara bijak serta menghindari pinjaman daring ilegal dan judi daring.

"Semangat kemerdekaan mari kita isi dengan berkarya dan berprestasi. Mari kita manfaatkan layanan perbankan dengan baik, termasuk transaksi non tunai. Edukasi kepada masyarakat harus terus dikawal agar semakin memahami manfaat transaksi digital," ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan Gebyar Fest 81 merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-81 Republik Indonesia yang digelar serentak di kantor cabang Bank Jateng pada 12-16 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut mengusung tema "81 Semangat Berkarya, Bersama Bank Jateng Menggerakkan Ekonomi Daerah".

"Gebyar Fest ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan Bank Jateng dengan masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi terhadap perekonomian daerah. Di Kudus, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM," ujarnya.

Risdiyanto menambahkan dalam rangkaian HUT Ke-81 RI juga akan dilaksanakan akad secara bersama-sama se-Jawa Tengah yang dipusatkan di Kantor Pusat Bank Jateng dan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah.

Untuk Kabupaten Kudus, tercatat sebanyak 25 peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut.

"Semangat 'Urip Nguripi' menjadi representasi bagaimana Bank Jateng terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian daerah," ujarnya.

Realisasi PAD empat terminal di Blora selama semester pertama 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 21:18 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Teguh Imam Wibowo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641592/realisasi-pad-empat-terminal-di-blora-selama-semester-pertama-2026>

Blora (ANTARA) - Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari empat terminal tipe C selama semester pertama 2026 sebesar Rp57,95 juta.

"Realisasi sebesar itu, berasal dari retribusi kios dan tempat pemungutan retribusi (TPR) bus," kata Kepala UPT Terminal dan Parkir Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora Adhitya Mukti Sanjaya di Blora, Rabu.

Secara persentase, ia mengatakan sudah mencapai 60 persen dari target PAD empat terminal yang ditetapkan sebesar Rp97,5 juta selama 2026.

Empat terminal yang menjadi sumber PAD tersebut, yakni Terminal Ngawen, Terminal Randublatung, Terminal Kunduran, dan Terminal Todanan.

Adhitya mengatakan target PAD dari empat terminal tersebut relatif tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pencapaian hingga semester I 2026 salah satunya ditopang aktivitas Terminal Ngawen yang masih relatif ramai dibandingkan terminal lainnya.

"TPR bus Rp5.000 kalau masuk terminal. Sehari antara 10 sampai 15 armada, mengingat lahan Terminal Ngawen yang sempit," ujar dia.

Ia menjelaskan potensi pendapatan dari retribusi kios juga masih terbatas. Hal itu karena jumlah kios yang tersedia di empat terminal tipe C tersebut hanya sebanyak 27 unit.

Selain keterbatasan jumlah kios, kata dia, aktivitas terminal juga terdampak semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi.

"Saat ini masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi, sehingga angkutan umum banyak ditinggalkan. Terminal tipe C bisa dibilang sepi," ujar dia.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Blora, jumlah angkutan umum yang masih beroperasi saat ini sebanyak 67 armada. Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan 2005 yang mencapai 202 armada.

Ia mengatakan puluhan armada tersebut kini melayani lima koridor angkutan umum di wilayah Kabupaten Blora. Di antaranya, koridor Blora-Kunduran sebanyak 23 armada dan Blora-Cepu sebanyak 21 armada, koridor Blora-Jepun serta Cepu-Randublatung-Doplang-Sulur masing-masing dilayani enam armada, sedangkan koridor Blora-Medang-Bulu sebanyak 11 armada.

Ratusan pekerja ter-PHK di Jepara mendapat pelatihan pemasaran

Rabu, 12 Agustus 2026 16:34 WIB

Pewarta: Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susi

<https://jateng.antaranews.com/berita/641573/ratusan-pekerja-ter-phk-di-jepara-mendapat-pelatihan-pemasaran>

Jepara (ANTARA) - Sebanyak 685 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari PT Samwon Busana Indonesia, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mendapatkan pelatihan pemasaran melalui program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) BPJS Ketenagakerjaan.

"Pelatihan tersebut bertujuan mendorong penerima manfaat dan keluarganya agar kembali produktif serta memiliki peluang membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan," kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari saat pelaksanaan program PEKA batch tiga di aula PT Samwon Busana Indonesia, Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Rabu.

Ia mengungkapkan para peserta mendapatkan berbagai pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi dan perkembangan dunia kerja mulai dari perencanaan keuangan, edukasi dan sosialisasi Program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan, pemasaran digital, hingga "Bangkit Bersama AI: Dari Ide Jadi Konten Digital Instan".

Selain itu, peserta juga diperkenalkan dengan aplikasi SIAPkerja, layanan digital ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kompetensi dan pelatihan, informasi kesempatan kerja, hingga layanan pendukung pengembangan karier dan usaha.

"Kehadiran Aplikasi SIAPkerja diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan bagi peserta untuk terus mengembangkan kapasitas diri dan memperoleh peluang ekonomi setelah mengikuti program PEKA," ujarnya.

Melalui pelatihan tersebut, diharapkan memberikan bekal praktis bagi peserta untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha, memperluas pasar, sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Melalui PEKA, kami mencoba membuka jalan agar penerima manfaat dapat bertemu dengan berbagai peluang pelatihan kerja, peningkatan kompetensi maupun pemberdayaan ekonomi yang dimiliki para mitra. Kami berperan sebagai penghubung, sementara keberhasilannya membutuhkan kolaborasi banyak pihak," ujarnya.

Untuk itu, dalam melaksanakan program PEKA melibatkan Dinas Tenaga Kerja Jepara, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pendampingannya berlangsung sejak 10-12 Agustus 2026 itu merupakan angkatan ketiga dengan jumlah peserta 200 orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Zamroni Lestiaza mengatakan program PEKA merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons persoalan PHK yang terjadi di PT Samwon Busana Indonesia.

Menurut dia kondisi perusahaan yang tidak mampu bertahan menjadi salah satu faktor terjadinya PHK terhadap 685 pekerja. Pemkab Jepara bersama BPJS Ketenagakerjaan kemudian bergerak cepat untuk memastikan para pekerja mendapatkan akses peluang kerja maupun wirausaha mandiri.

Ia menilai peningkatan keterampilan menjadi semakin penting di tengah perubahan dunia kerja dan pola usaha yang semakin terdigitalisasi.

Pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran digital hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dapat menjadi bekal praktis bagi peserta untuk mengembangkan sumber penghasilan maupun usaha secara lebih adaptif.

Pemkab Jepara, kata dia, juga menyediakan lowongan pekerjaan dan mendorong peningkatan kompetensi para pekerja agar dapat kembali memasuki dunia kerja, dunia usaha, maupun dunia industri, atau memilih untuk bekerja secara mandiri.

Zamroni mempersilakan para eks karyawan PT Samwon mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia di BLK. Sejumlah pelatihan yang dapat diakses antara lain servis AC, servis sepeda motor, kelistrikan, pengelasan, menjahit, tata boga, salon, hingga perkayuan.

Sementara itu, pemerhati jaminan sosial dari BPJS Watch Timbul Siregar memandang program ini sebagai gagasan positif sepanjang memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

"Keberhasilan PEKA perlu dilihat dari peningkatan kompetensi, kemampuan menghasilkan pendapatan hingga keberlanjutan kemandirian ekonomi keluarga," ujarnya.

Kepercayaan Konsumen Thailand Naik pada Juli, Tembus Level 51,8

Kamis, 13 Agustus 2026 14:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/kepercayaan-konsumen-thailand-naik-pada-juli-tembus-level-518>

KONTAN.CO.ID - Kepercayaan konsumen Thailand meningkat untuk bulan kedua berturut-turut pada Juli 2026. Kenaikan tersebut didorong oleh program stimulus pemerintah dan penurunan harga minyak.

Mengutip survei University of the Thai Chamber of Commerce yang dirilis Kamis (13/8/2026), indeks kepercayaan konsumen Thailand naik menjadi 51,8 pada Juli dari 50,7 pada Juni.

Kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi konsumsi domestik Thailand, meski masyarakat masih menghadapi sejumlah tekanan ekonomi.

University of the Thai Chamber of Commerce menyebut stimulus pemerintah dan penurunan harga minyak menjadi faktor utama yang menopang kepercayaan konsumen.

Pada Juni lalu, pemerintah Thailand meluncurkan program subsidi konsumen senilai 176 miliar baht atau sekitar US\$5,32 miliar untuk membantu mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Program tersebut merupakan bagian dari rencana pinjaman pemerintah senilai 400 miliar baht yang ditujukan untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak.

Selain stimulus pemerintah, kenaikan harga komoditas pertanian juga turut memperkuat kepercayaan konsumen.

Presiden University of the Thai Chamber of Commerce Thanavath Phonvichai mengatakan, kondisi tersebut memberikan dukungan tambahan terhadap daya beli masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat terhadap ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga mulai mereda sehingga turut memberikan sentimen positif.

Masih Khawatir Ekonomi dan Lapangan Kerja

Meski meningkat, tingkat kepercayaan konsumen Thailand masih menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimistis terhadap kondisi ekonomi.

Thanavath mengatakan, konsumen masih mengkhawatirkan pemulihan ekonomi Thailand yang lambat, tingginya biaya hidup, serta kondisi lapangan pekerjaan.

Thailand merupakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara. Namun, pertumbuhan ekonominya masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

Pada tahun lalu, ekonomi Thailand tumbuh 2,4%.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Thailand pada bulan lalu menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 2,5% dari sebelumnya 1,6%. Revisi tersebut didukung oleh kinerja ekspor yang lebih kuat dan peningkatan permintaan domestik.

Kenaikan kepercayaan konsumen pada Juli menjadi indikasi bahwa stimulus pemerintah dan membaiknya sejumlah faktor ekonomi mulai memberikan dampak terhadap sentimen masyarakat. Namun, tekanan biaya hidup dan lemahnya pemulihan ekonomi masih menjadi tantangan bagi konsumsi domestik Thailand.

Dolar Taiwan dan Won Korea Menguat Kamis (13/8), Rupiah Melemah

Kamis, 13 Agustus 2026 09:40 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-taiwan-dan-won-korea-menguat-kamis-138-rupiah-melemah>

KONTAN.CO.ID - Sejumlah mata uang Asia bergerak terbatas terhadap dolar AS pada Kamis (13/8/2026).

Dolar Taiwan dan won Korea Selatan mencatat penguatan, sementara sebagian besar mata uang regional cenderung datar.

Pergerakan mata uang Asia tersebut terjadi setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) Juli sesuai ekspektasi pasar.

Kondisi ini mengurangi spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada September.

Mengutip data Reuters pada pukul 02.12 GMT, dolar Taiwan menguat 0,25% menjadi 32,165 per dolar AS, sedangkan won Korea Selatan naik 0,28% menjadi 1.414,6 per dolar AS.

Yen Jepang juga menguat tipis 0,01% menjadi 159,39 per dolar AS. Dolar Singapura nyaris tidak berubah di 1,280 per dolar AS.

Sementara itu, baht Thailand menguat 0,04% menjadi 33,09 per dolar AS dan yuan China naik 0,03% menjadi 6,744 per dolar AS.

Ringggit Malaysia justru melemah tipis 0,02% menjadi 4,084 per dolar AS.

Rupiah Melemah

Di kawasan Asia Tenggara, rupiah Indonesia menjadi salah satu mata uang yang melemah. Rupiah turun 0,06% menjadi 17.875 per dolar AS dari posisi sebelumnya 17.865.

Pergerakan rupiah masih berada di bawah tekanan setelah mata uang Indonesia mencatat pelemahan cukup dalam sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan data tersebut, rupiah telah melemah sekitar 6,74% terhadap dolar AS sejak akhir 2025.

Kinerja rupiah menjadi salah satu yang terlemah di antara mata uang Asia dalam daftar tersebut.

Rupiah India tercatat melemah 5,73%, peso Filipina turun 3,94%, sedangkan baht Thailand merosot 4,96% sejak akhir 2025.

Sebaliknya, won Korea Selatan menjadi salah satu mata uang yang masih mencatat penguatan sepanjang tahun ini, yakni 1,76%. Dolar Singapura juga menguat 0,41%, sementara yuan China naik 3,62%.

Pergerakan mata uang Asia turut dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi terhadap kebijakan moneter AS.

Data inflasi konsumen AS pada Juli menunjukkan kenaikan 0,1% secara bulanan, sesuai dengan perkiraan ekonom, sehingga peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September menurun.

Pasar kini menunggu data ekonomi AS berikutnya untuk memperoleh petunjuk tambahan mengenai arah kebijakan The Fed.

Perubahan ekspektasi suku bunga AS menjadi salah satu faktor penting yang menentukan arah dolar AS dan mata uang negara berkembang, termasuk di Asia.

Hammack: The Fed Perlu Menaikkan Suku Bunga Untuk Meredam Pertumbuhan dan Inflasi

Kamis, 13 Agustus 2026 21:18 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Herlina Kartika Dewi

<https://internasional.kontan.co.id/news/hammack-the-fed-perlu-menaikkan-suku-bunga-untuk-meredam-pertumbuhan-dan-inflasi>

KONTAN.CO.ID - OHIO. Pejabat Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, menegaskan kembali pandangannya bahwa bank sentral AS harus segera menaikkan suku bunga guna menurunkan tingkat inflasi yang terlalu tinggi serta meredam pertumbuhan dan investasi dunia usaha.

"Saat berbicara dengan pelaku bisnis, saya mendengar antusiasme mereka untuk menggalang dana dan meminjam modal agar bisa terus berinvestasi. Mereka melihat adanya peluang pertumbuhan—hal yang tentu positif; saya ingin mereka terus melihat peluang pertumbuhan tersebut. Namun, jika pertumbuhan itu berlebihan... hal itu bisa memberikan tekanan tambahan terhadap kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi," ujar Hammack di hadapan Dayton Area Chamber of Commerce di Dayton, Ohio seperti dilansir Reuters, Kamis (13/8/2026).

"Kita perlu memastikan adanya langkah pembatasan melalui kebijakan agar kita bisa menurunkan inflasi dari angka di atas 3% saat ini kembali ke target 2%."

Hammack merupakan salah satu dari tiga pejabat The Fed yang menyatakan perbedaan pendapat dalam rapat bulan lalu, bertentangan dengan keputusan mayoritas untuk mempertahankan suku bunga pinjaman jangka pendek di kisaran 3,50%-3,75%.

Pada hari Kamis, ia menyatakan bahwa meskipun data inflasi telah membaik dalam dua bulan terakhir, hal itu belum cukup meyakinkannya bahwa arah tren telah benar-benar berubah—terutama mengingat sudah lebih dari lima tahun The Fed tidak mencapai target inflasi 2%-nya.

"Saya tidak yakin bahwa kita akan terus melihat hal itu, atau bahwa angkanya akan turun cukup rendah hingga membawa kita kembali ke tingkat 2% tersebut," ujarnya.

"Tugasnya adalah memastikan kita membuat kemajuan menuju angka 2% itu. Lalu pertanyaannya adalah seberapa cepat kita perlu mencapai target 2% tersebut—mungkin kita akan mencapainya, tetapi jika butuh waktu tiga atau empat tahun lagi untuk sampai ke sana, apakah itu bisa diterima?"

Seorang pengecer di Cincinnati mengatakan kepadanya bahwa mereka menaikkan harga "karena mereka tidak tahu dari mana tekanan harga berikutnya akan datang, namun mereka tahu tekanan itu pasti akan muncul dari suatu tempat," tuturnya.

Ia juga bercerita tentang pertemuannya dengan seorang ayah yang terpaksa melewatkan pertandingan sepak bola tandang anaknya akibat tingginya harga bahan bakar. Orang-orang dengan pekerjaan yang layak pun kini beralih ke bank makanan demi mengatur anggaran mereka, ungkapnya.

"Menurut saya, kita perlu bertindak sekarang karena kita harus menurunkan kembali inflasi ke target 2% itu lebih cepat daripada yang ditunjukkan oleh jalur penyesuaian jangka panjang—mengingat tingkat suku bunga saat ini berada di level tersebut," ujarnya.

Inflasi Sisi Produsen AS Stagnan di Juli, Lebih Rendah dari Konsensus Proyeksi

Kamis, 13 Agustus 2026 20:42 WIB

Reporter: Harris Hadinata, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-sisi-produsen-as-stagnan-di-juli-lebih-rendah-dari-konsensus-proyeksi>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Harga di tingkat produsen Amerika Serikat (AS) stagnan pada Juli 2026 setelah mengalami penurunan pada bulan sebelumnya. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya harga barang dan energi, meski tekanan harga pada sektor jasa masih berlanjut.

Berdasarkan laporan Bureau of Labor Statistics (BLS) yang dipublikasikan Kamis (13/8/2026), Producer Price Index (PPI) untuk permintaan akhir atau final demand tidak berubah pada Juli secara bulanan setelah turun 0,1% pada Juni.

Realisasi tersebut lebih rendah ketimbang konsensus proyeksi analis, yang memprediksi PPI naik 0,2%. Sebelumnya, PPI sempat meningkat 1,1% pada Mei. Secara tahunan, indeks final demand meningkat 4,7% hingga Juli.

Pergerakan PPI pada Juli menunjukkan adanya perbedaan antara harga barang dan jasa. Harga final demand services meningkat 0,2%. Sedangkan harga final demand goods turun 0,7%.

Selain itu, harga konstruksi untuk permintaan akhir melonjak 2,2% pada Juli. Kenaikan harga jasa dan konstruksi tersebut mengimbangi penurunan harga barang.

Tekanan harga juga terlihat lebih jelas jika komponen makanan, energi dan jasa perdagangan dikeluarkan. Indeks final demand less foods, energy, and trade services meningkat 0,4% pada Juli, jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan 0,1% pada Juni. Dalam setahun hingga Juli, indeks tersebut naik 4,7%.

Pada sektor barang, penurunan harga energi menjadi faktor utama yang menahan PPI. Harga final demand energy turun 3,1% pada Juli, sementara harga makanan turun 0,9%. Di sisi lain, harga barang di luar makanan dan energi masih meningkat 0,1%.

Harga bensin menjadi salah satu penyumbang terbesar penurunan harga barang. BLS mencatat harga bensin turun 5,7% pada Juli dan menyumbang lebih dari separuh penurunan indeks final demand goods.

Harga sayuran segar dan kering, diesel, bahan bakar jet, serta sejumlah bahan kimia dan resin juga turun. Sebaliknya, harga kendaraan bermotor dan peralatan naik 0,3%.

Di sektor jasa, harga final demand services meningkat 0,2% pada Juli, meski lebih lambat dibandingkan kenaikan 0,5% pada Juni.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari jasa di luar perdagangan, transportasi dan pergudangan yang naik 0,6%. Harga jasa transportasi dan pergudangan turun 1,8%, sedangkan jasa perdagangan turun 0,1%.

Salah satu kenaikan harga jasa yang paling mencolok terjadi pada jasa manajemen portofolio, yang melonjak 6,5% pada Juli. Kenaikan juga terjadi pada margin sejumlah aktivitas ritel dan grosir, termasuk produk kesehatan, kecantikan dan optik, kendaraan serta suku cadang, perlengkapan kebun dan pertanian, serta perdagangan makanan dan alkohol.

Tekanan harga pada rantai produksi juga masih cukup tinggi. Harga barang olahan untuk permintaan antara turun 0,6% pada Juli, sedangkan harga barang yang belum diolah turun 1,8%. Namun secara tahunan, harga barang olahan untuk permintaan antara masih meningkat 9,9%, sementara barang yang belum diolah naik 7,1%.

Penurunan harga bahan bakar turut mendorong pelemahan harga pada tahap produksi antara. Harga diesel turun 6,7%, sementara harga minyak mentah turun 11,9% pada Juli.

Harga bahan energi yang belum diolah secara keseluruhan turun 7,4%. Di sisi lain, harga kayu naik 5%, sementara harga aluminium scrap meningkat 5,8%.

Dengan demikian, meski PPI AS secara keseluruhan tidak mengalami kenaikan pada Juli, data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hilangnya tekanan harga di tingkat produsen.

Penurunan harga energi dan barang menjadi penahan utama. Sementara harga jasa serta ukuran PPI yang mengecualikan makanan, energi dan jasa perdagangan justru menunjukkan kenaikan yang lebih kuat.

Defisit Anggaran AS Tembus Rekor, Tarif Justru Jadi Beban

Kamis, 13 Agustus 2026 18:37 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Nina Dwiantika

<https://internasional.kontan.co.id/news/defisit-anggaran-as-tembus-rekor-tarif-justru-jadi-beban>

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Defisit anggaran pemerintah federal Amerika Serikat (AS) kembali membengkak. Pada Juli 2026, defisit mencapai US\$ 432 miliar, menjadi rekor tertinggi untuk bulan Juli dan melonjak 48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Melansir laporan Reuters (13/8), lonjakan belanja pemerintah serta pembengkakan pembayaran tunjangan menjadi faktor utama kenaikan defisit. Departemen Keuangan AS mencatat belanja Juli mencapai US\$ 766 miliar, naik 22% secara tahunan.

Sebagian kenaikan tersebut dipengaruhi faktor kalender. Pemerintah membayarkan sejumlah tunjangan yang seharusnya jatuh tempo pada Agustus lebih awal pada Juli karena awal Agustus bertepatan dengan akhir pekan.

Setelah memperhitungkan pergeseran kalender, defisit Juli tercatat sebesar US\$ 333 miliar, masih naik 18% dibandingkan Juli 2025.

Di sisi lain, penerimaan pemerintah justru melemah. Penerimaan Juli turun 1% menjadi US\$ 334 miliar. Salah satu tekanan datang dari penerimaan bea masuk yang kembali mencatat arus keluar.

Pemerintah AS mengembalikan dana tarif sebesar US\$ 33,38 miliar sepanjang Juli, sehingga penerimaan bea masuk bersih mencatat arus keluar US\$ 8,55 miliar. Ini menjadi bulan ketiga berturut-turut penerimaan tarif mengalami arus keluar bersih.

Pengembalian dana tersebut berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sejumlah tarif darurat yang sebelumnya diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump. Hingga

akhir Juli, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah memproses pengembalian sekitar US\$ 100 miliar.

Meski demikian, pemerintahan Trump masih berupaya membangun kembali kebijakan tarif melalui jalur hukum lain. Pemerintah pada bulan lalu mengenakan tarif 10% hingga 12,5% terhadap 60 mitra dagang utama yang mencakup lebih dari 99% impor AS. Kebijakan tarif baru juga diperkirakan terus bertambah dalam beberapa pekan mendatang.

Namun, prospek penerimaan dari tarif kini semakin tidak pasti. Kantor Anggaran Kongres AS memperkirakan penerimaan bea masuk sepanjang tahun fiskal akan sekitar US\$ 250 miliar lebih rendah dibandingkan proyeksi awal pada Februari.

Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah AS semakin tertekan. Dalam 10 bulan pertama tahun fiskal 2026, defisit anggaran telah mencapai US\$ 1,799 triliun, melampaui defisit sepanjang tahun fiskal 2025 yang sebesar US\$ 1,775 triliun.

Secara tahunan, defisit kumulatif tersebut naik US\$ 170 miliar atau 10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Setelah memperhitungkan faktor kalender, defisit tahun fiskal berjalan diperkirakan mencapai US\$ 1,700 triliun atau naik 5% secara tahunan.

Dengan tahun fiskal AS yang akan berakhir pada 30 September, pembengkakan defisit dalam dua bulan terakhir menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Harapan menjadikan tarif sebagai salah satu sumber penerimaan untuk menahan pelebaran defisit pun kini menghadapi tekanan, terutama setelah besarnya pengembalian dana tarif dan ketidakpastian dasar hukum kebijakan tersebut.

Ekonomi Inggris Kembali Tumbuh 0,3% di Juni, Setelah Sempat Stagnan di Mei

Kamis, 13 Agustus 2026 17:42 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Harris Hadinata

<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-inggris-kembali-tumbuh-03-di-juni-setelah-sempat-stagnan-di-mei>

KONTAN.CO.ID - LONDON. Di luar perkiraan, ekonomi Inggris melesat di Juni, setelah pertumbuhannya sempat stagnan di Mei. Office for National Statistics (ONS) Inggris mengumumkan, produk domestik bruto (PDB) Inggris naik 0,3% di Juni.

Realisasi tersebut jauh lebih baik dari konsensus proyeksi analis, yang memperkirakan PDB masih stagnan. Realisasi tersebut juga menempatkan Inggris di jalur pertumbuhan terkuat di antara negara-negara ekonomi maju G7 pada paruh pertama tahun ini.

Reuters melaporkan, PDB Inggris naik di akhir paruh pertama tahun ini karena perusahaan-perusahaan Inggris menikmati jeda dari lonjakan harga energi akibat perang Iran, serta adanya gelaran Piala Dunia dan cuaca panas.

"Secara keseluruhan, ekonomi tampaknya mampu bertahan dengan sangat baik menghadapi perang Iran, dengan sedikit tanda adanya pengurangan aktivitas oleh konsumen atau pelaku bisnis sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak," ujar Thomas Pugh, Kepala Ekonom firma akuntansi RSM UK, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/8/2026).

ONS mencatat perusahaan yang mengumumkan dampak negatif perang Iran sudah berkurang banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Memang, periode Juni bertepatan dengan periode gencatan senjata yang kini telah berakhir.

ONS juga melaporkan sejumlah produsen minuman beralkohol serta perusahaan di sektor makanan, produksi televisi, dan periklanan mengalami peningkatan kinerja berkat Piala Dunia. Sementara perusahaan pengecer dan beberapa manufaktur terbantu oleh cuaca panas.

Pertumbuhan ekonomi keseluruhan pada Juni didorong oleh kenaikan 0,4% di sektor jasa, mengimbangi penurunan 0,2% pada produksi industri dan 0,1% pada sektor konstruksi. Untuk kuartal kedua, yang mencakup tiga bulan hingga akhir Juni, ekonomi tumbuh sebesar 0,4%.

Pertumbuhan di kuartal dua tersebut melambat dibandingkan kenaikan 0,6% pada kuartal satu tahun ini. Kendati begitu, pertumbuhan di kuartal II tetap menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih kuat dari biasanya dan sesuai dengan perkiraan para ekonom.

Andrew Hunter, Ekonom Senior Moody's Analytics, menyoroti adanya pertumbuhan dalam konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. "Meski demikian, perlu diingat adanya pola berulang dalam beberapa tahun terakhir, di mana pertumbuhan kuat pada paruh pertama tahun diikuti oleh perlambatan tajam pada paruh kedua," ujarnya, dikutip Reuters.

Para ekonom berpendapat, metode pengukuran ekonomi yang digunakan ONS juga mungkin melebih-lebihkan angka pertumbuhan pada bulan-bulan awal tahun kalender.

Bank of England, yang mempertahankan suku bunga tetap stabil meskipun terjadi lonjakan harga energi, sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% pada kuartal kedua. Namun, bank sentral Inggris tersebut menyatakan pertumbuhan dasar berada di kisaran 0,1% dan diperkirakan akan melambat hingga mencapai titik nol pada periode Juli hingga September.

Sekadar mengingatkan, di kuartal kedua Inggris mengalami ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri Keir Starmer sebagai perdana menteri pada Juli.

Penggantinya, Andy Burnham, menyatakan pemerintahannya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan biaya operasional bagi dunia usaha di tengah prospek keuangan yang sulit. Burnham juga berjanji mengatasi masalah biaya hidup yang dihadapi rumah tangga.

Kendati begitu, Pugh menilai, ke depannya pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan melambat. Selain kembali memanasnya konflik terkait Iran yang telah mendorong kenaikan harga energi, para analis menyebutkan spekulasi mengenai potensi kenaikan pajak dalam anggaran pertama Menteri Keuangan John Healey pada Oktober mendatang juga dapat membebani perekonomian.

Untuk Pertama Kali, Dolar-Yuan Kuasai Perdagangan Valas Hong Kong

Kamis, 13 Agustus 2026 14:50 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/dolar-yuan-jadi-pasangan-mata-uang-paling-banyak-diperdagangkan-di-hong-kong>

KONTAN.CO.ID - Pasangan mata uang dolar AS-yuan China untuk pertama kalinya menjadi pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Hong Kong, menggeser dolar Hong Kong-dolar AS.

Asosiasi Pasar Treasury Hong Kong (Treasury Markets Association/TMA) menyebut, dolar AS-yuan menjadi pasangan mata uang dengan transaksi terbesar pada April 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran yuan dalam aktivitas pasar valuta asing di pusat keuangan Asia tersebut.

Dalam survei semesterannya yang diterbitkan pekan ini, TMA mencatat rata-rata transaksi valuta asing harian di Hong Kong mencapai US\$908,2 miliar pada April.

Rata-rata transaksi harian pasangan dolar AS-yuan melonjak menjadi US\$274 miliar, setara sekitar 30,2% dari total transaksi valuta asing Hong Kong.

Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata transaksi pasangan dolar AS-yuan sebesar US\$198,6 miliar.

Sementara itu, transaksi pasangan dolar Hong Kong-dolar AS juga meningkat, tetapi berada di bawah dolar AS-yuan dengan rata-rata transaksi harian mencapai US\$240,2 miliar.

Hong Kong Perkuat Posisi sebagai Pusat Yuan Offshore

Meningkatnya aktivitas perdagangan yuan terjadi ketika Beijing dan pemerintah Hong Kong terus memperkuat posisi kota tersebut sebagai pusat perdagangan yuan offshore.

Sejumlah kebijakan telah diluncurkan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan valuta asing, obligasi, dan emas di Hong Kong.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperluas penggunaan yuan di pasar global.

Upaya tersebut semakin mendapat perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang mendorong pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi aset dan mata uang.

Kenaikan transaksi dolar AS-yuan juga menunjukkan semakin pentingnya Hong Kong dalam menghubungkan pasar keuangan China dengan pasar internasional.

Dengan transaksi harian yang mencapai US\$274 miliar, pasangan dolar AS-yuan kini menjadi komponen terbesar dalam aktivitas pasar valuta asing Hong Kong, melampaui pasangan dolar Hong Kong-dolar AS yang selama ini mendominasi perdagangan mata uang di pusat keuangan tersebut.

Bank Sentral China Kembali Nihilkan Reverse Repo untuk Hari Ketiga

Kamis, 13 Agustus 2026 08:43 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/bank-sentral-china-kembali-nihilkan-reverse-repo-untuk-hari-ketiga>

KONTAN.CO.ID - Bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), kembali tidak menyalurkan dana melalui skema reverse repo tenor tujuh hari dalam operasi pasar terbuka pada Kamis (13/8/2026).

Langkah tersebut menjadi hari ketiga berturut-turut PBOC mencatatkan volume reverse repo tujuh hari sebesar nol, berdasarkan pernyataan yang dipublikasikan bank sentral China.

PBOC menyebut keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan para primary dealers.

Secara terpisah, PBOC pada Rabu (12/8) mengatakan akan menjalankan operasi reverse repo overnight hingga 600 miliar yuan atau sekitar US\$88,98 miliar per hari pada 14 Agustus serta 17-19 Agustus 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bank sentral China dalam mengelola kondisi likuiditas di sistem perbankan.

PBOC menggunakan instrumen reverse repo jangka pendek untuk menyesuaikan kondisi likuiditas dan menjaga kestabilan pasar uang sesuai kebutuhan perekonomian.

Inflasi Grosir Jepang Melonjak, Peluang Kenaikan Suku Bunga BOJ September Menguat

Kamis, 13 Agustus 2026 08:38 WIB

Sumber: Reuters, Editor: Yudho Winarto

<https://internasional.kontan.co.id/news/inflasi-grosir-jepang-melonjak-peluang-kenaikan-suku-bunga-boj-september-menguat>

KONTAN.CO.ID - Inflasi harga grosir Jepang kembali meningkat pada Juli 2026, memperkuat indikasi bahwa tekanan harga semakin meluas.

Kondisi ini sekaligus meningkatkan ekspektasi pasar bahwa Bank of Japan (BOJ) akan menaikkan suku bunga pada September mendatang.

Melansir Reuters, Data BOJ yang dirilis Kamis (13/8/2026) menunjukkan indeks harga produsen (PPI) Jepang naik 7,2% secara tahunan pada Juli.

Angka tersebut sedikit melambat dari kenaikan 7,3% pada Juni yang telah direvisi, tetapi masih di bawah ekspektasi pasar sebesar 7,4%.

Secara bulanan, indeks tersebut naik tipis 0,1% pada Juli, setelah meningkat 0,5% pada Juni berdasarkan revisi data.

Data inflasi grosir tersebut muncul setelah sinyal yang semakin hawkish dari BOJ. Dalam rangkuman pandangan anggota dewan pada pertemuan Juli, sejumlah pejabat menyerukan percepatan kenaikan suku bunga untuk menghadapi risiko inflasi.

Pelemahan Yen Dorong Biaya Impor

Tekanan harga juga terlihat dari indeks harga impor berbasis yen yang meningkat 29,1% secara tahunan pada Juli.

Meski demikian, kenaikan tersebut sedikit melambat dibandingkan lonjakan 30,1% pada Juni setelah revisi.

Kenaikan harga impor menunjukkan bahwa pelemahan yen masih meningkatkan biaya barang impor dan berpotensi mendorong tekanan inflasi yang lebih luas di perekonomian Jepang.

BOJ mempertahankan kebijakan moneternya pada pertemuan Juli. Namun, bank sentral Jepang untuk pertama kalinya memperingatkan bahwa inflasi yang mendasari dapat melampaui targetnya.

BOJ juga menyatakan bahwa pembahasan kebijakan selanjutnya akan berfokus pada risiko kenaikan harga.

Sinyal tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa kenaikan suku bunga dapat dilakukan paling cepat pada September 2026.

Inflasi AS Juli Melandai, The Fed Punya Ruang Tahan Suku Bunga

Kamis, 13 Agustus 2026 06:40 WIB

Mark Niquette

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118139/inflasi-as-juli-melandai-the-fed-punya-ruang-tahan-suku-bunga/2>

Bloomberg, Inflasi inti Amerika Serikat (AS) melandai pada Juli, yang kemungkinan mengurangi tekanan terhadap Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga.

Indeks harga konsumen (IHK), tidak termasuk kategori makanan dan energi yang cenderung bergejolak, naik 0,2% dibandingkan bulan sebelumnya, berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS yang dirilis Rabu (12/8). Secara tahunan, indeks tersebut naik 2,5%, menyamai laju paling lambat sejak Maret 2021.

Secara keseluruhan, harga-harga konsumen naik 0,1% dari bulan sebelumnya dan 3,4% dibandingkan setahun sebelumnya.

Laporan ini mengindikasikan bahwa dampak kejutan harga energi akibat perang Iran terus mereda pada bulan Juli. Angka-angka tersebut memberi The Fed lebih banyak ruang untuk menimbang tekanan inflasi terhadap perlambatan penyerapan tenaga kerja yang terjadi baru-baru ini, saat mereka memperdebatkan apakah akan menaikkan biaya pinjaman pada pertemuan 15-16 September mendatang.

Para pembuat kebijakan akan menerima laporan tambahan mengenai ketenagakerjaan dan inflasi sebelum pertemuan September. Investor juga akan mencermati pernyataan Gubernur The Fed Kevin Warsh yang diperkirakan disampaikan dalam simposium tahunan bank sentral di Jackson Hole akhir bulan ini.

“Ini kabar baik bagi pejabat The Fed yang ingin bersabar dalam situasi ini,” kata Oscar Munoz, Kepala Ekonomi AS di TD Securities. “Setidaknya bagi pejabat The Fed yang mencari tanda-tanda kemajuan, disinflasi, ini merupakan laporan kedua berturut-turut.”

Saham AS dibuka menguat dan imbal hasil obligasi Treasury turun seiring investor mengurangi taruhan terhadap kenaikan suku bunga pada September.

Harga energi dan bensin turun untuk bulan kedua berturut-turut. Harga bensin AS kembali naik di atas US\$4 per galon pada Juli setelah gencatan senjata AS-Iran runtuh dan permusuhan kembali pecah, tetapi rata-rata harga sepanjang bulan tersebut masih lebih rendah dibandingkan Juni.

Sementara itu, harga kebutuhan pokok turun untuk pertama kalinya sejak Maret, antara lain berkat penurunan harga selada yang mencapai rekor di tengah wabah cyclospora. Harga daging sapi giling mentah turun 1,6%, penurunan terbesar sejak 2020.

Harga hunian naik 0,1%, tertahan oleh penurunan tarif hotel dan motel sebesar 3,3%, yang merupakan penurunan terbesar dalam lebih dari setahun. Dua indikator harga sewa dalam laporan tersebut masing-masing naik 0,3%.

Harga jasa, tidak termasuk energi dan sewa, naik tipis 0,2% setelah turun pada bulan sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun Bloomberg. Layanan kesehatan dan tarif penerbangan termasuk kategori jasa yang mengalami kenaikan harga.

Inflasi Komputer

Harga barang, tidak termasuk komoditas makanan dan energi, kembali naik setelah mengalami penurunan selama dua bulan. Harga perangkat lunak dan aksesoris komputer melonjak 21,2% secara tahunan, kenaikan terbesar yang pernah tercatat. Sementara itu, harga komputer, perangkat pendukung, dan asisten rumah pintar naik dengan laju tercepat dalam lebih dari empat tahun.

Para ekonom memantau dampak kenaikan harga yang diumumkan pada Juni terhadap produk teknologi konsumen populer seperti Mac dan iPad milik Apple Inc. Kenaikan tersebut dipicu kelangkaan cip memori global di tengah perlombaan membangun pusat data.

Data indeks harga produsen (IHP) yang dijadwalkan rilis pada hari Kamis (13/8) akan memberikan gambaran mengenai kategori tambahan yang berdampak langsung pada indikator inflasi acuan The Fed, yaitu Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) yang akan dirilis akhir bulan ini. Inflasi inti menurut indikator PCE tersebut secara umum berjalan lebih cepat dibanding IHK pada tahun ini.

Pada bulan September, Biro Analisis Ekonomi AS akan menerapkan perubahan pada cara penghitungan harga untuk kategori tertentu dalam indeks PCE, termasuk jasa hukum, perangkat lunak komputer, dan saran investasi.

Laporan terpisah pada hari Rabu yang menggabungkan angka inflasi dengan data upah terbaru menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata riil per jam turun 0,2% pada bulan Juli dibanding tahun sebelumnya, memperpanjang tren pelemahan sejak perang Iran dimulai.

The Fed Berpotensi Lebih Dovish, Rupiah Berpeluang Menguat

Kamis, 13 Agustus 2026 08:10 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118146/the-fed-berpotensi-lebih-dovish-rupiah-berpeluang-menguat/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah di pasar spot berpotensi mendapat tenaga dengan meredanya kekhawatiran mengenai kenaikan suku bunga The Fed, Fed Fund Rate (FFR), dengan angka inflasi Amerika Serikat (AS) yang jinak.

Inflasi AS tercatat sesuai proyeksi ekonom dan analis yakni 3,4% secara tahunan, dan inflasi inti berada di 2,5%. Data ini memberi kelegaan bagi investor setelah adanya pelemahan pada ketenagakerjaan AS.

“Data inflasi dan laporan ketenagakerjaan yang lebih lemah dari perkiraan dapat membuat pejabat Fed yang hawkish tetap menahan diri pada September,” ujar Gary Schlossberg, global strategist di Wells Fargo Investment Institute, seperti dikutip Bloomberg News.

Turunnya peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September setidaknya mengurangi tekanan dari sisi interest rate differential, alias selisih suku bunga. Pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga September berada sekitar 40% setelah sebelumnya lebih tinggi.

Di pasar komoditas, harga minyak mentah Brent turun 0,76% ke US\$88,27/barel. Namun demikian, pasar minyak global dikabarkan tengah menghadapi defisit pasokan sebesar 1,8 juta barel per hari pada kuartal ini, menurut Badan Energi Internasional (IEA).

Investor masih terus mencermati perundingan antara AS dan Iran, meski kedua pihak yang bertikai ini masih memperkeras posisinya masing-masing.

Pakistan—yang selama ini bertindak sebagai mediator—mengatakan proses perdamaian yang lebih luas telah terhenti, meskipun tenggat waktu untuk menyusun nota kesepahaman AS-Iran masih dapat diperpanjang.

Meski begitu, sebagian besar mata uang Asia di pasar yang sudah buka, pagi ini bergerak di zona hijau. Baht Thailand menguat paling tajam 0,23%, disusul won Korea Selatan 0,21%. Sementara, yen Jepang dan yuan offshore menguat lebih terbatas.

Selain harga minyak mentah yang sedikit melandai dan meredanya ekspektasi langkah hawkish bank sentral AS, penguatan sebagian mata uang kawasan, termasuk rupiah, juga ditopang oleh indeks dolar AS yang sedikit terpankas 0,08% ke 99,94.

Dari domestik, investor akan mencermati nama-nama yang akan mengisi pos dalam otoritas moneter Indonesia, setelah kepastian bahwa pos Gubernur Bank Indonesia (BI) akan diisi oleh Destry Damayanti.

Dua nama yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi pos Deputy Gubernur adalah Solikin M Juhro dan M Anwar Bashori. Hanya salah satu yang terpilih akan menggantikan Aida S Budiman yang diusulkan untuk menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia.

“Dua nama calon Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu satu Bapak Solikin M. Juhro dan yang kedua adalah Bapak M. Anwar Bashori,” ungkap Puan Maharani, Ketua DPR, Rabu (12/08/2026).

Pekan depan, DPR akan memproses ketiga kandidat ini untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatuhan, sesuai mekanisme yang berlaku.

Pergantian kepemimpinan di tubuh BI akan jadi katalis bagi pasar keuangan domestik. Pasar tak cuma melihat siapa yang terpilih, tetapi juga membaca kombinasi antara Gubernur BI dan Deputi gubernur yang nantinya akan menentukan arah kebijakan moneter.

Kendati demikian, penguatan rupiah diproyeksikan tak berjalan mulus. Sebab, harga minyak tetap jadi risiko utama dari sisi eksternal. Meski harga minyak Brent turun, ke sekitar US\$88/barel, tapi pasar global masih menghadapi defisit pasokan.

Jika konflik AS-Iran memanas lagi, atau bahkan pembukaan Selat Hormuz tertunda dengan kembali gagalnya perundingan AS-Iran, harga minyak kembali berpotensi melonjak, dan menghapus potensi penguatan rupiah lebih lanjut.

Dengan begitu, rupiah diperkirakan masih berpotensi menguat, namun dalam rentang yang sangat terbatas, di kisaran Rp17.840-17.900/US\$.

Analisis Teknikal

Secara teknikal, nilai tukar rupiah sejatinya ada peluang menguat hari ini. Mata uang Ibu Pertiwi berpotensi menguat ke resistance terdekat di Rp17.840/US\$. Resistance potensial selanjutnya bisa ke Rp17.800/US\$ usai penembusan trendline sebelumnya.

Rupiah juga memiliki level Rp17.700/US\$ sebagai target acuan paling optimistis hari ini.

Namun jika nilai tukar rupiah justru melemah, maka level support terdekat adalah Rp17.900/US\$. Penembusan di titik ini memberi konfirmasi bahwa support selanjutnya adalah Rp17.950-18.000/US\$.

Ruang Fiskal Pemerintah Makin Sempit, Kemampuan APBN Redam Gejolak Baru Terbatas

Kamis, 13 Agustus 2026 19:52 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Tri Sulistiowati

<https://nasional.kontan.co.id/news/ruang-fiskal-pemerintah-makin-sempit-kemampuan-apbn-redam-gejolak-baru-terbatas>

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ruang fiskal Indonesia dinilai semakin sempit sehingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak baru juga kian terbatas.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, persoalan fiskal Indonesia saat ini bukan pada kemampuan pemerintah membayar utang, melainkan semakin besarnya porsi anggaran yang sudah terikat untuk membiayai berbagai kewajiban dan belanja yang sulit dikurangi dalam jangka pendek.

"Secara umum, saya melihat fiskal Indonesia masih berada dalam kategori manageable (terkontrol) tetapi ruang geraknya memang semakin sempit," ujar Irman kepada Kontan, Kamis (13/8).

Menurutnya, kerentanan fiskal saat ini lebih banyak berasal dari menyempitnya ruang fiskal dan meningkatnya beban pembayaran utang.

Pada 2026, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 834 triliun, sementara pembayaran bunga berada di kisaran Rp 599 triliun. Secara bruto (gross), keduanya mendekati 45% dari target pendapatan negara 2026.

Namun, angka tersebut tidak berarti hampir separuh penerimaan negara langsung digunakan untuk membayar utang. Sebagian besar pokok utang yang jatuh tempo dikelola melalui pembiayaan kembali (refinancing).

Karena itu, menurut Irman, angka tersebut lebih tepat dilihat sebagai besarnya kebutuhan refinancing dan sensitivitas fiskal terhadap biaya pendanaan (cost of funding).

Tekanan fiskal akan semakin besar jika imbal hasil SBN (yield) bertahan tinggi, rupiah melemah dan penerimaan negara tidak tumbuh secepat kebutuhan belanja.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus melakukan refinancing dengan biaya yang lebih mahal. Akibatnya, pembayaran bunga berpotensi mengambil porsi yang semakin besar dari belanja produktif.

"Fiscal buffer masih ada, tetapi jauh tidak selonggar beberapa tahun lalu. APBN masih mampu menjadi shock absorber, tetapi kapasitasnya terbatas," kata Irman.

Meski demikian, kondisi fiskal hingga semester I-2026 masih relatif terjaga. APBN 2026 awal menetapkan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun, belanja Rp 3.842,7 triliun dan defisit 2,68% PDB.

Dalam proyeksi terbaru (outlook), belanja dinaikkan menjadi sekitar Rp 3.942,4 triliun dan defisit menjadi 2,85% PDB. Pendapatan negara juga direvisi naik menjadi sekitar Rp 3.208,1 triliun.

Hingga semester I-2026, defisit APBN tercatat 0,76% PDB, sementara keseimbangan primer masih surplus Rp 85,1 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Irman belum melihat risiko gagal bayar utang (debt distress) dalam jangka pendek. Namun, ia menilai risiko yang lebih perlu diperhatikan adalah efek desakan (crowding out) di dalam APBN.

Ketika bunga utang dan kebutuhan refinancing meningkat, pemerintah tetap harus mempertahankan bantuan sosial, subsidi dan program prioritas. Alhasil, belanja yang lebih mudah disesuaikan atau belanja diskresioner (discretionary spending), termasuk sebagian belanja modal dan belanja K/L, berpotensi ditekan.

Kondisi ini dapat mengurangi daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Konsolidasi Fiskal 2027

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo di 2027, Irman menilai target pemerintah cukup menantang karena harus mengejar pertumbuhan tinggi sekaligus menurunkan defisit.

Pemerintah dan DPR sudah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, defisit 1,8%-2,4% PDB dan pendapatan negara 12,01%-12,40% PDB.

Menurut Irman, masing-masing target masih mungkin dicapai. Namun, mencapai ketiganya secara bersamaan akan lebih sulit. Pertumbuhan hampir 6% membutuhkan investasi dan permintaan yang kuat.

Di sisi lain, konsolidasi defisit membatasi ruang stimulus fiskal, kecuali pemerintah mampu meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan sistem pemungutan tanpa menaikkan tarif. Karena itu, 2027 sebaiknya menjadi momentum konsolidasi kualitas fiskal, bukan sekadar mengejar penurunan angka defisit.

Irman menyarankan pemerintah perlu memprioritaskan empat hal yaitu, Pertama memperbesar basis penerimaan tanpa menekan daya beli.

Kedua, melakukan penjamaan kembali atau reprioritisasi belanja ke program dengan multiplier ekonomi tinggi, serta menjaga kredibilitas fiskal agar premi risiko (risk premium) dan imbal hasil SBN tidak meningkat.

Ketiga, membatasi penambahan belanja wajib (mandatory spending) baru yang tidak memiliki sumber pendanaan permanen, dan Keempat, menjaga kredibilitas fiskal agar risk premium dan yield SBN tidak meningkat.

"Target pertumbuhan 5,8%-6,5% juga sebaiknya tidak dicapai dengan terus memperbesar belanja pemerintah. Kuncinya adalah membuat APBN menjadi katalis bagi investasi swasta," katanya.

Jika investasi swasta dan penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) mengambil porsi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan, pemerintah dapat melakukan konsolidasi fiskal tanpa menimbulkan hambatan fiskal (fiscal drag) yang terlalu besar.

"Jadi, kekhawatiran saya bukan Indonesia akan menghadapi krisis fiskal dalam waktu dekat. Risikonya lebih gradual, semakin banyak pendapatan digunakan untuk membayar bunga, semakin tinggi kebutuhan refinancing, dan semakin kecil ruang untuk merespons shock berikutnya," pungkas Irman.

Karena itu, Irman menilai kredibilitas RAPBN 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa program belanja baru dibarengi sumber penerimaan yang kredibel dan prioritas belanja yang lebih disiplin.

Utang Pemerintah Melonjak, Hampir Separuh Penerimaan Negara Habis untuk Bayar Utang

Kamis, 13 Agustus 2026 08:18 WIB

Reporter: Nurtiandriyani Simamora, Editor: Noverius Laoli

<https://nasional.kontan.co.id/news/utang-pemerintah-melonjak-hampir-separuh-penerimaan-negara-habis-untuk-bayar-utang>

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Utang pemerintah terus membengkak di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Per Juni 2026, posisi utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun, setara 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut melonjak Rp 1.819,79 triliun atau 21,5% dibandingkan posisi akhir September 2024, sebelum Prabowo menjabat, yang tercatat Rp 8.473,90 triliun atau 38,55% dari PDB.

Kenaikan utang ini menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan pemerintah masih besar.

Selain belanja rutin, pemerintah harus membiayai sejumlah program dengan kebutuhan anggaran jumbo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman. Rasio tersebut juga masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% terhadap PDB.

"Harusnya rasio utang bisa turun lagi sedikit dan masih di bawah batas 60%," kata Purbaya, Rabu (12/8/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah akan terus menjaga agar rasio utang terhadap PDB kembali menurun. Langkah yang ditempuh antara lain membatasi defisit anggaran dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Hidayat Amir mengatakan, strategi pembiayaan 2026 dilakukan secara proporsional dan terukur sesuai kebutuhan APBN. Pemerintah juga memperhitungkan kondisi kas negara, volatilitas pasar, serta risiko pembiayaan.

Dari sisi struktur, pemerintah memastikan profil utang tetap sehat. Utang didominasi instrumen berdenominasi rupiah, memiliki tenor relatif panjang, serta ditopang basis investor domestik yang semakin kuat.

Namun, besarnya beban utang mulai mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mencatat, hampir separuh penerimaan negara terserap untuk membayar pokok dan bunga utang.

Mengacu laporan APBN yang telah diaudit per Desember 2025, pembayaran bunga utang mencapai sekitar Rp 800 triliun, sedangkan pembayaran pokok utang sekitar Rp 515 triliun. Dengan demikian, total pembayaran pokok dan bunga mencapai sekitar Rp1.315 triliun.

Pada saat yang sama, penerimaan negara dalam laporan APBN tercatat sekitar Rp 2.700 triliun. Artinya, sekitar 49% penerimaan negara habis untuk membayar pokok dan bunga utang.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual menyoroti persoalan lain, yakni kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengimbangi laju utang.

Ia mencatat, posisi utang pemerintah pada kuartal II-2026 telah tumbuh 67,5% dibandingkan level 2020. Sementara itu, PDB nominal dalam periode yang sama hanya tumbuh 64,9%.

Dengan kata lain, utang pemerintah kini tumbuh lebih cepat daripada ekonomi nasional.

“Jika tren akselerasi ini berlanjut, kemampuan perekonomian domestik dalam menanggung utang berpotensi melemah, meski saat ini Indonesia belum masuk kategori debtor state,” ujar David.

Karena itu, menurut David, persoalan utang tidak cukup hanya dilihat dari rasio terhadap PDB. Pemerintah juga perlu memastikan setiap utang yang ditarik mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sepadan.

“Kenaikan rasio utang terhadap PDB menunjukkan utang yang saat ini ditarik belum optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi,” kata David.

Dengan posisi utang yang sudah menembus Rp 10.000 triliun, tantangan pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga rasio utang tetap di bawah batas 60%.

Pemerintah juga perlu memastikan tambahan utang benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan tidak semakin menggerus ruang fiskal.

Penjelasan Kemenkeu Soal Rp18,9 T untuk 522 Daerah, Termasuk DBH

Kamis, 13 Agustus 2026 10:40 WIB

Mis Fransiska Dewi

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118162/penjelasan-kemenkeu-soal-rp18-9-t-untuk-522-daerah-termasuk-dbh/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran senilai Rp18,9 triliun untuk 522 pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kekurangan anggaran.

Langkah tersebut merupakan bentuk respons dari pemerintah pusat terhadap banyaknya Pemda yang mengeluh kesulitan memenuhi kebutuhan belanja, terutama pembayaran gaji pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Itu plus efisiensi sekarang mengadakan skema efisiensi dengan tiap pemerintah daerah. Itu nanti kalau kita hitung, totalnya Rp20,8 triliun, totalnya. [namun] yang kemudian kita cairkan itu Rp18,9 triliun,” kata Plt Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufansa Wira Sakti ditemui di kantornya, Rabu (12/8/2026).

Dia menjelaskan, selain untuk pembayaran gaji PPPK, anggaran tersebut juga merupakan untuk pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan cicilan pembayaran sebagian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) untuk sebanyak total 522 daerah.

“522 [daerah] yang dapat semua. Karena kan semua ada selain yang tadi itu kan ada top-up juga yang untuk DBH, DAU [dana alokasi umum], sama 3T,” ujarnya.

“Jadi karena semua nggak punya, ada yang udah DBH-nya udah lunas dan sebagainya, akhirnya kami tambahkan yang tambahkan 3T itu juga. Jadi yang total dari 497 itu semua kita cover. Plus jadi 522 total semua karena dapat yang lain-lain tadi itu,” terang Nufansa.

Secara terperinci, anggaran tambahan sebesar Rp18,9 triliun tersebut terdiri dari dukungan penyelenggaraan pemerintahan termasuk untuk penggajian pegawai sebesar Rp12,8 Triliun, afirmasi kepada daerah 3T sebesar Rp1,1 Triliun dan ditambah cicilan pembayaran sebagian kurang bayar DBH sebesar Rp5 Triliun.

Dengan bantuan yang diwujudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 ini, kata dia, harapannya pemda dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan lancar, termasuk pembayaran gaji para pegawai ASN daerah dan juga pegawai PPPK.

“Bantuan presiden/pemerintah pusat ini diharapkan juga dapat mengurangi beban kewajiban dari tahun sebelumnya dan juga penyelesaian secara bertahap atas kurang bayar DBH,” jelas dia.

Pemerintah Kurang Bayar DBH Rp70 Triliun pada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya melaporkan total kurang bayar DBH hingga tahun anggaran 2024 yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp70,2 triliun.

Jika anggaran tersebut bisa segera dibayarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, maka persoalan kekurangan dana untuk membayar gaji PPPK akan terselesaikan.

Hal itu mengemuka dalam rapat Kementerian Dalam Negeri bersama, jajaran asosiasi pemerintah daerah, serta para gubernur dari seluruh Indonesia bersama Komisi II DPR RI, Kamis (30/7/2026).

“Nah ini kalau DBH dibayarkan maka PPPK ini sebagian besar daerah-daerah ini beres kecuali daerah-daerah itu tidak memiliki DBH kurang bayar,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu memerinci, DBH kurang bayar hingga tahun anggaran 2024 mencapai Rp83,5 triliun terdiri dari kurang bayar DBH pajak sebesar Rp43,3 triliun dan kurang bayar DBH sumber daya alam (SDA) sebesar Rp40,2 triliun.

Total lebih bayar DBH tahun anggaran 2024 mencapai Rp13,3 triliun dengan perincian lebih bayar DBH pajak Rp1,2 triliun; lebih bayar DBH SDA Rp9,6 triliun; dan lebih bayar DBH sawit Rp2,3 triliun.

Sehingga total kurang bayar DBH setelah dikurangi total lebih bayar DBH mencapai Rp70,2 triliun untuk sebanyak 431 pemerintah daerah (pemda) dengan perincian 31 provinsi; 317 kabupaten, dan 83 kota.

“Tapi ada daerah-daerah yang DBHnya enggak ada, dilakukan efisiensi juga sudah, kita tahu itu tidak ada lagi caranya yaitu dengan cara top up dan ini sudah disiapkan skema itu oleh Bapak Menteri Keuangan sehingga mudah-mudahan masalah PPPK bisa diatasi,” jelas Tito.

Sebagai informasi, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu dalam APBN dan dibagikan kepada daerah penghasil maupun daerah nonpenghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Dalam pagu TKD 2026, alokasi DBH tercatat sebesar Rp58,5 triliun untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Nilai tersebut turun hampir 70% dibandingkan dengan pagu DBH dalam APBN 2025 yang mencapai Rp192,2 triliun.

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.870/US\$

Kamis, 13 Agustus 2026 15:31 WIB

<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/118231/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp17-870-us/2>

Bloomberg Technoz, Jakarta - Rupiah ditutup menguat terbatas 0,03% ke Rp17.870/US\$ pada perdagangan Kamis (13/8/2026), kala pasar mencermati kandidat yang diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI) berikutnya.

Penguatan rupiah, yang meski tipis ini, juga ditopang oleh aksi beli di pasar obligasi domestik. Yield Surat Utang Negara (SUN) 1 tahun turun 2,9 basis poin menjadi 6,87%, sementara tenor 2 tahun dan 3 tahun masing-masing terpankaskan 4,5 bps dan 4,7 bps. Penguatan juga terjadi pada tenor 5 tahun dengan penurunan yield 3,9 bps jadi 7,18%.

Dari sisi eksternal harga minyak Brent kembali melandai dan terpankaskan 1,18% ke US\$87,93/barel, serta indeks dolar Amerika Serikat (AS) yang stabil di 99,98 memberi ruang penguatan bagi rupiah.

Namun, ketidakpastian dari hasil perundingan antara AS dan Iran masih menyisakan kekhawatiran di kawasan Asia. Sebagian mata uang merespons dengan pergerakan yang cukup bervariasi.

Won Korea Selatan melemah paling dalam, disusul peso Filipina, ringgit Malaysia, dan rupee India, juga yuan offshore. Sebaliknya, dolar Taiwan masih mempertahankan penguatannya, disusul baht Thailand, rupiah, yen Jepang, dan yuan China, yang menguat lebih terbatas.

Sebagian mata uang Asia yang melemah terbebani oleh perkembangan terbaru di Timur Tengah, terutama belum adanya terobosan dalam perundingan AS-Iran mengenai pembukaan Selat Hormuz.

Kebuntuan itu membuat pasar belum dapat sepenuhnya menghapus premi risiko geopolitik dari harga minyak ataupun aset di pasar negara berkembang.

Di satu sisi, Washington terus memberikan tekanan ekonomi terhadap Teheran, sementara di sisi lain Iran masih mempertahankan posisi keras terkait pembukaan jalur pelayaran.

Kondisi ini membuat pasar minyak kesulitan memperkirakan kapan arus perdagangan energi akan kembali normal dan harga minyak, meski sedikit melandai sejatinya belum pulih sepenuhnya.

Itu mengapa, meski sentimen domestik di Indonesia cukup menopang posisi rupiah, namun apresiasi terhadap mata uang Garuda relatif terbatas.

Pemkab Rembang Perkuat Kemitraan Pengusaha dengan UMKM

Kamis, 13 Agustus 2026

Penulis: Mifta Rembang, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-rembang-perkuat-kemitraan-pengusaha-dengan-umkm/>

REMBANG – Untuk memperkuat sinergi antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menggelar kegiatan Penjaringan Kebutuhan Kemitraan Pelaku Usaha Besar dan Sosialisasi Kewajiban Kemitraan, di Kantor Kadin kabupaten setempat, Rabu (12/8/2026).

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Wahyu Dian Prihatanto mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana komunikasi antara perusahaan besar, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang. Perusahaan besar didorong untuk berkolaborasi dengan UMKM di sekitar wilayah usahanya, guna meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing usaha lokal.

“Nanti bersama-sama menetapkan tujuan yang akan dicapai melalui beberapa tahapan, sesuai sektor masing-masing,” ujarnya.

Menurut Wahyu, kemitraan tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. UMKM dapat memperoleh akses pasar, pendampingan, hingga dukungan pengembangan usaha, sementara perusahaan besar dapat memperoleh mitra usaha, yang mampu memenuhi kebutuhan operasional maupun rantai pasok perusahaan.

“Pengusaha besar nantinya dapat berperan seperti orang tua asuh bagi UMKM. Mereka membantu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha UMKM, sementara UMKM juga dapat mendukung kebutuhan usaha perusahaan besar sesuai standar yang dibutuhkan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Rembang, Arifin menyampaikan, praktik kemitraan antara usaha besar dan UMKM sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Rembang, sebelum adanya regulasi yang mengatur kewajiban kemitraan.

Ia mencontohkan, usahanya yang bergerak di bidang industri kayu telah menggandeng para perajin lokal, dengan memberikan pendampingan, pelatihan, hingga dukungan peralatan, agar mampu menghasilkan produk sesuai standar kualitas yang dibutuhkan perusahaan.

“Kami mengajari para perajin, bahkan memberikan fasilitas mesin yang sesuai standar, sehingga mereka dapat menyuplai barang ke perusahaan kami dengan kualitas yang diharapkan. Pola seperti ini bisa diterapkan di berbagai sektor usaha lainnya,” katanya.

Arifin menilai, masih banyak peluang kemitraan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Rembang. Perusahaan penyedia layanan internet, misalnya, dapat bekerja sama dengan UMKM di bidang konstruksi atau bengkel las, untuk pemasangan tiang jaringan. Begitu pula industri sepatu maupun tas yang dapat memanfaatkan limbah produksi, sebagai bahan baku produk kreatif bernilai ekonomi.

Disampaikan, apabila pola kemitraan tersebut berkembang secara berkelanjutan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kesempatan usaha dan perputaran ekonomi daerah.

“Kalau masyarakat Rembang memiliki penghasilan, maka roda perekonomian akan bergerak. Mereka akan berbelanja di pasar, membeli kebutuhan rumah tangga, hingga memanfaatkan berbagai layanan usaha yang ada. Dampaknya akan dirasakan oleh seluruh sektor ekonomi,” tambahnya.

Arifin juga menyoroti legalitas usaha bagi UMKM. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang ragu mengurus perizinan, karena minimnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.

Karena itu, dia berharap, pemerintah dapat terus memberikan edukasi terkait legalitas usaha dan sistem perpajakan, agar pelaku UMKM semakin percaya diri mengembangkan usahanya secara formal.

Permudah Akses Modal, Pelaku UMKM Didorong Perbaiki Laporan Keuangan

Kamis, 13 Agustus 2026

Penulis: Kontributor Kab Pati, Editor: Di, Diskomdigi Jateng

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/permudah-akses-modal-pelaku-umkm-didorong-perbaiki-laporan-keuangan/>

PATI – Pelaku UMKM di Kabupaten Pati didorong untuk memperbaiki laporan keuangan, agar lebih bankable atau lebih memenuhi syarat perbankan.

Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, saat menghadiri Gebyar Fest 81 Bank Jateng di Bank Jateng Cabang Pati, Rabu (12/8/2026). Menurutnya, laporan keuangan yang tertata menjadi salah satu fondasi penting, agar pelaku UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, kondisi keuangan usaha yang terdokumentasi dengan baik, juga akan memperkuat kepercayaan dalam membangun kemitraan.

“Mulai perbaiki laporan keuangannya. Dengan begitu, perbankan seperti Bank Jateng akan lebih mudah memberikan pembiayaan, untuk mendorong usaha agar bisa berkembang,” ujarnya.

Chandra menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Bank Jateng dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pati. Dukungan tersebut penting, untuk mempercepat proses modernisasi dan digitalisasi pelaku usaha lokal.

“Pelaku UMKM jangan hanya berpikir bagaimana bertahan. Harus terus tumbuh, beradaptasi dengan modernisasi dan digitalisasi, serta meningkatkan daya saing sampai mampu menembus pasar ekspor,” kata Chandra.

Disampaikan, pihaknya juga akan menyiapkan ruang promosi tambahan bagi pelaku UMKM lokal, melalui rencana penyelenggaraan Car Free Night di Jalan Jenderal Sudirman, pada September atau

Oktober mendatang. Kegiatan tersebut akan diarahkan menjadi wadah bagi pelaku usaha, untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produknya kepada masyarakat.

“Kami merencanakan Car Free Night di Jalan Jenderal Sudirman. Ini bisa menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk berkontribusi, mempromosikan, dan memperluas pasar produknya,” kata Chandra.

BI: Ekonomi Jateng masih tunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global

Kamis, 13 Agustus 2026 20:52 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/641720/bi-ekonomi-jateng-masih-tunjukkan-resiliensi-di-tengah-ketidakpastian-global>

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah M Noor Nugroho (tengah) saat Media Briefing BI se-Jateng, di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (14/8/2026). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Kota Pekalongan (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah menyampaikan bahwa perekonomian wilayah tersebut tetap menunjukkan resiliensi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng M Noor Nugroho di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis, menyebutkan ekonomi Jateng masih tumbuh kuat sebesar 5,71 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2026.

Capaian pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa sebesar 5,65 persen (yoy) dan nasional sebesar 5,29 persen (yoy).

Hal tersebut disampaikan saat Media Briefing Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) se-Jateng yang dihadiri KPwBI Provinsi Jateng, KPwBI Solo, KPwBI Tegal dan KPwBI Purwokerto.

Ia mengatakan bahwa kinerja positif tersebut didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik, berlanjutnya investasi, serta kinerja sektor utama daerah yang terjaga.

Pertumbuhan ekonomi Jateng dari sisi permintaan, yaitu konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,31 persen (yoy), ditopang mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan libur panjang.

Investasi juga tumbuh kuat sebesar 8,84 persen (yoy) seiring berlanjutnya pembangunan kawasan industri dan Proyek Strategis Nasional, sementara konsumsi pemerintah juga masih tumbuh sebesar 15,69 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, kata dia, pertumbuhan terutama ditopang oleh Industri Pengolahan sebesar 5,03 persen (yoy), Perdagangan 7,52 persen (yoy), serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 12,80 persen (yoy).

Menurut dia, keberhasilan menjaga stabilitas harga tercermin pada inflasi Jateng pada Juli 2026 sebesar 2,60 persen (yoy), atay berada di dalam rentang sasaran 2,5 plus minus 1 persen (yoy) dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 2,88 persen (yoy).

BI bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun seluruh 35 kota/kabupaten se-Jateng terus berkoordinasi dan bersinergi memperkuat pengendalian inflasi secara "end-to-end", terutama pada komoditas pangan strategis.

Implementasi strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) diarahkan tidak hanya untuk merespons gejolak harga dalam jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur pasokan dan distribusi.

Ia mengatakan hasil liaison BI kepada pelaku usaha pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek ke depan.

Meski demikian, kata dia, masih diperlukan perhatian terhadap kenaikan biaya produksi, pembiayaan, keandalan energi, serta dinamika perdagangan global.

Di tengah capaian tersebut, ia juga mengingatkan berbagai risiko tetap perlu dicermati.

Karena itu, kata dia, penguatan permintaan domestik, keberlanjutan investasi, serta penciptaan iklim usaha dan pembiayaan yang kondusif menjadi penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jateng.

BI: Pengguna QRIS di Jateng hingga Juni 2026 capai 9,08 juta orang

Kamis, 13 Agustus 2026 20:07 WIB

Pewarta: Zuhdiar Laeis, Editor: Heru Suyitno

<https://jateng.antaranews.com/berita/641711/bi-pengguna-qr-is-di-jateng-hingga-juni-2026-capai-908-juta-orang>

Semarang (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa jumlah pengguna kode batang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di wilayah tersebut terhitung sampai Juni 2026 sudah mencapai 9,08 juta orang.

Kepala Perwakilan BI Jateng M Noor Nugroho di Kota Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa jumlah pengguna itu tercatat paling banyak ketiga secara nasional.

"Untuk gerai yang telah melayani pembayaran QRIS di Jateng, kata dia, hingga periode yang sama sudah mencapai 4,52 juta gerai, atau terbanyak keempat secara nasional," kata M Noor Nugroho saat Media Briefing Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) se-Jateng yang dihadiri KPwBI Provinsi Jateng, KPwBI Solo, KPwBI Tegal, dan KPwBI Purwokerto.

Menurut dia, BI terus memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan (pro-growth), salah satunya melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.

Melalui digitalisasi, kata dia, transaksi pembayaran menjadi sangat efisien dan efektif, tidak hanya dari sisi waktu namun juga biaya.

Ia menjelaskan BI terus memperluas akseptasi digital melalui Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026 yang dirangkai dengan peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 RI.

Pelaksanaan PQN 2026 pada 11–17 Agustus 2026, dan di Jateng dirangkaikan dengan berbagai kegiatan yang mendekatkan dan memudahkan penggunaan pembayaran digital kepada masyarakat.

Selain melalui digitalisasi, kata dia, penguatan edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Rupiah tetap dilakukan.

Pada paruh pertama 2026, telah dilaksanakan 49 kegiatan edukasi CBP (Cinta Bangsa dan Paham) Rupiah dengan menjangkau 29.909 peserta di Jateng.

Ia mengatakan BI juga telah menyalurkan Rp3,62 miliar uang layak edar ke empat pulau, sekaligus menghadirkan layanan kas keliling dan edukasi CBP Rupiah.

Perluasan literasi Rupiah juga dilakukan secara kolaboratif melalui berbagai kegiatan pendidikan, keagamaan, budaya, dan sport tourism di wilayah Semarang.

Kemudian, Solo Raya, eks-Karesidenan Pekalongan, dan Banyumas Raya, termasuk Rupiah Borobudur Playon (RBP), Adipati QRIS Run di Solo, Tegal City Run di Tegal , dan QRIS Purwokerto Run di Purwokerto.

Selain itu, kata dia, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jateng.

BI sebut ekonomi Banyumas Raya tumbuh di tengah risiko kekeringan

Kamis, 13 Agustus 2026 15:57 WIB

Pewarta: Sumarwoto, Editor: Edhy Susilo

<https://jateng.antaranews.com/berita/641677/bi-sebut-ekonomi-banyumas-raya-tumbuh-di-tengah-risiko-kekeringan>

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto menyebutkan perekonomian di wilayah Banyumas Raya tumbuh pada triwulan I 2026 di tengah peningkatan risiko kekeringan pada semester II tahun ini.

Dalam media briefing bagi wartawan se-Jawa Tengah, yang digelar KPwBI Jawa Tengah secara hibrida di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, Kepala KPwBI Purwokerto Aswin Gantina mengatakan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banyumas Raya pada triwulan I ini didorong oleh menguatnya konsumsi rumah tangga,

"Penguatan konsumsi rumah tangga itu terjadi seiring kenaikan UMP (upah minimum provinsi), pencairan THR (tunjangan hari raya), penyaluran stimulus pemerintah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadhan dan Idul Fitri," katanya.

Ia mengatakan berlanjutnya proyek strategis pemerintah dan swasta serta masuknya investasi turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas investasi, khususnya sektor konstruksi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi terjadi di empat kabupaten yang menjadi wilayah kerja KPwBI Purwokerto, yakni Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, dan Purbalingga (Banyumas Raya).

Sejumlah sektor utama yang mengalami peningkatan meliputi industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, serta konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banyumas Raya ditopang investasi, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

Sementara itu, dari sisi stabilitas harga, Purwokerto dan Cilacap mengalami deflasi pada Juli 2026.

Purwokerto mencatat deflasi sebesar 0,05 persen, sedangkan Cilacap 0,06 persen.

Aswin mengatakan capaian tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Di Banyumas, deflasi terutama didorong penurunan harga bensin, telepon seluler, sepeda motor, bawang putih, dan daging ayam ras.

Namun, penurunan lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, serta emas perhiasan.

Kondisi serupa terjadi di Cilacap dengan bensin menjadi salah satu komoditas pendorong deflasi, sementara bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan emas perhiasan menahan laju penurunan harga.

"Menghadapi perkembangan ke depan, BI mewaspadaikan kondisi iklim pada semester II 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan hingga akhir September," katanya.

Aswin mengatakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga produksi pangan dan stabilitas harga.

Langkah tersebut antara lain memastikan kecukupan pengairan pertanian melalui optimalisasi jaringan irigasi, pompanisasi, pengelolaan sumber air, serta mendorong penggunaan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap musim kemarau.

"Selain itu, juga terus mengembangkan sentra-sentra pangan, optimalisasi lahan pertanian, pengembangan kelompok tani muda atau tani milenial, serta implementasi digital farming untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesinambungan pasokan pangan," katanya.

Ia mengatakan Bank Indonesia juga mengintensifkan pendampingan kepada kelompok tani dan petani muda, memperkuat kerja sama antardaerah, serta melanjutkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas pangan strategis.

Menurut dia, pengawasan harga sesuai harga eceran tertinggi dan pemantauan dampak penyesuaian biaya distribusi serta logistik terhadap harga di tingkat konsumen juga diperkuat.

Dinas Koperasi Jateng Sarankan Kopdes Dibangun di Pegunungan dan Tambak Dijadikan Kafe dan Offtaker

Tayang: Kamis, 13 Agustus 2026 09:18 WIB

Muslimah

<https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1262991/dinas-koperasi-jateng-sarankan-kopdes-dibangun-di-pegunungan-dan-tambak-dijadikan-kafe-dan-offtaker>

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Tengah menyarankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes yang dibangun di tempat terpencil seperti di pegunungan dan pesisir agar mencari terobosan usaha lainnya.

Saran ini sebagai respon atas dibangunnya Kopdes di tempat yang kurang strategis seperti di kawasan pegunungan maupun wilayah pesisir yang dekat dengan tambak daripada warga.

Kopdes tersebut di antaranya seperti Kopdes di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, koperasi ini berdiri di ketinggian 1.385 MDPL di kawasan perbukitan lereng Gunung Prau.

Adapula Kopdes di Desa Langenharjo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, bangunannya berdiri di tengah area tambak ikan, berjarak lebih dari 150 meter dari permukiman warga.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jawa Tengah Desy Arijani mengaku, mengetahui pembangunan Kopdes di wilayah terpencil tersebut dari media sosial.

Pihaknya, dalam proses penentuan titik lokasi dan pembangunan sama sekali tidak dilibatkan.

Proses itu sepenuhnya berada di tangan PT Agrinas dan TNI.

Meski demikian, ia berharap, pembangunan KDKMP tersebut tetap bisa dimaksimalkan.

"Kalau di pegunungan bisalah dibikin kafe, menjual tempat udaranya bersih, dan sudah ada bangunan koperasinya, sedangkan Kopdes di pesisir ya bisa menjadi offtaker (pembeli tetap) produk perikanan bekerjasama dengan nelayan atau petambak," jelas Desy kepada Tribun, Rabu (12/8/2026).

Pelebaran Unit Usaha Memungkinkan

Pelebaran unit usaha itu, menurut Desy sangat memungkinkan, hal itu merujuk Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, salah satu tujuh poin pemanfaatan gerai Kopdes adalah usaha lainnya.

Sisanya baru untuk gerai sembako murah, layanan simpan pinjam dan kredit mikro, Klinik atau pos pelayanan kesehatan desa, Apotek desa obat generik, Gudang logistik dan cold storage hasil tani.

"Nah, poin usaha lainnya kan diartikan luas, bisa saja untuk usaha menyesuaikan kondisi setempat," bebernya.

Desy menuturkan, jalannya roda koperasi merah putih berada di tangan para manajer yang telah dilatih oleh TNI. Ia belum mengetahui kapan para manajer tersebut bakal terjun ke sebanyak 8.523 koperasi (data Agustus) di Jawa Tengah.

"Kopdes kurang bagus dari lokasi ini harapannya ke manajer kodpes yang anak-anak muda, mereka punya inovasi sehingga potensi di desa tersebut bisa dimunculkan," tuturnya. (Iwn)